



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023**



**MAUMERE
2019**



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018–2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sesuai dengan visi dan misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001 Seri 001 Nomor 0011);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 0105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
7. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak baku.
25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
28. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

31. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
33. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) RPJMD ini bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat daerah;
 - d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya daerah yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
 - e. menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan per 5 (lima) tahunan.

BAB III PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJMD menganut prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu :
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (2) RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta *atas – bawah* dan *bawah -atas*.

Pasal 4

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat di daerah.

BAB IV
SISTIMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 5

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN;
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- BAB IX PENUTUP.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 6

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 7

Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Bupati wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas RPJMD yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Litbang untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 10

Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
 - a. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - c. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - e. pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

Pasal 14

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW Kabupaten lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD kepada Bupati.

- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 16

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyampaikan

rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Litbang.

Pasal 20

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapelitbang melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD kepada Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi Terhadap Hasil

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi atau sebutan lain.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan Nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 26

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penetapan perubahan RPJMD diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

RPJMD yang telah ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkan RPJMD baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI SIKKA,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahapan pembangunan yang dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Melalui pernyataan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka ini adalah untuk mencari solusi dan antisipasi terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Sikka. Selain itu RPJMD ini, merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ini bertujuan untuk :

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sikka;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar Daerah, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah dan Pusat;
3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sikka;
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Sikka yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Sikka yang dilaksanakan per 5 (lima) tahunan.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023), adalah :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU
SIKKA BAHAGIA 2023”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 4 misi yaitu: (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka selama kurun waktu 5 tahun (2018-2023) dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan dan selanjutnya dilaksanakan melalui program-program pembangunan Daerah. Dengan demikian seluruh pelaku pembangunan dapat menyusun rencana kerja secara sistematis dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR

Ditetapkan di Maumere
Pada Tanggal 19 Maret 2019

Bupati Sikka

F. ROBERTO DIOGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan tuntunanNya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 dapat disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan salah satu tahapan dari rangkaian proses penyusunan RPJMD secara komprehensif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 akan digunakan seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sikka sebagai acuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, strategi dan kegiatn prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sikka.

Dengan segala keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Sikka menyadari bahwa RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 masih kurang sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut guna mewujudkan **"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"**.

Akhirnya dengan rendah hati dan menaruh rasa hormat, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang konstruktif, baik dalam proses penyusunan maupun pada pembahasan selanjutnya untuk penyempurnaan dokumen RPJMD ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.

Maumere, 19 Maret 2019


Bupati Sikka,
F. ROBERTO DIOGO, S. Sos. M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | I-2 |
| 1.2.1. Dasar Hukum Substansi | I-3 |
| 1.2.2. Dasar Hukum Proses | I-4 |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen | I-4 |
| 1.4. Maksud dan Tujuan | I-5 |
| 1.4.1. Maksud..... | I-5 |
| 1.4.2. Tujuan..... | I-5 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | I-5 |
| BAB II GAMBARAN UMUM | II-1 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi | II-1 |
| 2.1.1. Aspek Geografi | II-1 |
| A. Letak, Batas dan Luas Wilayah | II-1 |
| B. Kondisi Topografi | II-4 |
| C. Kondisi Geologi | II-4 |
| D. Kondisi Hidrologi | II-6 |
| E. Kondisi Morfologi | II-8 |
| F. Kondisi Klimatologi..... | II-9 |
| G. Penggunaan Lahan | II-11 |
| H. Lahan Kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS) | II-11 |
| I. Potensi Pengembangan Wilayah..... | II-12 |
| J. Wilayah Rawan Bencana..... | II-15 |
| 2.1.2. Aspek Demografi | II-16 |
| A. Struktur Penduduk | II-16 |
| B. Migrasi | II-19 |
| C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan | II-20 |
| D. Penduduk Menurut Agama | II-21 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-21 |
| 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi | II-21 |
| A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto | II-21 |
| B. Laju Inflasi | II-25 |
| C. PDRB per Kapita..... | II-25 |
| D. Indeks Gini..... | II-26 |
| E. Indeks Ketimpangan Williamson | II-27 |
| F. Tipologi Klassen per Kecamatan di Kabupaten Sikka..... | II-27 |
| G. Persentase Penduduk Miskin | II-28 |
| H. Indeks Pembangunan Manusia | II-29 |
| I. Indeks Kebahagiaan | II-29 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat | II-30 |
| A. Pendidikan | II-30 |
| B. Kesehatan | II-35 |
| C. Ketenagakerjaan | II-38 |
| 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga | II-39 |
| A. Kebudayaan | II-39 |
| B. Pemuda dan Olahraga | II-39 |
| 2.3. Aspek Pelayanan Umum | II-40 |
| 2.3.1. Fokus Layanan Umum Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar..... | II-40 |
| A. Pendidikan | II-40 |
| B. Kesehatan | II-45 |
| C. Pekerjaan Umum | II-53 |

| | |
|---|--------|
| D. Perumahan | II-54 |
| E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | II-55 |
| F. Sosial | II-59 |
| G. Perencanaan Pembangunan | II-61 |
| 2.3.2. Fokus Layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar | II-62 |
| A. Ketenagakerjaan | II-62 |
| B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | II-64 |
| C. Ketahanan Pangan | II-66 |
| D. Lingkungan Hidup | II-67 |
| E. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | II-69 |
| F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan | II-70 |
| G. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | II-72 |
| H. Perhubungan | II-74 |
| I. Komunikasi dan Informatika | II-76 |
| J. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | II-77 |
| K. Penanaman Modal | II-78 |
| L. Kepemudaan dan Olahraga | II-79 |
| M. Kebudayaan | II-79 |
| N. Perpustakaan | II-80 |
| O. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri | II-81 |
| P. Statistik | II-81 |
| Q. Kearsipan | II-81 |
| 2.3.3. Fokus Layanan Pilihan | II-82 |
| A. Pertanian | II-82 |
| B. Pariwisata | II-85 |
| C. Perdagangan | II-89 |
| D. Perindustrian | II-90 |
| E. Perikanan | II-91 |
| F. Ketrasmigrasian | II-94 |
| 2.4. Aspek Daya Saing Daerah | II-94 |
| 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-94 |
| 2.4.2. Fokus Fasilitas wilayah / infrastruktur | II-95 |
| A. Perhubungan | II-95 |
| B. Ketaatan Terhadap RTRW | II-97 |
| C. Wilayah Perkotaan | II-98 |
| D. Persentase Luas Wilayah Produktif | II-98 |
| E. Persentase Luas Wilayah Kebanjiran | II-98 |
| F. Fasilitas Ekonomi | II-98 |
| G. Infrastruktur Listrik | II-99 |
| H. Kominikasi dan Informatika | II-100 |
| 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi | II-100 |
| A. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk | II-100 |
| B. Lama Perijinan | II-101 |
| 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia | II-102 |
| A. Ketenagakerjaan | II-102 |

| | |
|--|--------------|
| BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | III-1 |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD | III-1 |
| A. Pendapatan Daerah | III-1 |
| B. Belanja Daerah | III-5 |
| C. Pembiayaan Daerah | III-9 |
| 3.1.2. Neraca Daerah | III-11 |
| 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2013-2017..... | III-15 |
| 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran | III-15 |
| 3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah | III-15 |
| 3.2.1.2. Pemenuhan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur | III-16 |
| 3.2.2. Analisa Pembiayaan | III-16 |

| | |
|---|---------------|
| 3.3. Kerangka Pendanaan | III-17 |
| 3.3.1. Analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama .. | III-18 |
| 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu | III-19 |
| 3.3.3. Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023 | III-19 |
| 3.3.3.1. Pendapatan Asli Daerah | III-19 |
| 3.3.3.2. Dana Perimbangan | III-20 |
| 3.3.3.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | III-20 |
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | IV-1 |
| 4.1. Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| 4.1.1. Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat Sikka | IV-1 |
| 4.1.2. Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | IV-6 |
| 4.1.3. Distribusi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah | IV-8 |
| 4.2. Isu Strategis | IV-8 |
| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1. Visi | V-1 |
| 5.1.1. Keselarasan Visi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019 | V-1 |
| 5.2. Misi | V-2 |
| 5.2.1. Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025..... | V-2 |
| 5.2.2. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.. | V-4 |
| 5.2.3. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. | V-6 |
| 5.2.4. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019 | V-7 |
| 5.2.5. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan Nawacita | V-8 |
| 5.2.6. Keselarasan Misi RPJMD dengan SDGs..... | V-9 |
| 5.2.7. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten..... | V-10 |
| 5.2.8. Telaah Terhadap RTRW Provinsi NTT..... | V-17 |
| 5.2.9. Telaah Terhadap RTRW Nasional..... | V-30 |
| 5.2.10. Telaah Terhadap KLHS..... | V-32 |
| 5.3. Tujuan dan Sasaran | V-51 |
| BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-1 |
| 6.1. Strategi | VI-1 |
| 6.2. Arah Kebijakan | VI-1 |
| 6.3. Program Pembangunan | VI-3 |
| BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VII-1 |
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | VIII-1 |
| BAB IX PENUTUP | IX-1 |
| 9.1. Kaidah Pelaksanaan | IX-1 |
| 9.2. Pedoman Transisisi | IX-1 |
| 9.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan | IX-2 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|-------------|---|------|
| Gambar 2.1. | Peta Administrasi Kabupaten Sikka | II-1 |
| Gambar 2.2. | Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka | II-4 |
| Gambar 2.3. | Peta Geologi Kabupaten Sikka | II-5 |
| Gambar 2.4. | Peta Hidrologi Kabupaten Sikka | II-7 |
| Gambar 2.5. | Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Sikka | II-8 |



DAFTAR GRAFIK

| | Halaman |
|---|---------|
| Grafik 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..... | I-4 |
| Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017 | II-18 |
| Grafik 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2017 | II-19 |
| Grafik 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 | II-22 |
| Grafik 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 | II-23 |
| Grafik 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2017 | II-23 |
| Grafik 2.6. Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-25 |
| Grafik 2.7. PDRB Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-26 |
| Grafik 2.8. Indeks Gini Tahun 2015-2017 | II-26 |
| Grafik 2.9. Indeks Ketimpangan Wiliamson Tahun 2015-2017 | II-27 |
| Grafik 2.10. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-28 |
| Grafik 2.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-29 |
| Grafik 2.12. Indeks Kebahagiaan Penduduk Tahun 2017 | II-29 |
| Grafik 2.13. Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-30 |
| Grafik 2.15. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-31 |
| Grafik 2.16. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-31 |
| Grafik 2.17. Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-32 |
| Grafik 2.18. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-32 |
| Grafik 2.19. Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SD/MI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-33 |
| Grafik 2.20. Angka pendidikan yang ditamatkan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-33 |
| Grafik 2.21. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2013-2017 | II-34 |
| Grafik 2.22. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2013-2017 | II-34 |
| Grafik 2.23. Angka Kematian Bayi Tahun 2013-2017 | II-35 |
| Grafik 2.24. Angka Kematian Balita Tahun 2013-2017 | II-35 |
| Grafik 2.25. Angka Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2013-2017 | II-36 |
| Grafik 2.26. Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017 | II-36 |
| Grafik 2.27. Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2013-2017 | II-37 |
| Grafik 2.28. Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-37 |
| Grafik 2.29. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat Tahun 2013-2017 | II-38 |
| Grafik 2.30. Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2013-2017 | II-38 |
| Grafik 2.31. Jumlah Grup Kesenian Tahun 2013-2017 | II-39 |
| Grafik 2.32. Jumlah Klub Olahraga Tahun 2013-2017 | II-39 |
| Grafik 2.33. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2013-2017 | II-40 |
| Grafik 2.34. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Tahun 2013-2017 | II-40 |
| Grafik 2.35. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017 | II-41 |
| Grafik 2.36. Rasio Guru Murid SD/MI Tahun 2013-2017 | II-41 |
| Grafik 2.37. Rasio Guru Murid SMP/MTs Tahun 2013-2017 | II-42 |
| Grafik 2.38. Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013-2017 | II-43 |

| | | |
|--------------|---|-------|
| Grafik 2.39. | Angka Putus Sekolah SD Tahun 2013-2017 | II-43 |
| Grafik 2.40. | Angka Putus Sekolah SMP/MTs Tahun 2013-2017 | II-44 |
| Grafik 2.41. | Angka Kelulusan SD/MTs Tahun 2013-2017 | II-44 |
| Grafik 2.42. | Angka Kelulusan SMP/MTs Tahun 2013-2017 | II-45 |
| Grafik 2.43. | Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2013-2017 | II-45 |
| Grafik 2.44. | Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017 | II-46 |
| Grafik 2.45. | Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017..... | II-46 |
| Grafik 2.46. | Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2013-2017 | II-47 |
| Grafik 2.47. | Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk Tahun 2013-2017 | II-47 |
| Grafik 2.48. | Cakupan komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2013-2017 | II-48 |
| Grafik 2.49. | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2013-2017 | II-48 |
| Grafik 2.50. | Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013-2017 | II-49 |
| Grafik 2.51. | Cakupan balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2013-2017 | II-49 |
| Grafik 2.52. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2013-2017 | II-50 |
| Grafik 2.53. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD Tahun 2013-2017 | II-50 |
| Grafik 2.54. | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2013-2017 | II-51 |
| Grafik 2.55. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Tahun 2013-2017 | II-51 |
| Grafik 2.56. | Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2013-2017 | II-52 |
| Grafik 2.57. | Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/ jam) Tahun 2013-2017 | II-53 |
| Grafik 2.58. | Panjang Pembangunan Turap Tahun 2013-2017 | II-54 |
| Grafik 2.59. | Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2013-2017..... | II-57 |
| Grafik 2.60. | Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017..... | II-59 |
| Grafik 2.61. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | II-60 |
| Grafik 2.62. | Jumlah Penanganan PMKS Tahun 2013-2017 | II-60 |
| Grafik 2.63. | Cakupan anak terlantar yang terbina Tahun 2013-2017 | II-61 |
| Grafik 2.64. | Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2013-2017 | II-62 |
| Grafik 2.65. | Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun Tahun 2013-2017 | II-62 |
| Grafik 2.66. | Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2013-2017 | II-63 |
| Grafik 2.67. | Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Tahun 2013-2017 | II-64 |
| Grafik 2.68. | Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan Tahun 2013-2017 | II-65 |
| Grafik 2.69. | Rasio Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-65 |
| Grafik 2.70. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2013-2017 | II-66 |
| Grafik 2.71. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2013-2017..... | II-66 |
| Grafik 2.72. | Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan Berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-67 |
| Grafik 2.73. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2013 - 2017 | II-67 |
| Grafik 2.74. | Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka | |

| | | |
|---------------|---|-------|
| | Tahun 2013 - 2017 | II-68 |
| Grafik 2.75. | Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2017..... | II-68 |
| Grafik 2.76. | Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013 - 2017 | II-69 |
| Grafik 2.77. | Rasio bayi berakte kelahiran Tahun 2013-2017 | II-69 |
| Grafik 2.78. | Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2013-2017 | II-70 |
| Grafik 2.79. | Jumlah LPMK dan BPD Tahun 2013-2017 | II-71 |
| Grafik 2.80. | Jumlah LSM Tahun 2013-2017 | II-71 |
| Grafik 2.81. | Jumlah PKK aktif Tahun 2013-2017 | II-72 |
| Grafik 2.82. | Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2013-2017 | II-72 |
| Grafik 2.83. | Cakupan Peserta KB aktif Tahun 2013-2017 | II-73 |
| Grafik 2.84. | Presentase Keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2017 | II-73 |
| Grafik 2.85. | Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Tahun 2017 | II-74 |
| Grafik 2.86. | Rasio ijin trayek Tahun 2013-2017 | II-75 |
| Grafik 2.87. | Jumlah uji KIR angkutan umum Tahun 2013-2017 | II-75 |
| Grafik 2.88. | Jumlah KSP dan KSU Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-77 |
| Grafik 2.89. | Jumlah UMKM Tahun di Kabupaten Sikka 2013-2017..... | II-77 |
| Grafik 2.90. | Jumlah nilai investasi berskala Nasional Tahun 2013-2017..... | II-78 |
| Grafik 2.91. | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017..... | II-79 |
| Grafik 2.92. | Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk Tahun 2013-2017 | II-80 |
| Grafik 2.93. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Tahun 2013-2017 | II-81 |
| Grafik 2.94. | Persentase Perangkat daerah yang mengelola kearsipan secara baku Tahun 2013-2017 | II-82 |
| Grafik 2.95. | Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-82 |
| Grafik 2.96. | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-84 |
| Grafik 2.97. | Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-84 |
| Grafik 2.98. | Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-88 |
| Grafik 2.99. | Rata- Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-88 |
| Grafik 2.100. | Kontribusi dan Pertumbuhan sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 | II-89 |
| Grafik 2.101. | Kontribusi dan Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 | II-90 |
| Grafik 2.102. | Kontribusi dan Pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 | II-90 |
| Grafik 2.103. | Produksi perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-93 |
| Grafik 2.104. | Konsumsi ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-93 |
| Grafik 2.105. | Cakupan bina kelompok perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-94 |
| Grafik 2.106. | Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-95 |
| Grafik 2.107. | Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Sikka Tahun 2017 | II-98 |

| | | |
|---------------|--|--------|
| Grafik 2.108. | Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2107 | II-100 |
| Grafik 2.109. | Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-20217 | II-101 |
| Grafik 2.110. | Persentase Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-102 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-------------|--|
| Tabel 2.1. | Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-2 |
| Tabel 2.2. | Desa Persiapan Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-2 |
| Tabel 2.3. | Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2017 II-3 |
| Tabel 2.4. | Kondisi Suhu Udara dan Kelembaban Udara Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-9 |
| Tabel 2.5. | Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka per Bulan Tahun 2017 II-10 |
| Tabel 2.6. | Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-10 |
| Tabel 2.7. | Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka II-11 |
| Tabel 2.8. | Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 II-16 |
| Tabel 2.9. | Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-17 |
| Tabel 2.10. | Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-18 |
| Tabel 2.11. | Migrasi Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2017 II-20 |
| Tabel 2.12. | Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-20 |
| Tabel 2.13. | Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-21 |
| Tabel 2.14. | Distribusi PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2014- 2017 II-22 |
| Tabel 2.15. | Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 II-24 |
| Tabel 2.16. | Penetapan Sektor Unggulan Daerah Menurut Tipologi Klassen II-24 |
| Tabel 2.17. | Tipologi Klassen Per Kecamatan Kondisi Tahun 2017..... II-27 |
| Tabel 2.18. | Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017..... II-52 |
| Tabel 2.19. | Rasio Panjang jalan per satuan Penduduk Kabupaten Sikka tahun 2013-2017 II-53 |
| Tabel 2.20. | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017 II-55 |
| Tabel 2.21. | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2017 II-56 |
| Tabel 2.22. | Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan / Desa Tahun 2017 II-56 |
| Tabel 2.23. | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Tahun 2017 II-57 |
| Tabel 2.24. | Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Tahun 2017.. II-57 |
| Tabel 2.25. | Petugas Linmas di Kota Tahun 2017 II-58 |
| Tabel 2.26. | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2017 II-58 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.27. | Tingkat waktu tanggap kebakaran di Kota Maumere | II-59 |
| Tabel 2.28. | Pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2013-2017 | II-63 |
| Tabel 2.29. | Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja Tahun 2013-2017 | II-64 |
| Tabel 2.30. | Ketersediaan data base kependudukan Tahun 2013-2017 | II-70 |
| Tabel 2.31. | Jumlah Kampung KB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018.. | II-73 |
| Tabel 2.32. | Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-76 |
| Tabel 2.33. | Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 | II-83 |
| Tabel 2.34. | Data Obyek Daya Tarik Wisata Alam | II-85 |
| Tabel 2.35. | Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka..... | II-86 |
| Tabel 2.36. | Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani | II-86 |
| Tabel 2.37. | Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari | II-87 |
| Tabel 2.38. | Jenis Alat tangkap Yang Digunakan | II-91 |
| Tabel 2.39. | Jenis Armada Yang Digunakan Nelayan | II-92 |
| Tabel 2.40. | Jenis Komoditi Yang Dikirim Keluar Wilayah | II-92 |
| Tabel 2.41. | Jumlah Orang/Barang yang Masuk Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-96 |
| Tabel 2.41. | Jumlah Orang/Barang yang Keluar Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-97 |
| Tabel 2.42. | Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-99 |
| Tabel 2.43. | Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-99 |
| Tabel 2.44. | Pajak dan Retrebusi Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | II-102 |
| Tabel 2.45. | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | II-103 |
| Tabel 3.1. | Pertumbuhan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-2 |
| Tabel 3.2. | Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-3 |
| Tabel 3.3. | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 | III-4 |
| Tabel 3.4. | Rasio kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017 | III-5 |
| Tabel 3.5. | Rata-rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-6 |
| Tabel 3.6. | Rasio Efektifitas Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-7 |
| Tabel 3.7. | Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017 | III-7 |
| Tabel 3.8. | Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-8 |
| Tabel 3.9. | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-10 |
| Tabel 3.10. | Neraca Daerah Tahun 2013-2017 | III-12 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 3.11. | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 | III-15 |
| Tabel 3.12. | Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sikka | III-16 |
| Tabel 3.13. | Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sikka | III-16 |
| Tabel 3.14. | Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Sikka | III-17 |
| Tabel 3.15. | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sikka..... | III-17 |
| Tabel 3.16. | Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 | III-18 |
| Tabel 3.17. | Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 | III-21 |
| Tabel 3.18. | Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 | III-24 |
| Tabel 3.19. | Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 ... | III-25 |
| Tabel 3.20. | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 | III-26 |
| Tabel 4.1. | Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah | IV-8 |
| Tabel 4.2. | Isu Strategis Daerah | IV-8 |
| Tabel 5.1. | Keselarasan Visi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019 | V-I |
| Tabel 5.2. | Keselarasan Misi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019 | V-7 |
| Tabel 5.3. | Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN tahun 2014-2019 dan NAWACITA | V-8 |
| Tabel 5.4. | Keselarasan Misi RPJMD dengan SDGs | V-9 |
| Tabel 5.5. | Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka | V-35 |
| Tabel 5.6. | Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Sosial | V-36 |
| Tabel 5.7. | Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Lingkungan | V-39 |
| Tabel 5.8. | Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Ekonomi | V-43 |
| Tabel 5.9. | Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Hukum dan Tata Kelola | V-49 |
| Tabel 6.1. | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi | VI-6 |
| Tabel 6.2. | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 | VI-9 |
| Tabel 6.3. | Program Pembangunan Daerah yang Disertai dengan Pagu Indikatif | VI-11 |
| Tabel 7.1. | Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah | VII-2 |
| Tabel 7.2. | Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan | VII-3 |
| Tabel 8.1. | Penetapan Indikator Utama Kabupaten Sikka 2018-2023 | VIII-1 |
| Tabel 8.2. | Penetapan Indikator kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sikka 2018-2023 | VIII-2 |

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Latar belakang berisikan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), proses penyusunan RPJMD dan kedudukan RPJMD. Dasar hukum berisikan tentang regulasi proses dan substansi penyusunan RPJMD. Hubungan antar dokumen berisikan tentang keterkaitan dan keterhubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya. Maksud dan tujuan berisikan tentang tujuan dan sasaran dari penyusunan RPJMD dan sistematika penulisan berisikan tentang pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.1. Latar Belakang

Dengan terpilihnya dan dilantiknya Bupati Sikka dan Waki Bupati Sikka masa bhakti 2018-2023 pada tanggal 20 September 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-6099 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si** dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-6099 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama **Romanus Woga**, maka sesuai Pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, visi dan misi kepala daerah terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen RPJMD.

RPJMD sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Mengacu Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Sistematika RPJMD sesuai Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, paling sedikit berisikan tentang Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan, Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Visi Kabupaten Sikka adalah Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Masyarakat Sikka Menuju Sikka BAHAGIA 2023, dengan 2 (dua) Misi Utama yaitu (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas, (2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi serta sasaran pembangunan daerah (1) Meningkatnya pendidikan masyarakat, (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (3) Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil dan (4) Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Untuk mencapainya ditetapkan strategi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kesakitan
3. Peningkatan nilai investasi, Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor potensial dan Kualitas Layanan Infrastruktur
4. Penurunan Kriminalitas dan Indeks Resiko Bencana
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan serta harmoni sosial
6. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

7. Peningkatan profesionalitas ASN
8. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai
9. Peningkatan Ketersediaan sistim informasi pelayanan publik yang memadai
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tahapan dalam penyusunan RPJMD yaitu tahapan persiapan, tahapan penyusunan rancangan awal, tahapan penyusunan rancangan dan tahapan penyusunan rancangan akhir. Tahapan persiapan terdiri dari pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja, penyiapan data dan informasi serta penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Tahapan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD terdiri dari penyusunan rancangan awal, pengajuan rancangan awal kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan, pengajuan rancangan awal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD dengan Nomor: 15/MoU/HK/2018 dan Nomor: 16/RA-RPJMD/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, Hasil Konsultasi ke Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Surat Kepala Bepeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Bap.045.1.2/Pev.825/2018, Persetujuan Validasi KLHS melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU. 660/03/DLH/2019 tanggal 21 Januari 2019, penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berdasarkan Rancangan Awal RPJMD, dan pengajuan Renstra PD untuk diverifikasi.

Tahapan penyusunan Rancangan RPJMD terdiri dari penyempurnaan rancangan awal berdasarkan Renstra PD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RPJMD dengan Nomor: Bap.050. 1.3 /43/II/2019 tanggal 8 Februari 2018. Tahapan penyusunan Rancangan Akhir RPJMD terdiri dari penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan berita acara Musrenbang RPJMD, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Akhir RPJMD ke DPRD untuk mendapat persetujuan, evaluasi Ranperda RPJMD oleh Gubernur, penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD, perumusan Rancangan Akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD, dan verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD.

RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode keempat dari RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025. Periode I Tahun 2005-2009, Periode II Tahun 2010-2014, Periode III Tahun 2015-2019 dan Periode IV Tahun 2020-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 berada pada periode ketiga tahun V dan periode ketiga tahun I–III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka tahun 2005-2025.

Kedudukan dokumen RPJMD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, dan Renstra PD akan menjadi bahan kelengkapan RPJMD. RPJMD kemudian akan dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi bahan kelengkapan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (RAPBD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1.2.1. Dasar Hukum Substansi

Secara substansi, dokumen RPJMD Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;

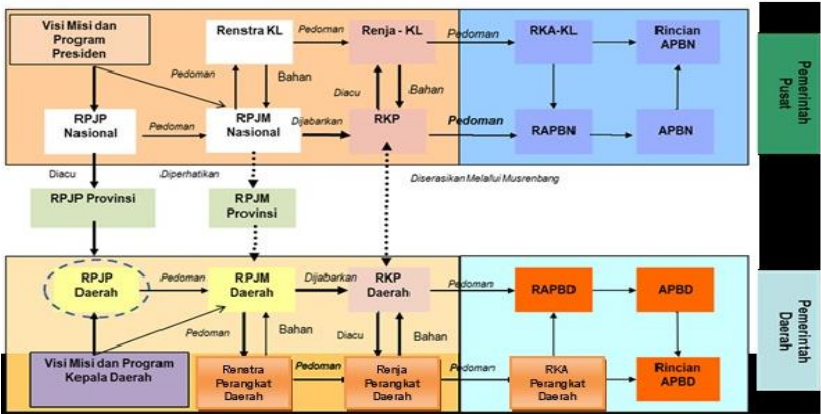
1.2.2. Dasar Hukum Proses :

- Secara proses, penyusunan dokumen RPJMD merupakan amanat dari :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Grafik 1.1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pembangunan daerah bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2019-2023 dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran, termasuk juga rencana-rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif;
3. Menjadi tolak ukur keperbahasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
4. Menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan pemerintahan dan fungsi anggaran DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Menjabarkan program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan Renja PD setiap tahun;
3. Melaksanakan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah sesuai Indikator Kinerja Utama;
4. Melaksanakan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD sesuai indikator tujuan dan sasaran Renstra PD;
5. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap produk hukum daerah, memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pembangunan dan membahas dan memberikan persetujuan APBD setiap tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen RPJMD dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang menguraikan tentang Aspek Geografi dan Demografi (Aspek Geografi dan Aspek Demografi), Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Fokus Seni Budaya dan Olahraga), Aspek Pelayanan Umum (Fokus Layanan umum wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, Fokus Layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Fokus Layanan Pilihan) dan Aspek Daya Saing Daerah (Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Berinvestasi dan Fokus Sumber Daya Manusia)
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH yang menguraikan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu (Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah), Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu (Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan) dan Kerangka pendanaan yang menguraikan Proyeksi Keuangan 2019-2023

- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH yang menguraikan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN yang menguraikan tentang uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sikka 2018-2023
- BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN yang menguraikan tentang Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH yang menguraikan tentang Kerangka Pendanaan, Program Prioritas dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta Indikator kinerja program, kegiatan dan Pagu Indikatif serta Perangkat Daerah Penanggung jawab.
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH yang menguraikan tentang Indikator Kinerja Utama Pelaksanaan pembangunan
- BAB IX PENUTUP yang menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi perencanaan serta pengembangan pembiayaan pembangunan.



BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Sikka, meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek geografi berisikan tentang letak, batas dan luas wilayah, kondisi topografi, kondisi morfologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, penggunaan lahan, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi berisikan tentang struktur penduduk, migrasi, penduduk menurut lapangan pekerjaan, penduduk menurut agama. Aspek kesejahteraan masyarakat berisikan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, dan fokus seni budaya dan olahraga. Aspek pelayanan umum berisikan tentang fokus layanan umum wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan fokus layanan pilihan. Aspek daya saing daerah berisikan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

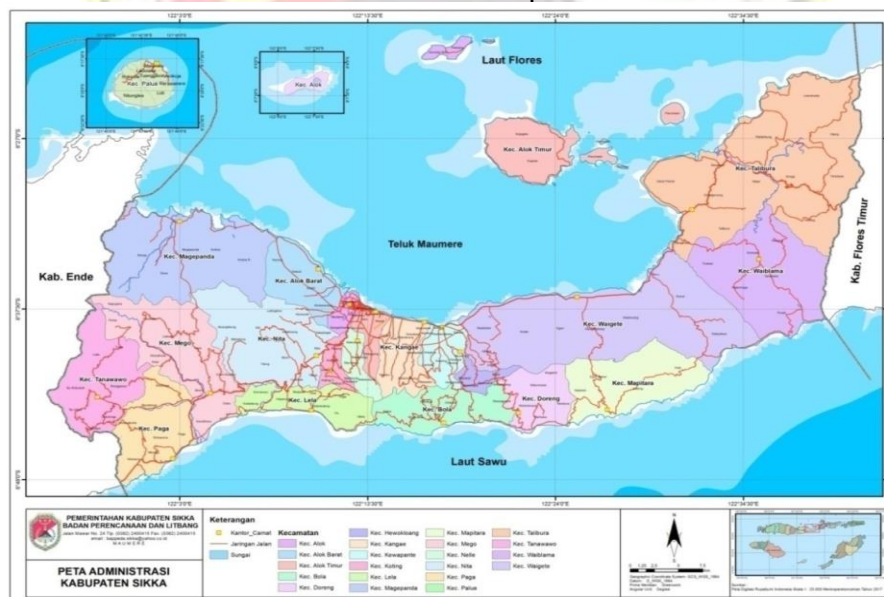
A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Sikka terletak di ujung timur Pulau Flores, memiliki luas wilayah 1.731,91 Km² atau 173.191 Ha dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ende;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Sawu.

Batas wilayah Kabupaten Sikka secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Sikka



Sumber: Kebijakan Satu Peta Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan peta diatas, dapat dijelaskan bahwa secara geografis, Kabupaten Sikka terletak pada 8°22' – 8°50' Lintang Selatan dan 121°55'40" – 122°41'30" Bujur Timur.

Secara administratif Kabupaten Sikka terbagi atas Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Desa Persiapan (Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2017). Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Sikka Tahun 2017

| No. | Kecamatan | Jumlah | |
|-----|---------------|------------|-----------|
| | | Desa | Kelurahan |
| 1 | Alok | 3 | 4 |
| 2 | Alok Barat | - | 4 |
| 3 | Alok Timur | 5 | 5 |
| 4 | Bola | 6 | - |
| 5 | Doreng | 7 | - |
| 6 | Mapitara | 4 | - |
| 7 | Hewokloang | 7 | - |
| 8 | Kangae | 9 | - |
| 9 | Kewapante | 8 | - |
| 10 | Koting | 6 | - |
| 11 | Lela | 9 | - |
| 12 | Magepanda | 5 | - |
| 13 | Mego | 10 | - |
| 14 | Nelle | 5 | - |
| 15 | Nita | 12 | - |
| 16 | Paga | 8 | - |
| 17 | Palue | 8 | - |
| 18 | Talibura | 12 | - |
| 19 | Tanawawo | 8 | - |
| 20 | Waiblama | 6 | - |
| 21 | Waigete | 9 | - |
| | JUMLAH | 147 | 13 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa wilayah administrasi Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 147 Desa. Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Talibura dan Nita masing-masing sebanyak 12 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Mapitara dan Alok Barat masing-masing sebanyak 4 desa/kelurahan. Selanjutnya rincian 34 Desa Persiapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.
Desa Persiapan Kabupaten Sikka Tahun 2017

| No. | Desa Persiapan | Desa Induk | Kecamatan |
|-----|----------------|--------------|------------|
| 1 | Gong Bekor | Watugong | Alok Timur |
| 2 | Watukrus | Ipir | Bola |
| 3 | Bura Bekor | Wolonwalu | Bola |
| 4 | Mahetana | Nenbura | Doreng |
| 5 | Pelibaler | Kloangpopot | Doreng |
| 6 | Ndai Mbere | Gera | Mego |
| 7 | Ratekalo | Bhera | Mego |
| 8 | Watukobu | Ian Tena | Kewapante |
| 9 | Watu Repa | Koting D | Koting |
| 10 | Waturia | Kolisia | Magepanda |
| 11 | Woda Mude | Magepanda | Magepanda |
| 12 | Legu Woda | Reroroja | Magepanda |
| 13 | Nangablo | Tilang | Nita |
| 14 | Tadalado Jallo | Nirangkliung | Nita |
| 15 | Karakabu | Nirangkliung | Nita |
| 16 | Watumoning | Pruda | Waiblama |
| 17 | Mamai | Bangkoor | Talibura |

| No. | Desa Persiapan | Desa Induk | Kecamatan |
|-----|----------------|------------|-----------|
| 18 | Udek Duen | Hikong | Talibura |
| 19 | Henga | Lewomada | Talibura |
| 20 | Likonggete | Nangahale | Talibura |
| 21 | Watuomok | Nebe | Talibura |
| 22 | Watubaing | Talibura | Talibura |
| 23 | Baokremot | Wailamung | Talibura |
| 24 | Waipaar | Wailamung | Talibura |
| 25 | Egon Buluk | Egon | Waigete |
| 26 | Mahe Kelan | Egon | Waigete |
| 27 | Bu Barat | Bu Selatan | Tanawawo |
| 28 | Bu Nuapuu | Bu Utara | Tana Wawo |
| 29 | Kotandelu | Mbengu | Paga |
| 30 | Aebubu | Paga | Paga |
| 31 | Lowolabo | Paga | Paga |
| 32 | Rega Pu'u | Wolorega | Paga |
| 33 | Rejo | Wolorega | Paga |
| 34 | Begu | Wolowiro | Paga |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa dari 34 Desa Persiapan, Kecamatan dengan desa yang paling banyak dimekarkan adalah Kecamatan Talibura sebanyak 8 desa, Kecamatan Paga sebanyak 6 desa, Kecamatan Nita dan Kecamatan Magepanda masing-masing sebanyak 3 desa, Kecamatan Bola, Doreng, Mego, Waigete, dan Tanawawo masing-masing sebanyak 2 desa, dan Kecamatan Alok Timur, Kewapante, Koting, dan Waiblama masing-masing sebanyak 1 desa.

Nama ibu kota kecamatan dan luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Nama Ibu Kota Kecamatan dan Luas Wilayah Per Kecamatan Tahun 2017

| No | Kecamatan | Ibukota | Luas Wilayah | |
|----|------------|-------------|--------------|-------|
| | | | Km | % |
| 1 | Paga | Paga | 82,85 | 4,78 |
| 2 | Tanawawo | Wolofeo | 79,78 | 4,61 |
| 3 | Mego | Lekebai | 111,26 | 6,42 |
| 4 | Lela | Lela | 31,33 | 1,81 |
| 5 | Bola | Bola | 56,83 | 3,28 |
| 6 | Doreng | Edat | 30,41 | 1,76 |
| 7 | Mapitara | Hebing | 81,02 | 4,61 |
| 8 | Talibura | Talibura | 260,11 | 15,02 |
| 9 | Waiblama | Tanarawa | 144,36 | 8,34 |
| 10 | Waigete | Waigete | 217,65 | 12,57 |
| 11 | Kewapante | Kewapante | 24,14 | 1,39 |
| 12 | Hewokloang | Baowunut | 17,58 | 1,02 |
| 13 | Kangae | Waipare | 38,43 | 2,22 |
| 14 | Nelle | Nelle Urung | 14,65 | 0,85 |
| 15 | Koting | Koting B | 23,56 | 1,36 |
| 16 | PaluE | Uwa | 41 | 2,37 |
| 17 | Nita | Nita | 141,07 | 8,15 |
| 18 | Magepanda | Magepanda | 166,15 | 9,59 |
| 19 | Alok | Kota Uneng | 14,64 | 0,85 |
| 20 | Alok Barat | Wailiti | 62,75 | 3,62 |
| 21 | Alok Timur | Waioti | 92,34 | 5,33 |
| | JUMLAH | | 1731,91 | 100 |

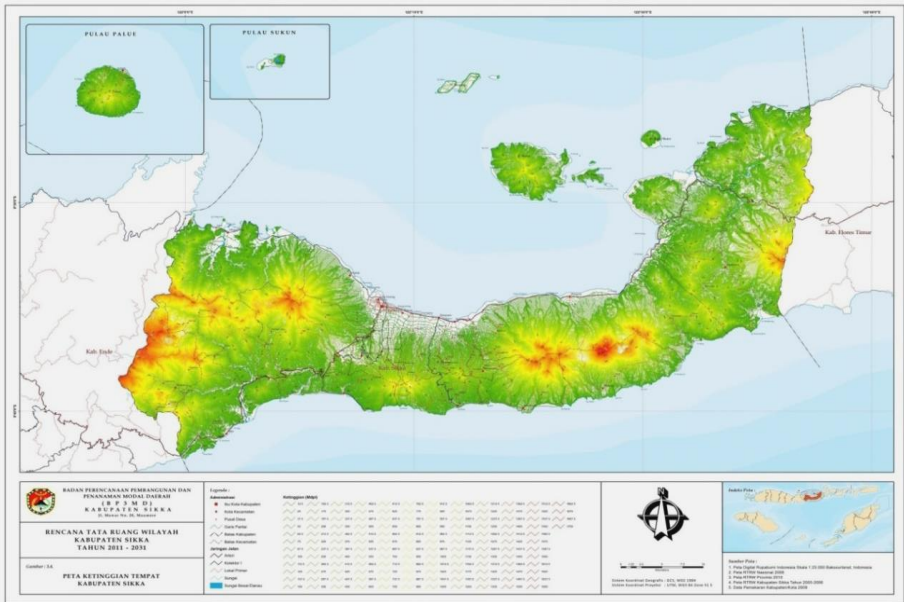
Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data luas wilayah per kecamatan diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Talibura dengan luas wilayah 260,11 Km² atau 15,02%, sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Alok 14,64 Km² atau 0,85%.

B. Kondisi Topografi

Topografi adalah keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah. Peta Topografi menggambarkan relief permukaan model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Topografi Kabupaten Sikka terlihat dari peta ketinggian lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.2.
Peta Ketinggian Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

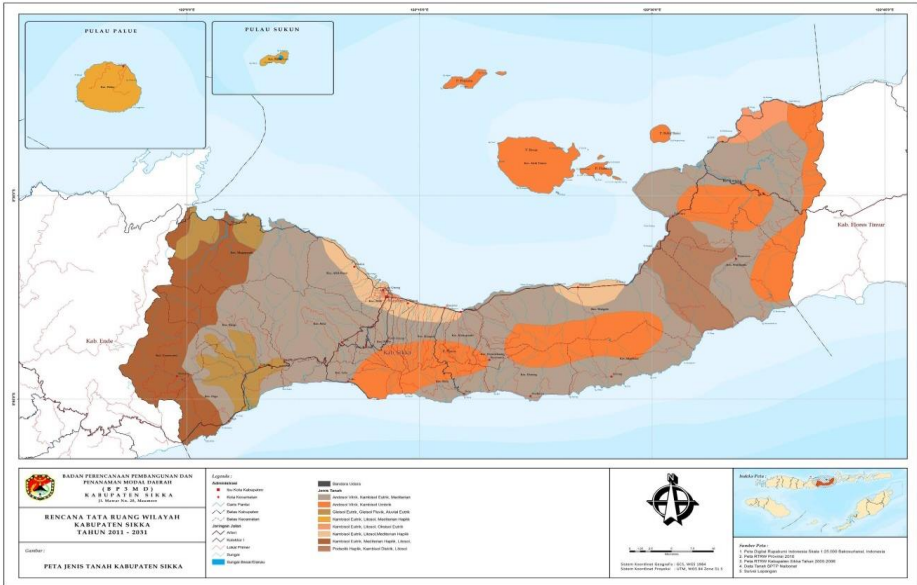
Berdasarkan peta ketinggian lahan diatas dapat dijelaskan bahwa topografi Kabupaten Sikka diklasifikasikan dalam lima kelas ketinggian dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Topografi dengan ketinggian 0-25 m dpl, yaitu dengan luas 29.863 Ha atau 17,24% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, meliputi sebagian besar daerah pesisir pantai utara dan daerah pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;
- 2) Topografi dengan ketinggian 25-100 m dpl, yaitu dengan luas 20.843 Ha atau 12,03% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;
- 3) Topografi dengan ketinggian 100-500 m dpl, yaitu seluas 48.171 Ha atau 27,81% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau pegunungan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
- 4) Topografi dengan ketinggian 500-1000 m dpl, yaitu seluas 70.216 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka;
- 5) Topografi dengan ketinggian lebih dari 1000 m dpl, yaitu seluas 4.098 ha atau 2,37% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka, merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi, yang tersebar di wilayah Kabupaten Sikka.

C. Kondisi Geologi

Geologi adalah kondisi suatu wilayah terkait komposisi struktur tanah dan tekstur tanah. Data geologi di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3.
Peta Geologi Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan peta geologi diatas dapat dijelaskan bahwa data geologi dan tata lingkungan meliputi sebaran struktur geologi yang terdiri dari beberapa batuan dan formasi batuan sebagai berikut: aluvium, endapan pantai, formasi kiro, dan batuan gunung api tua. Kondisi geologi dan faktor kegempaan di wilayah Kabupaten Sikka dibedakan menjadi empat zona kerentanan gerakan tanah, yaitu :

- 1) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah
Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sangat jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun baru, kecuali daerah sempit di sekitar tebing sungai. Zona ini terletak pada daerah datar sampai landai dengan kemiringan lereng medan lebih kecil dari 15% (0,05⁰). Lereng pada umumnya terbentuk oleh endapan aluvial pantai dan sungai berupa kerakal dan kerikil, pasir lumpur pelapukan batu gamping koral dan batuan gunung api. Zona ini terdapat di daerah tepi pantai utara dan daerah kaki perbukitan/pegunungan antara lain tepi pantai Kecamatan Magepanda, Kewapante, Talibura dan di pantai selatan hanya sebagian yaitu di Kecamatan Paga.
- 2) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah
Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng dan jika terdapat gerakan tanah lama. Gerakan tanah lama dimensi kecil masih dapat terjadi terutama pada tebing dan lembah sungai kecil (alur) dan lereng dengan kondisi tanah permukaan yang tidak lepas. Kemiringan lereng pada zona ini mulai dari landai (5-15%) sampai sangat terjal (50-70%) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Lereng pada umumnya terbentuk oleh persilangan konglomerat, batu pasir kasar, breksi, tufa pasiran dan tufa batu apung dan batu gamping. Zona ini terdapat di daerah selatan yaitu di Desa Lela, Desa Sikka, Desa Pruda (Hewat), Desa Watudiran (Kloan), Desa Nenbura (Pantai Doreng) dan daerah pesisir sekitarnya.
- 3) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan dan lereng terjal tidak bervegetasi. Gerakan tanah lama masih dapat aktif kembali terutama disebabkan oleh guncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi,

erosi kuat dan sifat tanah penutup yang gembur atau mudah larut.

Kondisi kemiringan lereng medan mulai terjal (30-50%) sampai curam hingga hampir tegak, yaitu >70%, tergantung kepada ketebalan tanah dan kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup pada umumnya sangat kurang yaitu berupa semak belukar, peladangan dan setempat-setempat tanaman keras. Batuan dasar pembentuk lereng berupa breksi, aglomerat, tufa pasiran terseling tufa lapilli atau tufa batu apung. Zona ini terdapat di lereng-lereng perbukitan bagian barat, selatan dan timur wilayah Kabupaten Sikka.

4) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi

Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Tinggi adalah daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat tinggi untuk terkena gerakan tanah. Zona ini sering terjadi gerakan tanah dan gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru yang masih dapat aktif bergerak, terutama akibat goncangan gempa bumi yang kuat, curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat, sehingga bila hujan terus menerus kemungkinan di alur-alur sungai terjadi aliran bahan rombakan.

Kemiringan lereng medan mulai dari terjal (30-50%) sampai curam hingga hampir tegak (>70%) tergantung pada kondisi keteknikan tanah/batuan pembentuk lereng. Vegetasi penutup umumnya sangat jarang bahkan di daerah lembah sungai tidak bervegetasi. Lereng pada umumnya terbentuk oleh tufa, tufa pasiran, breksi, aglomerat terseling tufa, batu apung hasil gunung api. Zona ini terdapat di daerah lereng lembah Pegunungan Egon, sebelah utara dan di lereng Pegunungan Gumbita, sebelah selatan dan utara Kecamatan Bola.

Dampak lain dari terjadinya gempa di wilayah Kabupaten Sikka adalah terjadinya Likuifaksi (*Liquifaction*) di daerah Kota Maumere. Likuifaksi adalah suatu gejala perubahan sifat dari suatu material yang bersifat padat (*solid*), non kohesif dan cair (*liquid*). Perubahan ini terjadi akibat pemanfaatan secara mendadak volume rongga antar butir yang disebabkan oleh adanya getaran, yang biasanya diakibatkan oleh gempa bumi. Akibat pemanfaatan ini akan meningkatkan tekanan air pori yang selanjutnya memunculkan gejala likuifaksi berupa munculnya semburan pasir. Bahaya likuifaksi ini dapat mengakibatkan dasar pondasi sipil mengalami amblean dan merusakkan bangunan gedung di atasnya (Bowles J.E, 1988). Untuk mengantisipasi bahaya likuifaksi tersebut, di wilayah Kota Maumere telah diidentifikasi tiga zona yang memiliki potensi untuk mengalami likuifaksi, yaitu :

- Zona Potensi Likuifaksi Tinggi

Zona Potensi Likuifaksi Tinggi terjadi pada endapan marin yang berupa pasir halus dan mengandung fraksi halus <10% dengan nilai uji penetrasi standard –SPT (N) kurang dari 7 dengan ketebalan perlapisan antara 2-10 meter. Zona ini terdapat di sekitar kota Maumere sampai dataran pantai bagian barat.

- Zona Potensi Likuifaksi Menengah

Zona Potensi Likuifaksi Menengah pada umumnya terjadi pada endapan aluvial dan sedikit pada endapan marin yang terdiri dari fraksi kasar (kerakal) sampai fraksi sedang (pasir halus) dan mengandung fraksi halus <15% dengan nilai N < 10, ketebalan perlapisan 2 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan kota Maumere (sekitar Pusat Jajanan dan Cinderamata Maumere) sampai pantai bagian timur.

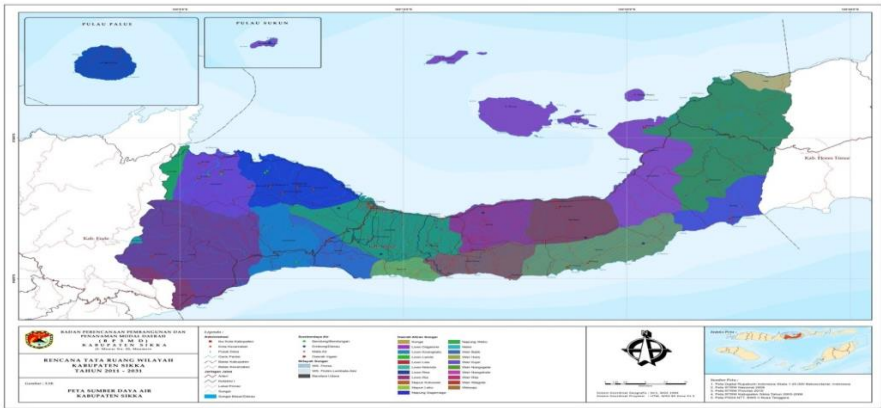
- Zona Potensi Likuifaksi Rendah

Zona Potensi Likuifaksi Rendah pada umumnya terjadi pada endapan vulkanis yang berupa lanau pasir, mengandung fraksi halus (lanau dan lempung) >15% dengan nilai N >12 dengan ketebalan perlapisan 1 meter. Zona ini terdapat di bagian selatan Kota Maumere sampai berbatasan dengan lereng perbukitan.

D. Kondisi Hidrologi

Kondisi Hidrologi adalah keadaan yang menggambarkan tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan termasuk hubungannya dengan makhluk hidup di suatu wilayah. Kondisi hidrologi Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.4.
Peta Hidrologi Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan Peta Hidrologi diatas dapat dijelaskan bahwa potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari tiga sumber yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

1. Air Hujan

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Sikka dan Nusa Tenggara Timur, umumnya sangat menentukan besarnya potensi air hujan. Iklim di Kabupaten Sikka adalah iklim kering yang dipengaruhi oleh angin Muson, dengan musim hujan yang pendek, yang jatuh pada sekitar bulan Nopember hingga bulan Mei. Wilayah Kabupaten Sikka mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 1000-1500 mm/tahun. Akibat rendahnya curah hujan dengan hari hujan dan intensitas yang bervariasi tinggi menyebabkan bentang alam Kabupaten Sikka menjadi relatif kering yang sangat mempengaruhi keadaan air tanah.

2. Air Tanah

Keberadaan kondisi geologi dan hidrologi mempengaruhi kondisi sumber daya air di Kabupaten Sikka. Beberapa jenis batuan yang dimiliki seperti batuan gunung api kuartar dan aluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Struktur hidrologi daerah ini cenderung kompleks dan sangat dipengaruhi oleh aktifitas tektonik dan vulkanik pada masa lampau. Aliran air tanah mengalir melalui celah antar butir (pasir dan butiran batu halus), mengalir di antara retakan dan celah batuan keras, aliran melalui celahan, retakan dan saluran. Aquifernya memperlihatkan penyebaran yang terbatas dan terdapat dalam kondisi aliran yang bervariasi. Kondisi ini berpengaruh pada produktifitas aquifernya, maka daerah Kabupaten Sikka di bagi atas lima aquifer:

- Setempat aquifer produktif (aliran melalui ruang antar butir), yaitu aquifer yang tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, maka air tanah dekat muka tanah, debit sumur diperkirakan kurang dari 1 (satu) liter/detik. Aquifer ini dijumpai pada aluvium dan endapan pantai.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas, umumnya dalam. Mata air berdebit cukup.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celah dan ruang antar butir), yaitu aquifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dapat dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah. Debit mata air sangat beragam dapat mencapai lebih dari 40 liter/detik.
- Aquifer dengan produktifitas sedang (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, retakan dan saluran pelarutan, debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran besar. Debit mata air terbesar mencapai 40 liter/detik.
- Setempat aquifer produktif (aliran melalui celahan, retakan dan saluran). Aliran air tanah terbatas pada zone celahan, retakan dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam dan setempat.

Mata air di daerah Kabupaten Sikka, umumnya muncul ke permukaan tanah secara

alami, karena terpotongnya aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat. Debit mata air di Kabupaten Sikka bervariasi antara 1-40 liter/detik. Debit mata air ini umumnya kecil, yang disebabkan antara lain oleh sifat batuan yang kurang meluluskan air dan kemiringan lereng dari daerah tanah cukup besar, yakni lebih dari 40%. Ini mengakibatkan aliran permukaan akan lebih besar dari peresapan.

Konservasi sumber air tanah perlu dilakukan di daerah Kabupaten Sikka, guna menjaga sumber air tetap lestari, dapat dilakukan reboisasi di daerah-daerah tandus. Pemanfaatan air tanah secara maksimal perlu dilakukan untuk mencukupi daerah-daerah yang rawan air, terutama pada daerah-daerah yang mengandung akuifer produktif atau dengan memanfaatkan sumber air yang ada.

Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari daerah perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Secara umum di Kabupaten Sikka, terdapat beberapa daerah yang memungkinkan pemanfaatan sumber air tanahnya. Daerah-daerah yang paling memungkinkan adalah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela.

3. Air Permukaan

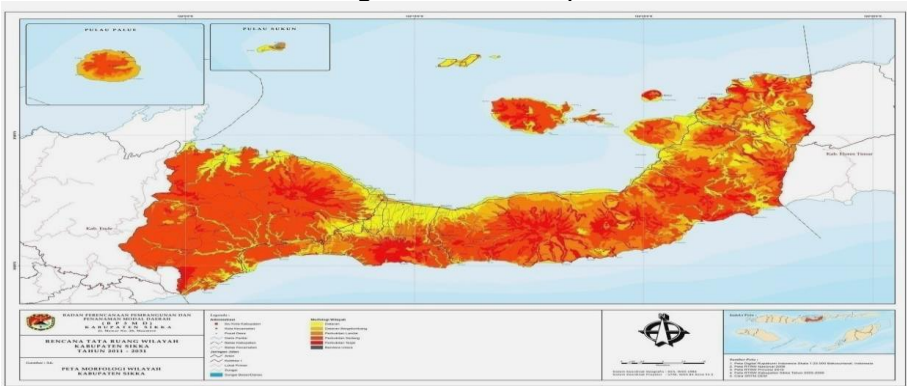
Potensi air permukaan dapat diketahui dari sumber air yang berasal dari sungai, danau, rawa dan air genangan. Di Kabupaten Sikka, potensi air permukaan sebagian besar berasal dari sungai-sungai yang berada di daerah tersebut dalam skala sedang dan kecil. Kecenderungan iklim yang relatif kering dan musim hujan yang berlangsung hanya 3-4 bulan dalam setahun menyebabkan sungai-sungai tersebut juga banyak yang kering terutama pada musim kemarau.

Pola aliran sungai di wilayah ini pada umumnya adalah dendritik, yaitu aliran sungai yang membentuk cabang pohon, berair pada musim hujan dan kering/berkurang debitnya pada musim kemarau. Kabupaten Sikka termasuk daerah yang potensial memiliki sumber daya air. Diketahui dari banyaknya sungai yang mengalir pada musim penghujan, baik sungai yang besar maupun yang kecil. Kondisi ini sesuai untuk pengembangan persawahan dengan jalan pembuatan bendung-bendung dan saluran irigasi untuk mencukupi kebutuhan air pada areal persawahan khususnya. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah sungai yang mengalir di wilayah ini hampir terdapat di semua kecamatan, tetapi kecenderungan hanya mengalir pada musim hujan. Guna memenuhi kebutuhan air untuk konsumsi keluarga di wilayah ini menggunakan air dari PDAM dan pembuatan sumur, mengambil dari sumber mata air dan Penampungan Air Hujan (PAH).

E. Kondisi Morfologi

Kondisi Morfologi adalah kondisi yang menjelaskan mengenai sub terluar dari batuan yang menyusun bentuk permukaan bumi (pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan lembah). Kondisi Morfologi (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.5.
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Sikka



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012 – 2032

Berdasarkan Peta Kemiringan Lahan diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup bervariasi, berkisar dari 0%-70% dan didominasi oleh kemiringan tanah yang lebih besar dari 40% dengan luas 81.167 Ha atau 46,87% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data geologi tata lingkungan, wilayah Kabupaten Sikka dikelompokkan menjadi lima satuan morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi dataran rendah, menempati daerah yang cukup luas di sepanjang pantai utara, pantai selatan dan pada alur-alur sungai dengan kemiringan antara 0-5%;
- 2) Satuan morfologi perbukitan halus terdapat di sekitar selatan Kota Maumere dan Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Kangae dengan kemiringan antara 5-15%;
- 3) Satuan morfologi perbukitan sedang berelief sedang terdapat di sepanjang pantai selatan, Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Pemana Besar, sebelah utara perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur dan di Kecamatan Magepanda dengan kemiringan antara 15-30%;
- 4) Satuan morfologi perbukitan kasar tersebar hampir 70% dari luas wilayah Kabupaten Sikka dengan kemiringan antara 30-70%;
- 5) Satuan morfologi pegunungan terdapat di Gunung Egon, Gunung Kimangbuleng, Gunung Jele dan Gunung Dobo dengan kemiringan antara 50-70%.

F. Kondisi Klimatologi

Klimatologi merupakan gambaran dan penjelasan sifat iklim di suatu wilayah yang terdiri dari komponen suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Kondisi suhu udara dan kelembapan udara di wilayah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Kondisi Suhu Udara dan Kelembapan Udara Kabupaten Sikka Tahun 2017

| BULAN | SUHU UDARA (°C) | | | KELEMBABAN UDARA (%) | | |
|-----------|-------------------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| | Maksimal | Minimal | Rata-rata | Maksimal | Minimal | Rata-rata |
| Januari | 31.20 | 24.90 | 27.40 | 95.00 | 77.00 | 85.00 |
| Februari | 28.00 | 22.70 | 24.70 | 94.00 | 73.00 | 76.00 |
| Maret | 31.40 | 24.50 | 27.30 | 90.00 | 71.00 | 84.00 |
| April | 31.10 | 23.60 | 27.10 | 91.00 | 71.00 | 77.00 |
| Mei | 34.20 | 22.30 | 28.10 | 98.00 | 43.00 | 72.00 |
| Juni | 33.60 | 22.00 | 27.20 | 93.00 | 42.00 | 73.00 |
| Juli | 34.20 | 22.60 | 27.20 | 95.00 | 26.00 | 70.00 |
| Agustus | 34.60 | 19.80 | 27.00 | 97.00 | 36.00 | 68.00 |
| September | 35.80 | 20.00 | 27.90 | 93.00 | 34.00 | 67.00 |
| Oktober | 35.60 | 23.00 | 29.20 | 93.00 | 32.00 | 69.00 |
| November | 35.20 | 19.00 | 28.60 | 100.00 | 41.00 | 77.00 |
| Desember | 34.60 | 18.60 | 28.00 | 100.00 | 54.00 | 82.00 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Sikka dikelilingi oleh Laut Flores dan Laut Sawu dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah di kabupaten Sikka memiliki suhu yang cenderung panas. Dari Stasiun Meteorologi Maumere tercatat, suhu tertinggi pada tahun 2017 adalah 35,80°C dan terendah adalah 19°C. Rata-rata suhu berkisar antara 24,70°C dan 29,20°C. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 67%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 85%; Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Februari sebesar 24,70°C. Sedangkan tertinggi pada Bulan Oktober sebesar 29,20°C.

Selanjutnya rata-rata curah hujan dan hari hujan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Kabupaten Sikka per Bulan Tahun 2017

| BULAN | Jumlah Curah Hujan (mm ³) | Jumlah Hari Hujan |
|-----------|---|-------------------|
| Januari | 194.90 | 19 |
| Februari | 193.90 | 20 |
| Maret | 103.10 | 23 |
| April | 174.40 | 10 |
| Mei | 11.30 | 6 |
| Juni | 0.00 | 1 |
| Juli | 2.20 | 2 |
| Agustus | 3.50 | 1 |
| September | 13.50 | 1 |
| Oktober | 9.80 | 4 |
| November | 168.30 | 13 |
| Desember | 92.30 | 12 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum, rata-rata curah hujan selama Tahun 2017 mencapai 80,60 mm³. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juni 2017 sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 194,90 mm³.

Tekanan udara, kecepatan angin dan penyinaran matahari di Kabupaten Sikka secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6.
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| Bulan | Tekanan Udara (mb) | Kecepatan Angin (knot) | Penyinaran Matahari (%) |
|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Januari | 1.009,00 | 3,00 | 47,30 |
| Februari | 1.008,60 | 3,00 | 49,90 |
| Maret | 1.010,10 | 3,00 | 47,30 |
| April | 1.011,00 | 4,00 | 48,90 |
| Mei | 1.012,70 | 6,00 | 99,00 |
| Juni | 1.013,83 | 7,00 | 95,83 |
| Juli | 1.014,10 | 8,00 | 98,39 |
| Agustus | 1.014,20 | 8,00 | 98,00 |
| September | 1.014,13 | 7,00 | 98,00 |
| Oktober | 1.012,00 | 7,00 | 98,00 |
| November | 1.010,00 | 5,00 | 89,00 |
| Desember | 1.010,04 | 5,00 | 86,90 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1.014,20 mb dan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 1.008,60 mb. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Juli dan Agustus sebesar 8,00 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Januari, Februari dan Maret sebesar 3,00 knot. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada Tahun 2017 mencapai 80,92%, terendah pada Bulan Januari dan Maret sebesar 47,30% dan tertinggi pada Bulan Mei sebesar 99%.

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Data penggunaan lahan Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sikka

| No | Guna Lahan | Luas (Km ²) | Luas (Ha) | % |
|--------|---------------------|-------------------------|------------|-------|
| 1 | Batuan Cadas | 3,11 | 310,68 | 0,18 |
| 2 | Hutan | 194,58 | 19.458,31 | 11,24 |
| 3 | Hutan Bakau | 7,04 | 704,27 | 0,41 |
| 4 | Kebun/Perkebunan | 173,24 | 17.323,86 | 10,00 |
| 5 | Pasir Pantai | 1,47 | 147,39 | 0,09 |
| 6 | Pemukiman | 26,85 | 2.684,90 | 1,55 |
| 7 | Rawa | 0,98 | 97,81 | 0,06 |
| 8 | Rumput/Tanah Kosong | 105,29 | 10.529,17 | 6,08 |
| 9 | Sawah Irigasi | 10,07 | 1.007,33 | 0,58 |
| 10 | Sawah Tadah Hujan | 2,39 | 239,20 | 0,14 |
| 11 | Semak/Belukar | 684,76 | 68.476,24 | 39,54 |
| 12 | Sungai/Danau | 4,31 | 430,65 | 0,25 |
| 13 | Tambak | 0,30 | 30,23 | 0,02 |
| 14 | Tegalan/Ladang | 477,98 | 47.798,29 | 27,60 |
| 15 | Lainnya | 39,53 | 3.952,67 | 2,28 |
| Jumlah | | 1.731,91 | 173.191,00 | 97,72 |

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, 2012–2032

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Sikka didominasi oleh semak belukar dengan luas 68.476,24 Ha atau 39,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sikka. Selanjutnya adalah Tegalan/ladang dengan luas 47.798,29 Ha atau 27,60%. Urutan ketiga Hutan, dengan luas 19.458,31 Ha atau 11,24% dari total luas Kabupaten Sikka. Perkebunan rakyat menduduki urutan keempat dengan luas 17.323,86 Ha atau 10,00% dari luas wilayah Kabupaten Sikka.

H. Lahan Kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah sebuah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia, dan biologis sehingga berkurang fungsinya atau bisa juga dikatakan kalau lahan kritis ini tidak mempunyai nilai ekonomis. Lahan ini memiliki sifat tandus dan gundul sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Luas lahan kritis Tahun 2017 di Kabupaten Sikka sebesar 37.829,43 Ha. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara dan pengatur iklim mikro.

2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah kesatuan ekosistem yang dibatasi oleh pemisah topografi yang berfungsi sebagai sistem hidrologi maupun sistem ekologi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, definisi Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Di Kabupaten Sikka terdapat 113 DAS yang terdiri dari 3 DAS besar dan 110 DAS kecil. DAS besar yaitu DAS Nangagete, DAS Riawajo, dan DAS Dagesime Magepanda. DAS Dagesime dan DAS Riawajo telah memiliki Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Terpadu.

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan social ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan pengkajian berbagai fakta dan isu yang berkembang di Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan beberapa potensi pengembangan Kabupaten Sikka, antara lain:

1. Pengembangan Kabupaten Sikka sebagai Pusat Kegiatan antar Kabupaten

- Berdasarkan arahan RTRW Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi (RTRWP), Kabupaten Sikka sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani beberapa kabupaten dalam dan luar Pulau Flores;
- Kota Maumere sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan (WP) II yaitu Pulau Flores. Wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, dengan kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perikanan, perindustrian, perkebunan dan pariwisata;
- Dari Wilayah Pusat Pengembangan II ini, Kabupaten Sikka sebagai kabupaten dengan kontribusi PDRB terbesar yakni pada tahun 2017 ini memiliki kontribusi PDRB sebesar Rp3.009.530.000,-
- Kabupaten Sikka berpotensi atau berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi NTT dan luar Provinsi. Didukung dengan sektor industri dan sektor jasa adalah salah satu sektor basis di Kabupaten Sikka;
- Kabupaten Sikka berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dimana kecenderungan hasil produksi di ekspor ke luar daerah melalui Kabupaten Sikka, seperti hasil perkebunan dan perikanan;
- Permukiman perdesaan di Kabupaten Sikka memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan permukiman secara berhirarki mulai dari pusat pelayanan antar desa sampai pusat pelayanan setiap dusun atau kelompok permukiman. Untuk meningkatkan peran pusat permukiman perdesaan, maka pusat pelayanan perdesaan dihubungkan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat.

2. Pengembangan Prasarana Wilayah

- Kabupaten Sikka berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan luar Provinsi.
- Kabupaten Sikka memiliki Bandara Frans Seda dengan hirarki sebagai Bandara Pengumpan, dengan jenis penggunaan adalah penerbangan domestik, dan dengan hirarki sebagai Bandara Pengumpul Skala Tersier (IV/S). Bandara Frans Seda merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi yang melayani penumpang dengan lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
- Kabupaten Sikka memiliki Pelabuhan Laut L. Say Maumere yang berdasarkan tatanan kepelabuhanan sebagai Pelabuhan Pengumpul untuk melayani beberapa kabupaten di Pulau Flores, kabupaten dalam Provinsi NTT dan luar Provinsi.
- Kabupaten Sikka memiliki transportasi darat yang melayani pergerakan lintas Flores dari Kabupaten Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Kondisi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Sikka sebagian besar sudah diaspal dan umumnya berkondisi baik.
- Kabupaten Sikka memiliki sekitar 43 mata air sebagai sumber air tanah bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis batuan yang dimiliki seperti batuan gunung api kuarter dan aluvial, secara umum menunjukkan potensi air tanah yang baik. Adanya pengembangan pengolahan industri air kemasan, sebagai potensi untuk pemanfaatan sumber daya air yang ada. Air permukaan dilayani oleh bendungan, aliran sungai termasuk dalam Wilayah Sungai Flores. Jaringan air baku untuk pertanian di Kabupaten Sikka terdiri atas Daerah Irigasi (DI) Kolisia dan DI Magepanda yang menjadi kewenangan Provinsi, Sedangkan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka

meliputi DI Nebe, Pruda, Kilawair, Wairhewat, Henga, Waigete, Ahuwair, Wodong, Wolowiro, Detu Janga, Pemo pombo, Fata, Gute, Masekea, Kolisoro, Wolokoli, Tendaki, Koro, Tilang, Wairkeang, Nangablo, Delang, Masebewa, Detu Mage, Ijura, Kolisia Aeliba, Aeroa, Puunaka, Nangapalu, Wae Rita, Hebing, Nangarasong, Umatawu, Bhiri Sedo, Lowo Mera, Kiria, Aekana, Kojablo, Lambalena, Ijuwatublow, Dagelongga, Kaliwajo.

- Kabupaten Sikka memiliki sistem telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit dan energi kelistrikan yang telah menjangkau ke wilayah pedesaan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maumere. Gardu Induk (GI) Maumere di Kabupaten Sikka dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV.

3. Kawasan Lindung

- Kabupaten Sikka memiliki kawasan Hutan Lindung sekitar 38,877.28 Ha atau sekitar 5.95% dari total luasan kawasan hutan lindung di Provinsi NTT sekitar 652,915.78 Ha. Kawasan Hutan lindung ini berfungsi menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah dan menahan tanah dari laju erosi.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya berupa kawasan resapan air (*catchment area*), berdasarkan setempat akuifer produktif (aliran melalui ruang antar butir), yaitu akuifer yang tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, maka air tanah dekat muka tanah. Pada wilayah Kecamatan Talibura, Waigete, Nita dan sebagian kecil Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya.
- Kabupaten Sikka memiliki pengamanan terhadap kawasan sekitar mata air akan memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan kawasan sekitar waduk/danau akan menjaga kualitas dan kuantitas air waduk/danau yang potensial untuk sumber air irigasi, sumber air bersih, pembangkit tenaga listrik serta pariwisata/public space. Pengamanan sekitar sempadan sungai, pantai dan hutan bakau di sepanjang pantai akan mengurangi erosi dan abrasi serta mencegah intrusi air laut.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yaitu: Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar, Kawasan Taman Wisata Alam Egon Illimedo, dan Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere. Kawasan ini menunjang untuk pengembangan sektor pariwisata yang bersifat ekowisata.
- Kabupaten Sikka memiliki kawasan lindung lainnya berupa kawasan terumbu Karang yang terdapat di perairan Laut Flores, Pantai Teluk Maumere di bagian utara dari Kabupaten Sikka sebagai potensi pemanfaatan kegiatan untuk penelitian, pendidikan, dan ekowisata dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan alam.

4. Kawasan Budidaya

- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Hutan Produksi (HP) berupa HP Tetap dengan luas sebesar 1,210.73 Ha atau 0,47% dari rata-rata luasan di Provinsi NTT, HP Terbatas dengan luas sebesar 6,500.61 Ha atau 3.14% dari rata-rata luasan di Provinsi NTT. Hutan Produksi ini dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan hutan yang bernilai ekonomis.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pertanian dengan potensi komoditas unggulan berupa tanaman padi sawah dan padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang hijau, buah-buahan dan sayuran tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Produksi padi dan palawija Tahun 2017 sebesar 175,24 ton. Sedangkan produksi buah dan sayur Tahun 2017 sebesar 73.803,76 ton.
- Kawasan Perkebunan di Kabupaten Sikka memiliki komoditas unggulan berupa tanaman kelapa, kakao dan jambu mete yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Produksi tanaman perkebunan Tahun 2017 sebesar 29.858, 25 ton.
- Kabupaten Sikka memiliki sentra-sentra komoditas peternakan sapi dan kuda di hampir seluruh wilayah kecamatan. Ternak kerbau pengembangannya terdapat di Kecamatan Magepanda. Ternak babi, kambing dan ayam bukan ras pengembangannya terdapat di seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan ayam ras pengembangannya terdapat di

Kecamatan Nita, Kangae, Waigete, Magepanda, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle, Koting, Mego dan Lela.

- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Perikanan dengan potensi ketersediaan ikan dan non ikan di perairan laut di bagian utara Laut Flores di pesisir pantai bagian utara, seperti Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, Talibura, Magepanda, dan di pesisir pantai bagian selatan Laut Sawu, seperti Kecamatan Waiblama, Waigete, Mapitara, Doreng, Bola, Lela, Mego dan Paga. Produksi ikan pada Tahun 2017 sebesar 16.972 ton.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pertambangan dengan jenis mineral dan batu bara. Pertambangan dengan masing-masing jenis mineral bahan galian terdapat antara lain: potensi Tras di Kecamatan Nita, potensi Sirtu di Kecamatan Paga, Lela, Talibura, Waigete, Kewapante, Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle dan Nita. Potensi Lempung di Kecamatan Nita, Alok, Alok Barat, Alok Timur dan Nelle. Potensi Batu Gamping di Kecamatan Alok, Alok Barat, Alok Timur, Nelle, Waigete, Talibura, Bola, Lela dan Paga. Potensi Andesit di Kecamatan Waigete dan Paga. Potensi Belerang di Kecamatan Mapitara dan Palue. Potensi Zeolit di Kecamatan Lela dan Paga. Potensi Dasit di Kecamatan Lela. Potensi Toseki di Kecamatan Paga.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Industri dengan potensi industri kain, industri meubel, industri makanan dan minuman, industri kerajinan untuk souvenir, industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan mete, industri pengolahan ikan dan industri pengolah daging.
- Kabupaten Sikka memiliki Kawasan Pariwisata Budaya yang meliputi objek wisata Museum Bikon Blewut di Kecamatan Nita, Nua Bharaka Lekebai di Kecamatan Mego, Jong Dobo di Kecamatan Kewapante, Makam Purbakala Nuabari di Kecamatan Paga, Tapak Kaki Raksasa di Kecamatan Nita, Sanggar Budaya Doka Tawatana di Kecamatan Bola, Sanggar Budaya Bliran Sina di Kecamatan Hewokloang, dan Sanggar Budaya Lepo Lorun di Kecamatan Nita.
Kawasan Wisata Rohani meliputi objek wisata: Gereja tua Sikka dan Wisung Fatima Lela di Kecamatan Lela, Patung Maria Bunda Segala Bangsa dan Bukit Golgota Nilo di Kecamatan Nita, Tempat Ziarah Watusoking dan Tempat Ziarah Dian Desa di Kecamatan Waigete, Gua Fatima Hokor di Kecamatan Bola, Replika Betlehem di Kecamatan Nelle, Patung Kristus Raja di Kecamatan Alok dan Tempat Ziarah dan Rumah Retret St. Nabi Elia di Kecamatan Paga.
Kawasan Wisata Bahari/Pantai meliputi objek wisata: Taman Laut Teluk Maumere, Pasir Putih Nenbura di Kecamatan Doreng, Pantai Koka di Kecamatan Paga, Tanjung Kajuwulu dan Tanjung Nusa Kutu di Kecamatan Magepanda, dan Pasir Putih Pulau Pangabatang di Kecamatan Alok Timur.
Kawasan Wisata Alam meliputi obyek wisata: Air Panas Blidit di Kecamatan Waigete, Penyulingan Uap Panas Bumi di Kecamatan Palue, Air Terjun Murusobe di Kecamatan Tanawawo, Danau Rano di Kecamatan Nita, Air Terjun Watu Wa di Kecamatan Magepanda, dan Bendungan Napung Gete di Kecamatan Waiblama.
- Kabupaten Sikka memiliki pola pengembangan permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah, mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing untuk mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.

5. Kawasan Strategis

- Potensi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yakni Kawasan Kota Maumere dan Kecamatan potensial pengembangan sektor ekonomi pertanian, peternakan, perkebunan perikanan, pariwisata, pertambangan dan industri.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup perairan Laut Flores dan Laut Sawu di Kabupaten Sikka.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan pariwisata alam dan pariwisata budaya.

J. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Sikka termasuk kabupaten rawan bencana. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalam RTRWN, wilayah Kabupaten Sikka termasuk dalam wilayah sebaran gunung berapi di Indonesia. Selain itu wilayah Kabupaten Sikka juga termasuk wilayah episenter gempa di Indonesia selama Tahun 1990-2000. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Sikka, wilayah Kabupaten Sikka rawan terhadap bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, angin topan, gempa dan gerakan tanah, letusan gunung berapi, dan tsunami.

Berdasarkan hasil kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, diidentifikasi beberapa jenis bencana yang dapat mengancam Kabupaten Sikka, yakni :

1. Risiko Bencana Banjir
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko bencana banjir berada di bagian tengah dan sebagian pantai utara Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur dan Kewapante.
2. Risiko Cuaca Ekstrem
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko cuaca ekstrem berada di wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Sikka, yaitu berada di wilayah Kecamatan Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kewapante, Paga, Tanawawo, Mego, Doreng dan Mapitara.
3. Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pantai
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gelombang ekstrem dan abrasi pantai berada di pantai selatan dan utara Kabupaten Sikka, dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Kangae, Kewapante, Doreng, Bola, Lela dan Paga.
4. Risiko Letusan Gunung Api
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko letusan gunung api berada di sekitar Gunung Rokatenda dan Gunung Egon. Di wilayah sekitar Gunung Egon risiko bencana berada di tingkat rendah sampai tinggi. Wilayah yang terkena risiko ini berada di Kecamatan Mapitara dan Waigete. Sedangkan di wilayah sekitar Gunung Rokatenda risiko bencana pada tingkat sedang sampai tinggi, dan berada di Kecamatan Palue.
5. Risiko Tanah Longsor
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tanah longsor tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Kecamatan dengan risiko tinggi di bagian barat berada di Kecamatan Magepanda, Mego, Tanawawo dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur berada di Kecamatan Mapitara, Bola, Waigete dan Waiblama.
6. Risiko Tsunami
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko tsunami berada di pantai utara dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan Magepanda, Alok Barat, Alok, Alok Timur, Kangae, Kewapante, Waigete, dan Talibura.
7. Risiko Gempa Bumi
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko gempa bumi di wilayah ini dengan risiko rendah sampai sedang. Di bagian barat terlihat sebagian mempunyai tingkat risiko tinggi. Wilayah ini adalah Kecamatan Magepanda, Nita, Alok Barat, dan Alok.
8. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kebakaran hutan dan lahan berada di hampir seluruh wilayah kecamatan dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tanawawo, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Sedangkan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama.

9. Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko epidemi dan wabah penyakit berada pada tingkat rendah.
10. Risiko Kekeringan
Wilayah Kabupaten Sikka yang berisiko kekeringan berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Di bagian barat terletak di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego dan Alok Barat. Dan di bagian timur terletak di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama. Sedangkan di Kecamatan Alok Timur memperlihatkan tingkat rendah.

2.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu yang menurut hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Pertambahan penduduk sangat dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Mego | 12.237 | 2.339 | 12.428 | 12.514 | 12.592 |
| Tanawawo | 8.891 | 8.942 | 8.984 | 16.111 | 9.053 |
| Lela | 2.103 | 2.238 | 2.365 | 9.021 | 12.590 |
| Bola | 11.422 | 11.618 | 11.805 | 12.477 | 12.169 |
| Doreng | 11.729 | 11.892 | 12.043 | 11.987 | 12.335 |
| Mapitara | 6.756 | 6.900 | 7.040 | 12.192 | 7.314 |
| Talibura | 20.872 | 20.977 | 21.060 | 7.177 | 21.198 |
| Waigete | 22.647 | 22.766 | 22.862 | 21.136 | 23.019 |
| Paga | 15.914 | 15.993 | 16.056 | 22.947 | 16.159 |
| Waiblama | 7.186 | 7.223 | 7.252 | 7.277 | 7.299 |
| Kewapante | 13.721 | 13.788 | 13.841 | 13.887 | 13.927 |
| Hewokloang | 8.523 | 8.603 | 8.676 | 8.744 | 8.808 |
| Kangae | 16.746 | 16.837 | 16.910 | 16.976 | 17.033 |
| Palue | 9.900 | 10.001 | 10.089 | 10.175 | 10.256 |
| Koting | 6.587 | 6.651 | 6.711 | 6.766 | 6.819 |
| Nelle | 6.137 | 6.245 | 6.347 | 6.447 | 6.547 |
| Nita | 21.729 | 21.863 | 21.976 | 22.077 | 22.168 |
| Magepanda | 11.977 | 12.115 | 12.241 | 12.364 | 12.481 |
| Alok | 33.829 | 34.030 | 34.195 | 34.349 | 34.482 |
| Alok Barat | 17.153 | 17.239 | 17.309 | 17.371 | 17.424 |
| Alok Timur | 32.949 | 33.151 | 33.319 | 33.482 | 33.619 |
| Jumlah | 309.008 | 311.411 | 313.509 | 315.477 | 317.292 |

Sumber: Kompilasi Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013 sebesar 309.008 jiwa, Tahun 2014 naik menjadi 311.411 jiwa, Tahun 2015 naik menjadi 313.509 jiwa, Tahun 2016 naik menjadi 315.477 jiwa dan Tahun 2017 menjadi 317.292 jiwa.

Pada Tahun 2017 jumlah penduduk menurut kecamatan, paling banyak berada di Kecamatan Alok sebesar 34.482 jiwa atau 10,87%, selanjutnya di Kecamatan Alok Timur sebesar 33.619 jiwa atau 10,60%. Sementara itu, jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Nelle sebesar 6.547 jiwa atau 2,06%.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika

kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Sex ratio Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah | Rasio Jenis Kelamin |
|------------|---------------|-----------|---------|---------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | | |
| Paga | 7.528 | 8.631 | 16.159 | 0,87 |
| Mego | 6.030 | 6.562 | 12.592 | 0,92 |
| Tanawawo | 4.227 | 4.826 | 9.053 | 0,88 |
| Lela | 5.759 | 6.831 | 12.590 | 0,84 |
| Bola | 5.358 | 6.811 | 12.169 | 0,79 |
| Doreng | 5.895 | 6.440 | 12.335 | 0,92 |
| Mapitara | 3.498 | 3.816 | 7.314 | 0,92 |
| Talibura | 10.154 | 11.044 | 21.198 | 0,92 |
| Waigete | 10.994 | 12.025 | 23.019 | 0,91 |
| Waiblama | 3.472 | 3.827 | 7.299 | 0,91 |
| Kewapante | 6.402 | 7.525 | 13.927 | 0,85 |
| Hewokloang | 4.123 | 4.685 | 8.808 | 0,88 |
| Kangae | 7.758 | 9.275 | 17.033 | 0,84 |
| Palue | 4.367 | 5.889 | 10.256 | 0,74 |
| Koting | 3.183 | 3.636 | 6.819 | 0,88 |
| Nelle | 3.011 | 3.536 | 6.547 | 0,85 |
| Nita | 10.683 | 11.485 | 22.168 | 0,93 |
| Magepanda | 6.067 | 6.414 | 12.481 | 0,95 |
| Alok | 16.862 | 17.620 | 34.482 | 0,96 |
| Alok Barat | 8.609 | 8.815 | 17.424 | 0,98 |
| Alok Timur | 16.043 | 17.576 | 33.619 | 0,91 |
| Jumlah | 150.023 | 167.269 | 317.292 | 0,90 |

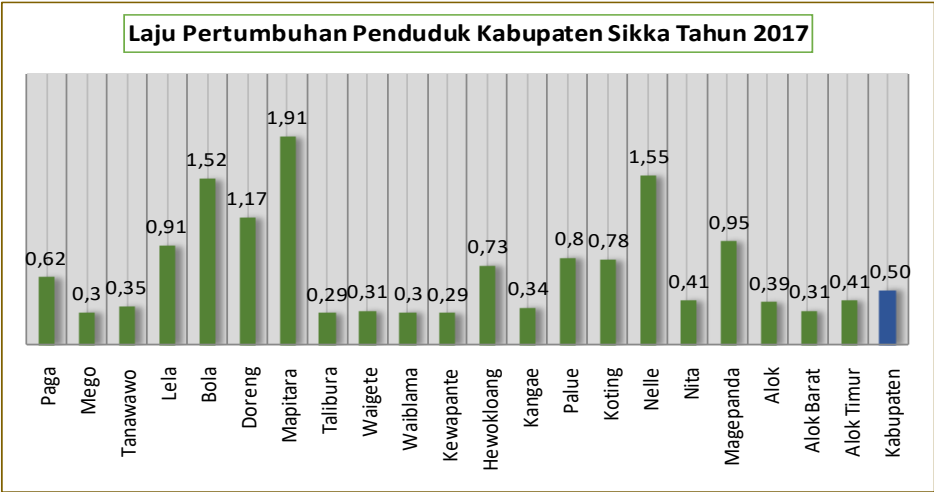
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa *sex ratio* Kabupaten Sikka adalah sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* menurut kecamatan, tertinggi terdapat di Kecamatan Alok Barat sebesar 0,98. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah terdapat di Kecamatan Palue sebesar 0,74.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah setiap tahunnya. Laju Pertumbuhan Penduduk digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk dalam suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sikka sebesar 0,50. Dari 21 Kecamatan ada 10 kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya berada diatas tingkat pertumbuhan kabupaten yaitu: Kecamatan Paga, Magepanda, Hewokloang, Koting, Palue, Lela, Doreng, Bola, Nelle, dan Mapitara. Sedangkan 11 Kecamatan lainnya tingkat pertumbuhannya dibawah tingkat pertumbuhan kabupaten.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas wilayah. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10.
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk per km ² |
|------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Paga | 82,85 | 16.159 | 195 |
| Mego | 111,26 | 12.592 | 113 |
| Tanawawo | 79,78 | 9.053 | 113 |
| Lela | 31,33 | 12.590 | 402 |
| Bola | 56,83 | 12.169 | 214 |
| Doreng | 30,41 | 12.335 | 406 |
| Mapitara | 81,02 | 7.314 | 90 |
| Talibura | 260,11 | 21.198 | 81 |
| Waigete | 217,65 | 23.019 | 106 |
| Waiblama | 144,36 | 7.299 | 51 |
| Kewapante | 24,14 | 13.927 | 577 |
| Hewokloang | 17,58 | 8.808 | 501 |
| Kangae | 38,43 | 17.033 | 443 |
| Palue | 41,00 | 10.256 | 250 |
| Koting | 23,56 | 6.819 | 289 |
| Nelle | 14,65 | 6.547 | 447 |
| Nita | 141,07 | 22.168 | 157 |
| Magepanda | 166,15 | 12.481 | 75 |
| Alok | 14,64 | 34.482 | 2.355 |

| Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk per km ² |
|------------|---------------------------------|------------------------|--|
| Alok Barat | 62,75 | 17.424 | 278 |
| Alok Timur | 92,34 | 33.619 | 364 |
| Jumlah | 1.731,91 | 317.292 | 183 |

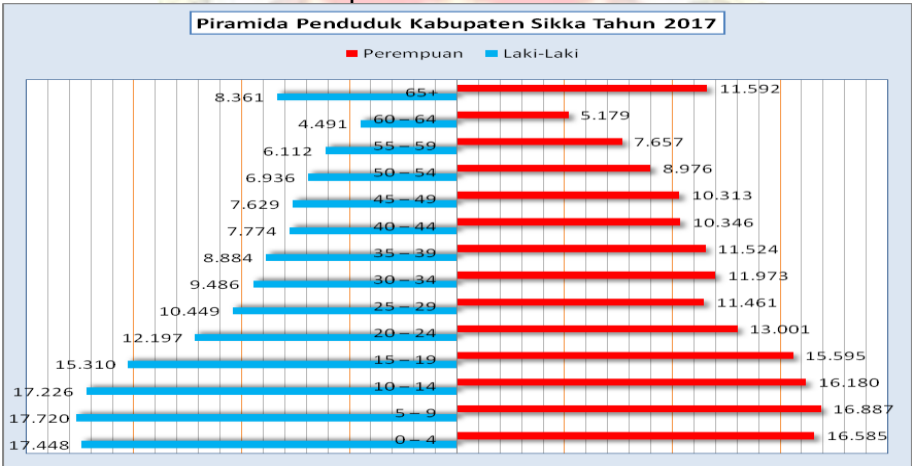
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2017 kepadatan penduduk di Kabupaten Sikka yaitu 183 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Alok sebanyak 2.355 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Waiblama sebanyak 51 jiwa/km².

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk adalah perbandingan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan ekonomi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Sikka Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan, jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 5-9 tahun diikuti 0-4 tahun dan 10-14 tahun. Jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 60-64 tahun. Usia produktif di Kabupaten Sikka pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 195.293 jiwa atau 61,55% dan jumlah penduduk usia non produktif sebanyak 121.999 jiwa atau 38,45%. Dari uraian diatas dapat diketahui rasio ketergantungan Tahun 2017 sebesar 62,47%.

B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional), yang terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar.

Migrasi masuk dan keluar diklasifikasi ke dalam dua bagian yaitu penduduk yang masuk dan keluar di dalam wilayah Provinsi NTT dan penduduk yang masuk dan keluar dari provinsi lain. Sementara yang pindah keluar negeri diklasifikasikan dengan membawa Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN) dan Non SKPLN. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| No | Jenis Migrasi | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|----------------|--------|------|------|------|-------|-------|
| 1 | Migrasi Masuk | Jiwa | - | - | 225 | 383 | 1.018 |
| 2 | Migrasi Keluar | Jiwa | - | - | 770 | 1.128 | 1.129 |
| Jumlah | | | - | - | 995 | 1.511 | 2.147 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa migrasi keluar Kabupaten Sikka lebih banyak dibandingkan dengan migrasi masuk. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya perhatian untuk meningkatkan daya tarik Kabupaten Sikka, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun dari aspek kenyamanan hunian.

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kabupaten Sikka. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sektor primer berupa pemanfaatan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian; (2) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; serta (3) Sektor tersier berupa jasa. Jumlah penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---------------|---------------|----------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 39.729 | 30.544 | 70.273 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1.211 | 482 | 1.693 |
| Industri Pengolahan | 6.022 | 14.635 | 20.657 |
| Listrik, Gas, dan Air | 601 | - | 601 |
| Bangunan | 6.550 | - | 6.550 |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel | 6.824 | 8.288 | 15.112 |
| Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 8.759 | 209 | 8.968 |
| Kuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan | 1.315 | 930 | 2.245 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | 6.956 | 10.692 | 17.648 |
| Jumlah | 77.967 | 65.780 | 143.747 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa lapangan pekerjaan utama yang digeluti terbanyak pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni 48,89% dari jumlah penduduk usia produktif. Urutan kedua terbanyak pada sektor industri pengolahan yakni 14,37% dan yang paling sedikit pada sektor listrik, gas dan air sebesar 0,42%.

D. Penduduk Menurut Agama

Komposisi penduduk menurut agama digunakan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kabupaten Sikka yaitu Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut per Kecamatan
di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
|------------|--------|-----------|---------|-------|-------|---------|
| Paga | 507 | - | 16.727 | 2 | - | - |
| Tanawawo | - | - | 9.402 | - | - | - |
| Mego | - | - | 13.039 | - | - | - |
| Lela | - | - | 13.003 | 2 | - | - |
| Bola | - | 2 | 12.479 | 2 | - | - |
| Doreng | - | 6 | 12.615 | - | - | - |
| Mapitara | - | - | 7.584 | - | - | - |
| Talibura | 2.691 | - | 18.334 | 2 | - | - |
| Waiblama | - | - | 7.578 | - | - | - |
| Waigete | - | - | 23.916 | 3 | - | - |
| Kewapante | 1.434 | - | 12.523 | 8 | - | - |
| Hewokloang | - | - | 9.068 | - | - | - |
| Kangae | - | 69 | 17.601 | 2 | - | - |
| Nelle | - | - | 6.661 | 2 | - | - |
| Koting | - | - | 6.890 | - | - | - |
| Palue | - | - | 10.532 | - | - | - |
| Nita | - | - | 23.682 | 3 | - | - |
| Magepanda | 775 | - | 11.832 | 2 | - | - |
| Alok | 10.069 | 417 | 21.555 | 77 | 22 | - |
| Alok Barat | 5.311 | 419 | 10.013 | 73 | 14 | - |
| Alok Timur | 8.123 | 2.100 | 20.019 | 81 | 23 | - |
| Jumlah | 28.905 | 3.014 | 285.055 | 258 | 59 | - |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Sikka berturut-turut dari yang terbanyak sebagai berikut: Katolik sebanyak 86,67%, Islam sebanyak 11,95%, Kristen sebanyak 1,22%, Hindu sebanyak 0,11% dan Budha sebanyak 0,05%. Pada 14 kecamatan memiliki penduduk dengan agama yang dianut beragam. Sedangkan pada 7 kecamatan hanya beragama Katolik. Walau adanya keberagaman agama di Kabupaten Sikka, akan tetapi kerukunan antar umat beragama senantiasa terjaga.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan ekonomi dari masyarakat dalam wilayah domestik suatu daerah. PDRB terdiri dari : (1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan (2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB ADHK dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 PDRB ADHB sebesar Rp2.983.397.000.000,- meningkat menjadi Rp3.294.800.000.000,- pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp3.605.730.000.000,-. Pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp3.594.820.000.000,- dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp4.319.900.000.000,-. Jika dibandingkan dengan PDRB ADHB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar Rp4.631.050.000.000,-, Kabupaten Ende sebesar Rp5.267.880.000.000,-, dan Kota Kupang sebesar Rp20.936.750.000.000,- maka PDRB ADHB Tahun 2017 Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

Dari PDRB ADHB ini kita dapat mengetahui dan menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor ekonomi yang dapat dirinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14.
Distribusi PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

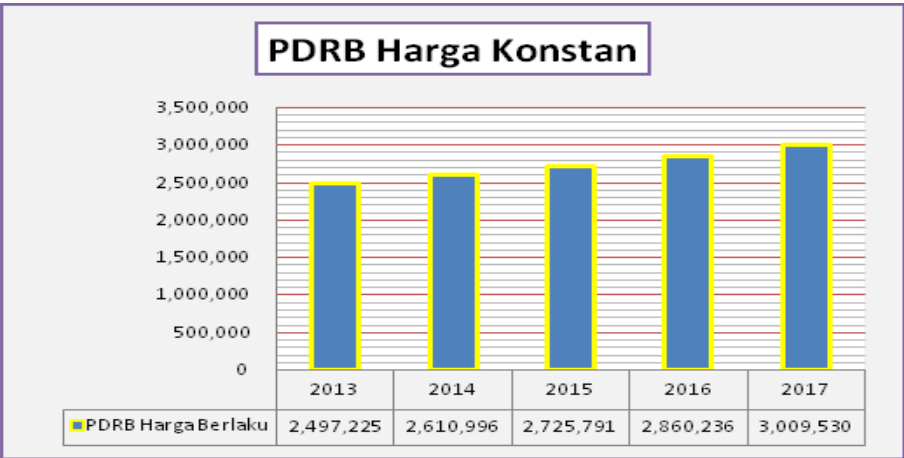
| Lapangan Usaha | Kontribusi | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata - Rata |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 36,19 | 36,35 | 35,60 | 35,37 | 35,88 |
| Pertambangan dan Penggalian | 1,35 | 1,34 | 1,29 | 1,21 | 1,30 |
| Industri Pengolahan | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 1,71 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| Konstruksi | 5,09 | 5,11 | 5,23 | 5,13 | 5,14 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,04 | 10,31 | 10,61 | 10,48 | 10,36 |
| Transportasi dan Pergudangan | 6,00 | 6,00 | 6,18 | 6,21 | 6,10 |
| Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,45 | 6,18 | 6,06 | 5,97 | 6,17 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,72 | 3,63 | 3,56 | 3,79 | 3,68 |
| Real Estate | 2,35 | 2,32 | 2,29 | 2,24 | 2,30 |
| Jasa Perusahaan | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 12,19 | 12,14 | 12,45 | 12,58 | 12,34 |
| Jasa Pendidikan | 10,19 | 10,25 | 10,35 | 10,62 | 10,35 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,04 | 2,01 | 2,02 | 2,05 | 2,03 |
| Jasa Lainnya | 1,52 | 1,48 | 1,46 | 1,43 | 1,47 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar masih dinominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata per tahun sebesar 35.88%, diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial dengan rata-rata per tahun sebesar 12.34%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan rata-rata per tahun sebesar 10.36% dan sektor Jasa Pendidikan dengan rata-rata per tahun sebesar 10.35%.

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



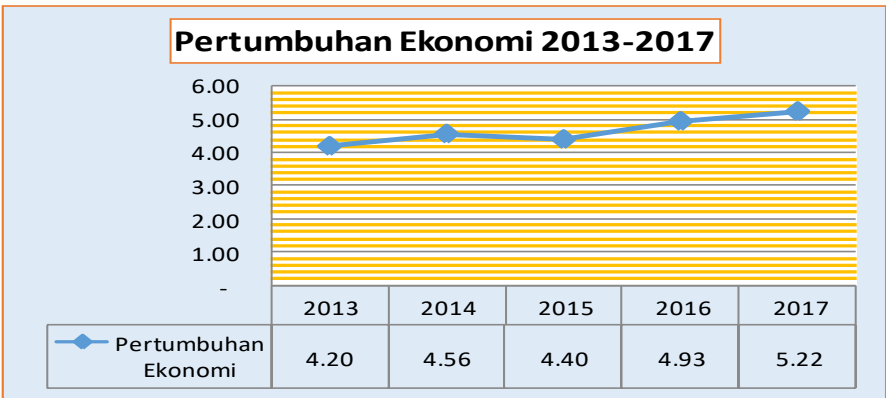
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 PDRB ADHK sebesar Rp2.497.225.000.000,- meningkat menjadi Rp2.610.996.000.000,- pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 meningkat menjadi Rp2.725.791.000.000,-. Pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp2.860.236.000.000,- dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi Rp3.009.530.000.000,-.

Jika dibandingkan dengan PDRB ADHK Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar Rp3.212.690.000.000,-, Kabupaten Ende sebesar Rp3.747.000.000.000,-, dan Kota Kupang sebesar Rp14.770.000.000.000,- maka PDRB ADHK Tahun 2017 Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

Dari gambaran peningkatan PDRB ADHK tersebut diketahui tingkat pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 4,56%, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 4,40%, dan Tahun 2016 naik menjadi sebesar 4,93% dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 5,22%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 di Kabupaten Ende sebesar 5,04%, Kabupaten Flores Timur sebesar 5,16%, Kota Kupang sebesar 6,83% dan Provinsi NTT sebesar 5,20% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kota Kupang.

Selanjutnya pertumbuhan PDRB dari masing-masing sektor sebagai sebuah indikator untuk menilai pertumbuhan sektor–sektor potensial, cepat maju dan cepat tumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15.
Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017

| Lapangan Usaha | Pertumbuhan | | | | |
|---|-------------|-------|-------|------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Rata - Rata |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 3,47 | 3,53 | 3,46 | 5,07 | 3,88 |
| Pertambangan dan Penggalian | 3,98 | 4,02 | 4,16 | 6,18 | 4,59 |
| Industri Pengolahan | 3,42 | 3,60 | 3,77 | 5,81 | 4,15 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 22,62 | 15,85 | 14,57 | 0,72 | 13,44 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,65 | 3,69 | 1,85 | 1,90 | 2,77 |
| Konstruksi | 5,83 | 5,30 | 6,59 | 3,94 | 5,42 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 6,24 | 6,42 | 6,66 | 4,52 | 5,96 |
| Transportasi dan Pergudangan | 2,48 | 3,57 | 5,57 | 6,53 | 4,54 |
| Penyediaan Akomodasi Makan Minum | 7,09 | 5,47 | 6,96 | 8,01 | 6,88 |
| Informasi dan Komunikasi | 6,49 | 6,59 | 6,62 | 6,78 | 6,62 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,44 | 3,87 | 6,20 | 6,71 | 6,06 |
| Real Estate | 1,75 | 1,92 | 2,35 | 3,57 | 2,40 |
| Jasa Perusahaan | 4,96 | 4,43 | 3,04 | 2,40 | 3,71 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 4,33 | 5,27 | 5,19 | 4,70 | 4,87 |
| Jasa Pendidikan | 6,97 | 4,10 | 5,18 | 5,30 | 5,39 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,52 | 2,35 | 5,27 | 5,87 | 4,00 |
| Jasa Lainnya | 1,90 | 2,60 | 3,85 | 5,19 | 3,39 |

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa sektor yang pertumbuhannya terus meningkat yaitu: pertambangan dan galian dengan rata-rata 4,59%, industri pengolahan dengan rata-rata 4,15%, transportasi dan pergudangan dengan rata-rata 4,54%, informasi dan komunikasi dengan rata-rata 6,62%, real estate dengan rata-rata 2,40%, dan jasa lainnya dengan rata-rata 3,39%. Sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Sejalan dengan paradigma baru pembangunan ekonomi daerah maka perlu ditetapkan sektor-sektor ekonomi yang strategis dalam peningkatan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan mengetahui konstribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor kita dapat menentukan sektor unggulan daerah berdasarkan Tipologi Klassen seperti dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16.
Penetapan Sektor Unggulan Daerah Menurut Tipologi Klassen

| <div>Kontribusi PDRB (y) Laju Pertumbuhan (r)</div> | yik > yi | yik < yi |
|--|---|---|
| rik > ri | Sektor Maju dan Cepat Tumbuh 1. Pertanian 2. Listrik dan Gas 3. Air,sampah dan Limbah 4. Jasa Pendidikan | Sektor Maju Tapi tertekan 1. Perdagangan besar,Eceran,reparasi mobil dan motor 2. Jasa perusahaan |
| rik < ri | Sektor Potensial dan Bisa Berkembang 1. Industri Pengolahan 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Akomodasi dan Makan Minum | Sektor Relatif Tertinggal 1. Pertambangan dan Galian 2. Konstruksi 3. Informasi dan Komunikasi 4. Keungan dan Asuransi 5. Real Estate 6. Administrasi pemerintah 7. Jasa Kesehatan dan Sosial 8. Jasa lainnya |

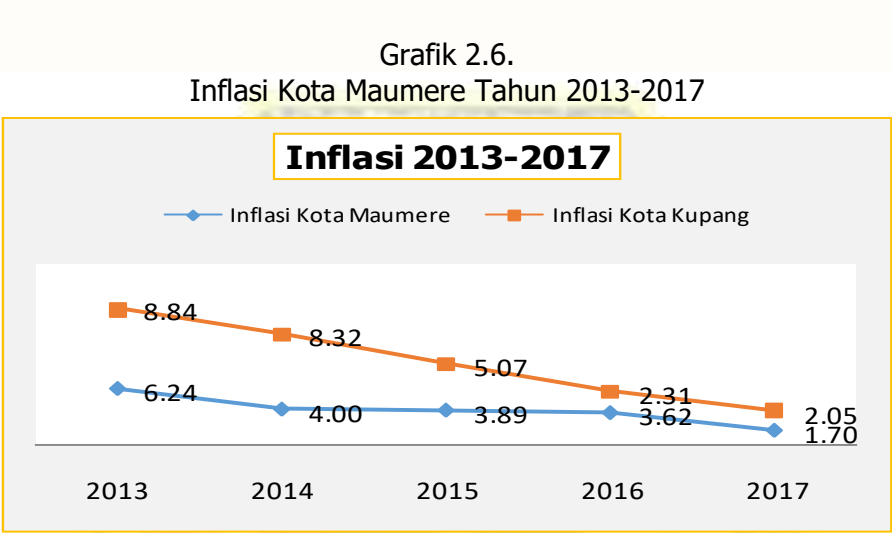
Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan tipologi klassen diatas dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor listrik dan gas, sektor air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta sektor jasa pendidikan dapat diandalkan dalam pengembangan ekonomi daerah Kabupaten Sikka karena berada pada kuadran sektor yang cepat maju dan cepat tumbuh.

Disamping itu, sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi makan minum, dapat juga dikembangkan dalam ekonomi lokal Kabupaten Sikka karena berada pada kuadran potensial dan bisa berkembang.

B. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

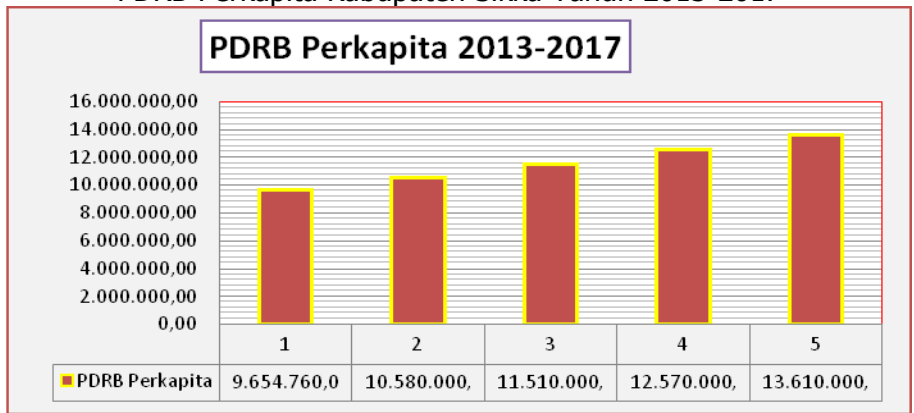
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2013-2017 terus terkendali. Pada Tahun 2013 laju inflasi kota Maumere terkendali sebesar 6,24, Tahun 2014 sebesar 4,00, Tahun 2015 sebesar 3,89, Tahun 2016 sebesar 3,62 dan pada Tahun 2017 terkendali sebesar 1,70.

Jika dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2017 di Kota Kupang sebesar 2,05 maka laju inflasi kota Maumere lebih terkendali. Dan jika dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2017 tingkat Nasional sebesar 3,61 maka laju inflasi kota Maumere pun lebih terkendali. Terhadap laju inflasi kota Maumere yang terus terkendali dengan kenaikan harga berada dibawah angka 10% tergolong inflasi ringan.

C. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung berdasarkan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7.
PDRB Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

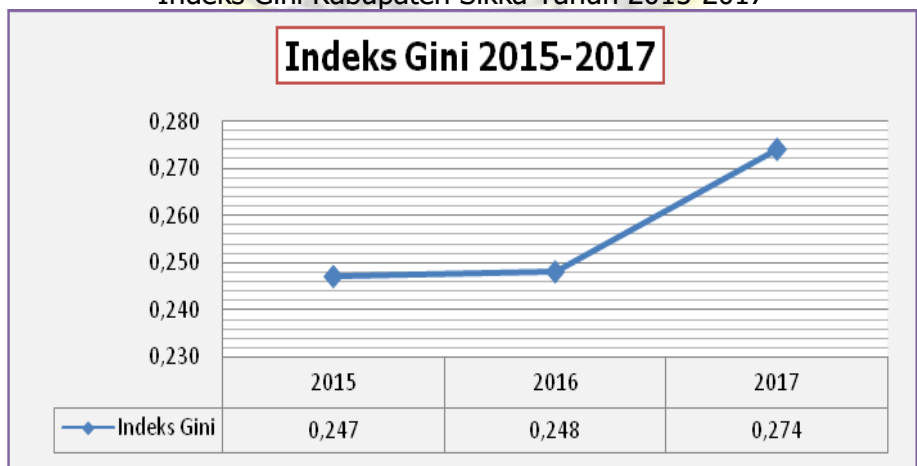
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Perkapita ADHB di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 PDRB Perkapita ADHB di Kabupaten Sikka sebesar Rp9.654.760,-, Tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp10.580.000,-, Tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp11.510.000,-, Tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp12.570.000,- dan pada Tahun 2017 sebesar Rp13.610.000,-.

Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita ADHB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar Rp18.405.000,-, Kabupaten Ende sebesar Rp19.361.000,-, Provinsi NTT sebesar Rp17.241.600,00, dan PDRB Perkapita ADHB Nasional sebesar Rp38.375.500,- dan target SDGs sebesar Rp8.214.302,- maka PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sikka masih tergolong rendah namun melampaui target SDGs.

D. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien gini <0,3 menunjukan ketimpangan rendah, koefisien gini 0,3≤G≤0,5 menunjukkan ketimpangan sedang dan koefisien gini G>0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks Gini Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.8.
Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017



Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

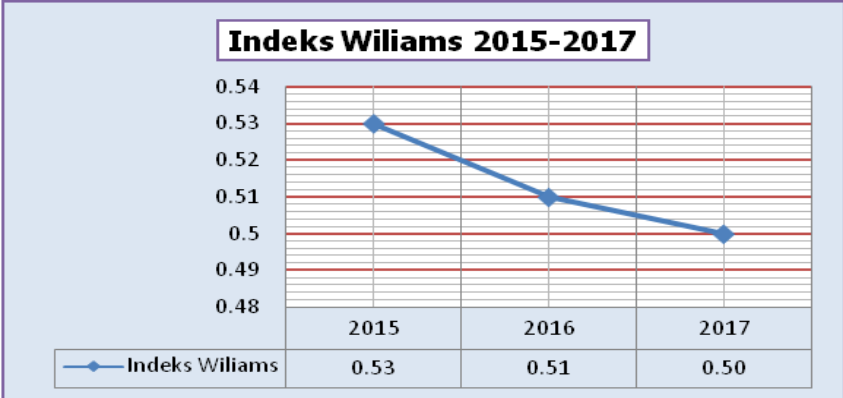
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 terus mengalami ketimpangan yang semakin melebar. Pada Tahun 2015 Indeks Gini Kabupaten Sikka sebesar 0,247, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 0,248, Tahun 2017 naik menjadi sebesar 0,274. Nilai capaian koefisien gini Kabupaten Sikka masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi NTT Tahun 2017

sebesar 0,360 dan Nasional sebesar 0,392 maka Indeks Gini Kabupaten Sikka masih lebih rendah. Namun demikian, tingkat ketimpangannya semakin melebar.

E. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan wilayah)

Indeks Ketimpangan Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB Perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Indeks Ketimpangan Williamson terletak antara 0–1. Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah tidak merata. Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.9.
Indeks Ketimpangan Wiliamson Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017



Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 semakin menyempit. Pada Tahun 2015 Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Sikka sebesar 0,53, Tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,51, dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 0,50. Kondisi Tahun 2017 menunjukkan Kabupaten Sikka berada pada ketimpangan wilayah sedang.

Terhadap Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Sikka yang semakin menyempit maka trend tersebut perlu terus didorong menuju nilai 0.

F. Tipologi Klassen per Kecamatan di Kabupaten Sikka

Analisis Tipologi Klassen per Kecamatan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dari masing-masing kecamatan. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita. Tipologi Klassen per kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.17.
Tipologi Klassen Per Kecamatan Kondisi Tahun 2017

| <div>PDRB Perkapita</div> <div>Laju Pertumbuhan</div> | $y1>y$ | $y1<y$ |
|---|---|--|
| | $r1>r$ | $r1<r$ |
| | Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh : <ul style="list-style-type: none">LelaMagepanda | Daerah Berkembang Cepat: <ul style="list-style-type: none">BolaTaliburaPagaKewapanteHewokloangKangaeAlok Barat |

| | | |
|------|--|---|
| r1<r | Daerah Maju Tapi Tertekan: <ul style="list-style-type: none"> • Koting • Nelle • Alok • Alok Timur • Nita | Daerah Relatif Tertinggal: <ul style="list-style-type: none"> • Mego • Tanawawo • Waigete • Palue • Doreng • Mapitara • Waiblama |
|------|--|---|

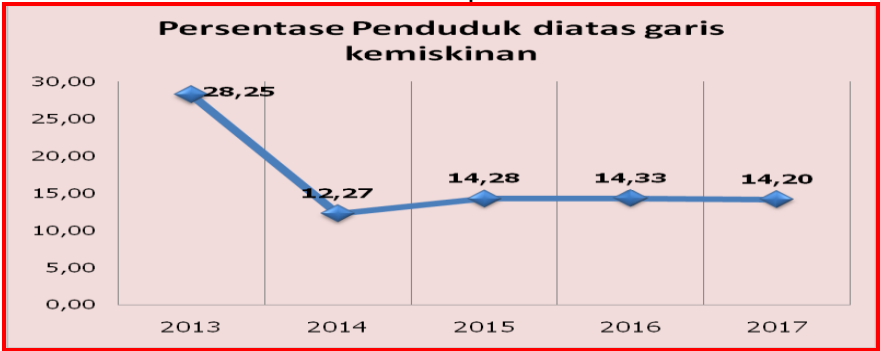
Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Tipologi Klassen per kecamatan di Kabupaten Sikka sampai dengan kondisi Tahun 2017 sebagai berikut: (1) **Kecamatan dengan kategori cepat maju dan cepat tumbuh** yaitu kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih tinggi dibanding dengan rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Lela dan Magepanda, (2) **Kecamatan dengan kategori maju tapi tertekan** yaitu kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten namun memiliki PDRB perkapita lebih tinggi dari rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Koting, Nelle, Alok, Alok Timur dan Nita, (3) **Kecamatan dengan kategori berkembang cepat** yaitu kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di atas rata-rata kabupaten, namun memiliki PDRB perkapita yang lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Bola, Talibura, Paga, Kewapante, Hewokloang, Kangae dan Alok Barat, (4) **Kecamatan dengan kategori relatif tertinggal** yaitu kecamatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Mego, Tanawawo, Waigete, Palue, Doreng, Mapitara, dan Waiblama.

G. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.10.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

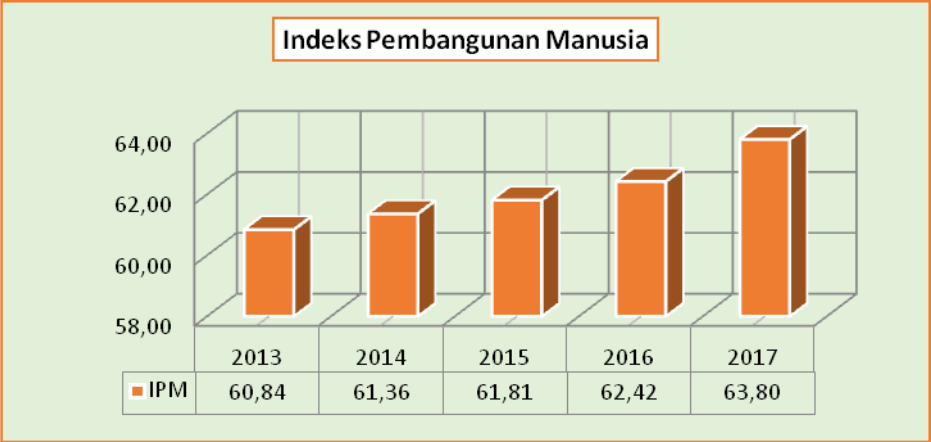
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung fluktuasi. Pada Tahun 2013 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka sebesar 28,25%, dan pada Tahun 2014 menurun signifikan menjadi 12,27%. Pada Tahun 2015 naik menjadi 14,28%, Tahun 2016 naik lagi menjadi 14,33% dan pada Tahun 2017 menurun menjadi 14,20%.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 10,75%, Kabupaten Ende sebesar 23,95%, Provinsi NTT sebesar 21,38%, Nasional sebesar 10,60% dan target SDGs 10,50% maka persentase penduduk miskin Kabupaten Sikka lebih rendah dari Kabupaten Ende, Provinsi NTT dan Nasional namun masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Flores Timur dan Target SDGs.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Sikka dari Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Sikka sebesar 60,84, meningkat menjadi 61,36 pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 meningkat menjadi 61,81, Tahun 2016 meningkat menjadi 62,42 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 63,80.

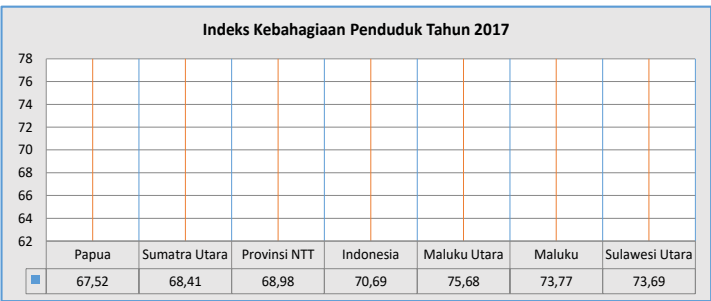
Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar 66,11, Kabupaten Nagekeo sebesar 64,74, Kabupaten Ngada 66,47, Kota Kupang sebesar 78,25 dan Provinsi NTT sebesar 63,73 maka IPM Kabupaten Sikka lebih rendah dari Kabupaten Ende, Nagekeo, Ngada, dan Kota Kupang, namun lebih tinggi dari IPM Provinsi NTT.

I. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit terhadap tiga dimensi yaitu dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan dan dimensi makna hidup, dengan 19 (sembilan belas) indikator yaitu pendidikan dan keterampilan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, kondisi rumah, keharmonisan keluarga, waktu luang, hubungan sosial, keadaan lingkungan, kondisi keamanan, perasaan senang/riang/gembira, perasaan tidak khawatir, perasaan tidak tertekan, kemandirian, penguasaan lingkungan, pengembangan diri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan diri.

Indeks Kebahagiaan Nasional Tahun 2017 sebesar 70,69. Selanjutnya Indeks Kebahagiaan Penduduk dari beberapa Provinsi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.12.
Indeks Kebahagiaan Penduduk Tahun 2017



Sumber: Statistik Indonesia, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa beberapa Provinsi mempunyai Indeks Kebahagiaan Penduduk diatas rata-rata Nasional dengan kategori sangat tinggi secara berurutan yaitu: Provinsi Maluku Utara sebesar 75.68, Provinsi Maluku sebesar 73.77, dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 73.69. Indeks Kebahagiaan Penduduk dibawah rata-rata Nasional dengan kategori sangat rendah secara berurutan yaitu Provinsi Papua sebesar 67.52, Provinsi Sumatera Utara sebesar 68.41, dan Provinsi NTT sebesar 68.98. Dengan demikian maka Indeks Kebahagiaan Penduduk di Kabupaten Sikka masih berada dibawah rata-rata Nasional sebesar 70,69 dan mungkin bisa lebih rendah dari Provinsi NTT.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Ada beberapa IPM dalam pendidikan, yaitu :

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan cerminan pembangunan di bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Indeks pendidikan Kabupaten Sikka 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

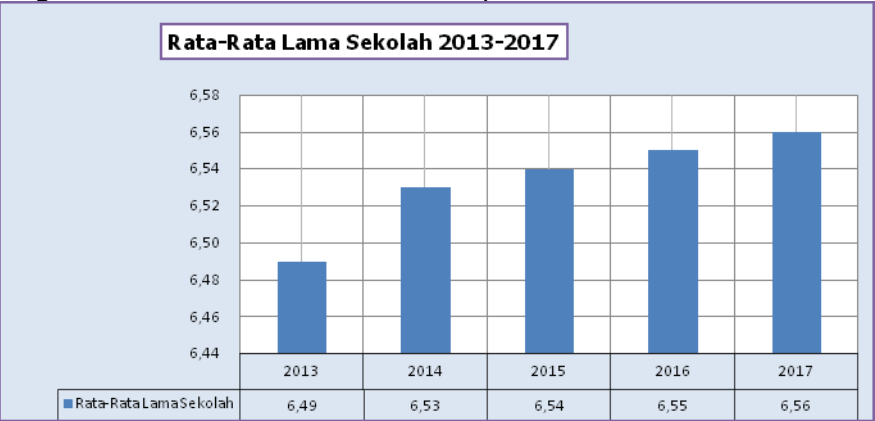
Berdasarkan data diatas, Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2013 sampai Tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 8,76, naik menjadi 8,96 pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 naik menjadi 9,04, naik lagi pada Tahun 2016 menjadi 9,23 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 9,45.

Jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar 10,69, Kabupaten Flores Timur sebesar 10, Kabupaten Nagekeo sebesar 9,9 dan Provinsi NTT sebesar 10,11 maka Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menepuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.14.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

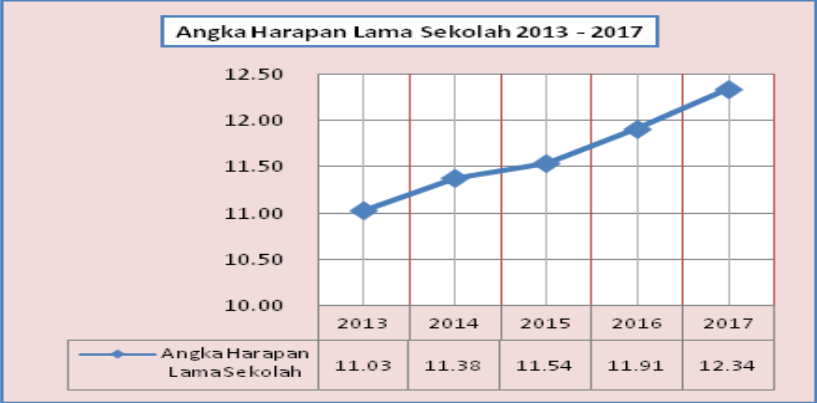
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2013 sebesar 6,49, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 6,53, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 6,54, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 6,55 dan Tahun 2017 naik menjadi sebesar 6,56.

Jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 7,12, Kabupaten Ende sebesar 7,63, Provinsi NTT 7,15 dan Nasional sebesar 8,10, maka Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.15.
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sikka tahun 2013-2017



Sumber: Data Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 sebesar 11,03, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 11,38, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 11,54, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 11,91 dan Tahun 2017 naik menjadi sebesar 12,34.

Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 13,75, Kabupaten Flores Timur 12,88 dan Ngada sebesar 12,67 dan Provinsi NTT sebesar 13,07 maka Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

4. Angka Partisipasi Kasar

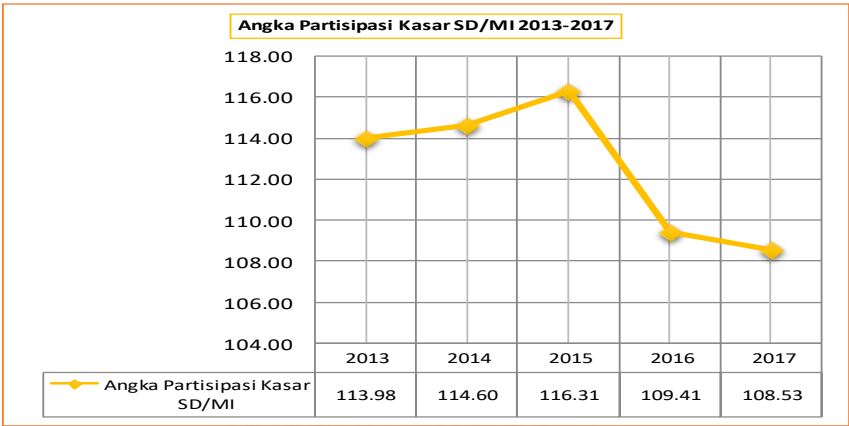
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

4.1. *APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017*

APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.16.
Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

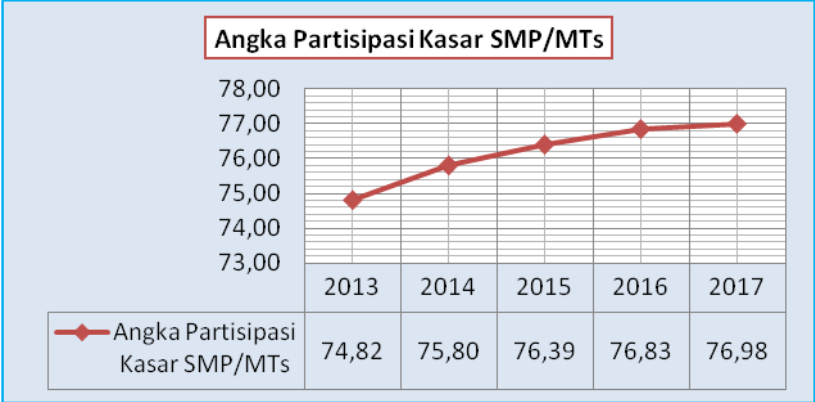
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa APK SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. APK SD/MI Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebesar 113,98%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 114,60% dan Tahun 2015 naik lagi menjadi sebesar 116,31%. Pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 109,41% dan Tahun 2017 turun lagi menjadi sebesar 108,53%.

Jika dibandingkan dengan APK SD/MI Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 118,67%, Provinsi NTT sebesar 114,05% dan Nasional sebesar 108,50% maka APK SD/MI Kabupaten Sikka lebih rendah dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun lebih tinggi dari APK SD/MI Nasional.

4.2. *APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017*

APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.17.
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa APK SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. APK SMP/MTs Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebesar 74,82%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 75,80%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 76,39%, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 76,83% dan Tahun 2017 naik menjadi sebesar 76,98%.

Jika dibandingkan dengan APK SMP/MTs Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 93,83%, Provinsi NTT sebesar 91,35% dan Nasional sebesar 90,23% dan target SDGs sebesar 87,40% maka APK SMP/MTs Kabupaten Sikka tergolong masih rendah.

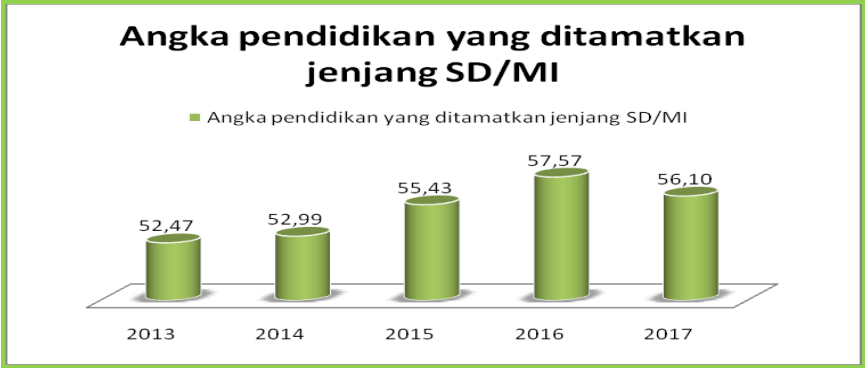
5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu dengan total jumlah penduduk pada tahun tertentu.

5.1. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.18.
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

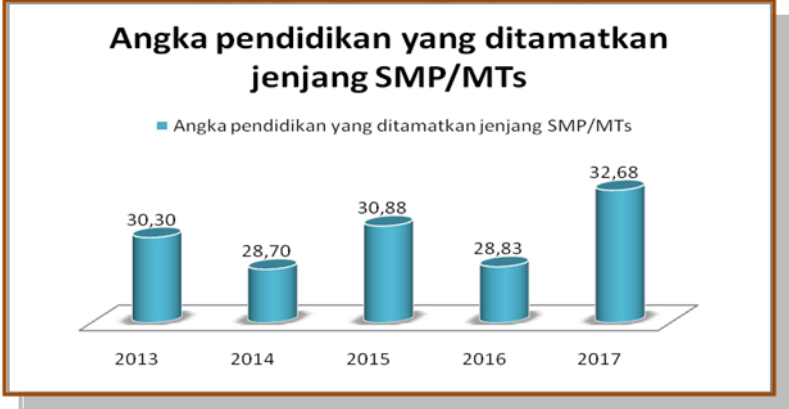
Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI pada Tahun 2013 sebesar 52,47%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 52,99%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 55,43%, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 57,57% dan pada Tahun 2017 turun menjadi sebesar 56,10%.

Jika dibandingkan dengan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI Tahun 2017 Provinsi NTT sebesar 67,10% maka Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI Kabupaten Sikka tergolong masih rendah.

5.2. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.19.
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs pada Tahun 2013 sebesar 30,30%, Tahun 2014 turun menjadi sebesar 28,70%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 30,88%, Tahun 2016 turun menjadi sebesar 28,83% dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 32,68%.

Jika dibandingkan dengan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SMP/MTs Tahun 2017 Provinsi NTT sebesar 35,88% maka Angka Pendidikan Yang Ditamatkan jenjang SD/MI

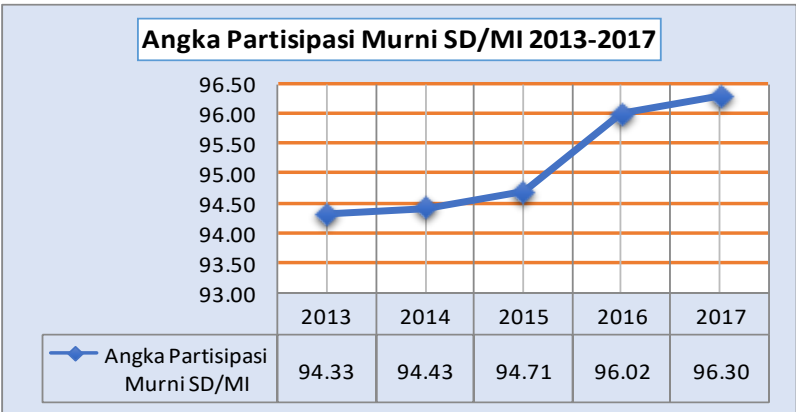
Kabupaten Sikka tergolong masih rendah.

6. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

6.1. APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.20.
Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



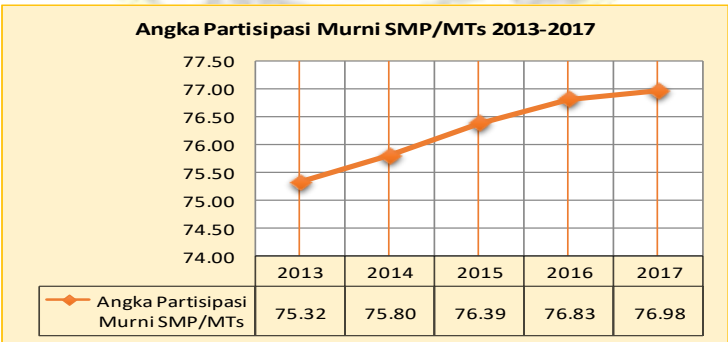
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa APM SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 94,33%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 94,43%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 94,71%, Tahun 2016 naik lagi menjadi sebesar 96,02% dan Tahun 2017 sebesar 96,30%.

Jika dibandingkan dengan APM SD/MI Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 95,04%, Provinsi NTT sebesar 95,40% dan Nasional sebesar 97,19% dan target SDGs sebesar 96% maka APM SD/MI Kabupaten Sikka lebih rendah dari Nasional, namun lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan target SDGs.

6.2. APM SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.21.
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa APM SMP/MTs Kabupateb Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 75,32%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 75,80%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 76,39%, Tahun 2016 naik lagi menjadi sebesar 76,83% dan Tahun 2017 naik menjadi sebesar 76,98%.

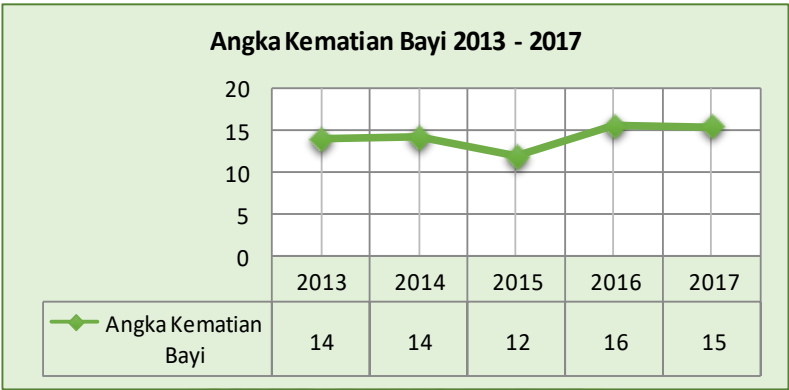
Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 62,68%, Provinsi NTT sebesar 67,18%, Nasional sebesar 78,40% dan target SDGs sebesar 76,40% maka APM SMP/MTs Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan target SDGs, namun lebih rendah dari APM SMP/MTs Nasional.

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup. AKB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.22.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

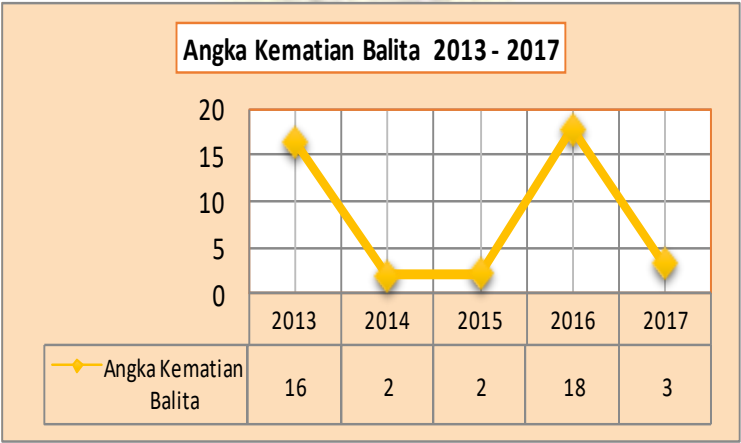
Berdasarkan data diatas menunjukkan AKB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. AKB Tahun 2013 sebesar 14 per 1.000 KH, Tahun 2014 tetap sebesar 14 per 1.000 KH, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 12 per 1.000 KH, Tahun 2016 naik menjadi 16 per 1.000 KH dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 15 per 1.000 KH.

Jika dibandingkan dengan AKB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 21 per 1.000 KH, Provinsi NTT sebesar 9,23 per 1.000 KH dan Nasional sebesar 25,10 per 1.000 KH maka AKB Kabupaten Sikka tergolong rendah dari Kabupaten Flores Timur dan Nasional, namun lebih tinggi dari Provinsi NTT. Walau demikian AKB harus ditargetkan 0 atau tidak ada kematian bayi.

2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (Akaba) adalah jumlah kematian anak berusia kurang dari 5 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup (termasuk kematian bayi). Akaba Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.23.
Angka Kematian Balita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

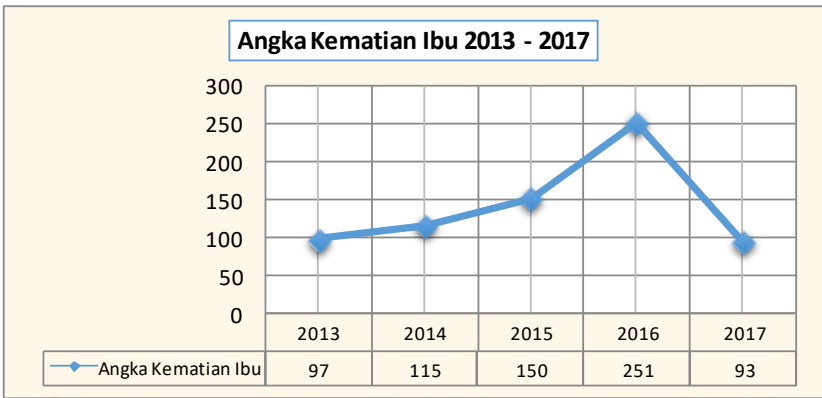
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Akaba Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Akaba pada Tahun 2013 sebesar 16 per 1.000 KH, Tahun 2014 turun menjadi 2 per 1.000 KH, Tahun 2015 tetap sebesar 2 per 1.000 KH, Tahun 2016 naik menjadi 18 per 1.000 KH dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 3 per 1.000 KH.

Jika dibandingkan dengan Akaba Tahun 2017 Provinsi NTT sebesar 10,11 per 1.000 KH maka Akaba Kabupaten Sikka masih tergolong rendah. Walau demikian Akaba harus ditargetkan 0 atau tidak ada kematian balita.

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Sikka Tahun 2013 -2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.24.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa AKI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. AKI Tahun 2013 sebesar 97 per 100.000 KH, naik menjadi 115 per 100.000 KH di Tahun 2014, naik menjadi 150 per 100.000 KH di Tahun 2015, Tahun 2016 naik menjadi 251 per 100.000 KH dan di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 93 per 100.000 KH.

Jika dibandingkan dengan AKI Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 150 per 100.000 KH, Kabupaten Ende sebesar 254 per 100.000 KH dan Provinsi NTT sebesar 131 per 100.000 KH maka AKI Kabupaten Sikka tergolong rendah. Walau demikian AKI harus ditargetkan 0 atau tidak ada kematian ibu.

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.25.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 65,68, naik

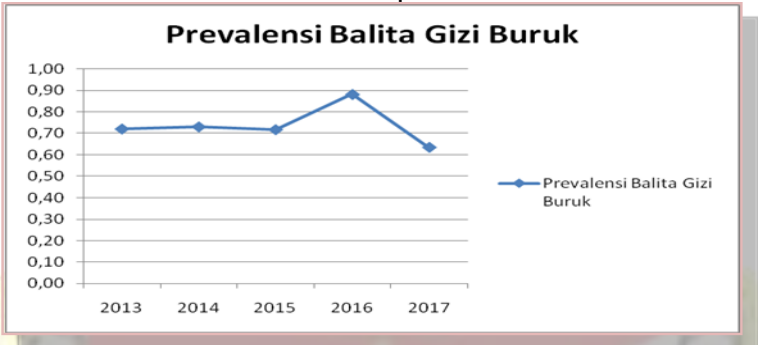
menjadi 65,70 pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 naik menjadi 66,10 dan Tahun 2016 naik menjadi 66,20. Tahun 2017 naik lagi menjadi 66,30.

Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 64,65, Kabupaten Ende sebesar 64,48, Provinsi NTT sebesar 66,07 dan Nasional sebesar 71,10 maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Sikka masih lebih tinggi dari Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

5. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah jumlah keseluruhan kasus balita gizi buruk yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah dibagi jumlah balita. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.26.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



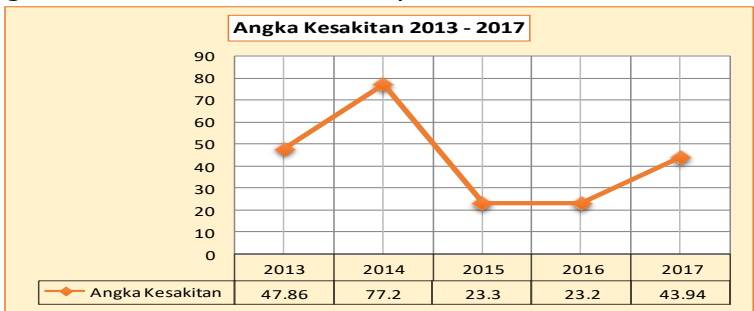
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 0,72%, naik menjadi 0,73% di Tahun 2014, Tahun 2015 turun menjadi 0,71%, Tahun 2016 naik menjadi 0,88% dan Tahun 2017 turun menjadi 0,63%. Capaian ini diatas target SDGs sebesar 0,50%. Walau demikian Prevalensi Balita Gizi Buruk harus ditargetkan 0 atau tidak ada kasus balita gizi buruk.

6. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan penduduk didapat dari data yang berasal dari masyarakat dan dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari laporan rutin melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP), Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS) dan Sistem Survei Terpadu (SST). Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi kesehatan di suatu wilayah adalah incidence rate (IR) dan prevalence rate (PR). Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.27.
Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 Angka Kesakitan Penduduk

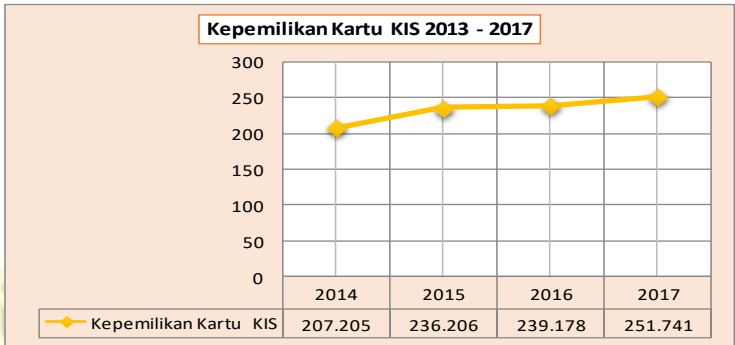
sebesar 47.86%, naik menjadi 77.2% pada Tahun 2014, pada Tahun 2015 turun menjadi 23.3%, pada Tahun 2016 turun menjadi 23.2%, dan naik menjadi 43.94% pada Tahun 2017.

Jika dibandingkan dengan Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar 30,63% dan Provinsi NTT sebesar 34,86% maka Angka Kesakitan Penduduk Kabupaten Sikka masih tergolong tinggi.

7. Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat

Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah orang/individu yang memiliki kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kepemilikan KIS di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.28.
Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kepemilikan KIS di Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 sebanyak 207.205 jiwa atau 66,54% dari jumlah penduduk di Tahun 2014, bertambah menjadi sebanyak 236.206 jiwa atau 75,34% dari jumlah penduduk di Tahun 2015, Tahun 2016 bertambah menjadi sebanyak 239.178 jiwa atau 75,48% dari jumlah penduduk di Tahun 2016, dan bertambah menjadi sebanyak 251.741 jiwa atau 79,34% dari jumlah penduduk di Tahun 2017. Walau demikian Kepemilikan KIS belum mencakup seluruh penduduk Kabupaten Sikka.

C. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio Penduduk Yang Bekerja adalah jumlah penduduk yang bekerja tahun tertentu berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.29.
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 96,57% turun

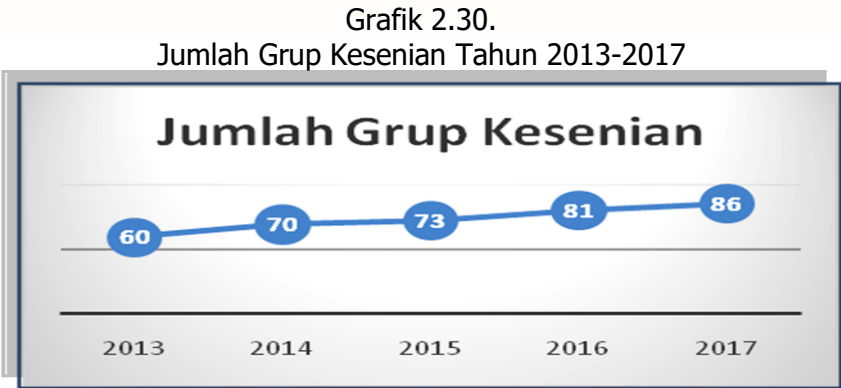
menjadi 94,76% di Tahun 2014, naik menjadi 99,35% di Tahun 2015, Tahun 2016 tetap 99,35% dan Tahun 2017 turun menjadi 97,50%. Walau demikian, Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Sikka belum mencapai 100%.

2.2.3. Fokus seni budaya dan olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Grup Kesenian adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 60 grup kesenian, Tahun 2014 bertambah menjadi 70 grup kesenian, Tahun 2015 menjadi 73 grup kesenian, Tahun 2016 menjadi 81 grup kesenian dan Tahun 2017 menjadi 86 grup kesenian.

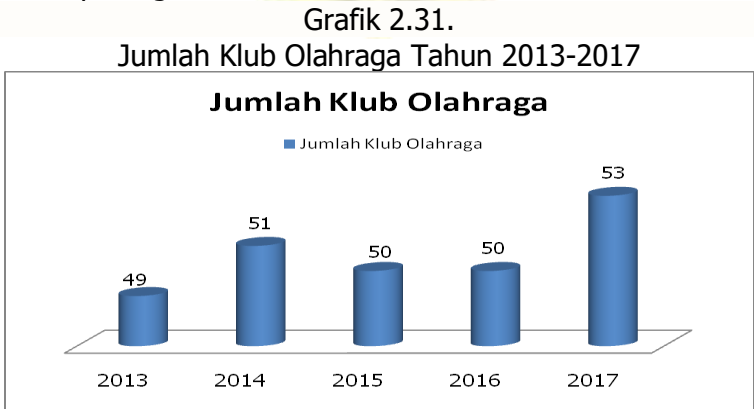
2. Jumlah Gedung Kesenian

Gedung Kesenian merupakan suatu tempat untuk menggelar suatu pertunjukan seni. Gedung Kesenian sebagai salah satu bagian ruang publik (*public space*) di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 baru terdapat 1 unit gedung kesenian, yaitu Panggung Pertunjukan Seni dan Budaya di Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olahraga

Klub Olahraga merupakan perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanya. Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebanyak 49 klub olahraga, Tahun 2014 bertambah menjadi 51 klub olahraga, Tahun 2015 berkurang menjadi 50 klub olahraga, Tahun 2016 tetap sebanyak 50 klub olahraga dan pada Tahun 2017 bertambah menjadi 53 klub olahraga.

2. Jumlah Gedung Olahraga

Gedung Olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga Jumlah Gedung Olahraga di Kabupaten Sikka sampai dengan 2017 sebanyak 10 gedung olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Umum Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

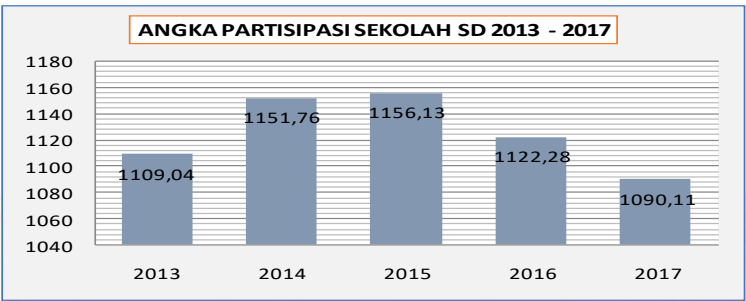
A. Pendidikan

1. Pendidikan dasar

1.1. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI adalah besaran jumlah murid usia 7-12 tahun berbanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.32.
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

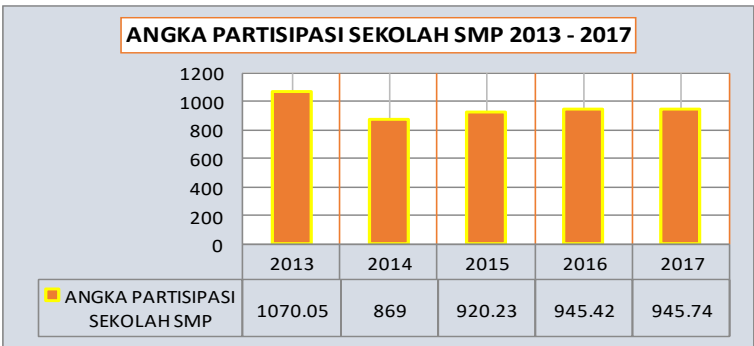
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 1109,04, Tahun 2014 naik menjadi 1151,76, Tahun 2015 naik menjadi 1156,13, Tahun 2016 turun menjadi 1122,28 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 1090,11.

Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 95,4, Kabupaten Ende sebesar 98 dan Provinsi NTT sebesar 95,40 maka Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kabupaten Ende.

1.2. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs adalah besaran jumlah murid usia 13-15 tahun berbanding jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.33.
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

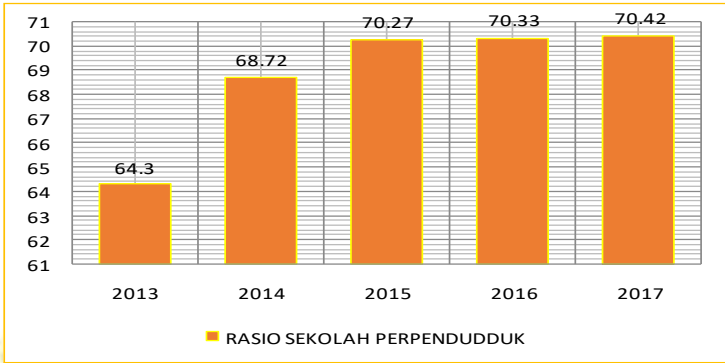
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 1.070,05, Tahun 2014 turun menjadi 869,00, Tahun 2015 naik menjadi 902,23, Tahun 2016 naik lagi menjadi 945,42 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 945,74.

Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 1.372,70, Kabupaten Ende sebesar 514,46 dan Provinsi NTT sebesar 488,49 maka Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Ende dan Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kabupaten Flores Timur.

1.3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah adalah jumlah sekolah pendidikan dasar berbanding jumlah penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.34.
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk
Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 64,30, Tahun 2014 naik menjadi 68,72, Tahun 2015 naik menjadi 70,27, Tahun 2016 naik menjadi 70,33 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 70,42.

Jika dibandingkan dengan Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 73,37, Kabupaten Ende sebesar 89,22 dan Provinsi NTT sebesar 64,11 maka Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende.

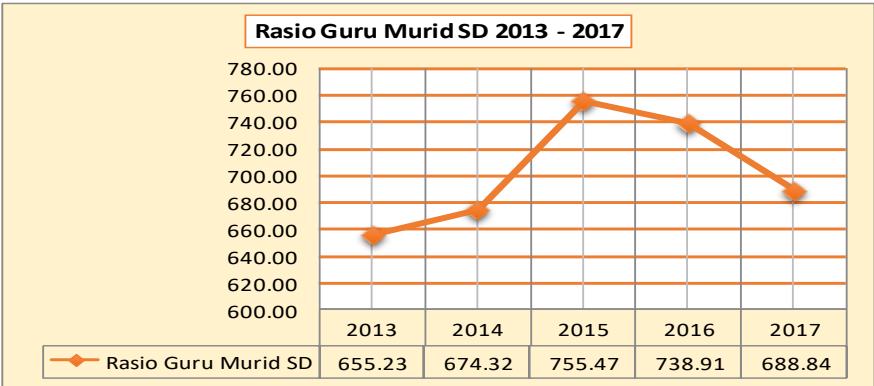
1.4. Rasio Guru Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio Guru Murid adalah jumlah guru berbanding jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu.

1.4.1. Rasio Guru Murid SD/MI

Rasio Guru Murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.35.
Rasio Guru Murid SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kompilasi Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

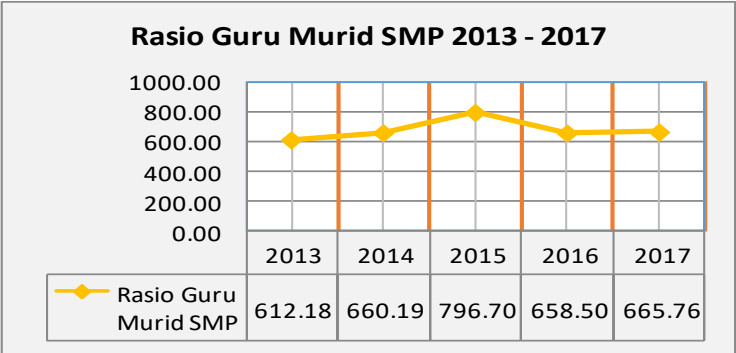
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Guru Murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 655,23, Tahun 2014 naik menjadi 674,32, Tahun 2015 naik menjadi 755,47, Tahun 2016 turun menjadi 738,91 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 688,84.

Jika dibandingkan dengan Rasio Guru Murid jenjang SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 759,27, Kabupaten Ende sebesar 801,99 dan Provinsi NTT sebesar 632,83 maka Rasio guru murid jenjang SD/MI Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur.

1.4.2. Rasio Guru Murid SMP/MTs

Rasio Guru Murid Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.36.
Rasio Guru Murid SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Guru Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 612,18, Tahun 2014 naik menjadi 660,19, Tahun 2015 naik menjadi 796,70, Tahun 2016 turun menjadi 658,50 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 665,76.

Jika dibandingkan dengan Rasio Guru Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 729,01 dan Kabupaten Ende sebesar 842,50 dan Provinsi NTT sebesar 712,11 maka Rasio Guru Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka tergolong masih rendah.

1.5. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. Rombongan Belajar jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 2.251 dan Rombongan Belajar SMP/MTs sebanyak 646.

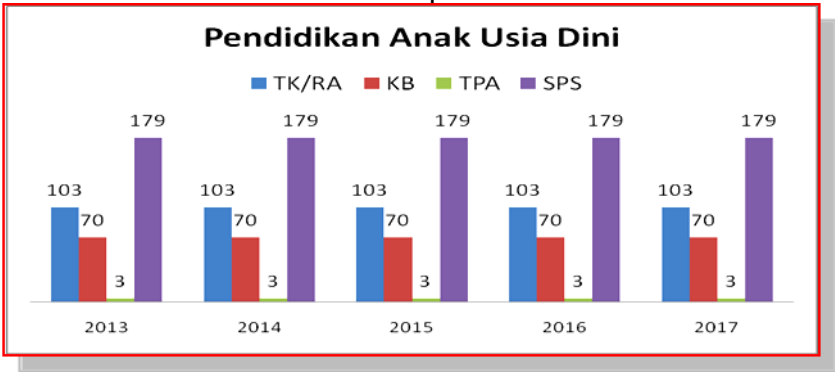
Jika dibandingkan dengan Rombongan Belajar SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebanyak 1.858, Kabupaten Ende sebanyak 2,082 dan Provinsi NTT sebanyak 36.768, maka Rombongan Belajar SD/MI Kabupaten Sikka lebih banyak dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende.

Jika dibandingkan dengan Rombongan Belajar SMP/MTs Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebanyak 523, Kabupaten Ende sebanyak 595 dan Provinsi NTT sebanyak 12.486, maka Rombongan Belajar SMP/MTs Kabupaten Sikka lebih banyak dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende.

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Jumlah dan jenis PAUD dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.37.
Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa PAUD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 baik itu Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Seluruh PAUD Sederajat (SPS) tidak mengalami perubahan dengan jenis dan jumlah TK/RA sebanyak 103, KB sebanyak 70, TPA sebanyak 3, dan SPS sebanyak 179. Angka Partisipasi Sekolah PAUD Kabupaten Sikka usia 0-6 tahun Tahun 2017 sebesar 17,55,

Jika dibandingkan Angka Partisipasi Sekolah PAUD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 24,19, Kabupaten Ende sebesar 19,24 dan Provinsi NTT sebesar 29,73, maka Angka Partisipasi Sekolah PAUD Kabupaten Sikka tergolong masih rendah.

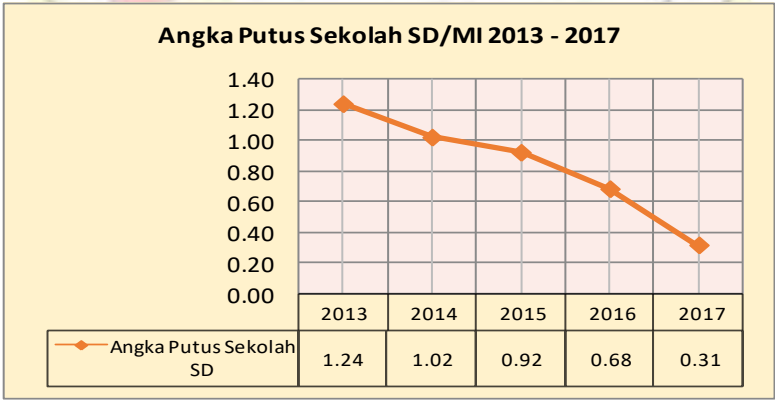
3. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

3.1. Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI

Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.38.
Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

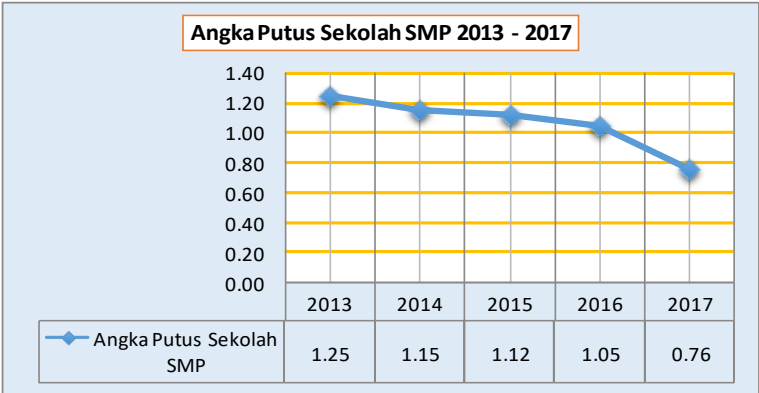
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 1,24, Tahun 2014 turun menjadi 1,02, Tahun 2015 turun menjadi 0,92, Tahun 2016 turun menjadi 0,68 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,31.

Jika dibandingkan dengan Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Provinsi NTT Tahun 2017 sebesar 1,73 maka Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Kabupaten Sikka lebih rendah.

3.2. Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs

Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.39.
Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 1,25, Tahun 2014 turun menjadi 1,15, Tahun 2015 turun menjadi 1,12, Tahun 2016 turun menjadi 1,05 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,76.

Jika dibandingkan dengan Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Provinsi NTT Tahun 2017 sebesar 5,24 maka Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs Kabupaten Sikka lebih rendah.

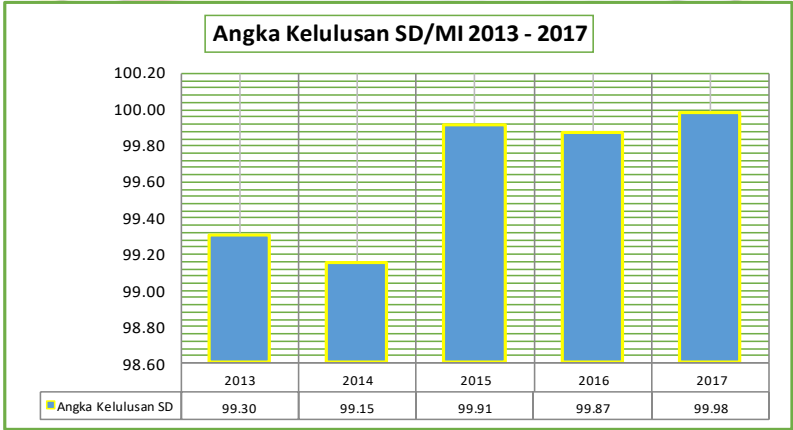
4. Angka Kelulusan

4.1. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Angka Kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

4.1.1. Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.40.
Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

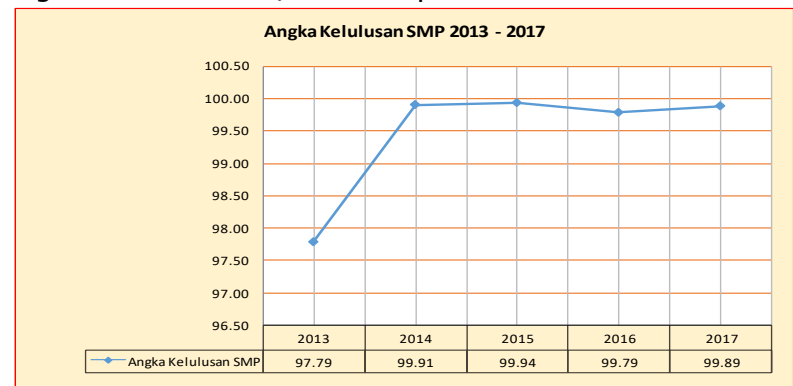


Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 99,30%, Tahun 2014 turun menjadi 99,15%, Tahun 2015 naik menjadi 99,91%, Tahun 2016 turun menjadi 99,87% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 99,98%.

4.1.2. Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.41.
Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



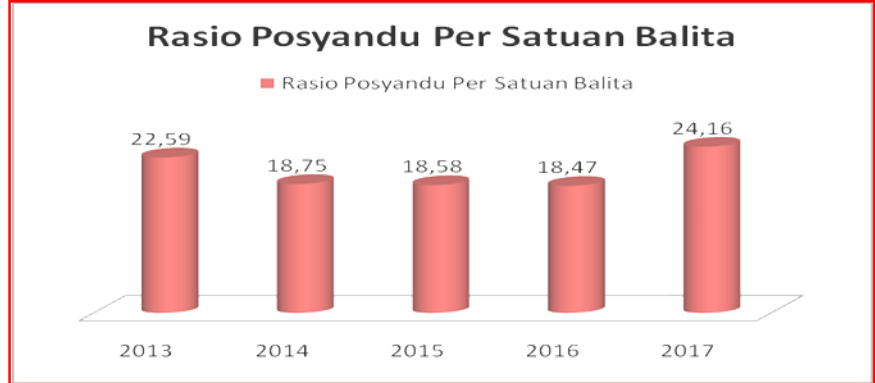
Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 97,79% naik menjadi sebesar 99,91% pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 naik menjadi sebesar 99,94%, pada Tahun 2016 turun menjadi sebesar 99,79 dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 99,89%.

B. Kesehatan
1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu Per Satuan Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.42.
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 22,59, Tahun 2014 turun menjadi 18,75, Tahun 2015 turun menjadi 18,58, Tahun 2016 turun menjadi 18,47 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 24,16.

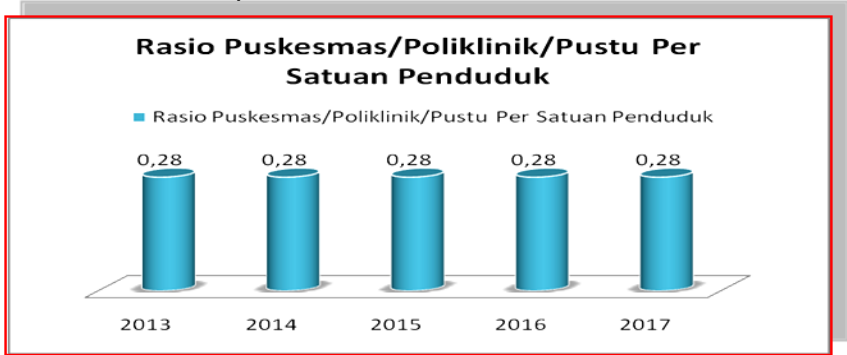
Jika dibandingkan dengan Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebesar 17,62, Kabupaten Ende sebesar 49,91 dan Provinsi NTT sebesar 13,33 maka Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih rendah dari Kabupaten Ende.

2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama

saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.43.
Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

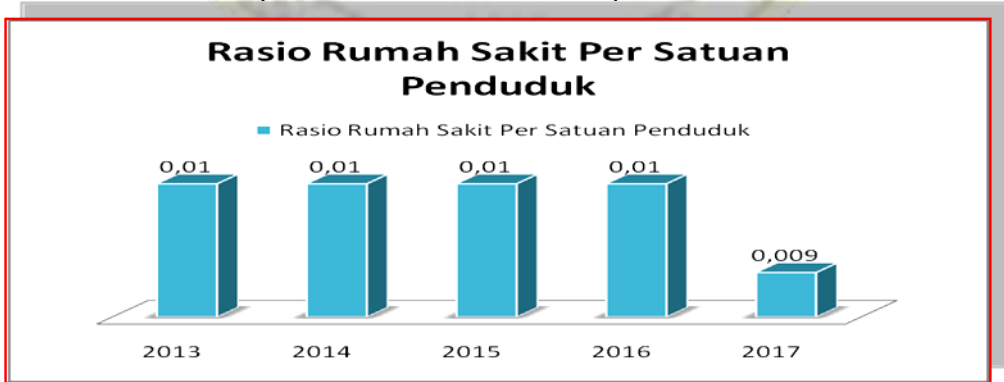
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Puskesmas/Poliklinik/ Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,28.

Jika dibandingkan dengan Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 0,24 dan Kabupaten Ende sebesar 0,32 maka Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur, namun lebih kecil dari Kabupaten Ende.

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.44.
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

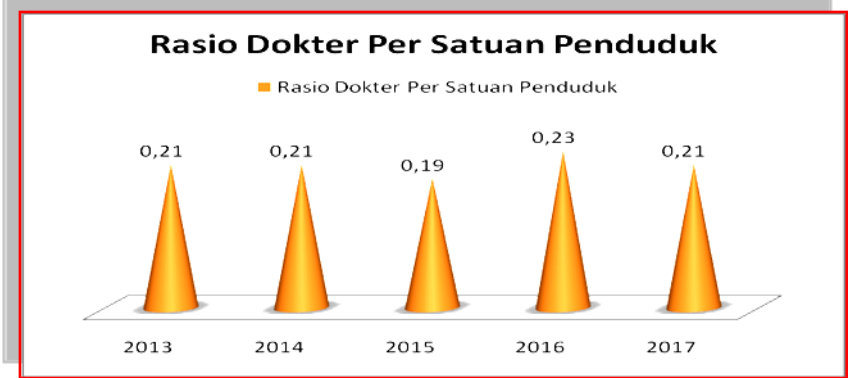
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami perubahan. Pada Tahun 2013 sampai tahun 2016 sebesar 0,01. Pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,009.

Jika dibandingkan dengan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2017 pada Kabupaten Flores Timur sebesar 0,004, Kabupaten Ende sebesar 0,007 maka Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka tergolong lebih besar.

4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah dokter yang ada di suatu wilayah berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.45.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

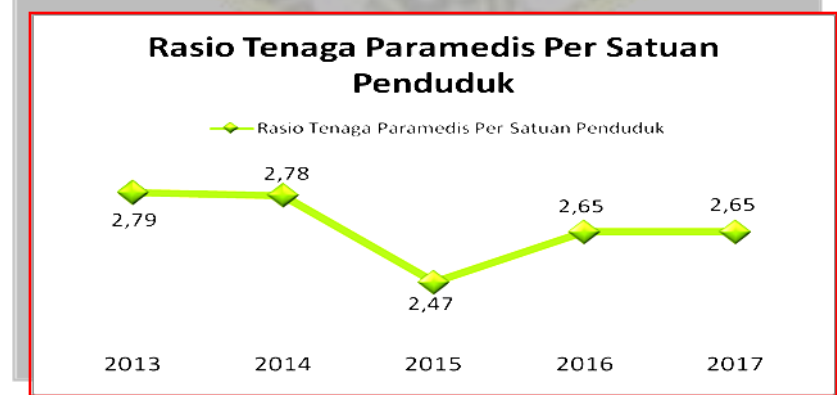
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 0,21, Tahun 2015 turun menjadi 0,19, Tahun 2016 naik menjadi 0,23 dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 0,21.

Jika dibandingkan dengan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 0,12 dan Kabupaten Ende sebesar 0,07 maka Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka tergolong lebih besar.

5. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah tenaga paramedis yang ada di suatu wilayah berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.46.
Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

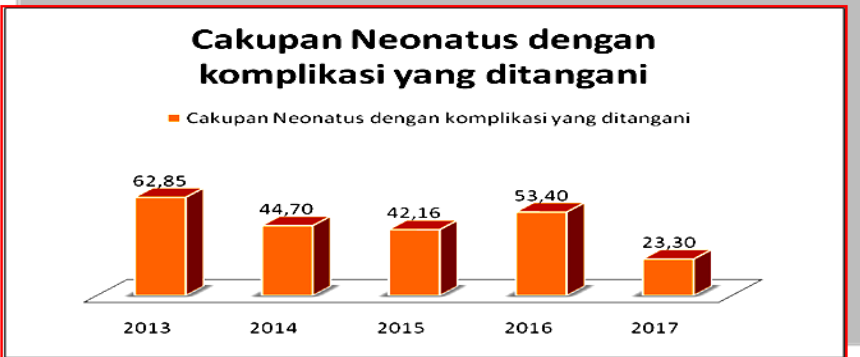
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 2,79, Tahun 2014 turun menjadi sebesar 2,78, Tahun 2015 turun menjadi 2,47, Tahun 2016 naik menjadi 2,65 dan Tahun 2017 tetap sebesar 2,65.

Jika dibandingkan dengan Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 2,07 dan Kabupaten Ende sebesar 2,12 maka Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka tergolong lebih besar.

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani adalah penanganan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja berbanding jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan pada kurun waktu tertentu. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.47.
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 62,85, Tahun 2014 turun menjadi sebesar 44,70, Tahun 2015 turun menjadi 42,16, Tahun 2016 naik menjadi 53,40 dan Tahun 2017 turun menjadi 23,30.

7. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding jumlah seluruh sasaran ibu bersalin. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.48.
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

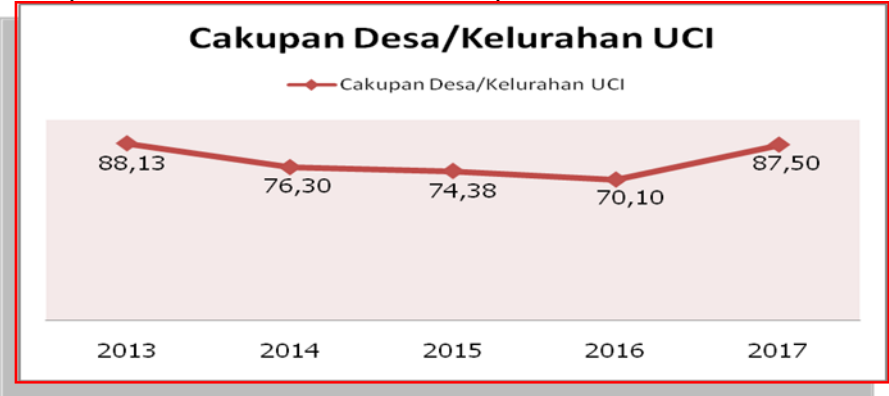
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetesi Kebidanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 84,94, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 97,29, Tahun 2015 turun menjadi 69,70, Tahun 2016 naik menjadi 70,32 dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 69,19.

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi. Cakupan Desa/Kelurahan UCI

diperoleh dari jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan UCI berbanding jumlah seluruh desa/kelurahan. Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.49.
Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



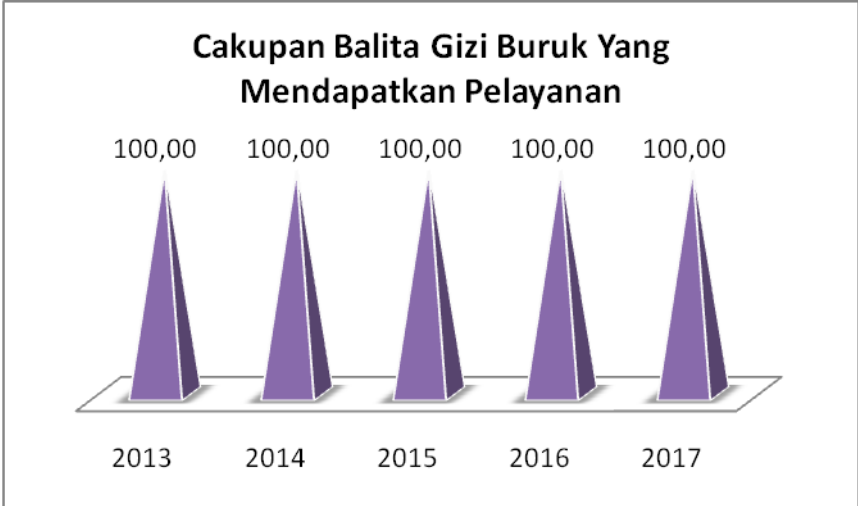
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 88,13, Tahun 2014 turun menjadi 76,30, Tahun 2015 turun menjadi 74,38, Tahun 2016 turun lagi menjadi 70,10 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 87,50.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana kesehatan berbanding dengan jumlah seluruh balita gizi buruk. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.50.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



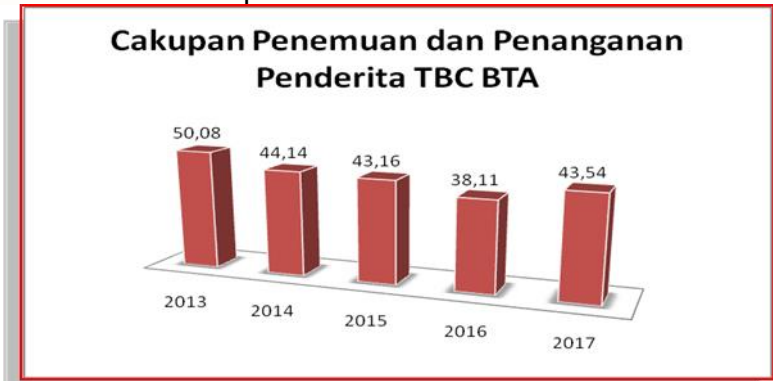
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mencapai 100%.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang diobati di suatu wilayah kerja dalam tahun tertentu berbanding jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.51.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 50,08, Tahun 2014 turun menjadi sebesar 44,14, Tahun 2015 turun menjadi 43,16, Tahun 2016 turun lagi menjadi 38,11 dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 43,54.

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD adalah jumlah penderita DBD yang tertangani berbanding dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.52.
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



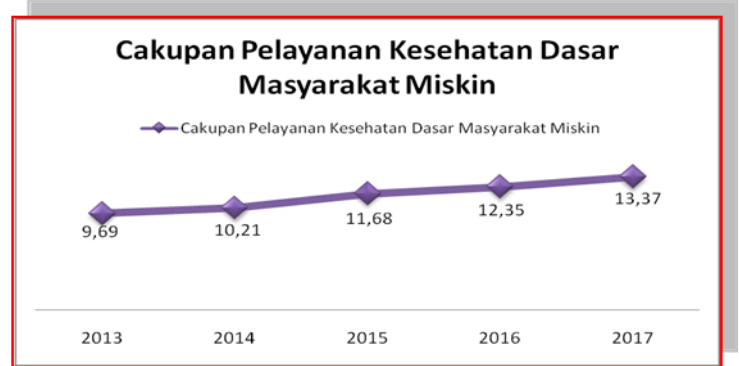
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mencapai 100%.

12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.53.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



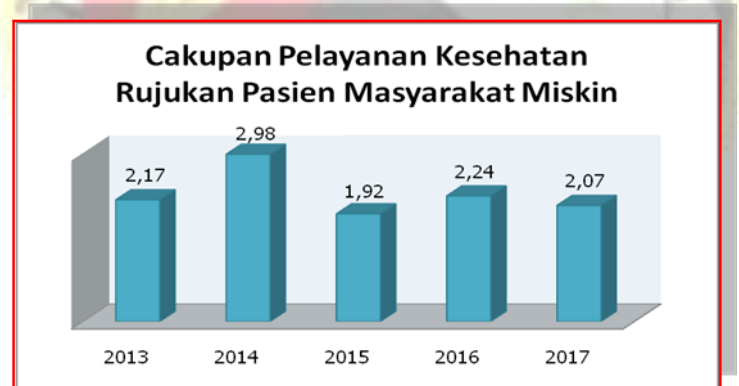
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 9,69, Tahun 2014 naik menjadi 10,21, Tahun 2015 naik menjadi 11,68, Tahun 2016 naik lagi menjadi 12,35 dan pada Tahun 2017 menjadi 13,37.

13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan berbanding dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.54.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



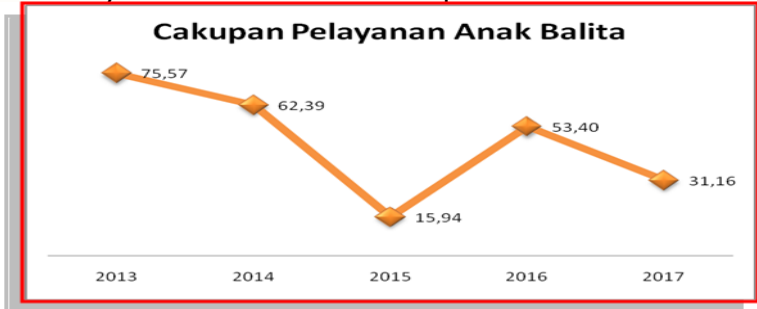
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 2,17, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 2,98, Tahun 2015 turun menjadi 1,92, Tahun 2016 naik menjadi 2,24 dan pada Tahun 2017 turun menjadi sebesar 2,07.

14. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan Pelayanan Anak Balita adalah jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali berbanding dengan seluruh anak balita. Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.55.
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 75,57, Tahun 2014 turun menjadi 62,39, Tahun 2015 turun menjadi 15,94, Tahun 2016 naik menjadi 53,40 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 31,16.

15. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas berbanding dengan jumlah kecamatan. Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 sebanyak 25 Puskesmas. Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017

| No | Nama Puskesmas | Nama Kecamatan |
|----|----------------|----------------|
| 1 | Kopeta | Alok |
| 2 | Wolomarang | Alok Barat |
| 3 | Beru | Alok Timur |
| 4 | Teluk Maumere | Alok Timur |
| 5 | Bola | Bola |
| 6 | Habibola | Doreng |
| 7 | Hewokloang | Hewokloang |
| 8 | Waipare | Kangae |
| 9 | Kewapante | Kewapante |
| 10 | Koting | Koting |
| 11 | Nanga | Lela |
| 12 | Magepanda | Magepanda |
| 13 | Mapitara | Mapitara |
| 14 | Lekebai | Mego |
| 15 | Feondari | Mego |
| 16 | Nelle | Nele |
| 17 | Nita | Nita |
| 18 | Paga | Paga |
| 19 | PaluE | Palue |
| 20 | Tuanggeo | Palue |
| 21 | Watubaing | Talibura |
| 22 | Boganatar | Talibura |
| 23 | Wolofeo | Tanawawo |
| 24 | Tanarawa | Waiblama |
| 25 | Waigete | Waigete |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, 2018

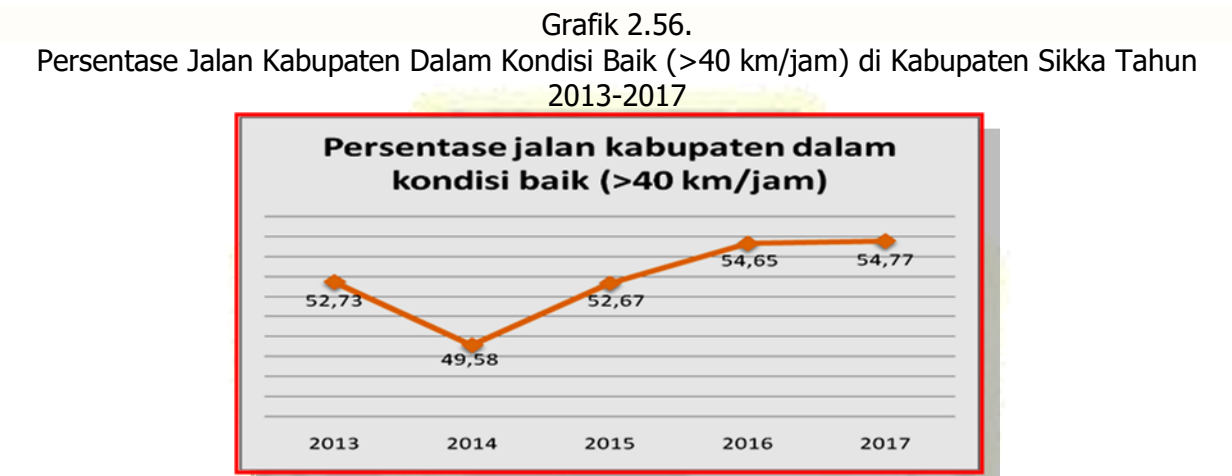
Berdasarkan data Sebaran Puskesmas per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 di atas Kecamatan yang memiliki 2 Puskesmas adalah Kecamatan Alok Timur, Mego, Palue dan Talibura. Dengan total 25 Puskesmas untuk melayani 21 Kecamatan maka Cakupan Puskesmas di Kabupaten Sikka sebesar 119%.

C. Pekerjaan Umum

1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan merupakan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik berbanding panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Hasil Olahan Dinas PUTR Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 km/jam) di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 52,73%, Tahun 2014 turun menjadi 49,58%, Tahun 2015 naik menjadi 52,67%, Tahun 2016 naik menjadi 54,65% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 54,77%.

2. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk diperoleh dengan membagi jumlah panjang jalan (Km) dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Rasio ini memiliki arti 1 Km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula masyarakat yang dilayani. Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19.
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Indikator | Satuan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Panjang Jalan | Km | 844,25 | 844,25 | 844,25 | 844,25 | 844,25 |
| Jumlah Penduduk | jiwa | 309.008 | 311.411 | 313.509 | 315.557 | 317.292 |
| Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk | Km/jiwa | 0,00273 | 0,00271 | 0,00269 | 0,00268 | 0,00266 |

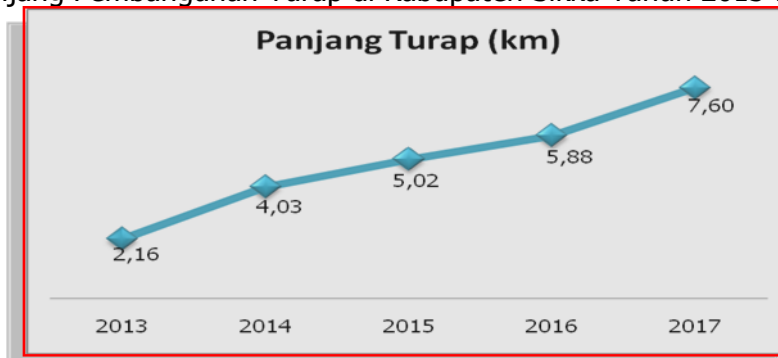
Sumber: Hasil Olahan Dinas PUTR Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami penurunan disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun sedangkan panjang jalan Kabupaten tetap.

3. Panjang Pembangunan Turap

Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air ke dalam lubang galian. Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.57.
Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Panjang Pembangunan Turap di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 2,16 km, Tahun 2014 naik menjadi 4,03 km, Tahun 2015 naik menjadi 5,02 km, Tahun 2016 naik lagi menjadi 5,88 km dan pada Tahun 2017 menjadi 7,60 km.

D. Perumahan

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih adalah jumlah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebanyak 19.723 rumah tangga terdiri dari : 15.600 rumah tangga menggunakan sambungan air bersih yang dipasang oleh PDAM, 3.632 rumah tangga menggunakan sambungan air bersih yang dipasang oleh BP SPAM-PANSIMAS dan 500 rumah tangga menggunakan air bersih dari sumur gali.

Persentase Penduduk Berakses Air Bersih adalah penduduk berakses air bersih berbanding dengan jumlah penduduk. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2016 sebesar 25,15% dari jumlah penduduk sebesar 315.477 jiwa atau sebanyak 79.342 jiwa. Capaian ini masih lebih rendah dari target SDGs sebesar 65%.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Rasio Elektrifikasi

Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Sedangkan rasio elektrifikasi adalah tingkat perbandingan jumlah penduduk yang telah mendapat listrik dengan jumlah total penduduk disuatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebanyak 39.831 sambungan, Tahun 2014 sebanyak 43.674 sambungan, Tahun 2015 sebanyak 44.326 sambungan, Tahun 2016 sebanyak 46.214 sambungan dan pada Tahun 2017 sebanyak 46.439 sambungan. Perkembangan rasio elektrifikasi di Kabupaten Sikka Tahun 2013 sebesar 64,45%, Tahun 2014 sebesar 70,12%, Tahun 2015 sebesar 70,69%, Tahun 2016 sebesar 73,24% sedangkan Tahun 2017 sebesar 73,18%.

3. Penyediaan Sanitasi

3.1. Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai

Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai dalam skala kawasan perkotaan adalah Sistem pengolahan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat Yang Memadai dalam skala kawasan perkotaan (Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur) pada Tahun 2017 sebesar 56,74%.

3.2. Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan

Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan adalah sistim pengolahan air limbah yang digunkana tidak hanya untuk satu rumah tangga tetapi digunakan bersamaan.

Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 sebesar 23,47%.

3.3. Presentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan

Presentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak Terjadi Genangan adalah luas daerah yang tergenang berbanding dengan luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang. Persentase drainase dalam kondisi baik adalah panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) berbanding dengan panjang seluruh drainase di suatu wilayah (Km).

Presentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur sebesar 35%.

4. Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan

Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan adalah suatu kawasan pemukiman ataupun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi sub standar atau tidak layak, yang dihuni oleh penduduk miskin. Persentase lingkungan permukiman kumuh adalah luas lingkungan permukiman kumuh berbanding dengan luas wilayah. Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2017 di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur sebesar 1,01%.

5. Jumlah dan Luas Lahan Bersertifikat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang telah ada haknya. Pada Tahun 2018, luas lahan yang telah tersertifikat di Kabupaten Sikka sebesar 340.776.332 m² atau sebanyak 91.469 bidang.

6. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni adalah jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu berbanding dengan jumlah rumah di suatu wilayah wilayah pada kurun waktu tertentu. Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sikka sampai Tahun 2017 sebesar 30,70%.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah perbandingan antara jumlah Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000
Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017

| NO. | URAIAN | TAHUN 2017 |
|-----|----------------------------------|------------|
| 1. | Jumlah Polisi Pamong Praja | 108 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 317.292 |
| 3. | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja | 3,403805 |
| | | 3 : 10.000 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 3 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 3 orang Polisi Pamong Praja melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Linmas adalah perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk. Rasio jumlah Linmas Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017

| NO. | URAIAN | TAHUN 2017 |
|-----|-----------------|-------------|
| 1. | Jumlah Linmas | 2.598 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 317.292 |
| 3. | Rasio | 81,88041 |
| | | 82 : 10.000 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 82 orang berbanding 10.000 jumlah penduduk. Artinya 82 orang anggota Linmas melayani ketentraman dan ketertiban lingkungan untuk 10.000 jumlah penduduk.

3. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa

Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa adalah perbandingan antara jumlah poskamling terbangun dibandingkan dengan jumlah kelurahan/desa. Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22.
Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2017

| NO. | U R A I A N | TAHUN 2017 |
|-----|---|------------|
| 1. | Jumlah Poskamling | 519,00 |
| 2. | Jumlah Desa / Kelurahan | 160,00 |
| 3. | Rasio Jumlah Poskamling/Desa, Kelurahan | 3 : 1 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Poskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 3 : 1. Artinya terdapat 3 unit Poskamling pada 1 desa/kelurahan.

4. Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase Penegakan Peraturan Daerah adalah jumlah penyelesaian penegakan Perda berbanding jumlah pelanggaran Perda. Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.58.
Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 Persentase Penegakan Peraturan Daerah sebesar 50% dan pada Tahun 2014-2017 naik menjadi 100%.

5. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP adalah frekuensi patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP maupun gabungan dalam 1 tahun. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23.
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2017

| NO. | URAIAN | Tahun 2017 |
|-----|---------------------------------|------------|
| 1. | Cakupan Patroli Siaga Pol PP | 720 |
| 2. | Cakupan Patroli Gabungan Pol PP | 12 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kabupaten Sikka Tahun 2017 melaksanakan 2 jenis patroli yaitu patroli siaga Pol PP dan patroli Gabungan Pol PP. Patroli Siaga Pol PP selama Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 720 kali dan patroli gabungan Pol PP sebanyak 12 kali.

6. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kota

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota adalah pelanggaran K3 yang diselesaikan berbanding dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Sat. Pol PP. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2017

| NO | U R A I A N | Tahun 2017 |
|----|---|------------|
| 1. | Jumlah Pelanggaran (K3) Kasus | 131 |
| 2. | Jumlah Pelanggaran (K3) Kasus yang diselesaikan | 131 |
| 3. | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran (K3) % | 100 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kota Maumere Tahun 2017 sebesar 100%.

7. Petugas Linmas di Kota

Petugas Linmas di Kota adalah jumlah petugas Linmas di wilayah perkotaan. Petugas Linmas di Kota Maumere yaitu di wilayah Kecamatan Alok, Alok Barat, dan Alok Timur. Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25.
Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2017

| NO. | KECAMATAN | KELURAHAN | JUMLAH |
|-----|------------|-------------|--------|
| 1. | Alok Timur | Waioti | 41 |
| | | Beru | 14 |
| | | Kota Baru | 28 |
| | | Nangameting | 20 |
| 2. | Alok | Nangalimang | 21 |
| | | Madawat | 20 |
| | | Kabor | 23 |
| | | Kota Uneng | 26 |
| 3. | Alok Barat | Wolomarang | 48 |
| | | Wailiti | 33 |
| | | Hewuli | 12 |
| | | Wuring | 29 |
| | | | 315 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Petugas Linmas di Kota Maumere Tahun 2017 sebanyak 315 orang dengan jumlah Linmas terbanyak di Kelurahan Wolomarang sebanyak 48 orang dan paling sedikit di Kelurahan Hewuli sebanyak 12 orang.

8. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran berbanding dengan luas wilayah kabupaten. Unit pemadam kebakaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 hanya melayani wilayah darat perkotaan yang meliputi Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.26.
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Maumere Tahun 2017

| NO. | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|---|--------------|
| 1. | Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (wilayah Daratan Kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur) | 92 Km² |
| 2. | Luas Wilayah Kabupaten Sikka | 1.731,91 Km² |
| 3. | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 5,3% |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2017 sebesar 5,3%. Sampai dengan Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sikka baru memiliki 1 unit mobil Pemadam Kebakaran untuk melayani wilayah manajemen kebakaran.

9. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran merupakan Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit dibandingkan dengan Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran.

Tingkat waktu tanggap kebakaran Tahun 2017 di Kota Maumere dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27.
Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| NO. | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|--|------------|
| 1. | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit | 0 |
| 2. | Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran | 18 |
| 3. | Tingkat Waktu Tanggap | 0 |

Sumber: Olahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, 2018

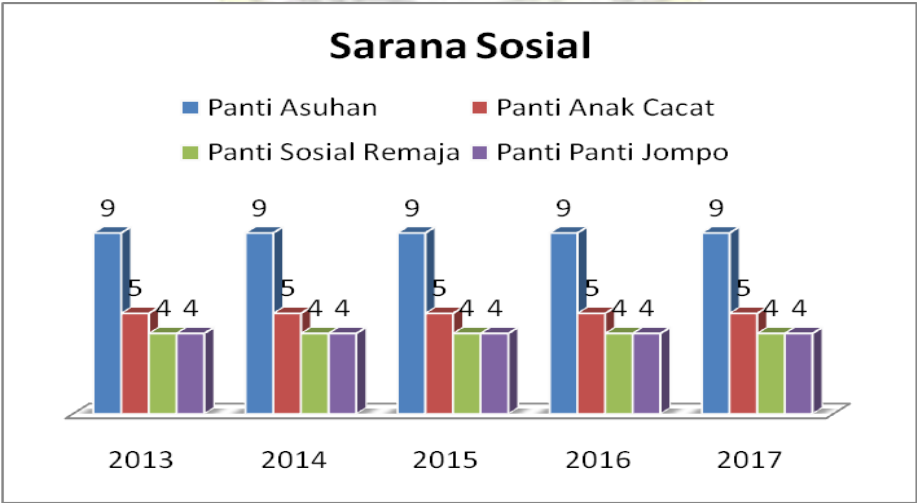
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat waktu tanggap di Kabupaten Sikka Tahun 2017 adalah 0. Artinya penanganan bencana kebakaran mulai dari waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran, waktu tempuh perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran dan sampai waktu gelar peralatan di lokasi dengan siap operasi pemadaman di wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Sikka melebihi standar tingkat waktu tanggap yaitu 15 menit.

F. Sosial

1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi

Sarana Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.59.
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan. Panti Asuhan sebanyak 9 lembaga, Panti Anak Cacat sebanyak 5 lembaga, Panti Sosial Remaja sebanyak 4 lembaga dan Panti Jompo sebanyak 4 lembaga. Dari total 22 sarana sosial yang ada di Kabupaten Sikka hanya 1 panti

jompo yang dikelola oleh Pemerintah sedangkan 21 sarana sosial lainnya dikelola oleh pihak swasta (*filantropis*).

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial adalah seseorang, kelompok maupun masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan wajar. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.60.
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 42,41%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 46,15%, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 30,77%, Tahun 2016 naik menjadi 38,46%, dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 53,85%.

3. Penanganan PMKS

Penanganan PMKS adalah jumlah PMKS yang tertangani melalui upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jumlah Penanganan PMKS Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.61.
Jumlah Penanganan PMKS Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Penanganan PMKS Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 1.742 kasus, Tahun 2014 turun menjadi sebesar 565 kasus, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 1.402 kasus, Tahun 2016 turun menjadi sebesar 1.180 kasus, dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 6.367 kasus.

4. Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina

Anak Terlantar Yang Terbina adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh Negara. Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.62.
Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Anak Terlantar Yang Terbina di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 194 anak.

G. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, karena didalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008.

2. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setiap RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah. RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2009-2013 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008. Sedangkan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014.

3. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD diturunkan kedalam dokumen perencanaan tahunan. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan. Dokumen RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018 telah ditetapkan sebagai berikut :

- Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2012 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2014;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2015;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2015 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2017 Tentang RKPD Kab. Sikka Tahun 2018;

4. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Keberadaan RKPD adalah bentuk “update” sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian tahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Penjabaran RPJMD Tahun 2013-2017 kedalam RKPD sesuai dengan program yang termuat dalam RPJMD.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.63.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

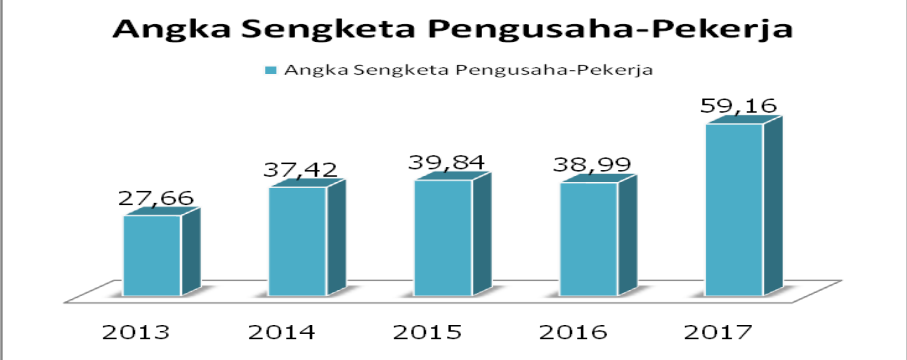
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 0,732, Tahun 2014 turun menjadi 0,701, Tahun 2015 tetap sebesar 0,701, Tahun 2016 turun menjadi 0,700, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 0,703.

2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun dibentuk dari adanya penyelesaian permasalahan hak dan kepentingan pengusaha-pekerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.64.

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 27,66, Tahun 2014 naik menjadi 37,42, Tahun 2015 naik menjadi 39,84, Tahun 2016 turun menjadi 38,99, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 59,16.

3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Pencari Kerja Yang Ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar. Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28.
Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

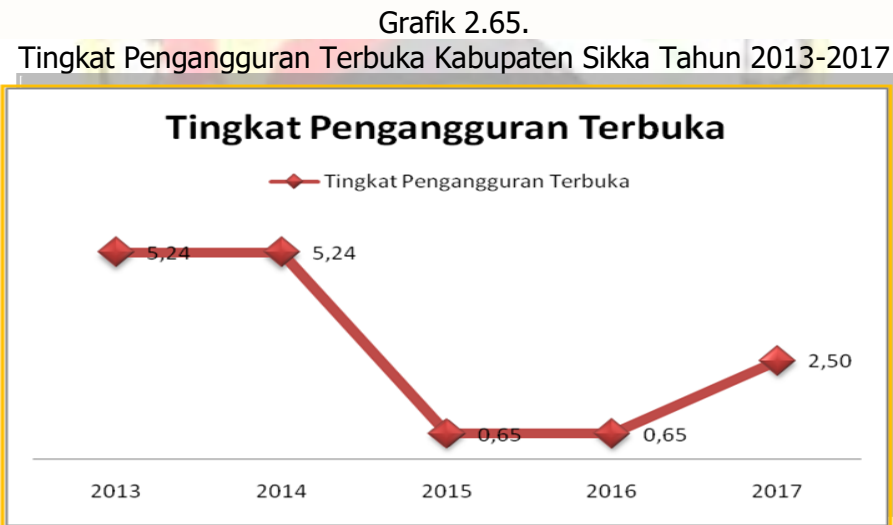
| NO | NEGARA | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Jumlah |
|--------|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|--------|
| | | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | |
| 1 | Malaysia | 16 | 20 | - | 23 | - | 3 | - | 6 | - | 9 | 77 |
| 2 | Hongkong | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 12 |
| 3 | Singapura | - | 4 | - | 5 | - | 14 | - | 7 | - | 4 | 34 |
| Jumlah | | 16 | 25 | - | 28 | - | 22 | - | 14 | - | 18 | 123 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Pencari Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 123 pencari kerja dengan Negara tujuan Malaysia sebanyak 77 orang, Singapura 34 orang dan Hongkong sebanyak 12 orang.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 dan 2014 sebesar 5,24, Tahun 2015 turun menjadi 0,65, Tahun 2016 tetap 0,65, dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 2,50.

5. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktifias tenaga kerja agar seorang pekerja merasa aman dan nyaman. Keselamatan dan perlindungan merupakan hak seorang pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| NO | TAHUN | BPJS Kesehatan | BPJS Ketenagakerjaan | | | Jumlah |
|----|-------|----------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | | | JKK | JK | JHT | |
| 1 | 2013 | - | 2.266 | 2.266 | 2.266 | 6.798 |
| 2 | 2014 | 1.395 | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 10.437 |
| 3 | 2015 | 5.368 | 3.415 | 3.415 | 3.415 | 15.613 |
| 4 | 2016 | 5.600 | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 17.708 |
| 5 | 2017 | 5.841 | 4.886 | 4.886 | 4.886 | 20.499 |

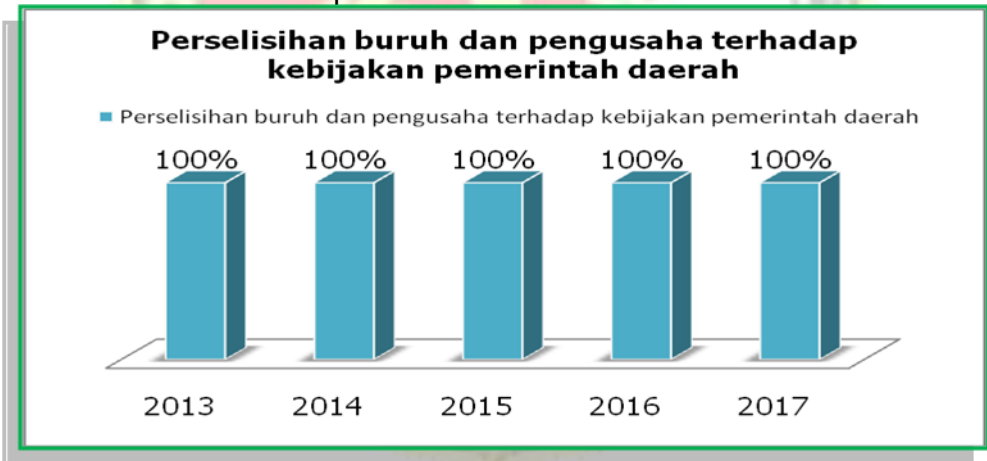
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 6.798 orang, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 10.437 orang, Tahun 2015 menjadi sebesar 15.613 orang, Tahun 2016 naik menjadi 17.708 orang dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 20.499 orang.

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah yang paling banyak muncul adalah pemutusan hubungan kerja dan upah minimum. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.66.
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, 2018

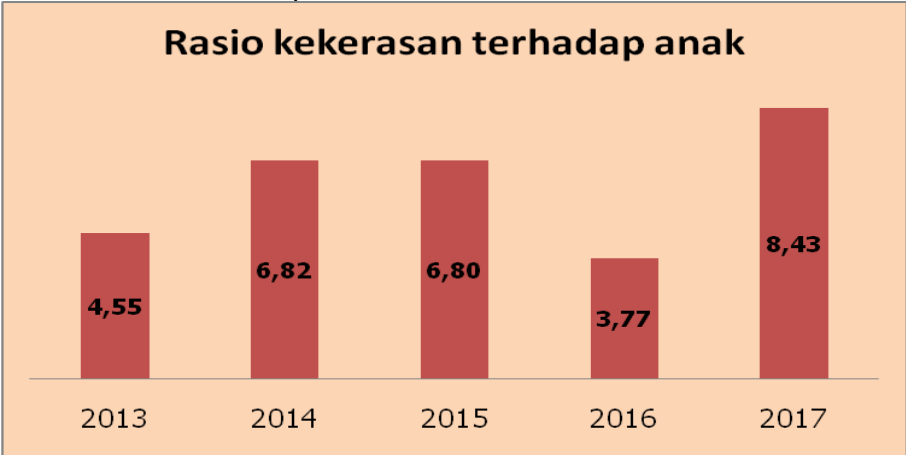
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat diselesaikan 100%.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT berbanding dengan jumlah Rumah Tangga. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.67.
Rasio KDRT Terhadap Anak dan Terhadap Perempuan
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

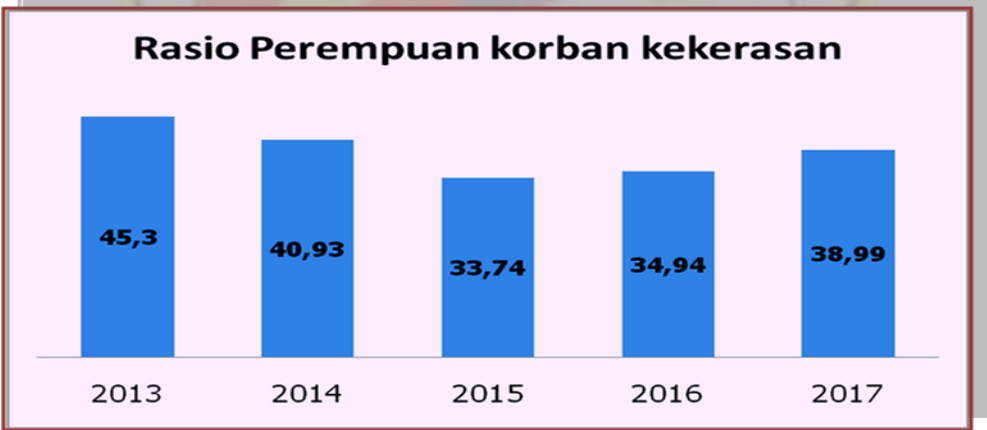


Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 4,55%, Tahun 2014 naik menjadi 6,82% dan pada Tahun 2015 turun menjadi 6,80%, Tahun 2016 turun menjadi 3,77%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 8,43%. Namun demikian rasio kekerasan terhadap anak harus ditargetkan nol.

Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.68.
Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



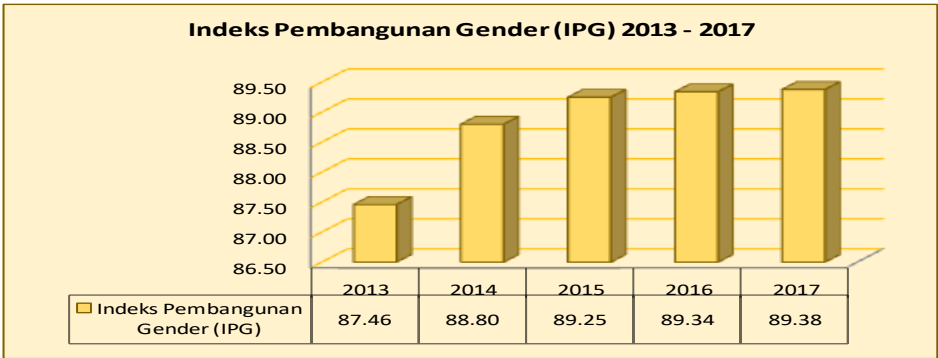
Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar 45,3%, Tahun 2014 turun menjadi 40,93%, Tahun 2015 turun menjadi 33,74%, Tahun 2016 naik menjadi 34,94% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 38,99%. Capaian Persentase kekerasan perempuan di tahun 2017 masih dibawah capaian SDGs sebesar 39,89%. Namun demikian Rasio Perempuan Korban Kekerasan harus ditargetkan nol.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan IPM. IPG Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.69.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



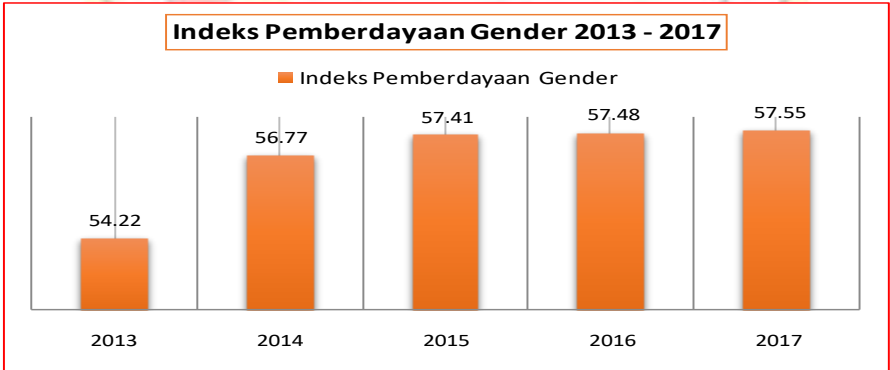
Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa IPG Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 87,46, Tahun 2014 naik menjadi 88,80, Tahun 2015 naik menjadi 89,25, Tahun 2016 naik menjadi 89,34, dan pada Tahun 2017 menjadi 89,38. Jika dibandingkan dengan indeks pembangunan gender Provinsi NTT Tahun 2017 sebesar 92,44% maka masih indeks pembangunan gender Kabupaten Sikka masih lebih rendah.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. IDG Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.70.
IDG Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

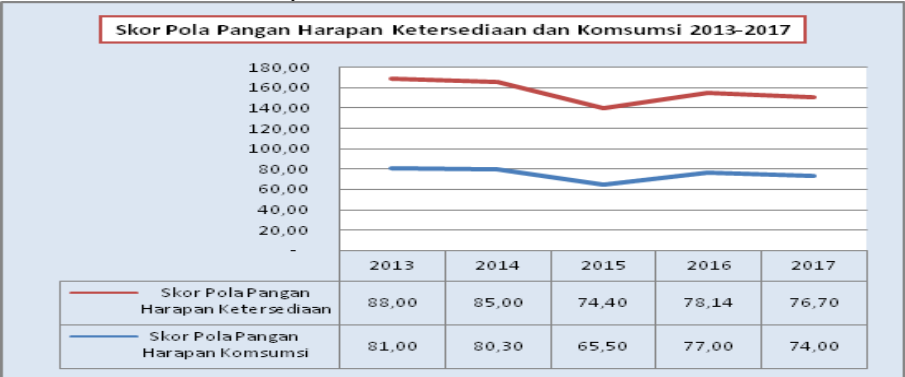
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa IDG Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar 54,22, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 56,77, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 57,41, Tahun 2016 naik menjadi 57,48, dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 57,55.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergisi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM).

Skor PPH konsumsi adalah jenis dan jumlah bahan makanan rata rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan Gizi. Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.71.
Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan berdasarkan Analisis NBM
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa Skor PPH Ketersediaan dan Konsumsi Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2013 sebesar 88, Tahun 2014 turun menjadi 85, Tahun 2015 turun menjadi 74,40 dan pada Tahun 2016 naik menjadi 78,14 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 76,70.

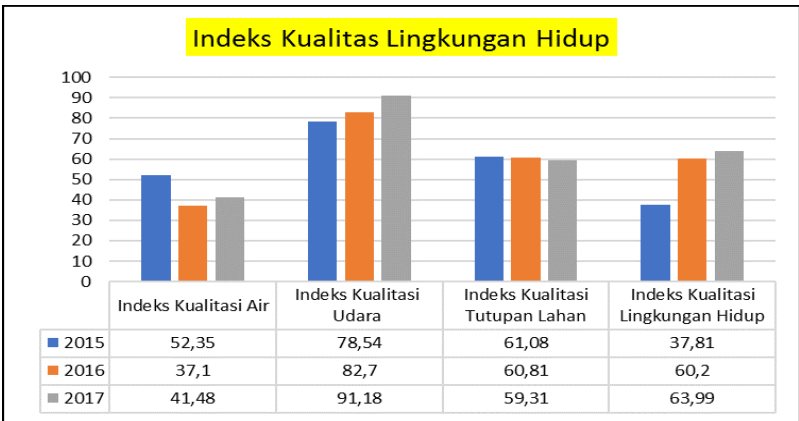
Skor PPH Komsumsi Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebesar 81, Tahun 2014 turun menjadi 80,30, Tahun 2015 turun menjadi 65,50, Tahun 2016 naik menjadi 77 dan pada Tahun 2017 turun menjadi 74. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Sikka cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau karena nilai konsumsi kita masih berada dibawah nilai ketersediaan pangan.

D. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Hutan/Lahan. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.72.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

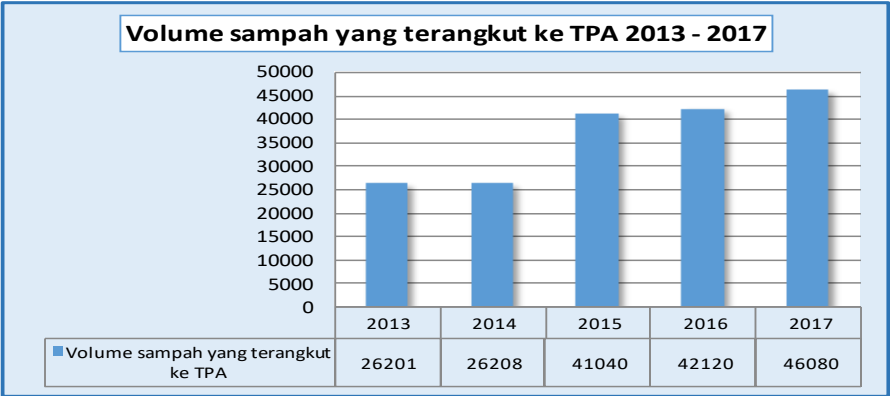


Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2018

2. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA

Indikator penanganan sampah didapatkan dari volume sampah yang terangkut ke TPA. Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.73.
Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



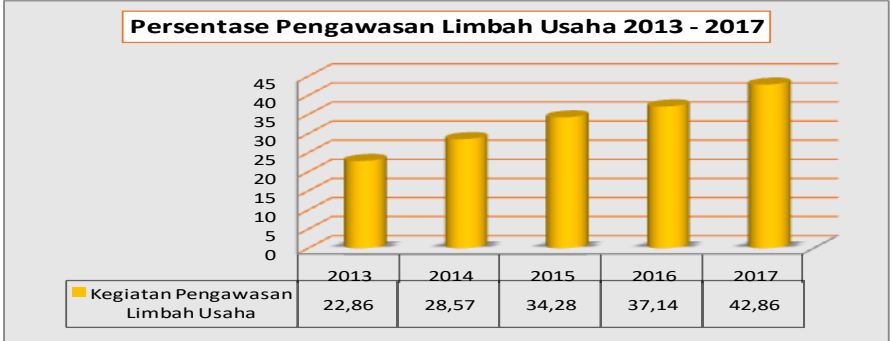
Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Volume Sampah yang Terangkut ke TPA di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 26.201m³, Tahun 2014 naik menjadi sebanyak 26.208m³, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 41.040m³, Tahun 2016 naik menjadi 42.120m³, dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 46.080m³. Volume sampah yang terangkut ke TPA berasal dari wilayah Kecamatan Alok, Alok Timur, Alok Barat, Kangae dan Kewapante.

3. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha

Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha adalah Jumlah pengawasan limbah usaha berbanding dengan usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah. Persentase kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.74.
Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Presentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 22,86%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 28,57%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 34,28%, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 37,14%, dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 42,86%.

4. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R

Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) adalah Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 2,74%.

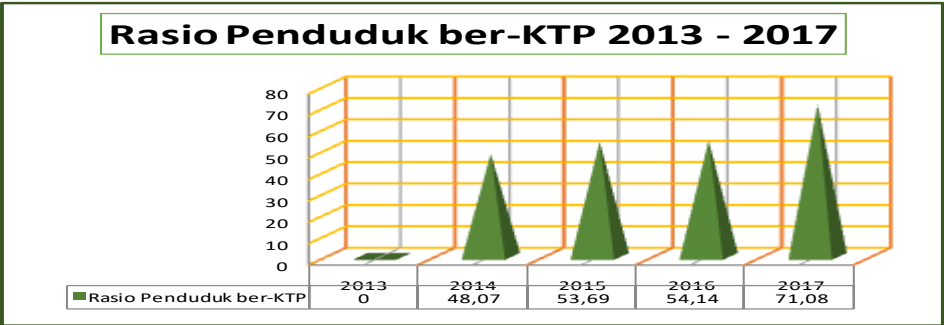
E. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk adalah jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP dibanding dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.75.

Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2018

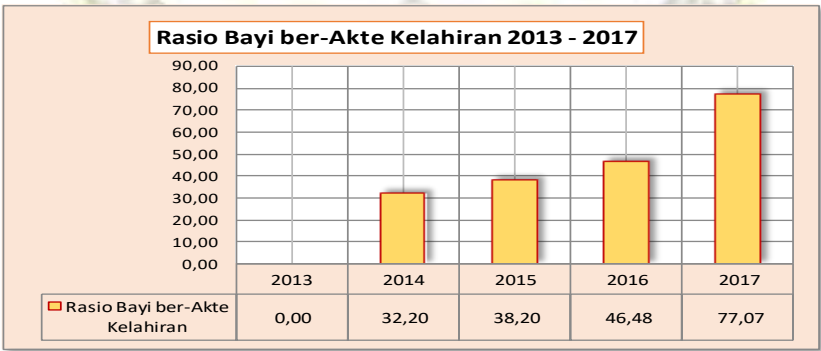
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 0%, Tahun 2014 naik menjadi 48,07%, Tahun 2015 naik menjadi 53,69%, Tahun 2016 naik menjadi 54,14%, dan pada Tahun 2017 menjadi 71,08%.

2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk

Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.76.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2018

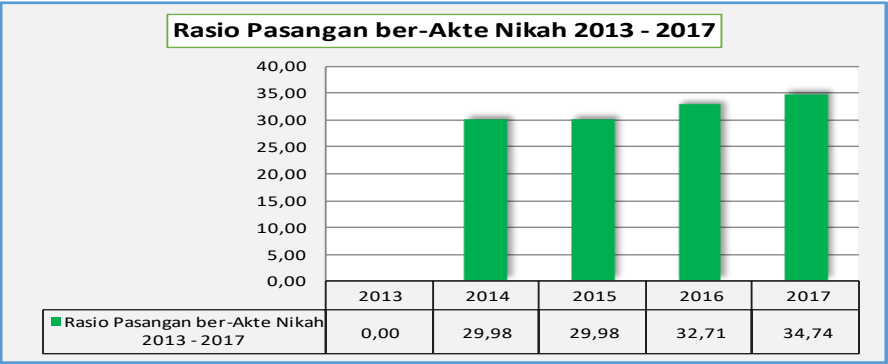
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 tidak dapat didata karena pada Tahun 2013 Kabupaten Sikka belum memiliki/menggunakan Sistem Informasi Administarasi Kependudukan (SIAK), Tahun 2014 sebanyak 32,20, Tahun 2015 naik menjadi sebanyak 38,20, Tahun 2016 naik menjadi sebanyak 46,48, dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebanyak 77,07.

3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Rasio Pasangan Berakta

Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.77.
Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2013 tidak dapat didata karena pada Tahun 2013 Kabupaten Sikka belum memiliki/menggunakan SIAK, Tahun 2014 dan 2015 sebanyak 29,98, Tahun 2016 naik menjadi 32,71, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 34,74.

4. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota

Database kependudukan di Kabupaten Sikka dilakukan secara rutin melalui program SIAK. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30.
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ketersediaan data base kependudukan skala kota | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Olahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota di Kabupaten Sikka Tahun 2013 belum memiliki/ menggunakan SIAK, namun sejak Tahun 2014-2017 tersedia data base kependudukan.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

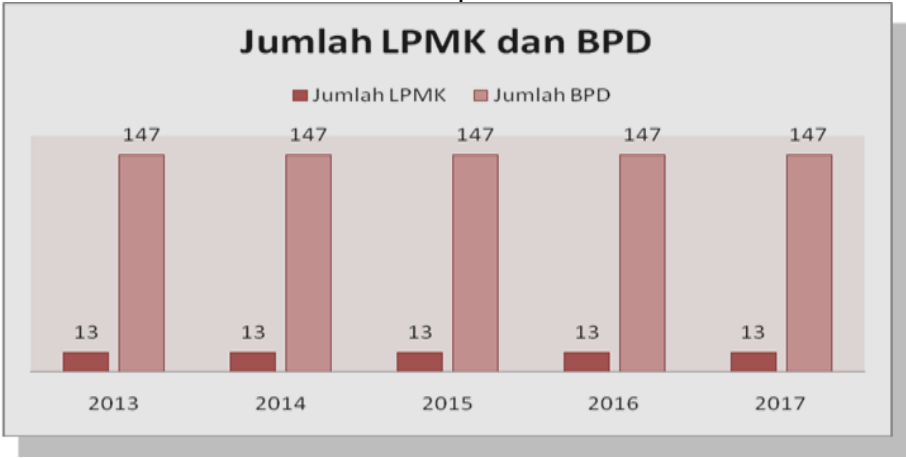
1. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

LPMK dan BPD adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh dan untuk rakyat, LPMK dan BPD adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

LPMK menjadi wadah dalam mensosialisasikan dan menggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan. Indikator jumlah kelompok binaan LPMK ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompok binaan LPMK, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPMK. LPMK dan BPD pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan

tidak memiliki kelompok binaan. Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.78.
Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



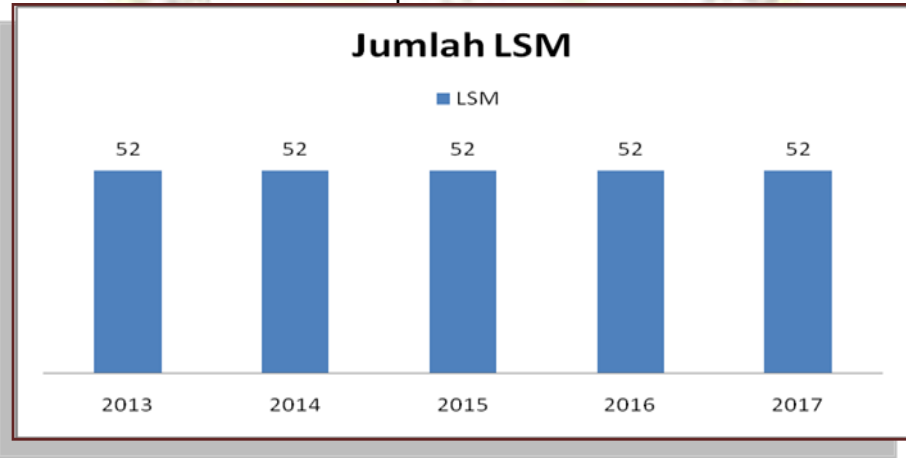
Sumber: Olahan Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas Jumlah LPMK dan BPD di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 berjumlah 160 lembaga yang terdiri dari 13 LPMK dan 147 BPD. Jumlah BPD akan bertambah sejalan dengan pendefenitifan 34 Desa Persiapan.

2. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSM melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng. Jumlah LSM di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.79.
Jumlah LSM di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



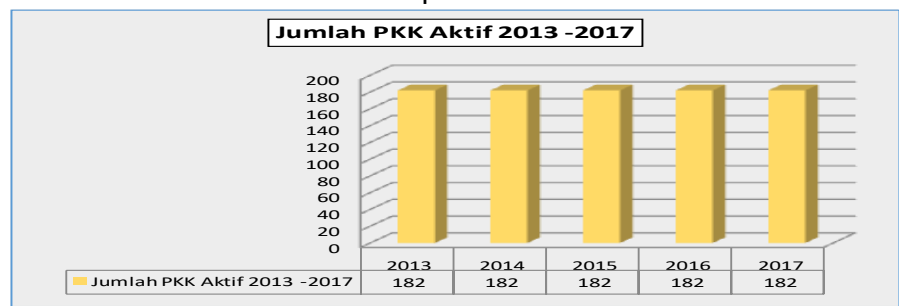
Sumber: Olahan Dinas PMD Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah LSM Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sikka sebanyak 52 lembaga.

3. Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif

PKK adalah kegiatan sekelompok kaum perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup yang paling kecil. Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.80.
Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

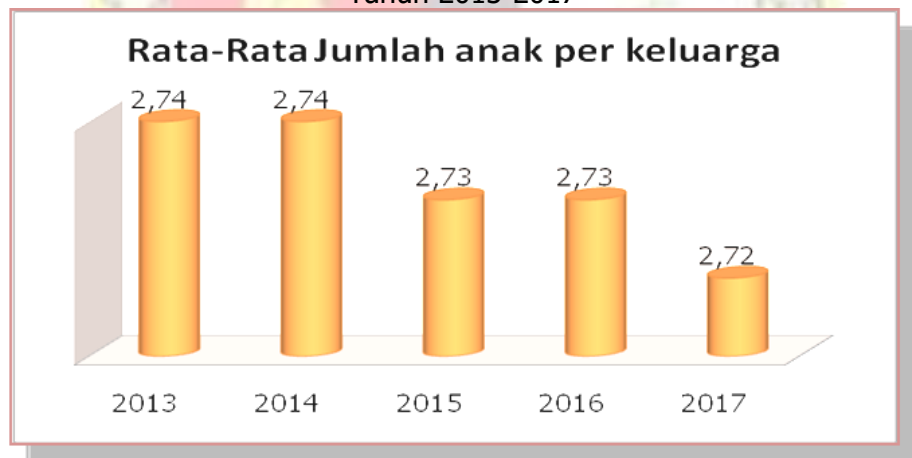
Berdasarkan data diatas Jumlah PKK aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebanyak 182 kelompok. Jumlah PKK aktif akan bertambah sejalan dengan pendefenitfan 34 Desa persiapan.

G. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samping dengan derajat ketiga. Anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.81.
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 2,74, Tahun 2015 turun menjadi 2,73, Tahun 2016 tetap sebesar 2,73, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 2,72.

2. Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Peserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.82.
Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan peserta KB aktif Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 53,03, Tahun 2014 naik menjadi 61,61, Tahun 2015 turun menjadi 54,25, Tahun 2016 turun menjadi 53,46, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 54,50.

3. Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Sedangkan sasaran dibentuknya Kampung KB adalah keluarga, pasangan usia subur, balita, remaja, lansia dan organisasi kemasyarakatan. Jumlah Kampung KB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31.
Jumlah Kampung KB di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018

| TAHUN 2016 | | | TAHUN 2017 | | | TAHUN 2018 | | |
|------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Desa Darat Pante | Kecamatan Talibura | 1 | Desa Wolorega | Kec. Paga | 1 | Desa Bu Selatan | Kecamatan Tanawawo |
| 2 | Desa Wailamun | Kecamatan Talibura | 2 | Desa Buu Watuweti | Kec. Tanawawo | 2 | Desa Manuriwu | Kecamatan Palue |
| 3 | Desa Gehera | Kecamatan Mego | 3 | Desa Korobhera | Kec. Mego | 3 | Desa Parumaan | Kecamatan Alok Timur |
| 4 | Desa Ian Tena | Kecamatan Kewapante | 4 | Desa Duu | Kec. Lela | | | |
| | | | 5 | Desa Nitakloang | Kec. Nita | | | |
| | | | 6 | Desa Koting C | Kec. Koting | | | |
| | | | 7 | Desa Manubura | Kec. Nelle | | | |
| | | | 8 | Desa Kojagete | Kec. Alok Timur | | | |
| | | | 9 | Kel. Kota Uneng | Kec. Alok | | | |
| | | | 10 | Kelurahan Wuring | Ke. Alok Barat | | | |
| | | | 11 | Desa Reroroja | Kec. Magepanda | | | |
| | | | 12 | Desa Tuanggeo | Kec. Palue | | | |
| | | | 13 | Desa Kringa | Kec. Talibura | | | |
| | | | 14 | Desa Pruda | Kec. Waiblama | | | |
| | | | 15 | Desa Hoder | Kec. Waigete | | | |
| | | | 16 | Desa Hale | Kec. Mapitara | | | |
| | | | 17 | Desa Nenbura | Kec. Doreng | | | |
| | | | 18 | Desa Wolonwalu | Kec. Bola | | | |
| | | | 19 | Desa Kajowair | Kec. Hewokloang | | | |
| | | | 20 | Desa Wairkoja | Kec. Kewapante | | | |
| | | | 21 | Desa Mekendetung | Kec. Kangae | | | |

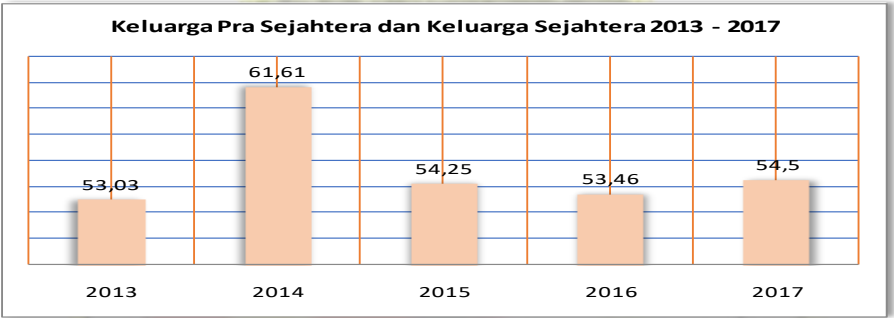
Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018 terus bertambah. Tahun 2016 sebanyak 4 kampung KB, Tahun 2017 bertambah 21 kampung KB, Tahun 2018 bertambah 3 kampung KB. Hingga Tahun 2018 jumlah Kampung KB menjadi 28 kampung KB.

4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan dasar minimal yaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I (satu) merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan. Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.83.
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Sikka, 2018

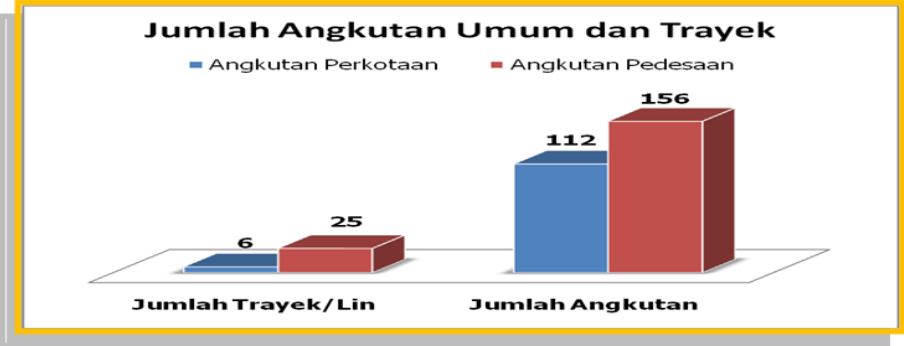
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 53,03, Tahun 2014 naik menjadi 61,61, Tahun 2015 turun menjadi 54,25, Tahun 2016 turun menjadi 53,46, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 54,50.

H. Perhubungan

1. Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan

Indikator Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Jalan adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada yang melayani wilayah dengan jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan. Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.84.
Jumlah Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan Jalan
di Kabupaten Sikka Tahun 2017

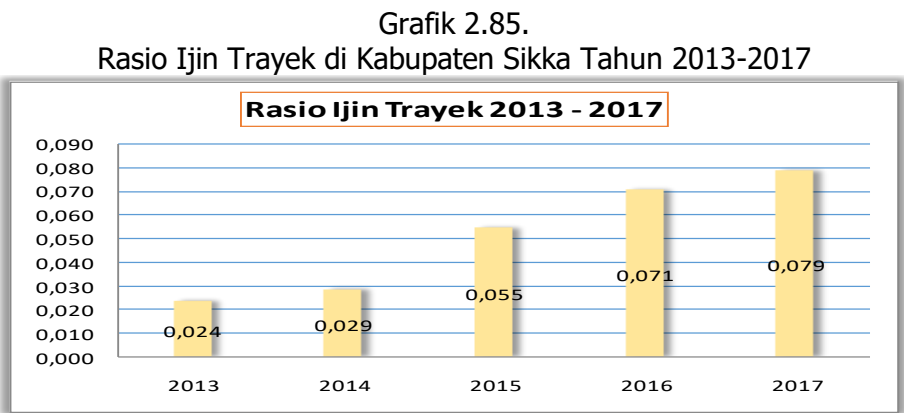


Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan di Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 6 trayek/lin perkotaan dengan 112 unit angkutan dan 25 trayek/lin pedesaan dengan 156 unit angkutan.

2. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kota antar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan, serta jaringan trayek pedesaan. Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

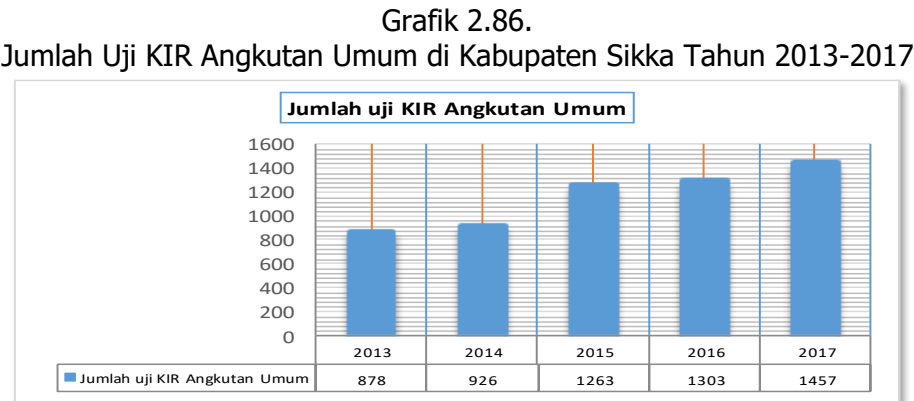


Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 0,024, Tahun 2014 naik menjadi 0,029, Tahun 2015 naik menjadi 0,055, Tahun 2016 naik menjadi 0,071, Tahun 2017 naik menjadi 0,079.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi (1) Uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5.827 Angkutan Umum.

4. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum adalah lamanya waktu yang digunakan untuk melakukan KIR kendaraan. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kabupaten Sikka selama 26 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 3 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 5 menit, penyetoran plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit, pengambilan buku selama 3 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 26 menit untuk masing-masing kendaraan.

5. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus adalah sarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian.

Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Tahun | Fasilitas Perhubungan | | | |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | Pelabuhan Udara | Pelabuhan Laut | Tambatan Perahu | Terminal Bus |
| 2013 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2014 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2015 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2016 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 2017 | 1 | 5 | 11 | 2 |

Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2017 jumlah pelabuhan udara sebanyak 1 unit, pelabuhan laut 5 unit, tambatan perahu sebanyak 11 unit dan terminal bus sebanyak 2 unit.

I. Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Indikator Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal seperti yang tertulis dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 adalah jenis surat kabar nasional dan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional yang masuk ke daerah berjumlah 1 (Kompas) dan Surat kabar lokal terdiri dari Pos Kupang, Flores Pos, Media NTT, Suara Flores, E-kora, Viktory News, Timor Ekspres.

2. Jumlah Penyiaran Radio Lokal

Indikator jumlah penyiaran radio lokal adalah jumlah penyiaran radio yang masuk ke daerah. Jumlah penyiaran radio yang di Kabupaten Sikka sejumlah 6 yang terdiri dari 1 unit RSPD Sikka dengan nama Radio Suara Sikka dan 2 Radio Swasta (Rogate FM dan Sonia FM) dan 3 radio komunitas (FAS FM, SMAK Bhaktiyarsa FM dan Medika FM).

3. Website Milik Pemerintah Daerah

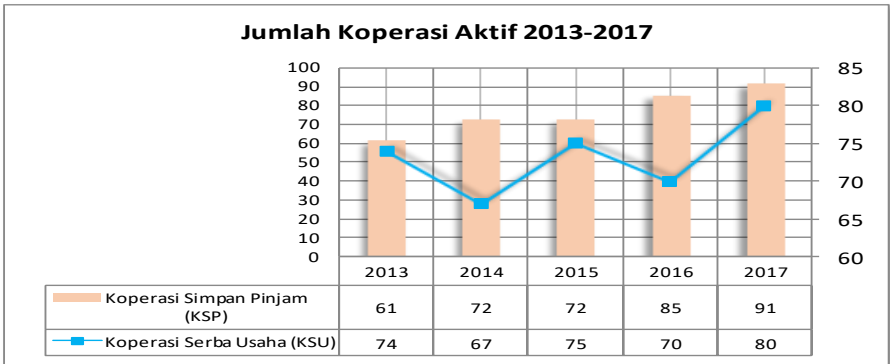
Kabupaten Sikka memiliki website yang rutin diisi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, yakni www.sikkakab.go.id. Website tersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Dalam pengembangan manajemen sistem informasi untuk menunjang kinerja serta membangun sistem pemerintahan yang akuntabel telah dikembangkan berbagai aplikasi seperti *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, LPSE dan SIMDA.

J. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan *kesejahteraan* masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.87.
Jumlah KSP dan KSU Aktif di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



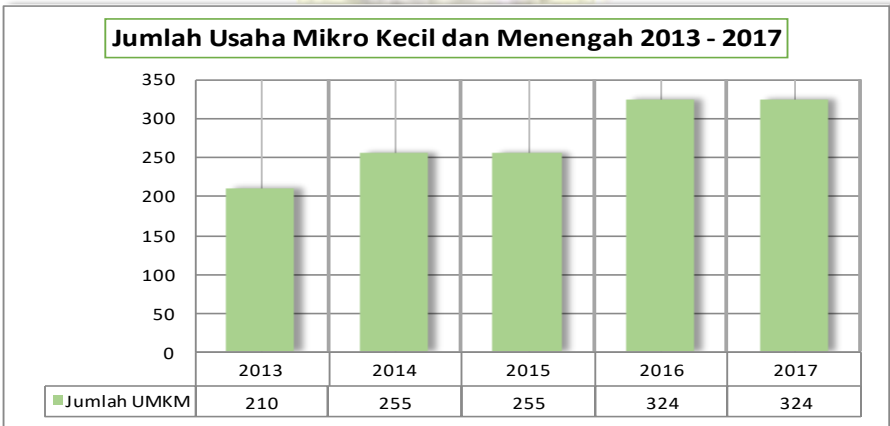
Sumber: Olahan Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah KSP dan KSU Aktif di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 Jumlah KSP Aktif sebanyak 91 KSP, Sedangkan jumlah KSU Aktif sebanyak 80 KSU.

2. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.88.
Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PERINDAGKOP Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas Jumlah UMKM di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 324 UMKM. Selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 114 UMKM.

K. Penanaman Modal

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kabupaten Sikka banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.89.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PM SATAP Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 Nilai Investasi sebesar Rp30.925.650.000, pada Tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp41.397.496.105. Pada tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp1.054.038.959.749. Pada tahun 2016 turun menjadi sebesar Rp910.850.304.002 dan pada tahun 2017 turun menjadi sebesar Rp218.585.816.710.

2. Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah Nilai Investasi PMA di Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar Rp59.040.761.649,00 yang bersumber dari 15 perusahaan asing yang menanamkan modal. Invenstasi PMA di Kabupaten Sikka masih didominasi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan serta ekspor dan impor hasil alam seperti komoditi pertanian dan perkebunan serta hasil laut.

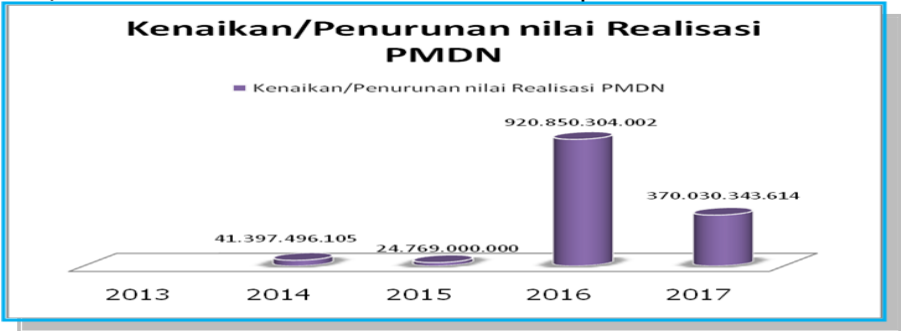
3. Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 sebanyak 1.498 orang.

4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah realisasi PMDN tahun evaluasi dikurangi realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi dibanding dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.90.
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas PM SATAP Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 Realisasi PMDN sebesar Rp41.397.496.105, pada tahun 2015 turun menjadi sebesar Rp24.769.000.000, pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp920.850.304.002. Pada tahun 2017 turun menjadi sebesar Rp370.030.343.614.

L. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan Pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 60 organisasi kepemudaan.

2. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2017 sebanyak 53 klub yang tersebar di 13 cabang Olah raga yang meliputi : Sepak bola, Bola Voly, Atletik, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Kempo, Tinju, Tarung Derajat, Bulu Tangkis, Tenis Lantai, Tenis Meja dan Catur.

3. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebanyak 32 kegiatan dari beberapa cabang olah raga.

4. Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga

Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 32 sarana olah raga.

M. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya

Kabupaten Sikka mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya. Sampai dengan Tahun 2017 telah diselenggarakan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang melibatkan 93 sanggar seni budaya bertempat di Pusat Jajanan dan Cendramata Maumere.

2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 1 sarana yaitu Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere.

3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa. Di Kabupaten Sikka terdapat 25 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dijaga oleh pemerintah antara lain ; Gereja Tua Sikka, Gereja Tua Lela, Wisung Fatima Lela, Museum Blikon Blewut Ledalero, Rumah adat Lepo Kirek Hewokloang, Miniatur Perahu Perunggu Jong Dobo Desa Iantena, Tugu Kristus Raja, Regalia Kerajaan Kangae.

N. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 518 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan pemerintah, sekolah dan perpustakaan desa.

2. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk

Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk adalah jumlah perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



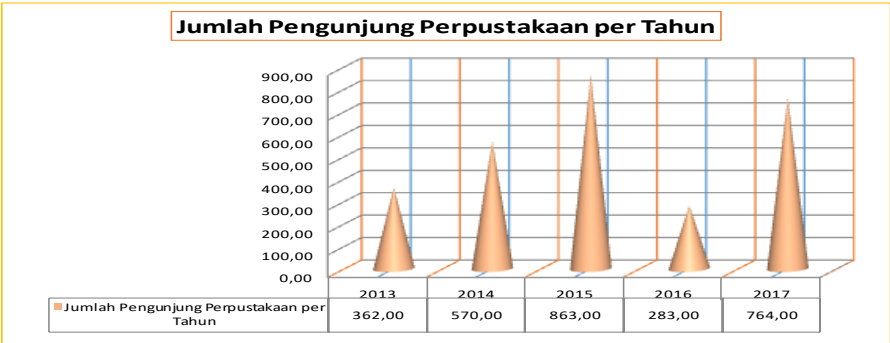
Sumber: Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Rasio jumlah perpustakaan Tahun 2013 sebesar 1,68, pada Tahun 2014 turun menjadi 1,66, Tahun 2015 turun menjadi 1,65, pada Tahun 2016 turun menjadi 1,64, Pada Tahun 2017 turun menjadi 1,63. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk sedangkan jumlah perpustakaan tidak mengalami penambahan.

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.92.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber : Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2013 sebanyak 362, Tahun 2014 naik menjadi 570, Tahun 2015 naik menjadi 863, Tahun 2016 turun menjadi 283 dan Tahun 2017 naik menjadi 764 pengunjung.

4. Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5.391 Judul Buku.

O. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Kegiatan pembinaan tersebut berupa seminar yang membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaan lembaga yang baik. Sampai dengan Tahun 2017 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan kepada 52 LSM, 60 Organisasi Kepemudaan dan 13 Karang Taruna Kelurahan.

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Pembinaan Partai Politik Daerah merupakan kegiatan pembinaan politik dilakukan terhadap 11 Partai Politik di Kabupaten Sikka. Dalam Pembinaan Partai Politik Daerah, pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembinaan partai politik.

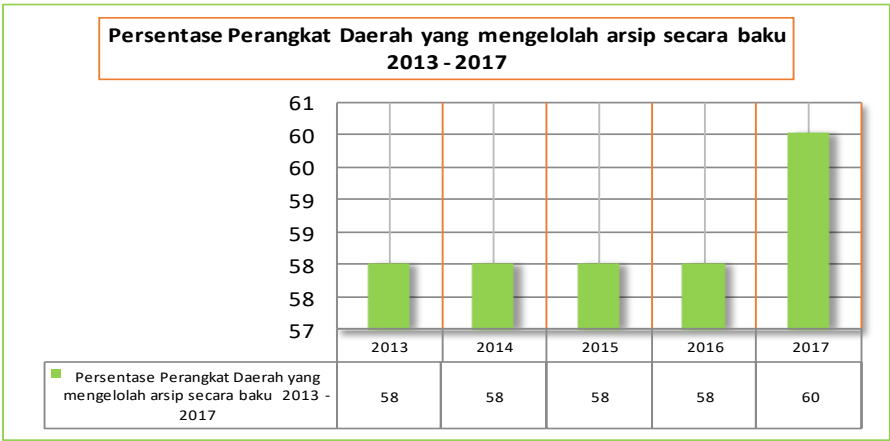
P. Statistik

Statistik merupakan basis data yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Semua bentuk perencanaan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Indikator pada aspek statistik adalah tersedianya buku “Sikka dalam Angka” dan buku “PDRB”.

Q. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis dan perkembangan kekinian. Sistem informasi kearsipan di Kabupaten Sikka mewajibkan semua perangkat daerah yang menghasilkan dokumen pemerintah dapat menyerahkan dokumennya untuk dijadikan Arsip. Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.93.
Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sikka, 2018

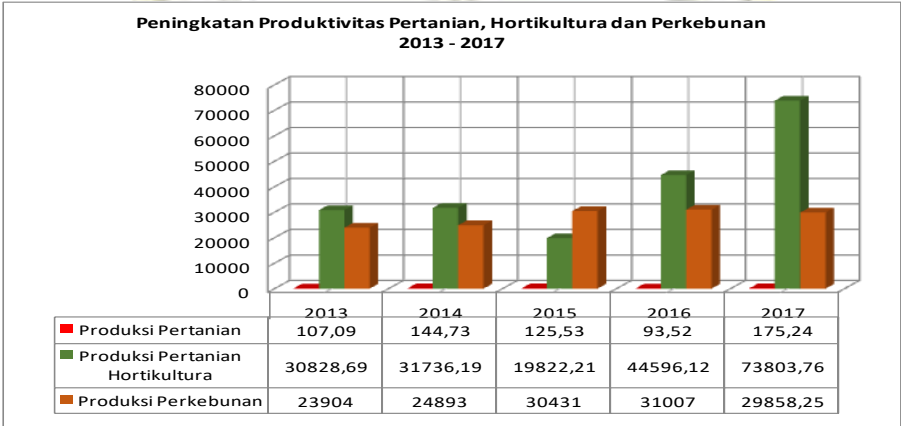
Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang mengelolah arsip secara baku di Kabupaten sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 60% dari 65 Perangkat Daerah.

2.3.3. Fokus Layanan Pilihan
A. Pertanian

1. Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yang memengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2) lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.94.
Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 berdasarkan sub sektor berturut-turut sebagai berikut :

- Produksi Padi dan Palawija mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebanyak 107,09 ton, Tahun 2014 naik menjadi 144,73 ton, Tahun 2015 turun menjadi 125,53 ton, Tahun 2016 turun menjadi 93,52 ton dan pada Tahun 2017 naik menjadi 175,24 ton.
- Produksi Hortikultura mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebanyak 30.828,69 ton, Tahun 2014 naik menjadi 31.736,19 ton, Tahun 2015 turun menjadi 19.822,21 ton, Tahun 2016 naik menjadi 44.596,12 ton, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 73.803,76 ton.

- Produksi Perkebunan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebanyak 23.904 ton, Tahun 2014 naik menjadi 24.893 ton, Tahun 2015 naik menjadi 30.431 ton, Tahun 2016 naik menjadi 31.007 ton, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 29.858,25 ton.

2. Pengembangan Sektor Perkebunan

Untuk sub sektor Perkebunan, komoditi yang mempunyai produksi yang cukup besar selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah komoditi Kelapa, Jambu Mente, dan Kakao. Rincan produksi tanamanperkebunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Luas Areal dan Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2018

| NO | KOMODITI | LUAS AREAL | | | | PRODUKSI (TON) | | | | PRODUKTIVITAS (Kg/ha) | | | |
|----|--------------|------------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|---------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kelapa | 19.872 | 20.022 | 20.022 | 20.022 | 7.029 | 7.029 | 7.029 | 7.099 | 343.7 | 344 | 343.7 | 350.4 |
| 2 | Jambu Mente | 21.674 | 21.674 | 21.674 | 21.824 | 6.868 | 6.868 | 6.936 | 6.936 | 386.4 | 386 | 386.4 | 317.8 |
| 3 | Kopi Robusta | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 128 | 128 | 128 | 128 | 189468 | 189,468 | 189468 | 189468 |
| 4 | Kakao | 21.657 | 21.907 | 22.057 | 22.257 | 6.409 | 7.151 | 6.650 | 7.151 | 295.9 | 330 | 295.9 | 321.3 |
| 5 | Kemiri | 630 | 630 | 630 | 630 | 71 | 71 | 71 | 71 | 112.7 | 113 | 112.7 | 112.7 |
| 6 | Kapuk | 440 | 440 | 440 | 440 | 27 | 27 | 27 | 27 | 61.4 | 61 | 61.4 | 61.4 |
| 7 | Cengkeh | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 145 | 145 | 145 | 145 | 97119.9 | 97,120 | 97119 | 97119 |
| 8 | Pinang | 53 | 53 | 53 | 53 | 11 | 11 | 11 | 11 | 207.5 | 208 | 207.5 | 207.5 |
| 9 | Vanili | 618 | 618 | 618 | 618 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95.0 | 95 | 95.0 | 8.1 |
| 10 | Lada | 163 | 163 | 163 | 163 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126.1 | 126 | 126.1 | 110.4 |
| 11 | Jarak Pagar | 479 | 479 | 479 | 479 | 50 | 50 | 50 | 50 | 104.4 | 104 | 104.4 | 104.4 |
| 12 | Pala | 370 | 370 | 370 | 370 | 25 | 25 | 25 | 25 | 67.6 | 68 | 67.6 | 67.6 |
| 13 | Tembakau | 236 | 236 | 236 | 236 | 26 | 26 | 26 | 26 | 110.2 | 110 | 110.2 | 110.2 |

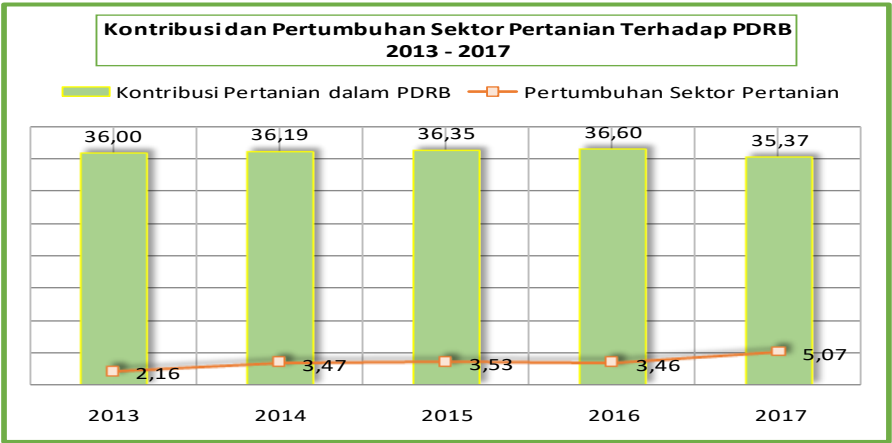
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka, 2018.

Produksi komoditi kelapa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tetap dengan jumlah produksi sebanyak 7.029 ton, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.099 ton. Produksi komoditi jambu mente pada tahun 2009 dan 2010 tetap, yakni sebesar 6.868 ton, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6.936 ton, dan tahun 2012 nilai produksinya sama dengan tahun 2011. Jumlah produksi komoditi kakao pada tahun 2009 sebanyak 6.409 ton, meningkat menjadi 7.151 ton pada tahun 2010, kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 6.650 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 7.151 ton. Selain itu, untuk 3 komoditi perkebunan tersebut memiliki luas area cukup besar. Untuk komoditi kelapa, pada tahun 2009 luas arealnya seluas 19.872 Ha, meningkat menjadi 20.022 Ha pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Luas areal jambu mente selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2011 tetap seluas 21.674 Ha, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 21.824 Ha. Luas areal kakao cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2009, luas areal kakao seluas 21.657 Ha, meningkat pada tahun 2010 menjadi 21.907 Ha, pada tahun 2011 meningkat menjadi 22.057 Ha, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 22.257 Ha.

3. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.95.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2018

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2013 sebesar 36,00%, Tahun 2014 naik menjadi 36,19%, Tahun 2015 naik menjadi 36,35%, Tahun 2016 naik menjadi 36,60%, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 35,37%.

Jika dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 26,63%, Kabupaten Ende sebesar 26,72% dan Provinsi NTT sebesar 28,72% maka Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka masih lebih tinggi.

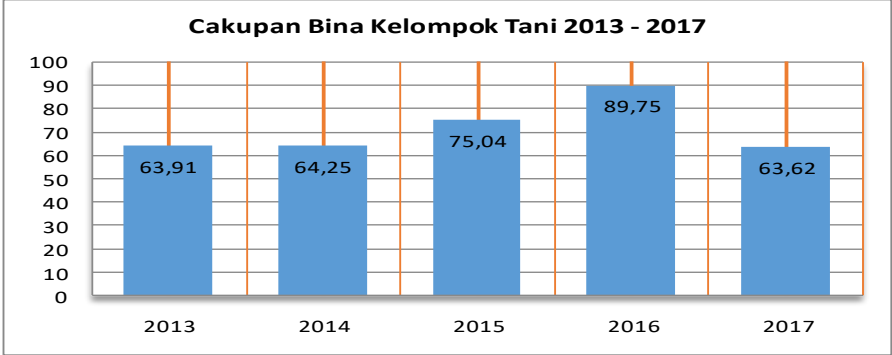
Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 2,16%, Tahun 2014 naik menjadi 3,47%, Tahun 2015 naik menjadi 3,53%, Tahun 2016 turun menjadi 3,46%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 5,07%.

Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 4,19%, Kabupaten Ende sebesar 4,92% dan Provinsi NTT sebesar 4,88% maka Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sikka masih lebih tinggi.

4. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok Tani merupakan bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kabupaten Sikka. Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.96.
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 63,91%, Tahun 2014 naik menjadi 64,25%, Tahun 2015 naik menjadi 75,04%, Tahun 2016 naik menjadi 89,75%, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 63,62%.

B. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan salah satu sektor yang cukup cukup berpotensi dalam pengembangan. Pariwisata merupakan satu fenomena baru yang bersifat multi sektor dan melibatkan berbagai kegiatan, dimana Pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata juga pengusaha objek dan usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor jasa terpenting yang berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian. Perkembangan pariwisata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan sektor lain yang terkait dengan sektor pariwisata, dengan demikian pariwisata juga merupakan satu bisnis.

1. Potensi Wisata

Potensi wisata di Kabupaten Sikka terdiri dari wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata.

a. Potensi wisata alam, yang dapat di dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34

Data Obyek Daya Taris Wisata Alam

| No. | Jenis Data | Keterangan |
|-----|---|--|
| 1. | Kawasan taman wisata alam gugus pulau teluk Maumere | Memiliki variasi / corak terumbu karang, ikan hias, hutan bakau dan padang lumut |
| 2. | Kawasan hutan wisata Pulau Besat | Memiliki keragaman Flora dan Fauna seperti rusa, babi hutan dan kelelawar |
| 3. | Puncak Buleng | Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura |
| 4. | Puncak Kimang | Keindahan panorama alam dengan keragaman tanaman holtikultura |
| 5. | Mata Air Panas Blidit | Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 di dalam kawasan hutan |
| 6. | Air Terjun Tunaohok | Air terjun setinggi 40 meter di Kawasan hutan lindung Egon |
| 7. | Gua alam Patiahu | Gua alam dengan stalaktit dan stalakmit yang menarik dan terdapat banyak kelelawar |
| 8. | Hutan wisata Egon | Memiliki panorama hutan dan berbagai jenis satwa |
| 9. | Gunung api egon | Memiliki panorama kawa vulkanik dan untuk kegiatan hiking |
| 10. | Tebing alam Halar Hawua | Tebing alam yang menarik dan terdapat berbagai jenis tanaman perkebunan |
| 11. | Mata air panas Krenget | Sumber mata air panas dengan suhu 50-80 |
| 12. | Gua alam Keitimu | Gua alam dengan habitat kelelawar kecil |
| 13. | Liang nipon Rengsina | Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II |
| 14. | Gua alam Warut | Gua alam dijadikan sebagai benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II |
| 15. | Dala Elat | Batu meteor berdiameter 25 cm yang memiliki daya magic dan sakral |
| 16. | Tebing alam Watu Ngesu | Tebing alam yang menarik dengan susunan batu berlapis |
| 17. | Gunung api Rokatenda | Memiliki panorama gunung api dengan kawa vulkanik |
| 18. | Penyulingan uap panas bumi | Penyulingan uap panas bumi secara tradisional untuk kebutuhan air minum |
| 19. | Mata air panas Poha | Mata air panas pada pinggir pantai dengan suhu 75-100 C |
| 20. | Air terjun Lianiki | Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter |
| 21. | Pulau Kondo | Pulau kecil, tidak dihuni, nyaman bagi wisatawan |
| 22. | Tebing alam Natar | Tebing alam yang menarik terdapat tanaman perkebunan di sekitarnya |
| 23. | Mata air panas Liwun Huler | Mata air panas dengan suhu 75-100 C |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2018.

b. Potensi wisata budaya yang dapat di dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35

Data Obyek Daya Tarik Wisata Budaya Kabupaten Sikka

| No | Jenis Data | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---|
| 1. | Rumah Adat Lepo Kirek | Rumah adat dengan koleksi peninggalan bersejarah seperti gading tua, keramik cina dan artefak lainnya |
| 2. | Rumah Adat Lepo Gete | Peninggalan istana Raja Sikka |
| 3. | Rumah Adat Mbengu | Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti kris, perisai, piring cina, peralatan tenun tradisional dan Gong Waning |
| 4. | Rumah Adat Wolo Bela | Rumah Adat dengan koleksi peninggalan sejarah seperti meriam miniatur, piring cina dan peralatan upacara Ka Uwi |
| 5. | Rumah Adat Nuabari | Rumah Adat juga terdapat benda warisan leluhur |
| 6. | Museum Bikon Blewut | Museum terbesar di NTT yang dikelola oleh STFK Ledalero yang menghimpun berbagai koleksi peninggalan purbakala seperti stagedon, berbagai alat musik, mata uang kuno dan berbagai fosil tua |
| 6. | Kubu Batu Nuabari | Warisan Megalitikum yang merupakan situs pekuburan batu tradisional masyarakat setempat |
| 7. | Miniatur Jong Dobo | Warisan budaya Dongson berupa miniatur perahu yang memiliki daya sakral dan magic yang tinggi |
| 8. | Perkampungan tradisional Wuring | Perumahan tradisional suku Bajo di atas laut dengan berbagai tata kehidupan tradisional |
| 9. | Regalia Kerajaan Sikka | Warisan pakaian kerajaan yang terbuat dari emas berupa mahkota, kalung, kris, dan tongkat sebagai simbol kebesaran Raja Sikka |
| 10. | Regalia Kerajaan Nita | Warisan kerajaan Nita berupa gading, emas, pakaian, tongkat kerajaan sebagai simbol kebesaran Raja Nita |
| 11. | Regalia kerajaan Kangae | Rumah adat dan terdapat beberapa benda warisan leluhur |
| 12. | Pigang Tawatana | Piring porselin buatan cina terdiri dari pigang zoroni, Lerohae, Retarai, Laueri, Lero Meseng dan Pigang Unu Nereng Tawu Klewak |
| 13. | Rumah adat Watulaki | Rumah adat ukuran 3x4m, terdapat tombak dan perisai |
| 14. | Rumah adat Tubu Kobe | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Tu Teu |
| 15. | Rumah adat Ndeo | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 16. | Rumah adat Lei | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 17. | Rumah adat Tomu | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 18. | Rumah adat Cawalo | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 19. | Rumah adat Koa | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 20. | Rumah adat Nitung | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 21. | Rumah adat Cua | Peninggalan purbakala dan pusat upacara Patikarapau |
| 22. | Liang Nipon Rengsina | Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu |
| 23. | Megalit Romanduru | Batu besar tempat pemberian sesajen pada leluhur |
| 24. | Liang Nipon Watuliwuwung | Benteng pertahanan Jepang pada perang dunia II melawan sekutu |
| 25. | Utan Beke Hewokloang | Memiliki nilai magic dan sakral |
| 26. | Nua Bharaka Lekebai | Kubur batu tempat disemayamkan tulang belulang leluhur rumpun mego |
| 27. | Pondok Tradisional Wailamung | Pondok dengan konstruksi lokal, tersimpan alba/juba pastor, kaliks emas dan piring keramik peninggalan portugis. |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2018.

c. Potensi wisata rohani, yang dapat di dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.36

| Data Obyek Daya Tarik Wisata Rohani | | |
|-------------------------------------|--|---|
| No | Jenis Data | Keterangan |
| 1. | Patung Kristus Raja | Simbol kekatolikan Kabupaten Sikka dan Pelindung Kota Maumere yang diberkati oleh Sri Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 |
| 2. | Wisung Fatima Lela, Bangunan Tua dan Gereja Tua Lela | Tempat ziarah umat katolik tertua di Flores dengan arca Bunda Maria Portugis |
| 3. | Tempat Ziarah Nilo | Terdapat patung Bunda Maria Segala Bangsa |
| 4. | Gua Maria Watusoking | Tempat ziarah umat katolik dan terdapat panorama alam |
| 5. | Gua Maria Dian Desa | Tempat ziarah umat katolik dan dapat menikmati panorama pantai |
| 6. | Gua Fatima Hokor | Tempat ziarah umat katolik |
| 7. | Rumah Retret St. Nabi Elia | Pusat Kegiatan Rohani |
| 8. | Pertapaan Kelikeo | Pertapaan Rohani dan memiliki panorama alam pegunungan yang indah dan sejuk. |
| 9. | Gereja Tua Sikka | Gereja dengan arsitek kuno Eropa terdapat salib Senhor, Menino |
| 10. | Gua Maria Kesokoja | Tempat ziarah umat katolik dipuncak bukit terdapat penyulingan uap panas bumi Nuhan Kaju |
| 11. | Gua Maria Krokowolon | Tempat wisata rohani pada pinggir pantai |
| 12. | Wair Nokerua | Sumber air panas di tepi pantai yang keluar dari batu cadas, menurut iman katolik dapat menyembuhkan penyakit karena hasil tancapan tongkat St. Fransiskus Xaverius dalam misi menyebarkan agam katolik di Pulau Flores |
| 13. | Watu Krus Bola | Salib peninggalan Protugis di atas batu karang di kawasan laut. |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2018.

d. Wisata Bahari yang dapat di dilihat pada tabel berikut
Tabel. 2.37

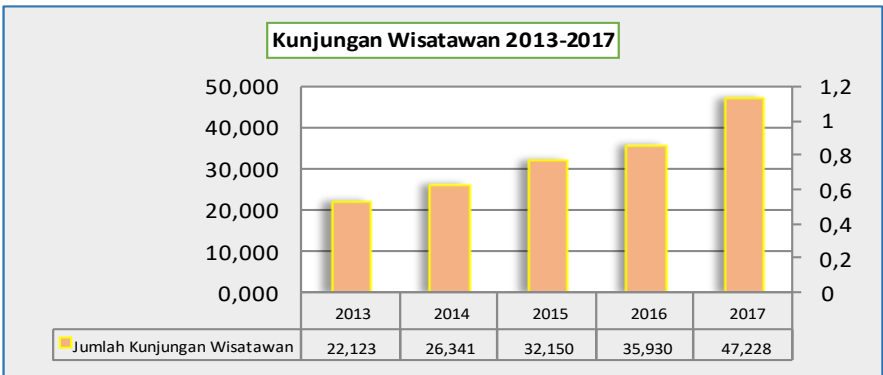
| Data Obyek Daya Tarik Wisata Bahari Kabupaten Sikka | | |
|---|--|---|
| No | Jenis Data | Keterangan |
| 1. | Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere | Memiliki keindahan panorama alam bawah laut dengan variasi coral, ikan hias, hutan bakau dan bentangan pantai pasir putih |
| 2. | Pantai Sikka | Pantai berpasir putih dengan variasi koral |
| 3. | Pantai Koka | Pantai berpasir putih dengan variasi koral |
| 4. | Pantai Doreng | Pantai berpasir putih |
| 5. | Pantai Paga | Pantai berpasir putih |
| 6. | Pantai Pulau Besar | Pantai berpasir putih |
| 7. | Pantai Pulau Kambing | Pantai berpasir putih |
| 8. | Pantai Reruwairere | Pantai berpasir putih |
| 9. | Pantai Ngolo | Pantai berpasir putih |
| 10. | Pantai Bangboler | Panorama pantai yang indah |
| 11. | Pantai Ipir | Panorama pantai yang indah |
| 12. | Pantai Pulau Pangabatang | Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau |
| 13. | Pantai Pulau Babi | Pantai berpasir putih dan terdapat hutan bakau |
| 14. | Pantai Waiara | Pantai berpasir putih, terdapat hotel Sao Wisata dan Pondok Dunia Laut (Sea Word Club) |
| 15. | Pantai Wailiti | Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu |
| 16. | Pantai Wingawoka | Pantai berpasir putih. hutan bakau, kera, lebah dan madu |
| 17. | Pantai Nangahure | Pantai berpasir putih,hutan bakau dan terdapat hotel Gading Beach |
| 18. | Pantai Waturia | Pantai berpasir |
| 19. | Pantai Nangatobong | Pantai berpasir |
| 20. | Pantai Kajuwulu | Pantai berpasir, hutan bakau dan Puncak Bukit terdapat Salib Besar |
| 21. | Pantai Wailamung | Pantai berpasir dalam kawasan teluk |
| 22. | Pantai Wairterang | Pantai berpasir terdapat Cottage Egon, Cottage Wodong |

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka, 2018.

2. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di Kabupaten Sikka. Sektor Pariwisata memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata rohani yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisata. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.97.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



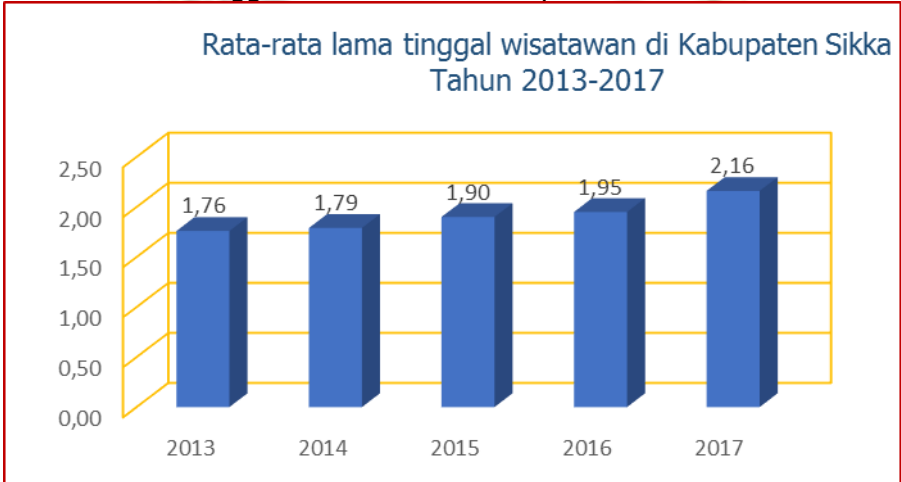
Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 jumlah kunjungan sebanyak 22.123 wisatawan, Tahun 2014 naik menjadi 26.341 wisatawan, Tahun 2015 naik menjadi 32.150 wisatawan, Tahun 2016 naik menjadi 35.930 wisatawan, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 47.228 wisatawan.

3. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata waktu tinggal wisatawan mancanegara di suatu wilayah untuk satu kali kunjungan. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.98.
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 rata-rata lama tinggal wisatawan selama 1,76 hari, Tahun 2014 naik menjadi 1,79 hari, Tahun 2015 naik menjadi 1,90 hari, Tahun 2016 naik menjadi 1,95, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 2,16 hari.

4. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Perhitungan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Kontribusi Sektor Pariwisata ditinjau dari Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.99.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 0,67, Tahun 2014 naik menjadi 0,69%, Tahun 2015 naik menjadi 0,72%, Tahun 2016 naik menjadi 0,75%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 1,07%.

Jika dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Flores Timur sebesar 0,10%, Kabupaten Ende sebesar 0,35%, Provinsi NTT sebesar 0,74% dan target SDGs sebesar 0,75% maka Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka masih lebih besar ari Provinsi NTT, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur dan target SDGs.

Sedangkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 8,33%, Tahun 2014 turun menjadi 7,09%, Tahun 2015 turun menjadi 5,47%, Tahun 2016 naik menjadi 6,96%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 8,01%.

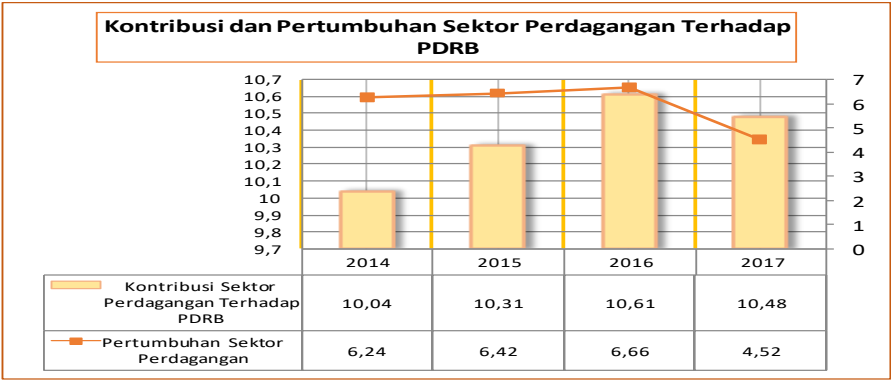
Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 5,19%, Kabupaten Ende sebesar 12,94% dan Provinsi NTT sebesar 13,59% dan maka Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur, namun lebih kecil dari Kabupaten Ende dan Provinsi NTT.

C. Perdagangan

1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Sikka. Sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Sikka terdiri dari dua sub sektor, yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran dan (2) Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.100.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 sebesar 10,04%, Tahun 2015 naik menjadi 10,31%, Tahun 2016 naik menjadi 10,61%, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 10,48%.

Jika dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 14,95%, Kabupaten Flores Timur 8,41%, dan Provinsi NTT sebesar 11,05% maka Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur namun lebih kecil dari Kabupaten Ende dan Provinsi NTT.

Sedangkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 sebesar 6,24%, Tahun 2015 naik menjadi 6,42%, Tahun 2016 naik menjadi 6,66% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 4,52%.

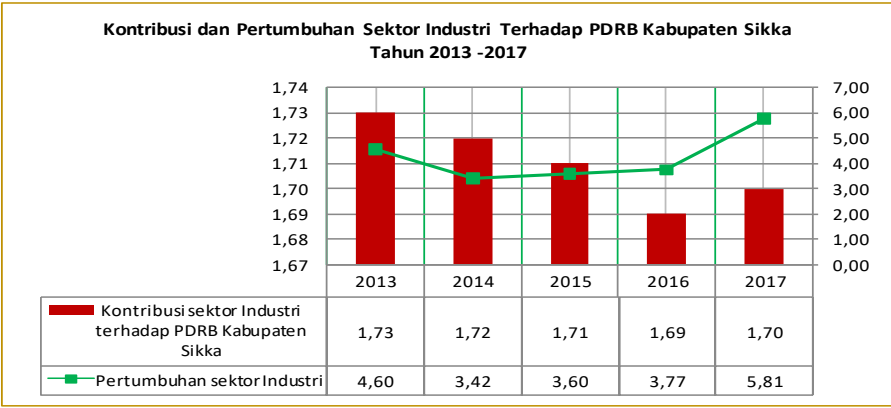
Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 4,92%, Kabupaten Flores Timur 4,44%, Provinsi NTT sebesar 4,45% maka Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih kecil dari Kabupaten Ende.

D. Perindustrian

1. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.101.
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB
di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 1,73%, Tahun 2014 turun menjadi 1,72%, Tahun 2015 turun menjadi 1,71%, Tahun 2016 turun

menjadi 1,69%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 1,70%.

Jika dibandingkan dengan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 0,83 %, Kabupaten Ende sebesar 1,48% dan Provinsi NTT sebesar 1,25% maka Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka masih lebih besar.

Sedangkan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 4,60%, Tahun 2014 turun menjadi 3,42%, Tahun 2015 naik menjadi 3,60%, Tahun 2016 naik menjadi 3,77% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 5,81%.

Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 5,57%, Kabupaten Ende sebesar 4,30% dan Provinsi NTT sebesar 7,36% maka Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende, namun lebih kecil dari Provinsi NTT.

E. Perikanan

1. Potensi Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan sebagian wilayahnya adalah lautan, potensi lestari perikanan tangkap diperkirakan mencapai 21.175 ton/tahun. Potensi ini dikelola oleh 4.585 RTP, yang terdiri dari nelayan penuh sebanyak 2.342 Rumah Tangga Perikanan (RTP), nelayan sambilan utama sebanyak 828 RTP, nelayan sambilan tambahan sebanyak 635 RTP, dan buruh nelayan sebanyak 780 RTP. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.38

Status Nelayan Kabupaten Sikka Tahun 2018

| No | Status Nelayan | Jumlah RTP |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Nelayan Penuh | |
| 2. | Nelayan Sambilan Utama | |
| 3. | Nelayan Sambilan Tambahan | |
| 4. | Buruh Nelayan | |
| | Jumlah | |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018.

Jumlah armada dan perusahaan yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, meliputi: Jumlah Kapal Cakalang Pole and Line sebanyak 87 Unit, Kapal Purse Seine sebanyak 93 unit, Kapal Penangkap Tuna (Hand Line) sebanyak 339 unit, dan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan sebanyak 4 Perusahaan.

Untuk melakukan penangkapan ikan nelayan Kabupaten Sikka menggunakan pancing, jaring ikan hanyut, dan jaring insang tetap. Secara rinci jenis alat tangkap nelayan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39

Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan

| No | Jenis Alat Tangkap | Jumlah |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | Pukat Pantai | |
| 2. | Payang | |
| 3. | Pukat Cincin | |
| 4. | Jaring Isang tetap | |
| 5. | Jaring Isang hanyut | |
| 6. | Bagan | |
| 7. | Longline | |
| 8. | Huhate | |
| 9. | Pancing | |
| 10. | Bubu | |
| 11. | Lain-lain | |
| | Jumlah | |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018.

Armada yang digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut meliputi: Jukung, perahu papan kecil, perahu papan sedang, perahu papan besar, perahu motor tempel, kapal motor,

perahu fiber untuk pembudidayaan rumput laut. Jumlah yang paling banyak digunakan adalah Jukung, dengan jumlah sebanyak 1.700 unit. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Jenis Armada yang digunakan Nelayan

| No | Jenis Armada | Jumlah (unit) |
|----|--|---------------|
| 1. | Jukung | |
| 2. | Perahu papan kecil | |
| 3. | Perahu papan sedang | |
| 4. | Perahu papan besar | |
| 5. | Perahu motor tempel | |
| 6. | Kapal Motor | |
| 7. | Perahu fiber untuk pembudidaya Rumput laut | |
| | Jumlah | |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018.

Beberapa komoditi diekspor ke luar dari wilayah Kabupaten Sikka. Beberapa daerah yang menjadi wilayah tujuan pengiriman hasil ikan dan non ikan Kabupaten Sikka, antara lain Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Makasar. Jenis ikan maupun non ikan yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Sikka dengan jumlah besaran yang dikirim serta nilai rupiahnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Jenis Komoditi yang dikirim keluar wilayah Kabupaten Sikka

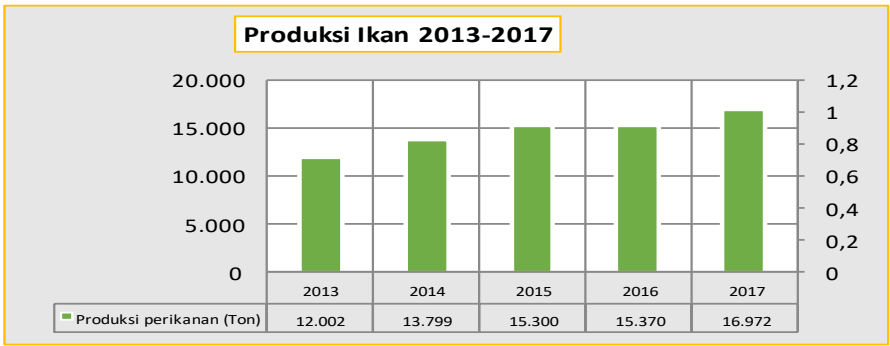
| No | Jenis Komoditi | Jumlah (Kg) | Nilai (Rp) | Daerah Tujuan |
|----|------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | IKAN (fish) | | | |
| 1. | Frozen Tuna | | | |
| 2. | Tuna Loin | | | |
| 3. | Ikan Kerapu Hidup | | | |
| 4. | Ikan Dasar Segar | | | |
| 5. | Cakalang Beku | | | |
| 6. | Tongkol Beku | | | |
| 7. | Deho Beku | | | |
| 8. | Layang Beku | | | |
| 9. | Ikan Kayu | | | |
| | Jumlah | | | |
| | BUKAN IKAN (non fish) | | | |
| 1. | Lobster Hidup | | | |
| 2. | Sirip Hiu | | | |
| 3. | Kerang Mutiara | | | |
| 4. | Japing-japing | | | |
| 5. | Teripang | | | |
| 6. | Rumput laut | | | |
| 7. | Gurita beku | | | |
| 8. | Tulang Pari | | | |
| | Jumlah | | | |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018.

2. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan adalah semua hasil produksi penangkapan, budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.102.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



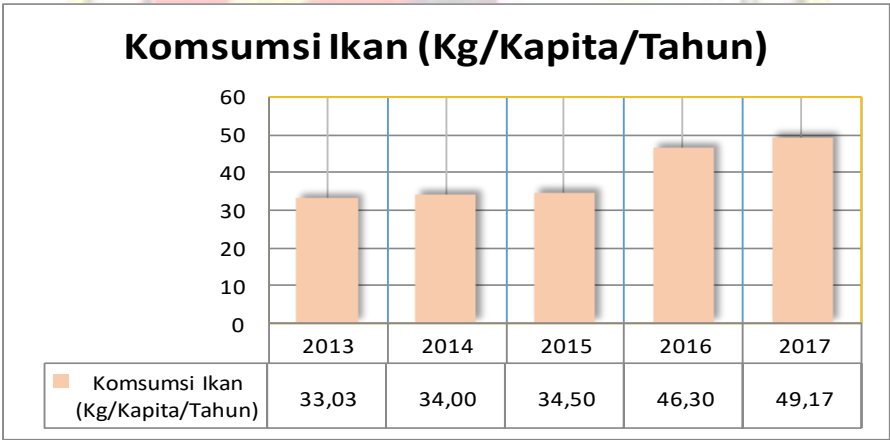
Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Produksi Perikanan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 12.002 ton, Tahun 2014 naik menjadi 13.799 ton, Tahun 2015 naik menjadi 15.300 ton, Tahun 2016 naik menjadi 15.370 ton, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 16.972 ton.

3. Konsumsi Ikan

Angka Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.103.
Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



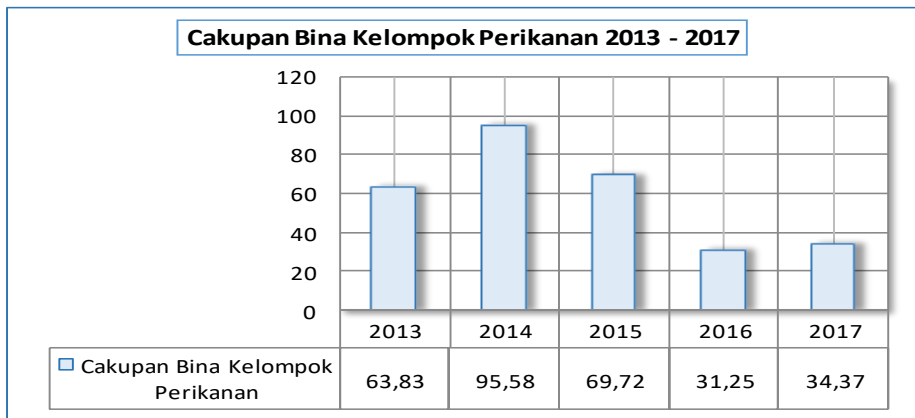
Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Konsumsi Ikan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 33,03 kg/kapita/tahun, Tahun 2014 naik menjadi 34,00 kg/kapita/tahun, Tahun 2015 naik menjadi 34,50 kg/kapita/tahun, Tahun 2016 naik menjadi 46,30 kg/kapita/tahun dan pada Tahun 2017 naik menjadi 49,17 kg/kapita/tahun.

4. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Kelompok Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengola ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta didalam lingkungan berpengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama perikanan. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah daerah berbanding dengan jumlah kelompok nelayan di wilayah tertentu setiap tahunnya. Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.104.
Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Olahan Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar 63,83%, Tahun 2014 naik menjadi 95,58%, Tahun 2015 turun menjadi 69,72%, Tahun 2016 turun menjadi 31,25% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 34,37%.

F. Ketransmigrasian

1. Jumlah Transmigran Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akan tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Jumlah Transmigran Swakarsa yang berasal dari Kabupaten Sikka Tahun 2005 sebanyak 180 transmigran dan pada Tahun 2009 sebanyak 39 transmigran. Sedangkan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 tidak ada peserta Transmigran Swakarsa.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah adalah kemampuan daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang disertai dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang relatif tinggi. Daya Saing Daerah dibentuk oleh faktor-faktor utama (input), baik bersifat endowment maupun diakibatkan oleh adanya interaksi aktifitas kegiatan masyarakatnya seperti: adanya perbedaan dalam lingkungan usaha produktif, struktur dan perekonomian daerah, perbedaan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di masing-masing daerah, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, serta kondisi lembaga keuangan dan perbankan yang ada.

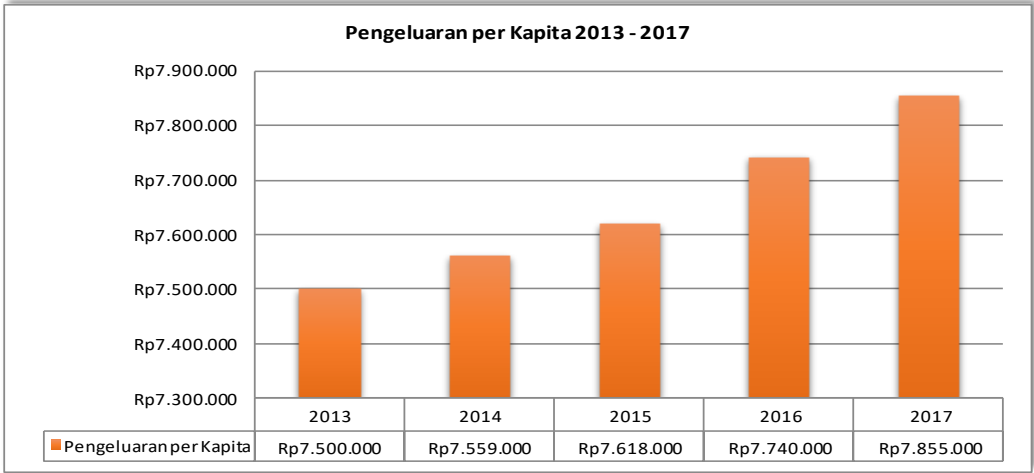
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah dari aspek daya saing daerah dapat dilihat dari pengeluaran per kapita penduduk. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Indikator Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan.

Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.105.
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sikka Tahun 2013 – 2017 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 sebesar Rp7.500.000,-, Tahun 2014 naik menjadi Rp7.559.000,- Tahun 2015 naik menjadi Rp7.618.000,-, Tahun 2016 naik menjadi Rp7.740.000,- dan pada Tahun 2017 naik menjadi Rp7.855.000,-.

Jika dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar Rp7.442.000,-, Kabupaten Ende sebesar Rp8.841.000,-, Kota Kupang sebesar Rp13.028.000,-, dan Provinsi NTT sebesar Rp7.350.000,- maka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih kecil dari Kabupaten Ende.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 sebesar 0,63%, Tahun 2015 turun menjadi 0,59%, Tahun 2016 turun menjadi 0,58%, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 3,06%.

2. Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Maumere per 1000 Penduduk

Rasio Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang Angkutan Darat adalah angka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Rasio Jumlah Angkutan Darat Per Penumpang Angkutan Darat Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 0,02178%, Tahun 2015 turun menjadi 0,02160%, Tahun 2016 naik menjadi 0,02172% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,02157%.

3. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal

Jumlah orang/barang yang masuk melalui terminal darat, bandar udara dan pelabuhan laut di Kabupaten Sikka dari Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42.
Jumlah Orang/Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Tahun | Jumlah arus kedatangan di terminal darat | | Jumlah arus kedatangan di Bandara Frans Seda | | Jumlah arus kedatangan di Pelabuhan L. Say | |
|-------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|
| | Orang | Barang (Ton) | Orang | Barang (Ton) | Orang | Barang/T/M3 |
| 2013 | 1.661.616 | 8.571 | 67.513 | 867.118 | 27.278 | 105.393 |
| 2014 | 1.555.200 | 7.773 | 69.983 | 898.612 | 78.927 | 78.375 |
| 2015 | 1.449.288 | 7.006 | 72.802 | 990.062 | 79.321 | 62.914 |
| 2016 | 1.275.048 | 5.894 | 89.431 | 1.078.823 | 72.712 | 84.138 |
| 2017 | 1.269.936 | 5.901 | 97.534 | 1.078.511 | 59.925 | 53.132 |

Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Orang/Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat, Bandar Udara dan Pelabuhan Laut di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat diuraikan berturut-turut sebagai berikut:

- Jumlah Arus Kedatangan Orang Di Terminal Darat Tahun 2013–2017 terus mengalami penurunan. Tahun 2013 sebanyak 1.661.616 orang, Tahun 2014 turun menjadi 1.555.200 orang, Tahun 2015 turun menjadi 1.449.288 orang, Tahun 2016 turun menjadi 1.275.048 orang, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 1.269.936 orang.
Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 8.571 ton, Tahun 2014 turun menjadi 7.773 ton, Tahun 2015 turun menjadi 7.006 ton, Tahun 2016 turun menjadi 5.894 ton, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 5.901 ton.
- Jumlah Arus Kedatangan Orang di Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 67.513 orang, Tahun 2014 naik menjadi 69.983 orang, Tahun 2015 naik menjadi 72.802 orang, Tahun 2016 naik menjadi 89.431 orang, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 97.534 orang.
Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 867.118 ton, Tahun 2014 naik menjadi 898.612 ton, Tahun 2015 naik menjadi 990.062 ton, Tahun 2016 naik menjadi 1.078.823 ton, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 1.078.511 ton.
- Jumlah Arus Kedatangan Orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 27.278 orang, Tahun 2014 naik menjadi 78.927 orang, Tahun 2015 naik menjadi 79.321 orang, Tahun 2016 turun menjadi 72.712 orang, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 59.925 orang.
Jumlah Arus Barang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 105.393 ton, Tahun 2014 turun menjadi 78.375 ton, Tahun 2015 turun menjadi 62.914 ton, Tahun 2016 naik menjadi 84.138 ton, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 53.132 ton.

Jumlah orang/barang yang keluar melalui terminal darat, bandar udara dan pelabuhan laut di Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.43.
Jumlah Orang/Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat, Bandar Udara Dan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017

| Tahun | Jumlah keberangkatan di terminal darat | | Jumlah keberangkatan di Bandara Frans Seda | | Jumlah keberangkatan di Pelabuhan L. Say | |
|-------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|
| | Orang | Barang (Ton) | Orang | Barang (Ton) | Orang | Barang/T/M3 |
| 2013 | 1.661.616 | 8.571 | 66.079 | 677.117 | 52.220 | 12.478 |
| 2014 | 1.555.200 | 7.773 | 68.789 | 761.684 | 93.915 | 1.989 |
| 2015 | 1.449.288 | 7.006 | 68.908 | 832.729 | 79.014 | 2.775 |
| 2016 | 1.275.048 | 5.894 | 90.027 | 960.415 | 62.380 | 1.254 |
| 2017 | 1.269.936 | 5.901 | 96.480 | 952.940 | 56.201 | 803 |

Sumber: Olahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Orang/Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat, Bandar Udara Dan Pelabuhan Laut Di Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 dapat diuraikan berturut-turut sebagai berikut :

- Jumlah Arus keberangkatan Orang di Terminal Darat Tahun 2013–2017 terus mengalami penurunan. Tahun 2013 sebanyak 1.661.616 orang, Tahun 2014 turun menjadi 1.555.200 orang, Tahun 2015 turun menjadi 1.449.288 orang, Tahun 2016 turun menjadi 1.275.048 orang dan Tahun 2017 turun menjadi 1.269.936 orang.

Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Terminal Darat Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 8.571 ton, Tahun 2014 turun menjadi 7.773 ton, Tahun 2015 turun menjadi 7.006 ton, Tahun 2016 turun menjadi 5.894 ton, dan pada Tahun 2017 naik menjadi 5.901 ton
- Jumlah arus keberangkatan orang di bandara Frans Seda Maumere dari tahun 2013–2017 terus mengalami kenaikan. Tahun 2013 sebanyak 66.079 orang, Tahun 2014 naik menjadi 68.789 orang, Tahun 2015 naik menjadi 68.908 orang, Tahun 2016 naik menjadi 90.027 orang dan Tahun 2017 naik menjadi 96.480 orang.

Jumlah Arus Barang Yang keluar melalui Bandara Frans Seda Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 677.177 ton, Tahun 2014 naik menjadi 761.684 ton, Tahun 2015 naik menjadi 832.729 ton, Tahun 2016 naik menjadi 960.415 ton, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 952.940 ton.
- Jumlah arus keberangkatan orang di Pelabuhan Laut L. Say Maumere dari tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 52.220 orang, Tahun 2014 naik menjadi 93.915 orang, Tahun 2015 turun menjadi 79.014 orang, Tahun 2016 turun menjadi 62.380 orang dan Tahun 2017 turun menjadi 56.201 orang.

Jumlah arus barang keluar di Pelabuhan Laut L. Say Maumere Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi.

Tahun 2013 sebanyak 12.478 ton, Tahun 2014 turun menjadi 1.989 ton, Tahun 2015 naik menjadi 2.775 ton, Tahun 2016 turun menjadi 1.254 ton, dan pada Tahun 2017 turun menjadi 803 ton.

B. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW adalah kepatuhan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana. Sesuai hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang selama 5 (lima) tahun pertama pelaksanaan RTRW Kabupaten Sikka telah mengalami perubahan. Perubahan terhadap pelaksanaan struktur ruang dengan tingkat kesesuaian sebesar 74,19%, sedangkan perubahan terhadap pola ruang dengan tingkat kesesuaian sebesar 86,88% sehingga tingkat kesesuaian RTRW sebesar 80,54%. Kategori dari penilaian ini adalah tingkat kesesuaian dan konsistensi tinggi.

Perubahan terhadap struktur ruang disebabkan karena adanya pembangunan dan pembukaan jalan poros kecamatan dan poros desa. Sedangkan perubahan terhadap pola ruang meliputi beberapa hal sebagai berikut : (1) perubahan kawasan lindung menjadi daerah pemukiman, (2) perluasan Bandara, (3) pembangunan PLTMG Wairita, dan (4) Pembangunan Bendungan Napung Gete.

C. Wilayah Perkotaan

Dalam Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Maumere (RDTRW) telah menetapkan daerah/zona perkotaan meliputi Kecamatan Kangae, Alok Timur, Alok, Alok Barat dan Nelle. Luas kawasan perkotaan maumere berdasarkan hasil perhitungan sebesar 149,02 km².

D. Persentase Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Luas wilayah produktif meliputi kawasan peruntukan hutan produktif dan kawasan peruntukan pertanian dengan total 79.375 Ha. Sedangkan luas wilayah budidaya sebesar 177.460,80 Ha meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebesar 44,728%.

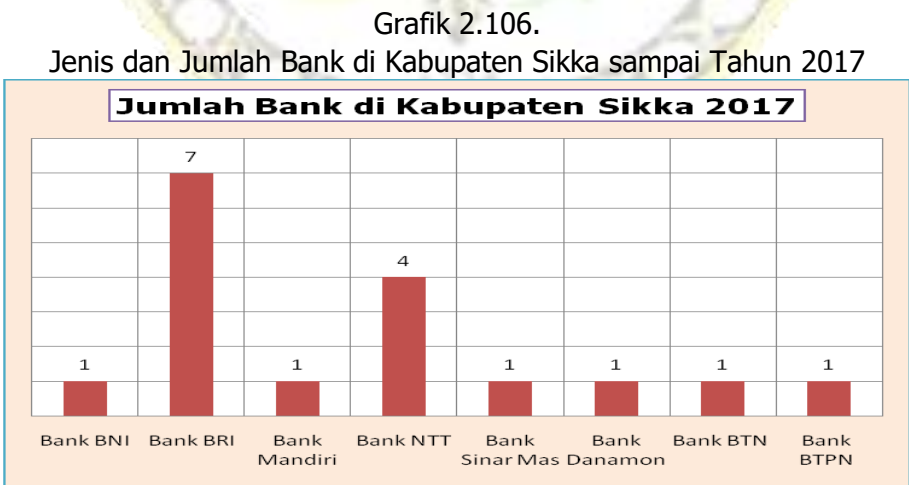
E. Persentase Luas Wilayah Kebanjiran

Indikator luas wilayah banjir adalah membandingkan antara jumlah wilayah banjir dengan jumlah luas wilayah budidaya. Persentase luas wilayah banjir dengan menggunakan perhitungan luas wilayah erosi tinggi di Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 21,99%.

F. Fasilitas Ekonomi

1. Jenis dan Jumlah Lembaga Keuangan Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Sikka sampai Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Sampai Tahun 2017 Bank yang melayani masyarakat di Kabupaten Sikka terdiri dari : (1) Bank Daerah yaitu PT. Bank NTT Cabang Maumere, (2) Bank Pemerintah yaitu PT. BRI, PT. BNI 1946, dan PT. Bank MANDIRI, dan (3) Bank Swasta yaitu PT. Bank Danamon, PT. Bank Sinarmas, PT. BTN, dan PT. BTPN.

PT. Bank NTT Cabang Maumere telah memiliki Kantor Cabang Pembantu di Kecamatan Talibura, Kewapante, Bola, dan Paga. PT. BRI telah memiliki Kantor Unit di Kecamatan Paga, Nita, Kewapante, Talibura, Alok, Alok Timur dan Alok Barat.

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Adapun jenis-jenis asuransi yang ada di Kabupaten Sikka Asuransi Jiwa, Kesehatan, Kendaraan, Kepemilikan rumah dan properti, pendidikan, bisnis, kredit dan umum. Sedangkan perusahaan Asuransi terdiri dari PT. Asuransi Bumi Putra, PT. Asuransi Jiwasraya, Allianz, dan Prudential.

3. Jenis dan Jumlah Restoran

Restoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44.

Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| NO | Jenis | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|-------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Restoran | 10 | 12 | 9 | 10 | 17 |
| 2 | Rumah Makan | 95 | 95 | 83 | 83 | 97 |
| | Jumlah | 105 | 107 | 94 | 93 | 114 |

Sumber: Olahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 114 unit.

4. Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah. Maumere terkenal dengan wisata bahari yang banyak menarik wisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotel banyak dibutuhkan oleh wisatawan. Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45.

Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| NO | Jumlah | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|--------|------|------|------|------|------|
| 1 | Hotel | 27 | 28 | 33 | 30 | 36 |

Sumber: Olahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan bahwa Perkembangan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Sikka sampai dengan 2017 sebanyak 36 unit. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hotel atau penginapan di kota Maumere menunjukkan pertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Maumere.

G. Infrastruktur Listrik

Energi kelistrikan telah menjangkau hampir ke seluruh wilayah pedesaan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Maumere di Kabupaten Sikka. Gardu Induk/ GI Maumere di Kabupaten Sikka dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV. Saat ini juga telah dalam proses penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Wairita dengan kapasitas 40 MW, dengan demikian diharapkan pada waktu yang akan datang seluruh rumah tangga sudah bisa mengakses listrik.

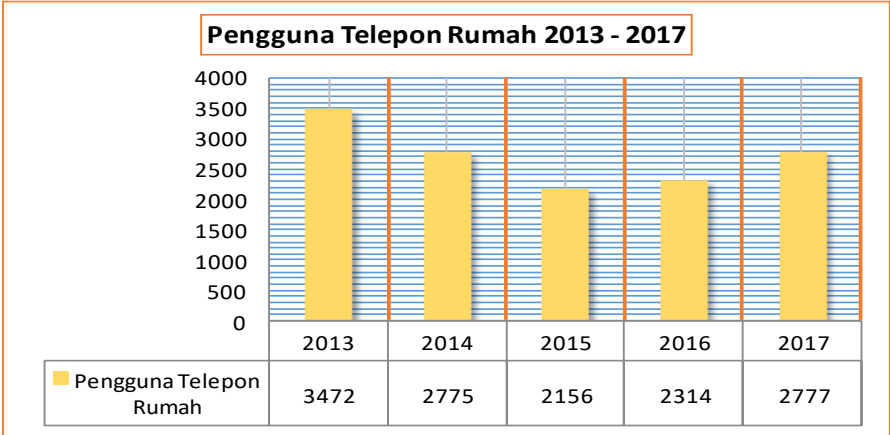
Rumah tangga pengguna listrik adalah jumlah rumah tangga yang terlayani jaringan listrik dalam suatu wilayah. Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebanyak 39.831 sambungan, Tahun 2014 sebanyak 43.674 sambungan, Tahun 2015 sebanyak 44.326 sambungan, Tahun 2016 sebanyak 46.214 sambungan, dan pada Tahun 2017 sebanyak 46.439 sambungan.

H. Komunikasi dan Informatika

Dalam mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di daerah perlu pengembangan jaringan telekomunikasi berupa perangkat telekomunikasi dan berbagai kelengkapannya. Salah satu jaringan telekomunikasi yang dibangun adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator (*Base Transceiver Station*). Jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 88 unit, tersebar di 17 Kecamatan. Ada 4 kecamatan yang sampai dengan saat ini belum bisa menggunakan perangkat telekomunikasi karena belum ada jaringan yaitu Kecamatan Mapitara, Doreng, Waiblama dan Tanawawo.

Pembangunan Komunikasi dan Informatika juga dapat dilihat dari Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.107.
Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pelanggan Telepon Rumah di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 2.777 pelanggan.

Jika dibandingkan dengan Pengguna Telepon Rumah Tahun 2017 Kabupaten Ende sebanyak 3.282 pelanggan, Kabupaten Flores Timur sebanyak 2.266 pelanggan dan Kota Kupang sebanyak 20.525 pelanggan, maka Penggunaan Telepon Rumah di Kabupaten Sikka lebih banyak dari Kabupaten Flores Timur namun lebih sedikit dari Kabupaten Ende dan Kota Kupang.

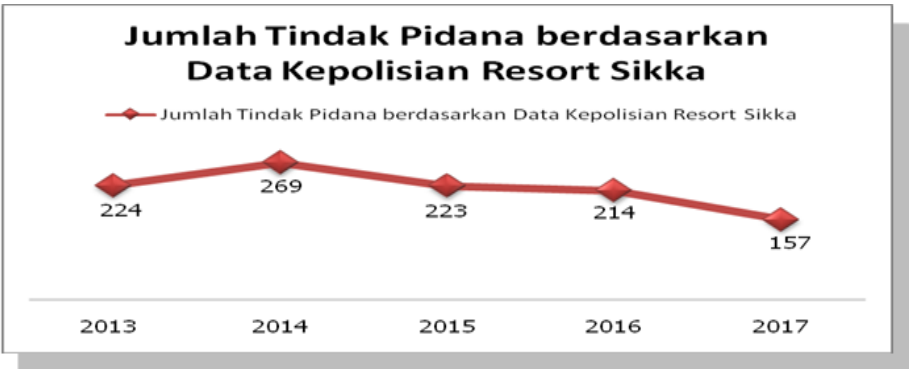
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Pertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi. untuk menumbuhkan investasi di daerah melalui pelayanan jasa.

A. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak pidana yang ditangani berdasarkan data kepolisian dalam satu tahun. Angka Kriminalitas di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.108.
Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2013-2017



Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Angka kriminalitas di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 224 kasus, Tahun 2014 naik menjadi 269 kasus, Tahun 2015 turun menjadi 223 kasus, Tahun 2016 turun menjadi 214 kasus dan Tahun 2017 turun menjadi 157 kasus.

Jika dibandingkan dengan Angka kriminalitas Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebanyak 288 kasus, Kabupaten Ende sebanyak 222 kasus maka angka kriminalitas di Kabupaten Sikka lebih sedikit dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende.

B. Lama Proses Perijinan

Perizinan merupakan instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat mendorong atau menghambat investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Jenis-jenis perijinan sebagai berikut:

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan & Heregistrasi (SIUP)
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan & Heregistrasi–Minuman Beralkohol (SIUP MB)
5. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITP MB)
6. Tanda Daftar Perdagangan (TDP)
7. Tanda Daftar Gudang dan Heregistrasi (TDG)
8. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi & Heregistrasi (SIUJK)
9. Ijin Usaha Angkutan (IUA)
10. Ijin Trayek (IT)
11. Ijin Dispensasi (ID)
12. Ijin Reklame (IR)
13. Ijin Usaha Industri (IUI)
14. Tanda Daftar Industri (TDI)
15. Ijin Usaha Perikanan (IU Perikanan)
16. Ijin Usaha Pariwisata (IU Pariwisata)

Berdasarkan jenis-jenis perijinan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian 1 jenis ijin selama 6 hari.

1. Jumlah dan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sikka 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.46.
Pajak dan Retrebusi Daerah di Kabupaten Sikka 2013-2017

| NO | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| I. | Pajak Daerah | | | | | |
| 1 | Pajak Hotel | 27 | 28 | 33 | 30 | 36 |
| 2 | Pajak Restoran | 248 | 250 | 261 | 262 | 190 |
| 3 | Pajak Hiburan | 24 | 18 | 13 | 13 | 21 |
| 4 | Pajak Reklame | | | | | |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Pajak Parkir | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 41 | 36 | 39 | 40 | 47 |
| 8 | Pajak Mineral bukan Logam | 92 | 32 | 300 | 300 | 20 |
| 9 | Pajak BPHTB | 364 | 381 | 1000 | 1000 | 561 |
| 10 | Pajak PP-P2 | - | 145.251 | 141.466 | 145.551 | 141.885 |

Sumber: Olahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, 2018

2. Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka yang mendukung iklim usaha terdiri dari (1) Perda tentang Perizinan, (2) Perda tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa, dan (3) Perda tentang Ketenagakerjaan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

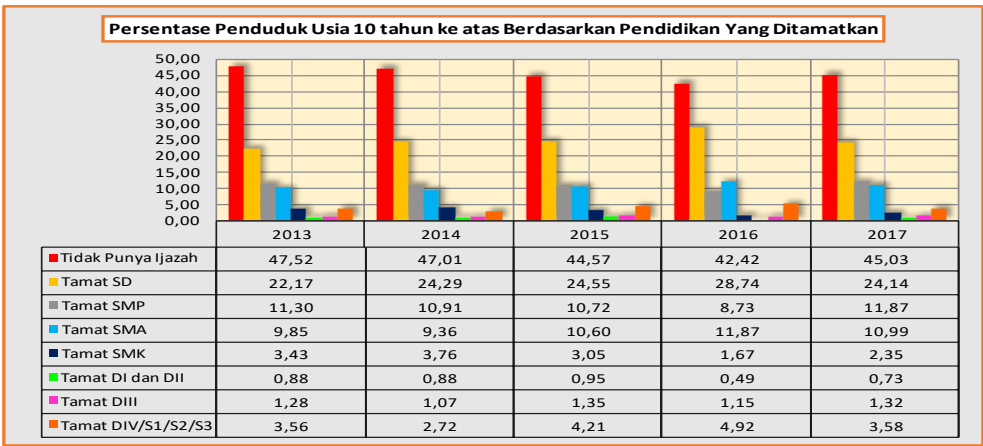
A. Ketenagakerjaan

1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Kualitas SDM ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.109.

Persentase Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan
Di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017



Sumber : Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

- Penduduk Yang Tidak Punya Ijazah pada Tahun 2013 sebanyak 47,52%, Tahun 2014 turun menjadi 47,01%, Tahun 2015 turun menjadi 44,57%, Tahun 2016 turun menjadi 42,42% dan Tahun 2017 naik menjadi 45,03%.
- Tamat SD pada Tahun 2013 sebanyak 22,17%, Tahun 2014 naik menjadi 24,29%, Tahun 2015 naik menjadi 24,55%, Tahun 2016 naik menjadi 28,74% dan Tahun 2017 turun menjadi 24,14%.
- Tamat SMP pada Tahun 2013 sebanyak 11,30%, Tahun 2014 turun menjadi 10,91%, Tahun 2015 turun menjadi 10,72%, Tahun 2016 turun menjadi 8,73% dan Tahun 2017 naik menjadi 11,87%.
- Tamat SMA pada Tahun 2013 sebanyak 9,85%, Tahun 2014 turun menjadi 9,36%, Tahun 2015 naik menjadi 10,60%, Tahun 2016 naik menjadi 11,87% dan Tahun 2017 turun menjadi 10,99%.
- Tamat SMK pada Tahun 2013 sebanyak 3,43%, Tahun 2014 naik menjadi 3,76%, Tahun 2015 turun menjadi 3,05%, Tahun 2016 turun menjadi 1,67% dan Tahun 2017 naik menjadi 2,35%.
- Tamat D-I dan D-II pada Tahun 2013 sebanyak 0,88%, Tahun 2014 tetap 0,88%, Tahun 2015 naik menjadi 0,95%, Tahun 2016 turun menjadi 0,49% dan Tahun 2017 naik menjadi 0,73%.
- Tamat D-III pada Tahun 2013 sebanyak 1,28%, Tahun 2014 turun menjadi 1,07%, Tahun 2015 naik menjadi 1,35%, Tahun 2016 turun menjadi 1,15% dan Tahun 2017 naik menjadi 1,32%.
- Tamat D-IV/S-1/S-2/S-3 pada Tahun 2013 sebanyak 3,56%, Tahun 2014 turun menjadi 2,72%, Tahun 2015 naik menjadi 4,21%, Tahun 2016 naik menjadi 4,92% dan Tahun 2017 turun menjadi 3,58%.

Jika dibandingkan dengan Persentase Tamat D-IV/S-1/S-2/S-3 Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebanyak 4,13%, Kabupaten Ende sebanyak 6,24% dan Provinsi NTT sebanyak 4,77% maka Persentase Tamat D-IV/S-1/S-2/S-3 Kabupaten Sikka masih lebih sedikit.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-64 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Sikka pada Tahun 2017 adalah 62,47%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 62 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

TABEL 2.47
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | CAPAIAN KNERJA | | | | | Standar | Interpreta si Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) |
|-----|---|----------------|------|------|------|------|---------|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 1.1.1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Pertumbuhan PDRB | 4,2 | 4,56 | 4,4 | 4,93 | 5,22 | 5 | |
| 1.1.1.2 | Laju Inflasi | 6,24 | 4 | 3,89 | 3,62 | 1,7 | 6.5 | |
| 1.1.1.3 | PDRB per kapita (Rp) | 9.654.760 | 10.580.000 | 11.510.000 | 12.570.000 | 13.610.000 | 8,748,231 | |
| 1.1.1.4 | Indeks Gini | | | 0,247 | 0,248 | 0,274 | | |
| 1.1.1.5 | Indeks Ketimpangan Williamson | | | 0,53 | 0,51 | 0,5 | | |
| 1.1.1.6 | Persentase Penduduk Miskin | 28,25% | 12,27% | 14,28% | 14,33% | 14,20% | 10 | |
| 1.1.1.7 | Indeks Pembangunan Manusia | 60,84 | 61,36 | 61,81 | 62,42 | 63,8 | 78 | |
| | | | | | | | | |
| 1.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1.2.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Indeks Pendidikan | 8,76% | 8,96% | 9,04% | 9,23% | 9,45% | | |
| 1.2.1.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 6,49% | 6,53% | 6,54% | 6,55% | 6,56% | | |
| 1.2.1.3 | Angka Harapan Lama Sekolah | 11,03% | 11,38% | 11,54% | 11,91% | 12,34% | | |
| 1.2.1.4 | APK SD/MI | 113,98% | 114,60% | 116,31% | 109,41% | 108,53% | | |
| 1.2.1.5 | APK SMP/MTs | 74,82% | 75,80% | 76,39% | 76,83% | 76,98% | | |
| 1.2.1.6 | Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Jenjang SD/MI | 52,47% | 52,99% | 55,43% | 57,57% | 57,10% | | |
| 1.2.1.7 | Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Jenjang SMP/MTs | 30,30% | 28,70% | 30,88% | 28,83% | 32,68% | | |
| 1.2.1.8 | APM SD/MI | 94,33% | 94,43% | 94,71% | 96,02% | 96,30% | 96.5 | |
| 1.2.1.9 | APM SPM/MTs | 75,32% | 75,80% | 76,39% | 76,83% | 76,98% | 76.8 | |
| 1.2.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Angka Kematian Bayi | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 7 | |
| 1.2.2.2 | Angka Kematian Balita | 16 | 2 | 2 | 18 | 3 | | |
| 1.2.2.3 | Angka Kematian Ibu | 97 | 115 | 150 | 251 | 93 | 80 | |
| 1.2.2.4 | Angka Harapan Hidup | 65,68 | 65,7 | 66,1 | 66,2 | 66,3 | | |
| 1.2.2.5 | Angka Prevelensi Gizi Buruk | 0,72% | 0,73% | 0,71% | 0,88% | 0,63% | 0.4 | |
| 1.2.2.6 | Angka Kesakitan | 47,86% | 77,20% | 23,30% | 23,20% | 43,94% | | |
| 1.2.2.7 | Kepemilikan Kartu Indonesia Sehat | | 207.205 jiwa | 236.206 jiwa | 239.178 Jiwa | 251.741 jiwa | | |
| 1.2.3 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Rasio Penduduk Yang Bekerja | 96,57% | 94,76% | 99,35% | 99,35% | 97,50% | | |
| 1.3 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | | | | | | |
| 1.3.1 | Kebudayaan | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Jumlah Grup Kesenian | 60 | 70 | 73 | 81 | 86 | | |
| 1.3.1.2 | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1.3.2 | Pemuda dan Olahraga | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Jumlah Klub Olahraga | 49 | 51 | 50 | 50 | 53 | | |
| 1.3.2.2 | Jumlah Gedung Olahraga | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 2.1 | Fokus Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | 1.109,04 | 1.151,76 | 1.156,13 | 1.122,28 | 1.190,11 | | |
| 2.1.1.2 | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs | 1.070,50 | 869 | 902,23 | 945,42 | 945,74 | | |
| 2.1.1.3 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah | 64,3 | 68,72 | 70,27 | 70,33 | 70,42 | | |
| 2.1.1.4 | Ratio Guru Murid SD/MI | 655,23 | 674,32 | 755,47 | 738,91 | 688,84 | | |
| 2.1.1.5 | Ratio Guru Murid SMP/MTs | 612,18 | 660,19 | 796,7 | 658,5 | 665,76 | | |
| 2.1.1.5 | Jumlah dan Jenis PAUD | | | | | | | |
| 2.1.1.6 | Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI | 1,24% | 1,02% | 0,92% | 0,68% | 0,31% | | |
| 2.1.1.7 | Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs | 1,25% | 1,15% | 1,12% | 1,05% | 0,76% | | |
| 2.1.1.8 | Angka Kelulusan SD/MI | 99,30% | 99,15% | 99,91% | 99,87% | 99,98% | 99 | |
| 2.1.1.9 | Angka Kelulusan SMP/MTs | 97,79% | 99,91% | 99,94% | 99,79% | 99,89% | 96 | |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|---|
| 2.1.2.1 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 22,59% | 18,75% | 18,58% | 18,47% | 24,16% | | |
| 2.1.2.2 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | | |
| 2.1.2.3 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,009% | | |
| 2.1.2.4 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | 0,21% | 0,21% | 0,19% | 0,23% | 0,21% | | |
| 2.1.2.5 | Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk | 2,79% | 2,78% | 2,47% | 2,65% | 2,65% | | |
| 2.1.2.6 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | 62,85% | 44,70% | 42,16% | 53,40% | 23,30% | | |
| 2.1.2.7 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan | 84,94% | 97,29% | 69,70% | 70,32% | 69,19% | | |
| 2.1.2.8 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 88,13% | 76,30% | 74,38% | 70,10% | 87,50% | 90 | |
| 2.1.2.9 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.1.2.10 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 50,08% | 44,14% | 43,16% | 38,11% | 43,54% | 90 | |
| 2.1.2.11 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.1.2.12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 9,69% | 10,21% | 11,68% | 12,35% | 13,37% | | |
| 2.1.2.13 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 2,17% | 2,98% | 1,92% | 2,24% | 2,07% | | |
| 2.1.2.14 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 75,57% | 62,39% | 15,94% | 53,40% | 31,16% | | |
| 2.1.2.15 | Cakupan Puskesmas | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 119% | | |
| 2.1.3 | Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | 52,73% | 49,58% | 52,67% | 54,65% | 54,77% | | |
| 2.1.3.2 | Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk | 0,00273 | 0,00271 | 0,00269 | 0,00268 | 0,00266 | | |
| 2.1.3.3 | Panjang Pembangunan Turap | 2,16 Km | 4,03 Km | 5,02 Km | 5,88 Km | 7,60 Km | | |
| 2.1.4 | Perumahan | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | | | | 79.342 jiwa | 79.342 jiwa | 51.04 | |
| 2.1.4.2 | Rumah Tangga Pengguna Listrik | 39.831 SR | 43.674 SR | 44.326 SR | 46.214 SR | 46.439 SR | 40,000 | |
| 2.1.4.3 | Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat yang Memadai | | | | | 23,47% | | |
| 2.1.4.4 | Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan | | | | | | | |
| 2.1.4.5 | Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan | | | | | 1,01% | | |
| 2.1.4.6 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | | | | | 30,70% | 31.5 | |
| 2.1.5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | | | | | 3:10.000 | | |
| 2.1.5.2 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | | | | | 82:10.000 | | |
| 2.1.5.3 | Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa | | | | | 3:01 | | |
| 2.1.5.4 | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.1.5.5 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | | |
| 2.1.5.6 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.1.5.7 | Petugas Linmas di Kota | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | | |
| 2.1.5.8 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | | | | | 5% | | |

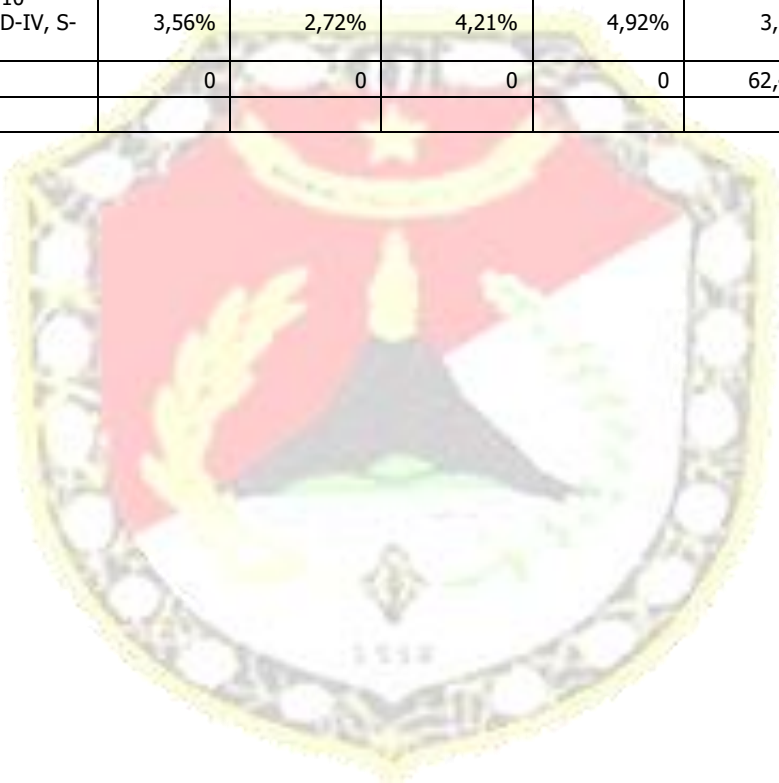
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 2.1.5.9 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | 18 menit | 18 menit | 18 menit | 18 menit | 18 menit | | |
| 2.1.6 | Sosial | | | | | | | |
| 2.1.6.1 | Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi | | | | | | | |
| | Panti Asuhan | 9 lembaga | 9 lembaga | 9 lembaga | 9 lembaga | 9 lembaga | | |
| | Panti Sosial Remaja | 5 lembaga | 5 lembaga | 5 lembaga | 5 lembaga | 5 lembaga | | |
| | Panti Anak Cacat | 4 lembaga | 4 lembaga | 4 lembaga | 4 lembaga | 4 lembaga | | |
| | Panti Jompo | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | | |
| 2.1.6.2 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial | 42,41% | 46,15% | 30,77% | 38,46% | 53,85% | | |
| 2.1.6.3 | Jumlah Penanganan PMKS | 1.742 kasus | 565 kasus | 1.402 kasus | 1.180 kasus | 6.367 kasus | | |
| 2.1.6.4 | Cakupan Anak Terlantar yang terbina | | | | | 194 | | |
| | | | | | | | | |
| 2.2 | Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | 0,73% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,70% | | |
| 2.2.1.2 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun | 27,66% | 37,42% | 39,84% | 38,99% | 59,16% | | |
| 2.2.1.3 | Pencari Kerja Yang ditempatkan | 39 | 28 | 22 | 14 | 18 | | |
| 2.2.1.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,24% | 5,24% | 0,65% | 0,65% | 2,50% | | |
| 2.2.1.5 | Keselamatan dan Perlindungan Kerja | 6.798 orang | 10.437 orang | 15.613 orang | 17.708 orang | 20.499 orang | | |
| 2.2.1.6 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.2.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | | | | | | | |
| | Rasio KDRT terhadap anak dan perempuan | 4,55% | 6,82% | 6,80% | 3,77% | 8,43% | | |
| | Rasio perempuan korban kekerasan | 45,30% | 40,93% | 33,74% | 34,94% | 38,99% | | |
| 2.2.2.2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 87,46% | 88,80% | 89,25% | 89,34% | 89,38% | | |
| 2.2.2.3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 54,22% | 56,77% | 57,41% | 57,48% | 57,55% | | |
| 2.2.3 | Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Skor PPH Ketersediaan | 88% | 85% | 74,40% | 78,14% | 76,70% | | |
| 2.2.3.2 | Skor PPH Konsumsi | 81% | 80,30% | 65,50% | 77% | 74% | | |
| 2.2.4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Volume Sampah yang Terangkut ke TPA | 26.201 M³ | 26.208 M3 | 41.040 M3 | 42.120 M3 | 46.080 M3 | | |
| 2.2.4.2 | Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha | 22,86% | 28,57% | 34,28% | 37,14% | 42,86% | | |
| 2.2.4.3 | Persentase volume sampah yang dikelola secara 3R | | | | | 34,56% | | |
| 2.2.5 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk | | 48,07% | 53,69% | 54,14% | 71,08% | | |
| 2.2.5.2 | Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk | | 32,20% | 38,20% | 46,48% | 77,07% | | |
| 2.2.5.3 | Rasio Pasangan Berakta Nikah | | 29,98% | 29,98% | 32,71% | 34,74% | | |
| 2.2.5.4 | Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota | Tidak ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.2.6 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | | | | | | | |
| | LPMK | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | BPD | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | | |
| 2.2.6.2 | Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | |
| 2.2.6.3 | Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | | |
| 2.2.7 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,72 | | |
| 2.2.7.2 | Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif | 53,03% | 61,61% | 54,25% | 53,46% | 54,50% | | |
| 2.2.7.3 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | 53,03% | 61,61% | 54,25% | 53,46% | 54,50% | | |
| 2.2.8 | Perhubungan | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Jumlah Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan | | | | | | | |
| | Jumlah Angkutan Umum perkotaan | | | | | 112 unit | | |
| | Jumlah Trayek / Lin perkotaan | | | | | 6 trayek | | |
| | Jumlah Angkutan Umum Perdesaan | | | | | 156 unit | | |
| | Jumlah Trayek / Lin Perdesaan | | | | | 25 Trayek | | |
| 2.2.8.2 | Rasio Ijin Trayek | 0,024 | 0,029 | 0,055 | 0,071 | 0,079 | | |
| 2.2.8.3 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 878 unit | 926 unit | 1263 unit | 1303 unit | 1457 unit | | |
| 2.2.8.4 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit | | |
| 2.2.8.5 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus | | | | | | | |
| | Pelabuhan Laut | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Pelabuhan Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Tamabatan Perahu | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | | |
| | Terminal Bus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2.2.9 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 2.2.9.1 | Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 2.2.9.2 | Jumlah Penyiaran Radio Lokal | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | | |
| 2.2.9.3 | Website Milik Pemerintah Daerah | ada | ada | ada | ada | ada | | |
| 2.2.9 | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | Koperasi Simpan Pinjam (KSP) | 61 unit | 72 unit | 72 unit | 85 unit | 91 unit | | |
| | Koperasi Serba Usaha (KSU) | 74 unit | 67 unit | 75 unit | 70 unit | 80 unit | | |
| 2.2.9.1 | Jumlah Koperasi Aktif | | | | | | | |
| 2.2.9.2 | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 210 unit | 255 unit | 255 unit | 324 unit | 324 unit | | |
| 2.2.10 | Penanaman Modal | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp 30.925.65 0.000 | Rp 41.397.496. 150 | Rp 1.054.038.9 59.749 | Rp910.850.3 04.002 | Rp218.585.8 16.710 | Rp47,00 9,919,28 1 | |
| 2.2.10.2 | Daya Serap Tenaga Kerja | | | | | 1.498 orang | | |
| 2.2.10.3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | 0 | Rp 41.397.496. 105 | Rp 24.769.000. 000 | Rp920.850.3 04.002 | Rp370.030.3 43.614 | | |
| 2.2.10 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Jumlah Organisasi Pemuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 organisasi | | |
| 2.2.10.2 | Jumlah Klub Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 klub | | |
| 2.2.10.3 | Jumlah Kegiatan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 kegiatan | | |
| 2.2.10.4 | Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 unit | | |
| 2.2.11 | Kebudayaan | | | | | | | |
| 2.2.11.1 | Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.11.2 | Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2.2.11.3 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---|
| 2.2.12 | Perpustakaan | | | | | | | |
| 2.2.11.1 | Jumlah Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 unit | | |
| 2.2.11.2 | Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk | 1,68% | 1,66% | 1,65% | 1,64% | 1,63% | | |
| 2.2.11.3 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | 362 org | 570 org | 863 org | 283 org | 764 org | | |
| 2.2.11.4 | Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391 judul buku | | |
| 2.2.12 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | |
| 2.2.12.1 | Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | |
| 2.2.12.2 | Kegiatan Pembinaan Terhadap OKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | | |
| 2.2.12.3 | Kegiatan Pembinaan Terhadap Karang Taruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
| 2.2.12.2 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.13 | Statistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.14 | Kearsipan | 58% | 58% | 58% | 58% | 60% | | |
| | | | | | | | | |
| 2.3 | Fokus Pelayanan Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 2.3.1 | Pertanian | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi/Palawija | 107,9 ton | 144,73 ton | 125,53 ton | 93,52 ton | 175,24 ton | | |
| 2.3.1.2 | Peningkatan Produktivitas Pertanian Hortikultura | 30.828,69 ton | 31.736,19 ton | 19.822,21 ton | 44.596,12 ton | 73.803,76 ton | | |
| 2.3.1.3 | Peningkatan Produktivitas Perkebunan | 23.904 ton | 24.893 ton | 30.431 ton | 31.007 ton | 29.858,25 ton | | |
| 2.3.1.4 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB | 36% | 36,19% | 36,35% | 36,60% | 35,36% | 44.01 | |
| 2.3.1.5 | Cakupan Bina Kelompok Petani | 63,91% | 64,25% | 75,04% | 89,75% | 63,62% | | |
| 2.3.2 | Pariwisata | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Kunjungan Wisata | 22.123 org | 26.341 org | 32.150 org | 35.930 org | 47.228 org | | |
| 2.3.2.2 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 0,67% | 0,69% | 0,72% | 0,75% | 1,07% | 0.78 | |
| 2.3.3 | Perdagangan | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | 0 | 10,04% | 10,31% | 10,01 | 10,48% | | |
| 2.3.4 | Perindustrian | | | | | | | |
| 2.3.4.1 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB | 1,73% | 1,72% | 1,71% | 1,69% | 1,70% | | |
| 2.3.5 | Perikanan | | | | | | | |
| 2.3.5.1 | Produksi Perikanan | 12.002 ton | 13.799 ton | 15.300 ton | 15.370 ton | 16.972 ton | | |
| 2.3.5.2 | Konsumsi Ikan | 33,03 kg | 34,00 kg | 34,50 kg | 46,30 kg | 49,17 kg | | |
| 2.3.5.3 | Cakupan Bina Kelompok Perikanan | 63,83% | 95,58% | 69,72% | 31,25% | 34,37% | | |
| 2.3.6 | Ketransmigrasian | | | | | | | |
| 2.3.6.1 | Jumlah Transmigran Swakarsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 3.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 3.1.1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Pengeluaran Per Kapita | 7.500.000 | 7.559.000 | 7.618.000 | 7.740.000 | 7.855.000 | | |
| | | | | | | | | |
| 3.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 3.2.1 | Perhubungan | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | 0 | 0,63% | 0,59% | 0,58% | 3,06% | | |
| 3.2.1.2 | Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Maumere Per 1000 Penduduk | 0,02178% | 0,02178% | 0,02160% | 0,02172% | 0,02157% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|
| 3.2.1.3 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Terminal Darat | 1.661.616 org | 1.555.200 org | 1.449.288 org | 1.275.048 org | 1.269.936 org | | |
| 3.2.1.4 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat | 8.571 ton | 7.773 ton | 7.006 ton | 5.894 ton | 5.901 ton | | |
| 3.2.1.5 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Terminal Darat | 1.661.616 org | 1.555.200 org | 1.449.288 org | 1.275.048 org | 1.269.936 org | | |
| 3.2.1.6 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat | 8.571 ton | 7.773 ton | 7.006 ton | 5.894 ton | 5.901 ton | | |
| 3.2.1.7 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Bandar Udara | 67.513 org | 69.983 org | 72.802 org | 89.431 org | 97.534 org | | |
| 3.2.1.8 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Bandar Udara | 867.118 ton | 898.612 ton | 990.062 ton | 1.078.823 ton | 1.078.511 ton | | |
| 3.2.1.9 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Bandar Udara | 66.079 org | 68.789 org | 68.900 org | 90.027 org | 96.480 org | | |
| 3.2.1.10 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Bandar Udara | 677.117 ton | 761.684 ton | 832.729 ton | 960.415 ton | 952.940 ton | | |
| 3.2.1.11 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut | 27.278 org | 78.927 org | 79.321 org | 72.712 org | 59.925 org | | |
| 3.2.1.12 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut | 105.393 ton | 78.375 ton | 62.914 ton | 84.138 ton | 53.132 ton | | |
| 3.2.1.13 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Pelabuhan Laut | 52.220 org | 93.915 org | 79.014 org | 62.380 org | 56.201 org | | |
| 3.2.1.14 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Pelabuhan Laut | 12.478 ton | 1.989 ton | 2.775 ton | 1.254 ton | 803 ton | | |
| 3.2.2 | Ketaatan Terhadap RTRW | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Perubahan Terhadap Pelaksanaan Struktur Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,19% | | |
| 3.2.2.2 | Perubahan Terhadap Pelaksanaan Pola Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,88% | | |
| 3.2.3 | Wilayah Perkotaan | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Luas Kawasan Perkotaan Maumere | 149,02 km ² | 149,02 Km ² | 149,02 Km ² | 149,02 Km ² | 149,02 Km ² | | |
| 3.2.4 | Luas Wilayah Produktif | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | Persentase Luas Wilayah Produktif | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,73% | | |
| 3.2.5 | Luas Wilayah Kebanjiran | | | | | | | |
| 3.2.5.1 | Persentase Luas Wilayah Kebanjiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,99% | | |
| 3.2.6 | Fasilitas Ekonomi | | | | | | | |
| 3.2.6.1 | Jenis dan Jumlah Lembaga Keuangan Bank | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | | |
| 3.2.6.2 | Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/4 | | |
| 3.2.6.3 | Jenis dan Jumlah Restoran | 2/105 | 2/107 | 2/94 | 2/93 | 2/114 | | |
| 3.2.6.4 | Jumlah Penginapan/Hotel | 27 penginapan/hotel | 28 penginapan/hotel | 33 penginapan/hotel | 30 penginapan/hotel | 36 penginapan/hotel | | |
| 3.2.7 | Infrastruktur Listrik | | | | | | | |
| 3.2.7.1 | Jumlah Sambungan Rumah Tangga Pengguna Listrik | 39.831 sambungan | 43.674 sambungan | 44.326 sambungan | 46.214 sambungan | 46.439 sambungan | | |
| 3.2.8 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 3.2.8.1 | Jumlah Pelanggan Telepon Rumah | 3.472 pelanggan | 2.775 pelanggan | 2.156 pelanggan | 2.314 pelanggan | 2.777 pelanggan | | |
| 3.2.8.2 | Jumlah Pelanggan Sambungan Layanan Internet Rumah | | | | | | | |
| 3.3 | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | |
| 3.3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Angka Kriminalitas Yang Tertangani | 224 kasus | 269 kasus | 223 kasus | 214 kasus | 157 kasus | | |
| 3.3.1.2 | Lama Proses Perijinan | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | | |
| 3.3.1.3 | Jenis dan Jumlah Objek Pajak Daerah | 8/799 | 9/145.999 | 9/143.115 | 9/147.199 | 9/142.765 | | |
| 3.3.1.4 | Jenis dan Jumlah Obyek Retribusi Daerah | | | | | | | |
| 3.3.1.5 | Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha | 3 PERDA | 3 PERDA | 3 PERDA | 3 PERDA | 3 PERDA | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| 3.4 | Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| 3.4.1 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Persentase Penduduk Yang Tidak Punya Ijazah | 47,52% | 47,01% | 44,57% | 42,42% | 45,03% | | |
| 3.4.1.2 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SD | 22,17% | 24,29% | 24,55% | 28,74% | 24,14 | | |
| 3.4.1.3 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMP | 11,30% | 10,91% | 10,72% | 8,73% | 11,87% | | |
| 3.4.1.4 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMA | 9,85% | 9,36% | 10,60% | 11,87% | 10,99% | | |
| 3.4.1.5 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMK | 3,43% | 3,76% | 3,05% | 1,67% | 2,35% | | |
| 3.4.1.6 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-I dan D-II | 0,88% | 0,88% | 0,95% | 0,49% | 0,73% | | |
| 3.4.1.7 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-III | 1,28% | 1,07% | 1,35% | 1,15% | 1,32% | | |
| 3.4.1.8 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-IV, S-1, S-2, S-3 | 3,56% | 2,72% | 4,21% | 4,92% | 3,58% | | |
| 3.4.1.9 | Rasio Ketergantungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,47% | | |
| | | | | | | | | |



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan mengenai Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 yang terdiri dari Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah akan menguraikan tentang perkembangan realisasi anggaran baik Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berdasarkan pertumbuhan dan proporsi dari masing-masing pos anggaran. Kerangka Pendanaan yang berisi tentang identifikasi proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023.

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektifitas pengelolaan penerimaan yang dijabarkan melalui target pendapatan daerah dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektifitas pengeluaran daerah melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Sumber utama pendapatan Pemerintah Kabupaten Sikka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Rata-Rata Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
PERTUMBUHAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2013-2017

| No | Uraian | Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah | | | | | Rata2 g |
|----------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 50.257.084.172,90 | 50.257.084.172,90 | 78.096.258.303,50 | 80.269.749.570,99 | 118.177.114.975,17 | 26,35 |
| | Pendapatan Pajak Daerah | 8.526.091.731 | 8.526.091.731 | 11.608.213.126 | 11.624.926.899 | 15.235.535.867 | 16,84 |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | 32.245.461.961,99 | 32.245.461.961,99 | 6.443.901.469 | 7.342.235.519 | 9.616.729.862 | -8,77 |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.338.207.999,65 | 2.338.207.999,65 | 3.543.161.598 | 4.076.387.545 | 3.227.623.396 | 11,44 |
| | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 7.147.322.480,26 | 7.147.322.480,26 | 56.500.982.110,50 | 57.226.199.607,99 | 90.097.225.850,17 | 187,31 |
| 2 | DANA PERIMBANGAN | 565.287.346.083 | 565.287.346.083 | 678.171.446.590 | 872.827.003.719 | 781.738.364.148 | 9,56 |
| | Dana Bagi Hasil Pajak | 18.345.164.858 | 18.345.164.858 | 11.038.605.350 | 13.250.985.166 | 12.228.972.999 | -6,87 |
| | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 640.954.225 | 640.954.225 | 777.565.240 | 490.229.286 | 706.116.146 | 7,1 |
| | Dana Alokasi Umum | 498.499.639.000 | 498.499.639.000 | 575.677.254.000 | 626.916.589.000 | 617.286.551.000 | 5,71 |
| | Dana Alokasi Khusus | 47.801.588.000 | 47.801.588.000 | 90.678.022.000 | 232.169.200.267 | 151.516.724.003 | 52,75 |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 58.725.949.562 | 100.768.283.544 | 126.350.903.718 | 113.051.237.516 | 141.322.467.685,21 | 27,86 |
| | Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.353.321.000 | 0 |
| | Dana Penyesuaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transfer Pemerintah Provinsi | 6.982.241.562 | 16.462.737.544 | 17.587.453.718 | 19.656.314.516 | 0 | 13,59 |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 6.982.241.562 | 82.690.946.000 | 107.193.450.000 | 91.630.923.000 | 24.969.146.685,21 | 256,67 |
| | Pendapatan Lainnya | 51.743.708.000 | 1.614.600.000 | 1.570.000.000 | 1.764.000.000 | 0 | -46,82 |
| | Jumlah Pendapatan | 674.270.379.817,90 | 716.312.713.799,90 | 882.618.608.611,50 | 1.066.147.990.805,99 | 1.041.237.946.808,38 | 11,98 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data pada tabel 3.1. diatas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar Rp674.270.379.817,90,- Tahun 2014 naik menjadi Rp.716.312.713.799,90, Tahun 2015 naik menjadi Rp882.618.608.611,50,- Tahun 2016 naik menjadi Rp1.066.147.990,805,99 dan Tahun 2017 turun menjadi Rp1.041.237.946.808,38,-

Realisasi PAD Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp50.257.084.172,90,- Tahun 2015 naik menjadi Rp78.096.258.303,50,- Tahun 2016 naik menjadi Rp80.269.749.570,99 dan Tahun 2017 naik menjadi Rp118.177.114.975,17.

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp565.287.346.083,- Tahun 2015 naik menjadi Rp678.171.446.590,- Tahun 2016 naik menjadi Rp872.827.003.719,- dan Tahun 2017 turun menjadi Rp781.738.364.148,-.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar Rp58.725.949.562,- Tahun 2014 naik menjadi Rp100.768.283.544,- Tahun 2015 naik menjadi Rp126.350.903.718,- Tahun 2016 turun menjadi Rp113.051.237.516,- dan Tahun 2017 naik menjadi Rp141.322.467.685,21.

Kinerja Pendapatan Tahun 2013-2017 dapat dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kontribusi.

1. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 - 2017

| Uraian | Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah (%) | | | | | Rata-rata (%) |
|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| PENDAPATAN | 98 | 102 | 97 | 95 | 87 | 95,8 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 106 | 125 | 99 | 81 | 82 | 98,6 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 115 | 95 | 93 | 60 | 50 | 82,6 |
| Hasil Retribusi Daerah | 103 | 109 | 54 | 53 | 53 | 74,4 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99,6 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 115 | 139 | 111 | 93 | 98 | 111,2 |
| | | | | | | 0 |
| DANA PERIMBANGAN | 98 | 100 | 99 | 97 | 89 | 96,6 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 111 | 102 | 75 | 98 | 79 | 93 |
| Dana Alokasi Umum | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99,6 |
| Dana Alokasi Khusus | 75 | 100 | 98 | 88 | 65 | 85,2 |
| | | | | | | 0 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 99 | 101 | 88 | 97 | 96 | 96,2 |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 95 | 105 | 92 | 84 | 82 | 91,6 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 97,4 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 99 | 89 | 84 | 0 | 54,4 |
| Lain-lain Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 95,8%. Tahun 2013 sebesar 98%, Tahun 2014 naik menjadi 102%, Tahun 2015 turun menjadi 97%, Tahun 2016 turun menjadi 95% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 87%.

Rata-rata Rasio Efektifitas PAD sebesar 98,6% masuk dalam kategori tidak efektif karena <100%. Rasio efektifitas PAD yang mencapai 100% hanya pada Tahun 2013 dan 2014.

Rata-rata Rasio Efektifitas Dana Perimbangan sebesar 96,6% masuk dalam kategori tidak efektif karena lebih kecil dari 100%. Rasio efektifitas Dana Perimbangan yang mencapai 100% hanya pada Tahun 2014.

Rata-rata Rasio Efektifitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif dengan rata-rata sebesar 96,2% masuk dalam kategori tidak efektif karena lebih kecil dari 100%. Rasio efektifitas Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mencapai 100% hanya pada Tahun 2014.

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dalam satu periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017

| Uraian | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%) | | | | Rata-rata (%) |
|---|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| PENDAPATAN | 21 | 23,21 | 20,79 | (2,33) | 11,90 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 56 | 55 | 3 | 47 | 40,35 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 12 | 36,14 | 0,14 | 31,05 | 19,83 |
| Hasil Retribusi Daerah | (67) | (80,01) | 13,94 | 30,97 | (8,94) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 27 | 51,53 | 15,04 | (20,82) | 18,19 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 673 | 690,51 | 1,28 | 57,44 | 355,56 |
| DANA PERIMBANGAN | 12 | 19,96 | 28,70 | (10,43) | 12,55 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | (36) | (39,82) | 20,04 | (7,71) | 2,12 |
| Dana Alokasi Umum | 11 | 15,48 | 8,90 | (1,53) | 8,46 |
| Dana Alokasi Khusus | 46 | 89,69 | 156,03 | (34,73) | 64,24 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 72 | 25,38 | (10,52) | 25,01 | 27,96 |
| Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 136 | 29,63 | (14,51) | (72,75) | 256,7 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | - | - | - | - | - |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | 6,83 | 11,76 | (100) | 13,59 |
| Lain-lain Pendapatan | - | (2,76) | 12,35 | (100) | (46,82) |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 11,90%. Pada Tahun 2014 sebesar 21%, Tahun 2015 naik menjadi 23,21%, Tahun 2016 turun menjadi 20,79% dan pada Tahun 2017 turun menjadi -2,33%.

Rata-rata Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 40,35%. Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar 56%, Tahun 2015 turun menjadi 55%, Tahun 2016 turun menjadi 3% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 47%.

Rata-rata Rasio Pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar 12,55%. Rasio Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar 12%, Tahun 2015 naik menjadi 19,96%, Tahun 2016 naik menjadi 28,70% dan pada Tahun 2017 turun menjadi -10,43%.

Rata-rata Rasio Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 27,96%. Rasio Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar 72%, Tahun 2015 turun menjadi 25,38%, Tahun 2016 turun menjadi -10,52% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 25,01%.

3. Rasio Kontribusi

Rasio Kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari komponen pendapatan terhadap total anggaran pendapatan daerah. Rasio Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Rasio Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Uraian | Rasio Kontribusi Pendapatan Daerah (%) | | | | | Rata-rata (%) |
|---|--|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| PENDAPATAN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8,8 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14,4 |
| Hasil Retribusi Daerah | 64 | 14 | 8 | 9 | 8 | 20,6 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4,4 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 14 | 70 | 72 | 71 | 76 | 60,6 |
| DANA PERIMBANGAN | 84 | 78 | 77 | 81 | 76 | 79,2 |
| Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dana Alokasi Umum | 88 | 87 | 85 | 72 | 79 | 82,2 |
| Dana Alokasi Khusus | 9 | 11 | 13 | 27 | 19 | 15,8 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 9 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 |
| Pendapatan Hibah | - | - | - | - | - | 0 |
| Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 12 | 16 | 14 | 17 | 18 | 15,4 |
| Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 88 | 82 | 85 | 81 | 82 | 83,6 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| Lain-lain Pendapatan | - | - | - | - | - | 0 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebesar 100% yang terdiri dari PAD sebesar 8,8%, Dana Perimbangan 79,2% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12%.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja diklasifikasikan ke dalam :

- 1. Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
- 2. Belanja Langsung, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .3.5.
RATA-RATA REALISASI BELANJA BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2013-2017

| No | Uraian | Realisasi Belanja Daerah | | | | | Rata2 g |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | BELANJA | | | | | | |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 413.679.677.065,00 | 456.837.790.440,00 | 534.621.401.542,00 | 614.840.547.248,00 | 616.963.701.110,00 | 10,62 |
| | Belanja Pegawai | 361.554.686.377,00 | 399.659.771.294,00 | 426.539.413.914,00 | 459.184.950.600,00 | 421.894.290.084,00 | 8,61 |
| | Belanja Hibah | 11.507.898.967,00 | 5.344.215.000,00 | 6.907.050.000,00 | 6.209.200.000,00 | 10.626.333.000,00 | -8,61 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 781.500.000,00 | 8.423.600.000,00 | 1.211.605.000,00 | 371.540.000,00 | 1.503.584.000,00 | 205,73 |
| | Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 531.299.850,00 | 713.040.000,00 | 1.349.194.500,00 | 83.724.300,00 | 1.805.264.000,00 | 7,41 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 37.350.222.368,00 | 42.497.304.146,00 | 96.063.630.074,00 | 148.512.836.935,00 | 178.770.993.380,00 | 48,61 |
| | Belanja Tak Terduga | 1.954.069.503,00 | 199.860.000,00 | 2.550.508.054,00 | 478.295.413,00 | 2.363.236.646,00 | 251,28 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 245.757.205.176,00 | 280.172.283.041,00 | 360.618.396.486,00 | 481.880.970.039,00 | 452.228.110.858,46 | 19,09 |
| | Belanja Pegawai | 28.960.955.219,00 | 24.023.405.492,00 | 22.139.245.050,00 | 26.947.622.700,00 | 34.260.943.465,00 | -0,79 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 118.591.758.413,00 | 152.931.776.185,00 | 228.592.486.800,00 | 259.386.584.277,00 | 231.036.663.388,30 | 22,98 |
| | Belanja Modal | 98.204.491.544,00 | 103.217.101.364,00 | 109.886.664.636,00 | 195.546.763.062,00 | 186.930.504.005,16 | 22,38 |
| | Jumlah Belanja | 659.436.882.241 | 737.010.073.481 | 895.239.798.028 | 1.096.721.517.287 | 1.069.191.811.968,46 | 13,31 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data pada tabel 3.1. diatas realisasi belanja daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar Rp659.436.882.241,- Tahun 2014 naik menjadi Rp737.010.073.481,- Tahun 2015 naik menjadi Rp895.239.798.028,- Tahun 2016 naik menjadi Rp1.096.721.517.287,- dan Tahun 2017 turun menjadi Rp1.069.191.811.968,46,-

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 sebesar Rp413.679.677.065,- Tahun 2014 naik menjadi Rp456.837.790.440,- Tahun 2015 naik menjadi Rp534.621.401.542,- Tahun 2016 naik menjadi Rp614.840.547.248,- dan Tahun 2017 naik menjadi Rp616.963.701.110,-. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 sebesar Rp245.757.205.176,- Tahun 2014 naik menjadi Rp280.172.283.041,- Tahun 2015 naik menjadi Rp360.618.396.486,- Tahun 2016 naik menjadi Rp481.880.970.039,- dan Tahun 2017 turun menjadi Rp452.228.110.858,46,-.

Optimalisasi Belanja Daerah Tahun 2013-2017 tercermin melalui Kinerja Belanja yang dapat dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang Jasa Terhadap Total Belanja.

1. Rasio Efektifitas
- Rasio Efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rasio Efektifitas Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6.
Rasio Efektifitas Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Uraian | Rasio Efektifitas Belanja Daerah (%) | | | | | Rata-rata (%) |
|--|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| BELANJA | 92 | 88 | 87 | 90 | 87 | 88,8 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 93 | 90 | 93 | 92 | 94 | 92,4 |
| Belanja Pegawai | 94 | 90 | 87 | 90 | 93 | 90,8 |
| Belanja Hibah | 67 | 82 | 578 | 98 | 98 | 184,6 |
| Belanja Bantuan Sosial | 85 | 96 | 93 | 74 | 94 | 88,4 |
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 100 | 74 | 56 | 3 | 41 | 54,8 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 98,2 |
| Belanja Tidak Terduga | 43 | 4 | 27 | 14 | 75 | 32,6 |
| BELANJA LANGSUNG | 90 | 84 | 79 | 88 | 79 | 84 |
| Belanja Pegawai | 95 | 91 | 5 | 95 | 96 | 76,4 |
| Belanja Barang dan Jasa | 89 | 84 | 84 | 89 | 90 | 87,2 |
| Belanja Modal | 90 | 83 | 83 | 86 | 68 | 82 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Efektifitas Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013–2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 88,8%. Tahun 2013 sebesar 92%, Tahun 2014 turun menjadi 88%, Tahun 2015 turun menjadi 87%, Tahun 2016 naik menjadi 90% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 87%.

Rasio efektifitas Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 92,4%. Tahun 2013 sebesar 93%, Tahun 2014 turun menjadi 90%, Tahun 2015 naik menjadi 93%, Tahun 2016 turun menjadi 92% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 94%.

Rasio efektifitas Belanja Langsung Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 84%. Tahun 2013 sebesar 90%, Tahun 2014 turun menjadi 84%, Tahun 2015 naik menjadi 79%, Tahun 2016 naik menjadi 88% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 79%.

2. Rasio Pertumbuhan
- Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dalam satu periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017

| Uraian | Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah (%) | | | | Rata-rata (%) |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| BELANJA | 11,76 | 21,47 | 22,51 | -2,51 | 13,31 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 10,43 | 17,03 | 15,00 | 0,35 | 10,70 |
| Belanja Pegawai | 10,54 | 6,73 | 7,65 | -8,12 | 4,20 |
| Belanja Hibah | -53,56 | 29,24 | - 10,10 | 71,14 | 9,18 |
| Belanja Bantuan Sosial | 977,88 | -85,62 | - 69,33 | 304,69 | 375,87 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 34,21 | 89,22 | - 93,79 | 2056,20 | 695,28 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Serta Partai Politik | 13,78 | 126,05 | 54,60 | 20,37 | 53,70 |
| Belanja Tidak Terduga | -89,77 | 1176,15 | - 81,25 | 394,10 | 699,61 |
| | | | | | |
| BELANJA LANGSUNG | 14,00 | 28,71 | 33,63 | -6,15 | 17,55 |
| Belanja Pegawai | -17,05 | -7,84 | 21,72 | 27,14 | 5,99 |
| Belanja Barang dan Jasa | 28,96 | 49,47 | 13,47 | -10,93 | 20,24 |
| Belanja Modal | 5,10 | 6,46 | 77,95 | -4,41 | 21,28 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 13,31%. Pada Tahun 2014 sebesar 11,76%, Tahun 2015 naik menjadi 21,47%, Tahun 2016 naik menjadi 22,51% dan pada Tahun 2017 turun menjadi -2,51%.

Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 10,70%. Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar 10,43%, Tahun 2015 naik menjadi 17,03%, Tahun 2016 turun menjadi 15% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 0,35%.

Rata-rata Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 17,55%. Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung Tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2014 sebesar 14%, Tahun 2015 naik menjadi 28,71%, Tahun 2016 naik menjadi 33,63% dan pada Tahun 2017 turun menjadi -6,15%.

3. Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang Jasa terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang Jasa Terhadap Total Belanja untuk mengukur sejauh mana proporsi belanja dari masing-masing komponen belanja terhadap total belanja daerah. Rasio Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang Jasa Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.

Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Uraian | Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%) | | | | | | | | | | Rata-rata (%) | |
|---|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---------------|------|
| | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | |
| | TB | BL | TB | BL | TB | BL | TB | BL | TB | BL | TB | BL |
| Belanja Pegawai | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2,4 | 6,6 |
| Belanja Barang dan Jasa | 18 | 48 | 21 | 55 | 23 | 65 | 24 | 54 | 21 | 45 | 21,6 | 53,6 |
| Belanja Modal | 15 | 40 | 14 | 37 | 12 | 34 | 18 | 40 | 23 | 49 | 16,4 | 40 |
| Ket. -TB = Rasio per komponen Belanja terhadap Total Belanja Daerah -BL = Rasio per komponen Belanja terhadap Belanja Langsung | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 2,4%. Pada Tahun 2013 sebesar 4%, Tahun 2014 turun menjadi 3%, Tahun 2015 turun menjadi 1%, Tahun 2016 naik menjadi 2% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 3%.

Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 21,6%. Pada Tahun 2013 sebesar 18%, Tahun 2014 naik menjadi 21%, Tahun 2015 naik menjadi 23%, Tahun 2016 naik menjadi 24% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 21%.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 16,4%. Pada Tahun 2013 sebesar 15%, Tahun 2014 turun menjadi 14%, Tahun 2015 turun menjadi 12%, Tahun 2016 naik menjadi 18% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 23%.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Langsung mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 6,6%. Pada Tahun 2013 sebesar 12%, Tahun 2014 turun menjadi 9%, Tahun 2015 turun menjadi 1%, Tahun 2016 naik menjadi 6% dan pada Tahun 2017 tetap menjadi 6%.

Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 53,6%. Pada Tahun 2013 sebesar 48%, Tahun 2014 naik menjadi 55%, Tahun 2015 naik menjadi 65%, Tahun 2016 turun menjadi 54% dan pada Tahun 2017 turun menjadi 45%.

Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 40%. Pada Tahun 2013 sebesar 40%, Tahun 2014 turun menjadi 37%, Tahun 2015 turun menjadi 34%, Tahun 2016 naik menjadi 40% dan pada Tahun 2017 naik menjadi 49%.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Rata-Rata Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel .3.9.
RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2013-2017

| No | Uraian | Realisasi Pembiayaan Daerah | | | | | Rata2 g |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 34.363.101.560 | 45.384.499.137 | 119.332.853.943 | 104.055.843.027 | 69.803.004.546 | 37,32 |
| | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 34.315.551.560 | 45.196.599.137 | 119.000.309.032 | 103.711.664.527 | 69.482.316.546 | 37,29 |
| | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 47.550.000 | 187.900.000 | 332.544.911 | 344.178.500 | 320.688.000 | 92,2 |
| 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 4.000.000.000 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 | 10.000.000.000 | 55,21 |
| | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 0 |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 3.500.000.000 | 1.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 | 7,14 |
| | Pemberian Pinjaman Daerah | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | PEMBIAYAAN NETTO | 30.363.101.560 | 43.884.499.137 | 116.332.853.943 | 100.055.843.027 | 59.803.004.546 | |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data pada tabel 3.1. diatas Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebesar 37,32% sedangkan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebesar 55,21%.

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp34.363.101.560,- Tahun 2014 naik menjadi Rp45.384.499.137, Tahun 2015 naik menjadi Rp119.332.853.943,- Tahun 2016 turun menjadi Rp104.055.843.027 dan Tahun 2017 turun menjadi Rp69.803.004.546. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp4.000.000.000,- Tahun 2014 turun menjadi Rp1.500.000.000, Tahun 2015 naik menjadi Rp3.000.000.000,- Tahun 2016 naik menjadi Rp4.000.000.000 dan Tahun 2017 naik menjadi Rp10.000.000.000.

Pembiayaan Netto Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp30.363.101.560,- Tahun 2014 turun menjadi Rp43.884.499.137,- Tahun 2015 naik menjadi Rp116.332.853.943,- Tahun 2016 naik menjadi Rp100.055.843.027,- dan Tahun 2017 naik menjadi Rp59.803.004.546

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.10.
Neraca Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017

| Uraian | Neraca Daerah (Rp) | | | | | Rata-rata (%) |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ASET | | | | | | |
| ASET LANCAR | | | | | | |
| Kas di Kas Daerah | 39.255.355.574 | 95.560.389.006 | 83.472.071.622 | 54.434.546.682 | 21.486.767.662 | 8,87 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 6.329.566.944 | 5.883.490.005 | 600.000 | 180.000 | 262.796.201 | -36,43 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 31.807.385 | 1.105.500 | 1.600.691.265 | 2.625.713.833 | 1.142.810.184 | -35,46 |
| Kas di BLUD | - | 20.052.170.213 | 16.737.032.146 | 10.773.067.073 | 5.921.130.021 | -24,30 |
| Kas Lainnya | - | - | - | 63.476.774 | 805.969.267 | 292,43 |
| Setara Kas | - | - | - | - | - | - |
| Kas JKN | - | - | 1.920.685.765 | 1.841.082.678 | 835.933.000 | -14,69 |
| Kas Dana BOS | - | - | - | 727.966.950 | 1.505.991.305 | 26,72 |
| Investasi Jangka Pendek | - | - | - | - | - | - |
| Piutang Pendapatan | | | 22.791.910.428 | 29.161.129.073 | | -18,01 |
| Piutang Pajak | 1.800.065.362 | 11.830.513.497 | - | - | 18.190.743.041 | 114,31 |
| Piutang Retribusi | 4.217.977.440 | 5.156.584.292 | - | - | 4.256.508.782 | -19,44 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 1.114.017.110 | 0 | - | - | 3.330.309.354 | -25,00 |
| Piutang Lainnya | 2.418.361.643 | 3.919.623.316 | 5.524.714.589 | 5.554.072.789 | 5.765.692.507 | 26,84 |
| Penyisihan Piutang | - | - | (13.047.158.957,42) | (14.801.813.292,06) | (17.594.301.081,35) | 8,08 |
| Beban Dibayar Dimuka | - | - | - | - | - | - |
| Persediaan | 6.793.738.716 | 8.331.237.114 | 15.304.101.916,59 | 17.590.670.429,85 | 20.489.365.683,47 | 34,44 |
| Jumlah Aset Lancar | 61.960.890.177 | 150.735.112.945 | 134.304.648.774 | 107.970.092.990 | 66.399.715.926 | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | | | | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | | | - | - | - |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | | | - | - | - | - |
| Investasi dalam Obligasi | | | - | - | - | - |

| Uraian | Neraca Daerah (Rp) | | | | | Rata-rata (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | | | - | - | - | |
| Dana Bergulir | | | - | - | - | |
| Deposito Jangka Panjang | | | - | - | - | |
| Investasi Non Permanen Lainnya | 5.625.730.524 | 6.017.284.126 | 4.654.875.753 | 7.123.684.842 | 10.803.517.177 | 22,25 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 11.663.460.000 | 12.663.460.000 | 23.306.103.311 | 26.306.103.311 | 26.694.615.801 | 26,74 |
| Investasi Permanen Lainnya | 7.801.284.564 | 7.642.643.311 | - | - | - | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | 25.090.475.088 | 26.323.387.437 | 27.960.979.065 | 33.429.788.153 | 37.498.132.978 | 20,72 |
| Uraian | Jumlah | | | | | Rata-rata |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| ASET TETAP | | | | | | |
| Tanah | 91.403.247.216 | 123.327.068.882 | 212.433.352.332 | 215.528.230.332 | 220.887.063.307 | 27,78 |
| Peralatan dan Mesin | 198.141.643.117 | 166.417.897.763 | 193.415.479.151 | 252.032.672.991 | 277.666.934.417 | 10,17 |
| Gedung dan Bangunan | 330.598.653.638 | 338.439.530.656 | 371.592.646.000 | 401.500.464.957 | 381.081.161.057 | 3,78 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 524.600.269.055 | 569.172.084.654 | 614.143.221.084 | 721.993.917.114 | 800.906.601.343 | 11,22 |
| Aset Tetap Lainnya | 25.440.901.379 | 17.151.017.788 | 15.746.467.378 | 31.500.340.873 | 35.071.010.921 | 17,65 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 26.250.652.193 | 30.821.487.729 | 48.702.836.634 | 110.511.544.660 | 95.412.096.435 | 47,17 |
| Akumulasi Penyusutan | - | - | (507.088.096.089) | (550.695.017.820) | (625.891.196.198) | 5,56 |
| Jumlah Aset Tetap | 1.196.435.366.600 | 1.245.329.087.475 | 948.945.906.491 | 1.182.372.153.111 | 1.185.133.671.283 | 1,28 |
| DANA CADANGAN | | | | | | |
| Dana Cadangan | - | - | - | - | 10.542.221.600 | |
| Jumlah Dana Cadangan | - | - | | | 10.542.221.600 | |
| ASET LAINNYA | | | | | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 810.760.243 | 790.123.943 | 855.004.563 | 855.004.563 | 855.004.563 | 1,42 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - | |

| Uraian | Neraca Daerah (Rp) | | | | | Rata-rata (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Aset Tidak Berwujud | 1.328.567.504 | 1.570.345.804 | 1.206.571.467 | 839.931.864 | 520.050.214 | -18,36 |
| Aset Lain-lain | 23.249.261.135 | 55.157.321.529 | 32.658.868.218 | 24.368.677.547 | 123.927.833.868 | 119,91 |
| Jumlah Aset Lainnya | 25.388.588.882 | 57.517.791.276 | 34.720.444.249 | 26.063.613.974 | 125.302.888.645 | 110,68 |
| JUMLAH ASET | 1.308.875.320.749 | 1.479.905.379.134 | 1.145.931.978.580 | 1.349.835.648.230 | 1.424.876.630.433 | 3,46 |
| KEWAJIBAN | | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 388.323.381 | 403.233.625 | 18.816.271 | 191.678.870,00 | 512.831.798 | 248,69 |
| Utang Bunga | - | - | - | - | - | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | - | - | - | - | - | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | 71.219.284 | 71.219.284 | - | |
| Utang Beban | 3.666.767.635 | 2.743.654.707 | 5.281.168.291 | 12.058.130.873 | 4.616.462.972 | 33,48 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | - | 9.359.000 | - | - | - | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 4.055.091.017 | 3.156.247.332 | 5.371.203.846 | 12.321.029.027 | 5.129.294.770 | 29,76 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | - | |
| Utang Dalam Negeri | | | - | - | - | |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | - | - | - | - | - | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | | | | - | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 4.055.091.017 | 3.156.247.332 | 5.371.203.846 | 12.321.029.027 | 5.129.294.770 | 29,76 |
| EKUITAS | | | | | | |
| Jumlah Ekuitas | 1.304.820.229.732 | 1.476.749.131.802 | 1.140.560.774.734 | 1.337.514.619.202 | 1.419.747.335.663 | 3,46 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1.308.875.320.749 | 1.479.905.379.134 | 1.145.931.978.580 | 1.349.835.648.230 | 1.424.876.630.433 | 3,46 |

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai aset dalam neraca keuangan Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,32% dari Tahun 2013–2017. Aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 8,87%. Pertumbuhan aset lancar disebabkan karena kenaikan kas lainnya dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 292,43%. Piutang Daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 114,31%, serta persediaan mengalami kenaikan sebesar 34,44%.

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp1.308.875.320.749,- Tahun 2014 naik menjadi Rp1.479.905.379.134,- Tahun 2015 turun menjadi Rp1.145.931.978.580,- Tahun 2016 naik menjadi Rp1.349.835.648.230,- dan pada Tahun 2017 naik menjadi Rp1.424.876.630.433,-

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp4.055.091.017,- Tahun 2014 turun menjadi Rp3.156.247.332,- Tahun 2015 naik menjadi Rp5.371.203.846,- Tahun 2016 naik menjadi Rp12.321.029.027,- dan pada Tahun 2017 turun menjadi Rp5.129.294.770,-

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebesar Rp1.304.820.229.732,- Tahun 2014 naik menjadi Rp1.476.749.131.802,- Tahun 2015 turun menjadi Rp1.140.560.774.734,- Tahun 2016 naik menjadi Rp1.337.514.619.202,- dan pada Tahun 2017 naik menjadi Rp1.419.747.335.663,-

Kekayaan daerah atau Ekuitas adalah Jumlah Aset dikurangi Jumlah Kewajiban. Dari data tersebut diatas Jumlah Kekayaan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.419.747.335.663,-

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013-2017

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.5, maka gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sikka tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah

| No | Uraian | Realisasi Belanja (Rp) | | | | | Rata2 g |
|----|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 62,73 | 61,99 | 59,72 | 56,06 | 57,70 | 59,64 |
| | Belanja Pegawai | 54,83 | 54,23 | 47,65 | 41,87 | 39,46 | 47,61 |
| | Belanja Hibah | 1,75 | 0,73 | 0,77 | 0,57 | 0,99 | 0,96 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 0,12 | 1,14 | 0,14 | 0,03 | 0,14 | 0,31 |
| | Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,01 | 0,17 | 0,10 |
| | Belanja Bantuan Keuangan | 5,66 | 5,77 | 10,73 | 13,54 | 16,72 | 10,48 |
| | Belanja Tak Terduga | 0,30 | 0,03 | 0,28 | 0,04 | 0,22 | 0,17 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 37,27 | 38,01 | 40,28 | 43,94 | 42,30 | 40,36 |
| | Belanja Pegawai | 4,39 | 3,26 | 2,47 | 2,46 | 3,20 | 3,16 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 17,98 | 20,75 | 25,53 | 23,65 | 21,61 | 21,91 |
| | Belanja Modal | 14,89 | 14,00 | 12,27 | 17,83 | 17,48 | 15,30 |
| | Jumlah Belanja | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3.2.1.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015-2017. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
ANALISIS PROPORSI PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KABUPATEN SIKKA

| NO | URAIAN | TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR | TOTA PENGELUARAN (Belanja + Pengeluaran) | PROSENTASE |
|----|---------------------|--|--|------------|
| 1 | Tahun Anggaran 2015 | 426.539.413.914 | 898.239.798.028,00 | 47,49 |
| 2 | Tahun Anggaran 2016 | 459.184.950.600 | 1.100.721.517.287,00 | 41,72 |
| 3 | Tahun Anggaran 2017 | 421.894.290.084 | 1.079.191.811.968,46 | 39,09 |

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Sikka pada tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kabupaten Sikka adalah sebesar 39,09%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Sikka relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.13
DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN SIKKA

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah | 882.618.608.611,50 | 1.066.147.990.805,99 | 1.041.237.946.808,38 |
| | Dikurangi Realisasi : | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 895.239.798.028 | 1.096.721.517.287 | 1.069.191.811.968 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 3.000.000.000 | 4.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| | Defisit Riil | (15.621.189.417) | (34.573.526.481) | (37.953.865.160) |

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2017 Kabupaten Sikka mengalami defisit anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 3 tahun terakhir (2015-2017) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN
KABUPATEN SIKKA

| NO | URAIAN | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 119.000.309.032 | 103.711.664.527 | 69.482.316.546 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | | |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 332.544.911 | 344.178.500 | 320.688.000 |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sikka selama periode 2015-2017 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah dari Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 3.15
REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

| NO | URAIAN | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----|---|-----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|
| | | Rp | % | Rp | % | Rp | % |
| 1 | Jumlah SiLPA | 119.000.309.032 | 100 | 103.711.664.527 | 100 | 69.482.316.546 | 100 |
| 2 | Pelampauan Penerimaan PAD | 863.667.142 | | | | | |
| 3 | Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan | | | | | | |
| 4 | Pelampauan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | 16.534.667.515 | | | | | |
| 5 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 101.601.974.375 | | 103.711.664.527 | | 30.084.133.292 | |
| 6 | Kewajiban Kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | | | | | | |
| 7 | Kegiatan Lanjutan | | | | | 39.398.183.253 | |

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Untuk memperkirakan kemampuan pendanaan lima tahun kedepan, metode sederhana yang dipergunakan adalah *regresi trend* menggunakan Aplikasi SPSS dan ditambah asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Target Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan mengikat serta prioritas Utama Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan mengikat serta prioritas Utama
Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

| Uraian | Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp) | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 721.016.207.496 | 764.718.132.007 | 808.204.380.370 | 854.483.151.724 | 897.817.714.137 |
| Belanja Pegawai | 483.312.554.020 | 495.297.243.047 | 508.272.107.685 | 523.835.249.905 | 538.233.234.696 |
| Belanja Hibah | 15.284.428.256 | 17.205.208.386 | 19.055.663.134 | 20.924.722.570 | 22.684.411.667 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.210.420.647 | 2.468.428.472 | 2.717.565.744 | 2.970.204.971 | 3.207.957.469 |
| Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 2.340.863.496 | 2.768.994.084 | 3.177.548.358 | 3.583.455.457 | 3.966.309.730 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 213.601.972.805 | 242.309.267.113 | 269.920.362.138 | 297.705.589.942 | 323.883.340.958 |
| Belanja Tak Terduga | 4.265.968.272 | 4.668.990.905 | 5.061.133.311 | 5.463.928.879 | 5.842.459.617 |
| BELANJA LANGSUNG | 567.018.142.846 | 528.556.675.201 | 578.625.826.770 | 626.828.010.773 | 702.825.558.669 |
| Belanja Pegawai | 37.990.477.397 | 41.397.224.662 | 44.719.065.982 | 48.143.261.484 | 51.359.946.853 |
| Belanja Barang dan Jasa | 286.064.935.108 | 268.420.902.984 | 295.033.597.928 | 319.267.690.828 | 372.728.224.162 |
| Belanja Modal | 242.962.730.341 | 218.738.547.555 | 238.873.162.860 | 259.417.058.461 | 278.737.387.654 |
| JUMLAH BELANJA | 1.288.034.350.342 | 1.293.274.807.208 | 1.386.830.207.140 | 1.481.311.162.497 | 1.600.643.272.806 |
| | | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 25.000.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri/Lembaga Keuangan | - | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 |
| Pengeluaran Lain-lain | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Netto | 34.112.957.241 | -34.057.042.759 | -35.357.042.759 | -36.457.042.759 | -13.457.042.759 |

Sumber : Data Olahan BPKAD dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah Kota. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2021 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat kota. Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:

1. Menopang proses pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik Pemerintah Kabupaten Sikka.
2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga keberlanjutan anggaran Kota dapat terjamin

Proyeksi data disusun berdasarkan data masa lalu, kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada masa depan, dan asumsi yang digunakan

3.3.3. Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Sikka yang sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut

3.3.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait

Asumsi–asumsi yang digunakan dalam memperkirakan PAD adalah :

1. Realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya
2. Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD
3. Perkiraan makro ekonomi

Dari asumsi diatas ditetapkan berbagai kebijakan pengelolaan PAD sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta
2. Membangun sistim pengelolaan PAD yang terintegrasi
3. Optimalisasi penerimaan dari sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada
4. Mengkaji dan menetapkan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru berdasarkan potensi dan kewenangan yang ada
5. Memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah
6. Penegakan Perda pajak daerah dan retribusi daerah.

3.3.3.2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

3.3.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, transfer dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Berdasarkan hasil perhitungan, Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17.
 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

| Uraian | Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp) | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 115.000.000.000 | 121.440.000.000 | 128.556.384.000 | 136.398.323.424 | 144.991.417.800 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 20.507.739.000 | 21.656.172.384 | 22.925.224.086 | 24.323.662.755 | 25.856.053.508 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 17.389.947.483 | 18.363.784.542 | 19.439.902.316 | 20.625.736.358 | 21.925.157.748 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.056.249.289 | 3.227.399.249 | 3.416.524.845 | 3.624.932.861 | 3.853.303.631 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 74.046.064.228 | 78.192.643.825 | 82.774.732.753 | 87.823.991.451 | 93.356.902.912 |
| DANA PERIMBANGAN | 916.408.690.000 | 1.002.875.203.866 | 1.090.614.219.798 | 1.178.353.235.731 | 1.266.092.251.664 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 10.629.312.000 | 10.178.312.532,40 | 9.367.681.798,60 | 8.557.051.064,80 | 7.746.420.331,00 |
| Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | - | - | - | - | - |
| Dana Alokasi Umum | 647.862.407.000 | 693.789.264.918 | 729.344.252.377 | 764.899.239.836 | 800.454.227.295 |
| Dana Alokasi Khusus | 257.916.971.000 | 298.907.626.415,20 | 351.902.285.622,80 | 404.896.944.830,40 | 457.891.604.038 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 222.512.703.101 | 203.016.646.101 | 203.016.646.101 | 203.016.646.101 | 203.016.646.101 |
| Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | 26.249.400.000 | 26.846.000.000 | 26.846.000.000 | 26.846.000.000 | 26.846.000.000 |
| Dana Penyesuaian | 151.300.419.000 | 150.747.800.000 | 150.747.800.000 | 150.747.800.000 | 150.747.800.000 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 25.422.846.101 | 25.422.846.101 | 25.422.846.101 | 25.422.846.101 | 25.422.846.101 |
| Pendapatan Lainnya | 19.540.038.000 | | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan | 1.253.921.393.101 | 1.327.331.849.967 | 1.422.187.249.899 | 1.517.768.205.256 | 1.614.100.315.565 |

Sumber : Data Olahan BPKAD dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 terus meningkat. Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.253.921.393.101,- Tahun 2020 naik menjadi Rp1.327.331.849.967,- Tahun 2021 naik menjadi Rp1.422.187.249.899,- Tahun 2022 naik menjadi Rp1.517.768.205.256,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp1.614.100.315.565,-
 PAD pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp115.000.000.000,- Tahun 2020 naik menjadi Rp121.440.000.000,- Tahun 2021 naik menjadi Rp128.556.384.000,- Tahun 2022 naik menjadi Rp136.398.323.424,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp144.991.417.800,-
 Dana Perimbangan pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp916.408.690.000,- Tahun 2020 naik menjadi Rp1.002.875.203.866,- Tahun 2021 naik menjadi Rp1.090.614.219.798,- Tahun 2022 naik menjadi Rp1.178.353.235.731,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp1.266.092.251.664,-
 Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp222.512.703.101,- Tahun 2020-2023 turun menjadi Rp203.016.646.101,-.

A. Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Proyeksi anggaran belanja daerah tersebut diatas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji;
2. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019–2023;
3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas, anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat dan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta

mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Sikka.

Dalam upaya mewujudkan "*Terpenuhinya Hak-hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023*", perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership*. Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Sikka diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- b. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat
- c. Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).
- d. Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.
- e. Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1. Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
2. Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

| Uraian | Proyeksi Belanja Daerah (Rp) | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 721.016.207.496 | 764.718.132.007 | 808.204.380.370 | 854.483.151.724 | 897.817.714.137 |
| Belanja Pegawai | 483.312.554.020 | 495.297.243.047 | 508.272.107.685 | 523.835.249.905 | 538.233.234.696 |
| Belanja Hibah | 15.284.428.256 | 17.205.208.386 | 19.055.663.134 | 20.924.722.570 | 22.684.411.667 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.210.420.647 | 2.468.428.472 | 2.717.565.744 | 2.970.204.971 | 3.207.957.469 |
| Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA | 2.340.863.496 | 2.768.994.084 | 3.177.548.358 | 3.583.455.457 | 3.966.309.730 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 213.601.972.805 | 242.309.267.113 | 269.920.362.138 | 297.705.589.942 | 323.883.340.958 |
| Belanja Tak Terduga | 4.265.968.272 | 4.668.990.905 | 5.061.133.311 | 5.463.928.879 | 5.842.459.617 |
| BELANJA LANGSUNG | 567.018.142.846 | 528.556.675.201 | 578.625.826.770 | 626.828.010.773 | 702.825.558.669 |
| Belanja Pegawai | 37.990.477.397 | 41.397.224.662 | 44.719.065.982 | 48.143.261.484 | 51.359.946.853 |
| Belanja Barang dan Jasa | 286.064.935.108 | 268.420.902.984 | 295.033.597.928 | 319.267.690.828 | 372.728.224.162 |
| Belanja Modal | 242.962.730.341 | 218.738.547.555 | 238.873.162.860 | 259.417.058.461 | 278.737.387.654 |
| JUMLAH BELANJA | 1.288.034.350.342 | 1.293.274.807.208 | 1.386.830.207.140 | 1.481.311.162.497 | 1.600.643.272.806 |

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 terus meningkat. Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.288.034.350.342,- Tahun 2020 naik menjadi Rp1.293.274.807.208,- Tahun 2021 naik menjadi Rp1.386.830.207.140,- Tahun 2022 naik menjadi Rp1.481.311.162.497,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp1.600.643.272.806.-.

Proyeksi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019-2023 terus meningkat. Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp721.016.207.496,- Tahun 2020 naik menjadi Rp764.718.132.007,- Tahun 2021 naik menjadi Rp808.204.380.368,- Tahun 2022 naik

menjadi Rp854.483.151.724,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp897.817.714.137,-.

Proyeksi Belanja Langsung Tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp567.018.142.846,- Tahun 2020 naik menjadi Rp528.556.675.201,- Tahun 2021 naik menjadi Rp578.625.826.770,- Tahun 2022 naik menjadi Rp626.828.010.773,- dan pada Tahun 2023 diproyeksikan naik menjadi Rp702.825.558.669,-.

B. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2016-2021, pembiayaan netto Kabupaten Sikka diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,15%. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Sikka tahun 2016-2021

Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi sumber pendapatannya sangat terbatas. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan :

- 1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Sikka;
- 2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain;
- 3. Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta;
- 4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas;
- 5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi PMA dan PMDN.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel Tabel 3.19.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

| Uraian | Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp) | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 59.112.957.241 | 8.112.957.241 | 6.812.957.241 | 5.712.957.241 | 28.712.957.241 |
| Penggunaan SILPA | 8.612.957.241 | 7.612.957.241 | 6.312.957.241 | 5.212.957.241 | 3.212.957.241 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | 25.000.000.000 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | - | - | - | - | - |
| Penerimaan Pinjaman daerah | 50.000.000.000 | | | | |
| Penerimaan kembali Pemb. Pinjaman | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Penerimaan Lain-lain | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 25.000.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 | 42.170.000.000 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri/Lembaga Keuangan | - | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 | 17.170.000.000 |
| Pengeluaran Lain-lain | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Netto | 34.112.957.241 | -34.057.042.759 | -35.357.042.759 | 36.457.042.759 | -13.457.042.759 |

Berdasarkan hasil perhitungan, Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dijelaskan bahwa Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019-2023

mengalami fluktuasi. Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp59.112.957.241,- Tahun 2020 turun menjadi Rp8.112.957.241,- Tahun 2021 turun menjadi Rp6.812.957.241,-, Tahun 2022 turun menjadi Rp5.712.957.241,-, dan Tahun 2023 naik menjadi Rp28.712.957.241,-.

Pada Tahun 2019 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp59.112.957.241,- disebabkan karena adanya rencana pinjaman daerah sebesar Rp50.000.000.000,-

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp25.000.000.000,- dan pada tahun 2020-2023 naik menjadi Rp42.170.000.000,-. Hal ini disebabkan adanya rencana pembentukan dana cadangan untuk Kegiatan PILKADA Tahun 2023 yang setiap tahun dicadangkan sebesar Rp5.000.000.000,-. Pemerintah juga merencanakan adanya penyertaan modal daerah setiap tahun sebesar Rp20.000.000.000,- Selain itu mulai Tahun 2020 pemerintah wajib menganggarkan pembayaran cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman daerah.

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan Kerangka Pendanaan Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

| Uraian | Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pendapatan | 1.253.921.393.101 | 1.327.331.849.967 | 1.422.187.249.899 | 1.517.768.205.256 | 1.614.100.315.565 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| SiLPA | 8.612.957.241 | 7.612.957.241 | 6.312.957.241 | 5.212.957.241 | 3.212.957.241 |
| | | | | | |
| Total Penerimaan | 1.262.534.350.342 | 1.334.944.807.208 | 1.428.500.207.140 | 1.522.981.162.497 | 1.617.313.272.806 |
| Dikurangi | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| | | | | | |
| Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat | 500.000.000.000 | 512.500.000.000 | 525.312.500.000 | 538.445.312.500 | 551.906.445.313 |
| Total Pengeluaran | 520.000.000.000 | 532.500.000.000 | 545.312.500.000 | 558.445.312.500 | 571.906.445.313 |
| | | | | | |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | 742.534.350.342 | 802.444.807.208 | 883.187.707.140 | 964.535.849.997 | 1.045.406.827.493 |

Sumber : Data Olahan BPKAD dan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp742.534.350.342,- dan pada Tahun 2020 naik menjadi Rp802.444.807.208,-, Tahun 2021 naik menjadi Rp883.187.707.140,- Tahun 2022 naik menjadi Rp964.535.849.997,- pada Tahun 2023 naik menjadi Rp1.045.406.827.493,-. Dengan demikian maka Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Analisis Kerangka Pendanaan dalam RPJMD ini dapat digunakan untuk membiayai program kegiatan pada tahun rencana.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sikka dan Isu Strategis. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sikka yang menguraikan masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang yang bersifat makro. Masalah adalah kondisi atau hal yang merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Sedangkan akar masalah adalah kondisi atau hal yang merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci. Selanjutnya isu strategis adalah kondisi atau hal yang mendasar, mendesak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran kondisi daerah Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2017, pemetaan permasalahan pembangunan dan isu strategis dapat digambar sebagai berikut :

4.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dipetakan berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah.

4.1.1. Masalah Pokok Masih Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat.

Indikasi masalah pokok masih rendahnya kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu: **Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan**.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013 IPM Kabupaten Sikka sebesar 60,84, meningkat menjadi 61,36 pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 meningkat menjadi 61,81, Tahun 2016 meningkat menjadi 62,42 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 63,80. Jika dibandingkan dengan IPM Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 66,11, Kabupaten Nagekeo sebesar 64,74, Kabupaten Ngada 66,47 dan Kota Kupang sebesar 78,25 maka IPM di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah namun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTT sebesar 63,73.

Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Sikka tidak jauh berbeda dengan kondisi Indeks Kebahagiaan Masyarakat NTT pada umumnya yang dipublikasikan BPS. Indeks kebahagiaan Masyarakat NTT Tahun 2014-2017 cenderung meningkat. Pada Tahun 2014 Indeks Kebahagiaan Masyarakat NTT sebesar 66,2 dan Tahun 2017 naik menjadi 68,98. Jika dibandingkan dengan Indeks Kebahagiaan Tahun 2017 Provinsi Papua Barat sebesar 71,73, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 70,70 dan juga rata-rata Nasional sebesar 70,69 maka Indeks Kebahagiaan Masyarakat NTT masih tergolong rendah. Indeks Kebahagiaan di NTT merupakan salah satu dari 5 (lima) provinsi di Indonesia dengan Indeks Kebahagiaan terendah.

Masalah pokok masih rendahnya kualitas hidup masyarakat Sikka disebabkan oleh beberapa masalah :

1. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Indikasi masalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dari indikator Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sampai Tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan. Tahun 2013 sebesar 8,76, meningkat menjadi 8,96 pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 meningkat menjadi 9,04, meningkat lagi pada Tahun 2016 menjadi 9,23 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,45. Jika dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 10,69, Kabupaten Flores Timur sebesar 10, Kabupaten Nagekeo sebesar 9,9 dan Provinsi NTT sebesar 10,11 maka Indeks Pendidikan Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

Masalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disebabkan oleh akar masalah Masih Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan.

Indikasi masalah Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dapat dilihat dari indikator :

- Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 sebesar 6,49, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 6,53, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 6,54, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 6,55 dan Tahun 2017 sebesar 6,56. Jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 7,12, Kabupaten Ende sebesar 7,63, Provinsi Nusa Tenggara Timur 7,15 dan Nasional sebesar 8,10, maka Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.
- Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 sebesar 11,03, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 11,38, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 11,54, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 11,91 dan Tahun 2017 sebesar 12,34. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 13,75, Kabupaten Flores Timur 12,88 dan Ngada sebesar 12,67 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 13,07 maka Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.

2. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikasi masalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup. Data Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Tahun 2013 sebesar 65,68 meningkat menjadi 65,70 pada Tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 66,10 meningkat lagi pada Tahun 2016 menjadi 66,20 dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 66,30. Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar 64,65, Kabupaten Ende sebesar 64,48, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 66,07 dan Nasional sebesar 71,10 maka angka harapan hidup Kabupaten Sikka masih lebih rendah dari Nasional namun lebih tinggi dari Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat disebabkan oleh akar masalah Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kesakitan.

Indikasi akar masalah Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kesakitan dapat dilihat dari indikator :

- Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Angka Kematian Ibu Melahirkan pada Tahun 2013 sebesar 97 per 100.000 KH, naik menjadi 114,50 per 100.000 KH di tahun 2014, naik menjadi 150,16 per 100.000 KH di Tahun 2015, Tahun 2016 naik menjadi 250,90 per 100.000 KH dan di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 93,22 per 100.000 KH. Jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 150 per 100.000 KH, Kabupaten Ende sebesar 254,7 per 100.000 KH dan Provinsi NTT sebesar 131 per 100.000 KH maka Angka Kematian Ibu Kabupaten Sikka tergolong rendah namun angka kematian ibu harus ditargetkan mencapai angka 0 atau tidak ada kematian ibu.
- Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Sikka pada tahun 2013 sebesar 11 per 1.000 KH, Tahun 2014 meningkat menjadi 14,25 per 1.000 KH, Tahun 2015 menurun menjadi sebesar 11,87 per 1.000 KH, Tahun 2016 naik menjadi 15,44 per 1.000 KH dan Tahun 2017 menjadi sebesar 15,61 per 1.000 KH. Jika dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 21 per 1.000 KH, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 9,23 per 1.000 KH dan Nasional sebesar 25,10 per 1.000 KH maka angka kematian bayi di Kabupaten Sikka tergolong rendah akan tetapi lebih tinggi dari Provinsi NTT namun angka kematian bayi harus ditargetkan mencapai angka 0 atau tidak ada kematian bayi.
- Angka Kesakitan Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Angka Kesakitan di Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebesar 47,86%, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 77,20, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 23,30, Tahun 2016 turun

menjadi sebesar 23,20 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 43,94%. Jika dibandingkan dengan Angka Kesakitan Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar 30,63% dan Provinsi NTT sebesar 34,86% maka angka kesakitan Kabupaten Sikka masih lebih tinggi.

3. Belum Kokoh, Belum Maju dan Belum Adilnya Perekonomian

Indikasi masalah Belum Kokoh, Belum Maju dan Belum Adilnya Perekonomian dapat dilihat dari Indikator PDRB Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Indeks Williamson, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Rasa Aman dan Nyaman yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- PDRB per Kapita di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. PDRB per Kapita Tahun 2013 sebesar Rp9.654.760,- Tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp10.580.000,- Tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp11.510.000,- Tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp12.570.000,- dan Tahun 2017 sebesar Rp13.610.000,-. Jika dibandingkan dengan PDRB per Kapita Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar Rp12.768.000,- dan Kabupaten Ende sebesar Rp13.722.000,-, maka PDRB per Kapita Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur dan lebih rendah dari Kabupaten Ende.
- Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 sebesar Rp7.500.000,- Tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp7.559.000,-, Tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp7.618.000,- Tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp7.740.000,- dan Tahun 2017 sebesar Rp7.855.000,-. Jika dibandingkan dengan Pengeluaran per Kapita Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar Rp7.442.000,- dan Kabupaten Ende sebesar Rp8.841.000,-, dan Provinsi NTT sebesar Rp7.350.000,- maka Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sikka lebih besar dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT, namun lebih kecil dari Kabupaten Ende.
- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus meningkat. Pada Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2%, Tahun 2014 sebesar 4,56%, Tahun 2015 menurun menjadi sebesar 4,40%, dan Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 4,93% dan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 5,22%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 di Kabupaten Ende sebesar 5,04%, Kabupaten Flores Timur sebesar 5,16%, Kota Kupang sebesar 6,83% dan Provinsi NTT sebesar 5,20% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka tergolong lebih tinggi dari Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT namun lebih rendah dari Kota Kupang.
- Inflasi Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 terus terkendali. Pada Tahun 2013 laju inflasi kota Maumere terkendali sebesar 6,24, Tahun 2014 sebesar 4,00, Tahun 2015 sebesar 3,89, Tahun 2016 sebesar 3,62 dan pada Tahun 2017 terkendali sebesar 1,70. Jika dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2017 di Kota Kupang sebesar 2,05 maka laju inflasi kota Maumere lebih terkendali. Dan jika dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2017 tingkat Nasional sebesar 3,61 maka laju inflasi kota Maumere pun lebih terkendali.

Disisi lain masih ada kemiskinan dan ketimpangan, hal ini dapat dilihat dari indeks Gini, Indeks Williamson, Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Rasa aman.

- Indeks Gini Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 sebesar 0,247, tahun 2016 sebesar 0,248 dan Tahun 2017 menjadi 0,274. Dari data ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan terus mengalami ketimpangan yang semakin lebar dengan kategori tingkat ketimpangan rendah.
- Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Sikka Tahun 2015-2017 terus mengalami ketimpangan yang semakin sempit. Pada Tahun 2015 Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Sikka sebesar 0,53, Tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,51, Tahun 2017 menjadi sebesar 0,50. Kondisi Tahun 2017 menunjukkan Kabupaten Sikka berada pada

ketimpangan wilayah sedang. Terhadap Indeks Ketimpangan Williamson di Kabupaten Sikka yang terus mengalami ketimpangan yang semakin sempit maka trend tersebut perlu terus didorong menuju nilai 0.

- Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 28,25%, dan pada Tahun 2014 menurun signifikan menjadi 12,27%. Pada Tahun 2015 naik menjadi 14,28%, Tahun 2016 naik lagi menjadi 14,33% dan pada Tahun 2017 menurun menjadi 14,20%. Presentase Penduduk diatas garis kemiskinan Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar 10,75% dan di Kabupaten Ende sebesar 23,95% serta Provinsi NTT sebesar 21,38% dan Nasional sebesar 10,60%. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Sikka mengalami penurunan namun masih lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Flores Timur dan Nasional akan tetapi masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Kabupaten Ende dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Tingkat Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013 dan 2014 sebesar 5,24, Tahun 2015 turun menjadi 0,65, Tahun 2016 tetap 0,65, dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar 2,50.
- Indeks rasa aman dan nyaman. Indeks rasa aman dan nyaman Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 0,67 dibawah Indeks rasa aman ideal 1.

Masalah Belum Kokoh, Belum Maju dan Belum Adilnya Perekonomian disebabkan oleh akar masalah (1) Masih rendahnya nilai investasi swasta, Kurangnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor potensial dan rendahnya Kualitas Layanan Infrastruktur dan (2) Masih adanya gangguan keamanan, resiko bencana dan kurangnya harmoni sosial.

Indikasi akar masalah (1) Masih rendahnya nilai investasi swasta, Kurangnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor potensial dan rendahnya Kualitas Layanan Infrastruktur dan (2) Masih adanya gangguan keamanan, resiko bencana dan kurangnya harmoni sosial dapat dilihat dari indikator:

- a. Nilai investasi PMA dan PMDN. Nilai investasi PMA Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Nilai investasi PMA Tahun 2013 sebesar \$3.800.000,-, Tahun 2014 naik menjadi \$4.343.500, Tahun 2015 turun menjadi sebesar \$1.785.025,-, Tahun 2016 naik menjadi sebesar \$4.487.182,- dan Tahun 2017 naik sebesar \$287.707.621,-. Sedangkan nilai investasi PMDN di Kabupaten Sikka tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Nilai Investasi PMDN Tahun 2013 sebesar Rp30.925.650.000,-, Tahun 2014 naik menjadi Rp41.397.496.105,-, Tahun 2015 naik menjadi sebesar Rp1.054.038.959.749,-, Tahun 2016 turun menjadi sebesar Rp910.850.304.002,- dan Tahun 2017 turun sebesar Rp218.585.816.710,-. Jika dibandingkan dengan penanaman modal dalam negeri Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar Rp206.465.482.775, Provinsi NTT sebesar Rp2.540.000.000.000,- untuk penanaman modal asing dengan nilai Rp960.000.000.000,- maka nilai investasi sektor swasta di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.
- b. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Tahun 2013 sebanyak 4.816, Tahun 2014 bertambah menjadi sebanyak 4.868, Tahun 2015 bertambah menjadi sebanyak 4.887, Tahun 2016 bertambah menjadi sebanyak 4.897 dan Tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 5.049. Jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebanyak 2.215, Kota Kupang usaha mikro dan kecil sebanyak 2.556 maka jumlah usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Sikka tergolong tinggi dibanding Kabupaten Flores Timur tetapi lebih rendah dari Kota Kupang.
- c. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian. Kontribusi Sektor Pertanian di Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif. Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 36,19%, Tahun 2015 naik menjadi 36,35%, Tahun 2016 turun menjadi sebesar 35,60% dan turun menjadi sebesar 35,37% pada Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektor pertanian Tahun 2017 Provinsi NTT

sebesar 28,72%, Kabupaten Ende sebesar 26,72%, Kabupaten Flores Timur sebesar 26,63% maka kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Sikka lebih tinggi namun masih perlu ditingkatkan.

- d. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata di Kabupaten Sikka tahun 2014-2017 cenderung meningkat. Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 0,69%, Tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,71%, dan menjadi sebesar 0,72% pada Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektor pariwisata Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 0,35%, Kabupaten Flores Timur sebesar 0,1% dan Provinsi NTT sebesar 0,74% maka kontribusi PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur namun lebih rendah dari Provinsi NTT.
- e. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan. Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung meningkat. kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Sikka pada Tahun 2013 sebesar 10,14%, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 10,31%, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 10,61% dan Tahun 2017 turun menjadi sebesar 10,48%. Jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektor perdagangan Tahun 2017 Kabupaten Ende sebesar 14,95%, Kabupaten Flores Timur sebesar 8,41% dan Provinsi NTT sebesar 11,05% maka kontribusi PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur namun lebih rendah dari Kabupaten Ende dan Provinsi NTT.
- f. Kontribusi PDRB Sektor Industri. Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung menurun. Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 1,72%, Tahun 2015 sebesar 1,71%, Tahun 2016 sebesar 1,69%, dan menjadi sebesar 1,70% pada Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektor industri tahun 2017 Kabupten Flores Timur sebesar 0,83%, Kabupaten Ende sebesar 1,48% dan Provinsi NTT sebesar 1,26% maka kontribusi PDRB sektor industri di Kabupaten Sikka lebih tinggi namun masih perlu ditingkatkan.
- g. Kontribusi PDRB Sektor Transportasi. Kontribusi Sektor Transportasi Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif. Kontribusi Sektor Transportasi Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 dan 2015 sebesar 6%, Tahun 2016 sebesar 6,8%, dan menjadi sebesar 6,21% pada Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB sektor transportasi Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 5,60%, Kabupaten Ende 7,11% dan Provinsi NTT sebesar 5,42% maka kontribusi PDRB sektor transportasi di Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT namun masih lebih rendah dari Kabupaten Ende.
- h. Pertumbuhan sektor konstruksi terhadap PDRB dapat dilihat dari indikator laju Pertumbuhan sektor Konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan Sektor Konstruksi Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung menurun. Pertumbuhan Sektor Konstruksi Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 5,83, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 5,30, Tahun 2016 naik menjadi 6,59 dan pada Tahun 2017 turun secara signifikan menjadi 3,94. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor konstruksi terhadap PDRB Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar 5,10%, Kabupaten Ende 6,14% dan Provinsi NTT sebesar 6,12% maka pertumbuhan sektor konstruksi terhadap PDRB di Kabupaten Sikka masih tergolong rendah.
- i. Pertumbuhan Sektor Listrik Dan Gas terhadap PDRB dapat dilihat dari indikator laju pertumbuhan sektor listrik dan gas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga konstan. Pertumbuhan Sektor Listrik Dan Gas Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung menurun. Pertumbuhan Sektor Listrik Dan Gas Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 22,62, Tahun 2015 turun menjadi sebesar 15,85, Tahun 2016 turun menjadi 14,57 dan pada Tahun 2017 turun secara signifikan menjadi 0,72. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor listrik dan gas terhadap PDRB Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar 0,56%, Kabupaten Ende 0,93% dan Provinsi NTT sebesar 0,70% maka pertumbuhan sektor listrik dan gas terhadap PDRB di Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Flores Timur dan Provinsi NTT namun masih lebih rendah dari Kabupaten Ende.

- j. Pertumbuhan Sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap PDRB dapat dilihat dari indikator laju Pertumbuhan Sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga konstan. Pertumbuhan Sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Sikka Tahun 2014-2017 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan Sektor Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kabupaten Sikka pada Tahun 2014 sebesar 3,65, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 3,69, Tahun 2016 turun menjadi 1,85 dan pada Tahun 2017 naik menjadi 1,90. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB Tahun 2017 di Kabupaten Flores Timur sebesar 2,65%, Kabupaten Ende 1,43% dan Provinsi NTT sebesar 1,47% maka pertumbuhan sektor air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB di Kabupaten Sikka lebih tinggi dari Kabupaten Ende dan Provinsi NTT namun masih lebih rendah dari Kabupaten Flores Timur.
- k. Kualitas Layanan Infrastruktur. Kualitas layanan infrastruktur Kabupaten Sikka Tahun 2016 sebesar 66,77 yang terdiri dari pelaksanaan infrastruktur pekerjaan umum sebesar 71,01, infrastruktur perumahan sebesar 64,48 dan infrastruktur perhubungan sebesar 64,84. Angka kualitas layanan infrastruktur berada pada kriteria puas sehingga perlu didorong mencapai kriteria sangat puas.
- l. Angka Kriminalitas. Angka kriminalitas di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 sebanyak 224 kasus, Tahun 2014 naik menjadi 269 kasus, Tahun 2015 turun menjadi 223 kasus, Tahun 2016 turun menjadi 214 kasus dan Tahun 2017 turun menjadi 157 kasus. Jika dibandingkan dengan Angka kriminalitas Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebanyak 288 kasus, Kabupaten Ende sebanyak 222 kasus maka angka kriminalitas di Kabupaten Sikka lebih sedikit dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Ende.
- m. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks Resiko Bencana Indonesia di Kabupaten Sikka Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh BNPB Kabupaten Sikka berada pada urutan 59 dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk skala Provinsi NTT, Kabupaten Sikka berada pada urutan 1 dari 22 Kabupaten/Kota, dengan kelas resiko tinggi (skor 201). Dibandingkan daerah dengan skor tertinggi adalah Kabupaten Cianjur (Skor : 250) dan daerah dengan skor terendah adalah Kabupaten Membramo Tengah, Papua (Skor: 45/Kelas Resiko Sedang).

4.1.2. Masalah Pokok Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Indikasi masalah pokok belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari Indeks **Reformasi Birokrasi**. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sikka tidak jauh berbeda dengan kondisi Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT pada umumnya yang dipublikasikan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT mencapai nilai B. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Sulawesi Tengah yang mencapai nilai BB, maka Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT masih tergolong rendah.

Masalah pokok belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi disebabkan oleh masalah :

1. Pemerintah yang belum bersih dan bebas dari KKN

Indikasi masalah Pemerintah yang belum bersih dan bebas dari KKN dapat dilihat dari akar masalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP dapat dilihat dari indikator Opini BPK dan jumlah temuan pemeriksaan BPK dan APIP. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2016 dan 2017 mendapatkan Opini WTP. Jumlah temuan pemeriksaan BPK dan APIP di Kabupaten Sikka Tahun 2013 sebanyak 32 temuan, Tahun 2014 sebanyak 107 temuan, Tahun 2015 sebanyak 97 temuan, Tahun 2016 sebanyak 147 temuan dan Tahun 2017 sebanyak 145 temuan. Terhadap jumlah temuan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sikka belum bebas temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.

Masalah Pemerintah yang belum bersih dan bebas dari KKN disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kinerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Indikasi rendahnya

kinerja sistim pengendalian internal pemerintah dapat dilihat dari indikator maturitas SPIP. Angka maturitas SPIP kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 berada pada Level 2 dengan nilai sebesar 2,33.

2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indikasi masalah masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik dapat dilihat dari indeks Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Sikka sebesar 1,85 berdasarkan hasil penelitian Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Sikka dengan kriteria buruk.

Masalah masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut :

a. Masih Rendahnya Profesionalitas ASN

Indikasi masalah rendahnya profesionalitas ASN dapat dilihat dari indikator indeks profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka pada tahun 2013 sebesar 64,9, tahun 2014 naik menjadi sebesar 65,3, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 65,4, Tahun 2016 naik menjadi sebesar 65,5 dan Tahun 2017 sebesar 65,6. Jika dibandingkan dengan profesionalitas ASN Tahun 2017 Kabupaten Flores Timur sebesar 71,2, Kabupaten Ende sebesar 76,3, Provinsi Nusa Tenggara Timur 71,5 dan Nasional sebesar 81, maka profesionalitas ASN di Kabupaten Sikka masih lebih rendah.

b. Prasarana dan sarana pelayanan publik yang belum memadai

Indikasi masalah Prasarana dan sarana pelayanan publik yang belum memadai dapat dilihat dari Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kabupaten Sikka sampai dengan Tahun 2017 sebesar 0,39 dibawah nilai 2 (kriteria : aman dan nyaman) yang dapat diartikan bahwa belum semua perangkat daerah mempunyai tempat parkir, ruang tunggu, toilet, layanan kebutuhan khusus, ruang laktasi/foto copy/tempat bermain anak, Front office layanan konsultasi dan Front office pengaduan.

c. Sistim informasi pelayanan publik yang belum memadai

Indikasi masalah Sistim informasi pelayanan publik yang belum memadai dapat dilihat dari indeks *e-government*. Indeks *e-government* di Kabupaten Sikka pada sampai dengan Tahun 2017 telah mencapai 0,97 dari nilai ideal sebesar 4 atau sangat baik yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sikka sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas.

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi yang masih rendah.

Indikasi masalah Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi yang masih rendah dapat dilihat dari indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP di Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sikka pada tahun Tahun 2013 sebesar 31,66 dengan predikat C, Tahun 2014 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 50,74 dengan predikat CC, Tahun 2015 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 51,02 dengan predikat CC dan Tahun 2016 nilai SAKIP naik menjadi sebesar 54,98 dengan predikat CC, Pada Tahun 2017 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sikka sebesar 55,14 atau dengan tingkat Akuntabilitas Kinerja CC. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi dan 3 Kabupaten/Kota lainnya dengan predikat B maka nilai SAKIP di Kabupaten Sikka masih rendah.

Masalah Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi yang masih rendah disebabkan oleh akar masalah masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan Evaluasi serta pelaporan kinerja. Indikasi masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan Evaluasi serta pelaporan kinerja dapat dilihat dari indikator nilai perencanaan, nilai pengukuran, nilai evaluasi dan nilai pelaporan kinerja. Nilai perencanaan Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 16,93 nilai pengukuran Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 11,05, nilai evaluasi internal Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 4,48 dan nilai pelaporan kinerja Kabupaten Sikka Tahun 2017 sebesar 12,72.

4.1.3. Distribusi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah yang diuraikan diatas, maka hubungan kasualitas “jika – maka” dan “agar – maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

| No. | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|-----|--|---|---|
| 1. | Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat | 1 Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat | Masih rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan |
| | | 2 Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat | Masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kesakitan |
| | | 3 Belum Kokoh, Belum Maju dan Belum Adilnya Perekonomian | 1 Masih rendahnya nilai investasi swasta, Kurangnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor potensial dan rendahnya Kualitas Layanan Infrastruktur |
| | | | 2 Masih adanya gangguan keamanan, resiko bencana dan kurangnya harmoni sosial |
| 2 | Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi | 1 Pemerintah yang belum bersih dan bebas dari KKN | Masih rendahnya kinerja Sistim Pengendalian Internal Pemerintah |
| | | 2 Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik | 1 Masih rendahnya profesionalitas ASN |
| | | | 2 Prasarana dan sarana pelayanan publik yang belum memadai |
| | | 3 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi yang masih rendah | 3 Sistim Informasi pelayanan publik yang belum memadai |
| | | | Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan Evaluasi serta pelaporan kinerja |

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang mendasar, mendesak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Isu strategis pada hakekatnya adalah masalah pokok. Oleh karena itu, penetapan isu strategis dalam RPJMD ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Isu Strategis Daerah

| No. | Masalah Pokok | Isu Strategis |
|-----|--|--|
| 1. | Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat | Masih rendahnya kualitas hidup masyarakat |
| 2. | Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi | Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi |

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Visi menggambarkan kondisi yang diharapkan dan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lima tahun kedepan. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.1. Visi

Perumusan Visi Pembangunan Daerah harus mereflesikan kekuatan dan potensi unggulan daerah sekaligus menjawab masalah pokok dan atau isu strategis daerah. Berdasarkan masalah pokok dan atau isu strategis daerah maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

5.1.1. Keselarasan Visi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019

Keselaran Visi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1.

Keselaran Visi RPJMD dengan Visi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019

| VISI RPJMD | VISI RPJPD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2005-2025 | VISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023 | VISI RPJMN TAHUN 2014-2019 |
|---|--|--|---|
| TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023 | Kabupaten SIKKA sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta pariwisata di kawasan Flores pada tahun 2025 | NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong |

5.2. Misi

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

5.2.1. Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah kabupaten maka Visi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025 adalah:

“Kabupaten SIKKA sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta pariwisata di kawasan Flores pada tahun 2025”.

Visi Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sikka dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Kabupaten Sikka tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya.

Agar ada tahap-tahap yang jelas menuju tercapainya visi Kabupaten Sikka tersebut maka ditetapkan Visi Antara untuk periode 5 tahun pembangunan. Visi Antara selama 20 tahun periode pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2005-2009 Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan partisipasi masyarakat, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan SDM Unggul, serta pariwisata dengan basis budaya, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2009.
2. Tahun 2010–2014 Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan infrastruktur unggul, serta pariwisata berbasis budaya dengan pelestarian cagar budaya, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2014.
3. Tahun 2015–2019 Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan infrastruktur bertaraf global, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan standar mutu internasional, serta pariwisata berbasis budaya dengan manajemen berkesinambungan, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2019.
4. Tahun 2020–2025 Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan dengan dukungan jaringan bisnis internasional, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas dengan dukungan teknologi mutakhir, serta pariwisata berbasis budaya dengan jaringan pemasaran global, berwawasan lingkungan di kawasan Flores pada tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 berada pada periode ketiga Tahun V dan periode keempat Tahun I–III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka tahun 2005-2025. Pada periode ketiga dan keempat RPJPD tersebut, tetap fokus pada pengembangan Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta pariwisata berbasis budaya yang berwawasan lingkungan di kawasan Flores, namun dengan target capaian yang berbeda pada setiap periode.

Untuk mewujudkan visi pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Sikka tersebut dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera;
2. Menjadikan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores;
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Kabupaten Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur;
4. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
5. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai;
6. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan;
7. Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
9. Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat.

Sebagai ukuran tercapainya **"Kabupaten Sikka sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, pusat pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas, serta pariwisata di kawasan Flores pada tahun 2025"** maka pembangunan jangka panjang sampai tahun 2025 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

- A. Keunggulan daya saing Kabupaten Sikka khususnya di sektor industri manufaktur, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh:
 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai sekitar dua belas juta rupiah per tahun (atas dasar Harga Konstan 1993), dengan tingkat pengangguran 4 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 2. Kualitas SDM yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.
 3. Terbangunnya struktur perekonomian Sikka yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
- B. Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai Salah Satu Pusat Pendidikan Berkualitas di Flores, ditunjukkan oleh:
 1. Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah.
 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan informal.
 3. Tingkat kelulusan sekolah dasar dan menengah hingga mendekati angka 100 persen.
 4. Tercapainya program wajib belajar 12 tahun sehingga pendidikan minimal masyarakat Sikka adalah setara SMU dan tidak ada anak usia didik yang putus sekolah.
 5. Tercapainya tingkat buta aksara hingga nol persen.
 6. Tersedianya fasilitas taman pendidikan luar sekolah yang modern dan lengkap yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Sikka yang berkepentingan.
- C. Kabupaten Sikka sebagai Tujuan Wisata di Indonesia bagian Timur, ditunjukkan oleh:
 1. Meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
 2. Meningkatkan infrastruktur dan layanan wisata yang profesional.
 3. Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari paket wisata yang terintegrasi.
 4. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal.
- D. Terwujudnya Kabupaten Sikka yang memiliki good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum, ditunjukkan oleh:
 1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
 2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Sikka untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa, dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pembangunan Sikka.

4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari praktek-praktek KKN.
 5. Terwujudnya akuntabilitas publik penyelenggaraan pemerintahan.
 6. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur pemerintah yang profesional dan berkompetensi tinggi.
- E. **Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai**, yang ditandai oleh:
1. Rendahnya tingkat kriminalitas.
 2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.
 3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tentram, dan damai.
 4. Tingkat partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.
- F. **Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan**, ditandai oleh:
1. Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi antarmoda berbasis pada efisiensi dan berkeadilan. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi. Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern guna terciptanya Kabupaten Sikka sebagai *cybercity* terkemuka di Indonesia.
 2. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, dan energi.
 3. Tingkat aksesibilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata ke segenap lapisan masyarakat.
 4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat.
 5. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel serta terwujud Sikka tanpa permukiman kumuh.
 6. Tersedianya ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.
- G. **Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan**, ditandai oleh:
1. Meningkatnya kenyamanan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
 2. Rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara.
 3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- H. **Masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**, ditandai oleh:
1. Terwujudnya karakter masyarakat Sikka yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
 2. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.
 3. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari.
- I. **Terwujudnya Kabupaten Sikka Sehat**, ditandai oleh:
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dari rendahnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, dan rendahnya tingkat prevalensi penyakit menular termasuk HIV/AIDS.
 2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan serta perlindungan terhadap kesehatan terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
 3. Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perumahan serta ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan rumah tangga.
 4. Rendahnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan napza.

5.2.2. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi wilayah, pengembangan sosial masyarakat, memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

"Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil Dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- a. **Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda:
- Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- b. **Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global**, dilakukan melalui agenda :
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
 - Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
 - Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah
- c. **Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :
- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
 - Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
 - Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
 - Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
 - Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
- d. **Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan**, dapat dilakukan melalui agenda :
- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
 - Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
 - Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
- e. **Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**, dapat dilakukan melalui agenda :
- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
 - Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
 - Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
 - Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
 - Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

- f. **Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat**, dapat dilakukan melalui agenda
- Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/ pembela,transmitter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
- g. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim**, dapat dilakukan melalui agenda :
- Memantapkan habitus, tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
 - Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Guna mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025 membutuhkan tahapan proses dalam merencanakan dan melaksanakan skala prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi agenda pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Adapun tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut :

- **RPJM Ke- 1 Tahun 2005–2008**
Kinerja pembangunan daerah yang telah dicapai pada kurun waktu Tahun 2005–2008 adalah IPM 63,6, APM SD 85,09%, SMP 45,73% dan SMA 27,95%, Literasi penduduk usia 10 tahun ke atas 87,96% dan buta huruf 12,04%, Jumlah penduduk miskin 35,50%, Pertumbuhan ekonomi 5,08%.
- **RPJM Ke- 2 Tahun 2009–2014**
Rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut: IPM mencapai angka 68,3. Buta aksara 10 ribu, AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/100.000 KH, Kemiskinan 22% dan Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%, Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, Good governance dan penegakan hukum dan HAM, Pembangunan yang responsif gender, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.
- **RPJM Ke- 3 Tahun 2015–2019**
 - a. Rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut: IPM mencapai angka 73,3.
 - b. AKB 40/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 250/100.000 KH, Kemiskinan 15% dan
 - c. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,6%, Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, Good governance dan penegakan hukum dan HAM
 - d. Pembangunan yang responsif gender, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.
- **RPJM Ke- 4 Tahun 2020–2024**
Rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut: IPM mencapai angka 80, Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80, Buta aksara 0%, AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH, Kemiskinan 12%, Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%, Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000, Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, Good governance dan penegakan hukum dan HAM, Pembangunan yang responsif gender, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

5.2.3. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 diarahkan untuk :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

5.2.4. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 diarahkan untuk :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
6. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Keselaranan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2.
 Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2014-2019

| MISI RPJMD | MISI RPJPD KABUPATEN SIKKA TAHUN 2005-2025 | MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023 | MISI RPJMN TAHUN 2014-2019 |
|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas | I Mewujudkan daya saing Kabupaten Sikka yang unggul sebagai pusat perdagangan dan pengembangan industri pengolahan untuk mencapai Kabupaten Sikka yang lebih makmur dan sejahtera II Menjadikan Kabupaten Sikka sebagai salah satu pusat pendidikan berkualitas di Flores. III Mempertahankan dan Mengembangkan Budaya Luhur Sikka sehingga menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia Bagian Timur V Mewujudkan Kabupaten Sikka yang aman, tertib, bersatu dan damai | I Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil II Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>) III Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan IV Meningkatkan kualitas sumber daya manusia | I Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan II Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum IV Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera V Mewujudkan bangsa yang berdaya saing |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| | VI Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan VII Mewujudkan Kabupaten Sikka yang nyaman dan ramah lingkungan VIII Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sikka yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa IX Mewujudkan Kabupaten Sikka Sehat | | VI Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional VII Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan |
| II Mewujudkan Reformasi Birokrasi | IV Mewujudkan Kabupaten Sikka yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum | V Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan | |

5.2.5. Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan NAWACITA

Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan NAWACITA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.
Keselarasan Misi RPJMD dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan NAWACITA

| MISI RPJMD | RPJMN TAHUN 2014-2019 | NAWACITA |
|--|--|--|
| I Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas | I Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan III Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum IV Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera V Mewujudkan bangsa yang berdaya saing VI Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional | I Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga III Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan V Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia VI Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional VII Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik |

| MISI RPJMD | RPJMN TAHUN 2014-2019 | NAWACITA |
|-----------------------------------|--|--|
| | VII Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan | VIII Melakukan revolusi karakter bangsa IX Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia |
| II Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | II Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya IV Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya |

5.2.6. Keselarasan Misi RPJMD dengan SDGs

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Peraturan Presiden tersebut menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs yang terdapat dalam sasaran nasional RPJMN Tahun 2014-2019. Sehubungan dengan itu maka keselarasan Misi RPJMD dengan penerapan SDGs sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Keselarasan Misi RPJMD dengan SDGs

| MISI RPJMD | SDGs |
|--|--|
| 1 | 2 |
| I Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas | I Tanpa Kemiskinan : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun |
| | II Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan |
| | III Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia |
| | IV Pendidikan Berkualitas: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua |
| | V Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan |
| | VI Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua |
| | VII Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua |

| 1 | 2 |
|-----------------------------------|---|
| | <p>VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p> <p>IX Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</p> <p>X Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara</p> |
| | <p>XI Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p> <p>XII Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p> <p>XIII Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>XIV Ekosistem Laut: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan</p> |
| | <p>XV Ekosistem Daratan: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati</p> |
| II Mewujudkan Reformasi Birokrasi | <p>XVI Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan</p> <p>XVII Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan</p> |

5.2.7. Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk **“Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai pusat pertumbuhan Berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan”**.

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi

empat tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam tiga jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas rencana pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama, dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Dalam rentang waktu 4(empat) tahun terakhir pemanfaatan RTRW Kabupaten Sikka telah terjadi perkembangan perwujudan struktur ruang yang cukup signifikan. Bentuk perwujudan struktur ruang yang dapat teridentifikasi dari berbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah antara lain dalam bentuk perwujudan pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten serta pembangunan pusat kegiatan dan perwujudan pembangunan prasarana wilayah lainnya seperti pembangunan telekomunikasi yaitu menara BTS yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Sikka.

1. Rencana Pusat Kegiatan

Rencana Pusat Kegiatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 meliputi:

1. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yaitu Perkotaan Maumere, sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Perkotaan Kewapante sebagai pusat perdagangan, transportasi, industri dan perdagangan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda, dan Palue sebagai pusat pelayanan perdagangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, transportasi, pariwisata.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Perkotaan Bola, Hewokloang, Doreng, Waiblama, Mapitara, Lela, Koting, Tanawawo, Mego dan Pemana sebagai pusat pelayanan perdagangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, transportasi, pariwisata.

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem jaringan prasarana utama meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat, rencana sistem jaringan transportasi laut, dan rencana sistem jaringan transportasi udara. Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi pengembangan jaringan jalan dan jembatan, trayek angkutan penumpang, dan rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP). Pengembangan jaringan jalan dan jembatan dilakukan terhadap jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor, dan lokal primer. Untuk trayek angkutan penumpang meliputi angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota serta angkutan perdesaan. Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal meliputi pengembangan terminal type B di perkotaan Maumere dan terminal tipe C yang terdapat di Perkotaan Kewapante, Waigete, Talibura, Paga, Nita dan Magepanda, jembatan timbang yang terdapat di Perkotaan Maumere dan pengujian kendaraan bermotor yang terdapat di Perkotaan Maumere. Sedangkan Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) yaitu Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok.

Rencana sistem jaringan transportasi laut terdiri atas rencana tatanan kepelabuhanan dan rencana alur pelayaran. Rencana tatanan kepelabuhanan meliputi pengumpul dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan pengumpul meliputi Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok; dan Pelabuhan Rakyat Wuring di Kecamatan Alok Barat. Sedangkan pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Krica di Kecamatan Palue, Pelabuhan Geliting di Kecamatan Kewapante, Pelabuhan Paga di Kecamatan Paga, Pelabuhan Kojadoi dan Pelabuhan Parumaan di Kecamatan Alok Timur, dan Pelabuhan Pemana dan Pelabuhan Sukun di Kecamatan Alok. Untuk alur pelayaran diatur alur pelayaran untuk pelabuhan pengumpul dan pengumpan

dalam rangka meningkatkan akses dalam wilayah Kabupaten Sikka dan akses dengan wilayah di luar Kabupaten Sikka.

Rencana sistem jaringan transportasi udara terdiri atas rencana tatanan kebandarudaraan dan rencana ruang udara untuk penerbangan. Rencana tatanan kebandarudaraan adalah Bandar Udara pengumpul sekunder yaitu Bandar Udara Frans Seda Maumere di Kecamatan Alok Timur. Rencana ruang udara untuk penerbangan terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) disesuaikan dengan ketentuan teknis KKOP Bandar Udara Frans Seda Maumere, jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju Bandara Frans Seda yaitu Bandara Ngurah Rai, Bandara Juanda, Bandara Sultan Hasanuddin, serta jalur penerbangan lokal, yakni dari bandara yang ada di dalam Provinsi NTT.

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, dan rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana sistem jaringan energi terdiri atas rencana pembangkit listrik dan rencana jaringan prasarana energi.

B. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sikka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perwujudan pola ruang terbesar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah perwujudan kawasan pemukiman baik pada kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Untuk kawasan pemukiman bertambah sebesar 671 Ha dalam 4(empat) tahun terakhir sehingga pada awal Tahun 2016 luas kawasan pemukiman di Kabupaten Sikka mencapai 3513,9 Ha. Apabila dibandingkan dengan alokasi ruang untuk kawasan pemukiman di Kabupaten Sikka untuk Tahun 2012 sampai Tahun 2032 seluas 8831,54 Ha maka pada tahun ke-4 pelaksanaan rencana tata ruang pencapaian pembangunan fisik kawasan pemukiman adalah sebesar 39,78%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal kawasan pemukiman, alokasi tambahan ruang untuk kawasan pemukiman di Kabupaten Sikka adalah sebesar 5923,04 Ha, pada Tahun 2016 sudah terisi sebesar 671 Ha atau 11,23%, artinya alokasi ruang untuk pemukiman masih mampu untuk mendukung kebutuhan ruang dalam 15 tahun mendatang.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung Egon Ilimedo terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Doreng, Kecamatan Bola dan Kecamatan Hewokloang, dengan luas kurang lebih 19.457 Ha;
2. Kawasan hutan lindung Iliwuli terdapat di Kecamatan Talibura dan Waiblama, dengan luas kurang lebih 575 Ha;
3. Kawasan hutan lindung Iligai terdapat di Kecamatan Lela, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Bola, dengan luas kurang lebih 1.226 Ha;
4. Kawasan hutan lindung Ilindobo terdapat di Kecamatan Bola dan Kecamatan Hewokloang, dengan luas kurang lebih 230 Ha;
5. Kawasan hutan lindung Wukoh Lewoloroh terdapat di Kecamatan Talibura dan Kecamatan Waiblama, dengan luas kurang lebih 3.250 Ha;
6. Kawasan hutan lindung Telorawa II terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tanawawo dan Kecamatan Mego, dengan luas kurang lebih 6.000 Ha;
7. Kawasan hutan lindung Mbotulena–Keliwenda terdapat di Kecamatan Paga dan Kecamatan Tanawawo, dengan luas kurang lebih 670 Ha;

8. Kawasan hutan lindung Kimang Buleng terdapat di Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Alok Barat, dengan luas kurang lebih 5.514 Ha;
9. kawasan hutan lindung Ilindarat terdapat di Kecamatan Talibura, dengan luas kurang lebih 700 Ha;
10. Kawasan hutan lindung Mengkuri (Pulau Besar) terdapat di Kecamatan Alok Timur, dengan luas kurang lebih 400 Ha; dan
11. Kawasan hutan lindung Rokatenda terdapat Kecamatan Palue, dengan luas kurang lebih 420 Ha.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sikka seluas kurang lebih 134 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

1. Kawasan sempadan pantai, terdapat di Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kangae, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Waigete, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Lela, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga dan Kecamatan Palue,
2. Kawasan sempadan sungai terdiri atas:
 - a. kawasan sungai meliputi sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah;
 - b. sempadan sungai di kawasan non permukiman berjarak sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri dan kanan untuk aliran sungai besar dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk sungai kecil; dan
 - c. sempadan sungai di kawasan permukiman berjarak sekurang-kurangnya 10 meter kiri dan kanan tepi sungai.
3. Kawasan sekitar danau atau waduk berjarak 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
4. Kawasan sekitar mata airdengan radius 200 meter yang tersebar di seluruh wilayah.
5. Kawasan pulau-pulau kecil meliputi pulau-pulau dalam wilayah kabupaten yang berada di sebelah utara dan selatan Pulau Flores.
6. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan terdapat di wilayah perkotaan.

Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:

1. Kawasan suaka alam laut terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam Laut Flores; dan
 - b. Kawasan Suaka Alam Laut Sawu.
2. Kawasan suaka margasatwa terdapat di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo.
3. Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di sepanjang pantai utara dan wilayah kepulauan.
4. Kawasan taman wisata alam meliputi:
 - a. Taman Wisata Alam Pulau Besar; dan
 - b. Taman Wisata Alam Egon Ilimedo.
5. Kawasan taman wisata alam laut yaitu Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere.
6. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - a. Gereja Tua Sikka, Rumah Raja Sikka, dan Wisung Fatima di Kecamatan Lela;
 - b. Watu Krus, Gereja Bola dan Sumur Tua Baluk di Kecamatan Bola;
 - c. Gereja Salib Suci Mauloo, Lepa Ria Kunu Mbengu dan Kubur Batu Nua Bari di Kecamatan Paga;
 - d. Gereja Tua Nita, Regalia Kerajaan Nita, Patung Maria Bunda Segala Bangsa Nilo dan Museum Bikon Blewut di Kecamatan Nita;
 - e. Gereja Tua Imakulata Lekebai di Kecamatan Mego;
 - f. Gereja Tua Koting di Kecamatan Koting;
 - g. Patung Kristus Raja, Gereja Katedral St. Yoseph, Makam Raja Sikka di Kecamatan Alok;
 - h. Jong Dobo, Moko dan Kumbang Porselin di Kecamatan Kewapante;
 - i. Lepo Kirek dan Benda Pusaka di Kecamatan Hewokloang; dan
 - j. Gereja Tua Lei di Kecamatan Palue.

Kawasan Rawan Bencana, terdiri atas:

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Mego, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Alok Timur Kepulauan dan Kecamatan Palue, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waiblama.
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi kecamatan pesisir yang terdiri atas Kecamatan Paga, Kecamatan Kangae, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Doreng, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Palue, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama serta pulau-pulau.
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Paga, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Talibura dan Kecamatan Mego, Kecamatan Kangae.
4. Kawasan rawan angin topan meliputi Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Nita, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Doreng, Kecamatan Waigete.

Kawasan Lindung Geologi, seluas 37 ha. Kawasan lindung geologi terdiri atas:

1. Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa dan gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan letusan gunung berapi; dan
 - c. kawasan rawan tsunami
2. Kawasan perlindungan terhadap air tanah tersebar di seluruh wilayah.
3. Kawasan Lindung Lainnya terdiri atas:
 - a. kawasan pengungsian satwa;
 - b. kawasan terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor jenis satwa/biota laut yang dilindungi.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya Kabupaten Sikka terdiri atas:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi seluas kurang lebih 8.933 ha terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap, memiliki luas kurang lebih 1.354ha terdapat di Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Kangae, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Alok Timur.
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, memiliki luas kurang lebih 7.579 ha, terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Nita dan Kecamatan Magepanda.
2. Kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 69.254 ha meliputi :
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan, terdiri atas:
 - sawah irigasi seluas kurang lebih 3.106 Ha terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Mego, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Nita, Kecamatan Waiblama dan Kecamatan Magepanda.;
 - sawah non irigasi seluas kurang lebih 524 Ha terdapat di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Lela, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Kangae dan Kecamatan Nita; dan
 - lahan kering seluas 47.109 Ha tersebar di seluruh wilayah.
 - b. Kawasan budidaya hortikultura seluas kurang lebih 2.233 ha, terdapat di Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Nelle, Kecamatan Nita, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Palue dan Kecamatan Alok.
 - c. Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 12.019 ha meliputi seluruh wilayah.
 - d. Kawasan budidaya peternakan terdiri atas:
 - peternakan besar terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Mapitara, dan Kecamatan Magepanda seluas kurang lebih 5.451 ha;
 - peternakan kecil terdapat di seluruh wilayah.

3. Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral, di Kabupaten Sikka meliputi:

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, yang terdapat di Kecamatan Paga, Kecamatan Mego, Kecamatan Lela, Kecamatan Bola, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Waigete, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Talibura.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam, yang terdapat di Kecamatan Talibura, Kecamatan Waigete, Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mego, Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo.
- c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan, yang terdapat di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Kangae, Kecamatan Bola, Kecamatan Nelle, Kecamatan Doreng, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nita, Kecamatan Lela, Kecamatan Alok, Kecamatan Paga, Kecamatan Tana Wawo, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Talibura, Kecamatan Mego dan Kecamatan Waigete.
- d. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sikka, meliputi Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh wilayah, Kawasan peruntukan industri sedang dan Kawasan peruntukan industri besar.
- e. Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Sikka, meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi berupa taman kota dan agrowisata.
- f. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi kawasan permukiman perkotaan, yang diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Maumere, Perkotaan Kewapante, Waigete, Talibura, Nita, Paga, Magepanda, dan Palue, dan Kawasan permukiman perdesaan, terdapat di Kecamatan Bola, Hewokloang, Doreng, Waiblama, Mapitara, Lela, Tana Wawo, Mego dan Koting.
- g. Kawasan peruntukan lainnya, khusus untuk pertahanan dan keamanan, meliputi kompleks markas Komando Distrik Militer, kompleks Pangkalan Angkatan Laut, kompleks markas Kepolisian Resort Sikka di Kecamatan Alok Timur, kompleks markas komando Brigade Mobil, kompleks markas Kepolisian Sektor, kompleks markas Komando Rayon Militer dan kompleks perwakilan Angkatan Udara Maumere berada di Kecamatan Alok Timur.

4. Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Sikka meliputi kawasan strategis Provinsi NTT dan Kawasan strategis Kabupaten Sikka.

Kawasan strategis Provinsi NTT yang ada di Kabupaten Sikka yaitu Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkunganhidup. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. kawasan Strategis Perkotaan Maumere;
2. kawasan Nebe-Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka; dan
3. kawasan Nangaroro, Mautenda, Waiwajo di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:

1. Kawasan Konservasi Laut Sawu;
2. Kawasan Konservasi Laut Flores;
3. Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu II; dan
4. Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Flores.

Kawasan strategis Kabupaten Sikka terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Strategis Perkotaan Kewapante;

2. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, Kecamatan Paga, Kecamatan Mego dan Kecamatan Talibura;
3. Kawasan Strategis Bandara Frans Seda di Kecamatan Alok Timur;
4. Kawasan Strategis Pelabuhan L. Say di Kecamatan Alok;
5. Kawasan Sentra Kerajinan Tenun di Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Bola, Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting dan Kecamatan Nita;
6. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok. Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Lela, Kecamatan Talibura, Kecamatan Magepanda, dan Kecamatan Kewapante; dan
7. Kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Kewapante.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Konservasi Teluk Maumere; dan
2. Kawasan Konservasi Laut Sawu.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

1. kawasan Gereja Tua Sikka dan Logu Sinhor di Kecamatan Lela;
2. kawasan Watu Kruz di Kecamatan Bola; dan
3. kawasan Kubur Batu Nuabari di Kecamatan Paga.

Berdasarkan data kegiatan pembangunan, untuk mendukung terwujudnya kawasan strategis Kabupaten Sikka pada 4 (empat) tahun terakhir cukup signifikan. Upaya perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka secara implisit tertuang dalam perwujudan struktur ruang di Kabupaten Sikka, kondisi ini tidak terlepas dari penetapan kawasan strategis yang beririsan dengan pusat-pusat kegiatan. Sebagai contoh perwujudan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi secara tidak langsung terlaksana dengan program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur untuk menunjang fungsi kawasan perkotaan. Kawasan strategis Kewapante sebagai contoh mulai terwujud dengan upaya pemerintah Kabupaten Sikka mendorong pembangunan Pasar Wairkoja, pembangunan Dermaga Penyebrangan (Feri), pembangunan Jaringan Jalan yang menghubungkan wilayah Kewapante menuju Doreng dan Bola, pembangunan jalan yang melintasi PKLp Kewapante tersebut akan memperlancar fungsi ekonomi kawasan tersebut. Kawasan strategis Waigete, Talibura dan Alok Timur mulai terwujud dengan upaya pemerintah pusat mendorong pembangunan PLTMG Wairita, Bendungan Napung Gete, perluasan run way bandar udara Frans Seda, pembangunan dermaga peti kemas pelabuhan Lorens Say.

Namun dari sisi aspek pemerataan pembangunan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka, masih belum menunjukkan upaya pemerataan pembangunan di kawasan selatan. Kondisi ini tidak terlepas dari arahan pemanfaatan ruang yang lebih condong adanya pembangunan di kawasan utara Kabupaten Sikka. Sebagai akibat dari arah orientasi pembangunan ini, maka wilayah selatan Kabupaten Sikka masih tertinggal dibandingkan wilayah utara. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari kondisi pusat-pusat kegiatan dan jaringan jalan pada wilayah selatan yang masih sangat terbatas, apabila kondisi ini tidak ada upaya untuk mendorong pertumbuhan pada wilayah selatan maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka dalam 20 tahun mendatang (sesuai periode RTRW 2012-2032) hanya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di Osis utara Kabupaten Sikka. Untuk itu perlu adanya upaya pemerataan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan wilayah selatan menjadi sangat penting. Pentingnya upaya mendorong wilayah selatan ini didasari pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan hak-hak dasar dan infrastruktur dasar pada wilayah selatan yang ingin mendapatkan tingkat pelayanan yang setara dengan masyarakat yang ada di wilayah utara. Wilayah selatan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah wisata bahari dan juga pengembangan perikanan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mendorong percepatan pembangunan pada wilayah selatan adalah dengan menetapkan salah satu pusat pelayanan lingkungan/kawasan sebagai pusat pertumbuhan baru.

5.2.8. Telaah Terhadap RTRW Provinsi NTT

Kebijakan Pengembangan

a. Kebijakan Perencanaan

- Rencana tata ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
- Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dan atau disempurnakan bilamana tidak mampu lagi mengakomodir dinamika perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan atau internal.
- Rencana tata ruang wilayah perlu ditindaklanjuti dan dijabarkan ke jenjang rencana yang lebih detail yaitu dalam rencana tata ruang pulau dan rencana tata ruang kawasan.

b. Kebijakan Pemanfaatan Ruang

- Pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang.
- Struktur tata ruang meliputi pengembangan sistem kota-kota, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas dan kawasan pertahanan keamanan.
- Pola tata ruang kebijakan pola tata ruang kawasan lindung, kawasan budidaya serta pola tata ruang kawasan tertentu.
- Kebijakan pengembangan sistem kota-kota dilakukan melalui pengembangan sistem kotakota yang sesuai dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup serta kegiatan dominannya.
- Kebijakan pengembangan prasarana wilayah dilakukan dengan :
 - mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan infrastruktur transportasi untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan andalan;
 - menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
 - mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan energi listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan
- Kebijakan pengembangan kawasan prioritas dilakukan dengan :
 - mengembangkan wilayah-wilayah yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan perkembangan sektor-sektor strategis dengan melakukan studi yang lebih mendalam mengenai kawasan tersebut serta upaya penyiapan penataan ruang kawasan;
 - menanggulangi dengan segera, kawasan-kawasan prioritas yang memiliki permasalahan yang cukup mendesak untuk ditangani, seperti penanganan terhadap kawasan kritis dan daerah terkebelakang;
 - memberi dukungan penataan ruang pada setiap kawasan prioritas.
- Kebijakan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan adalah untuk mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara di beberapa kawasan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.
- Kebijakan pengembangan kawasan Lindung
 - Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi kebijaksanaan untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
 - Strategi untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup diselenggarakan dengan :
 - 1) menetapkan kawasan lindung di wilayah daratan serta di wilayah pesisir dan laut dalam satu bentangan wilayah pulau dan pesisir hingga mencapai minimum 30% dari luas wilayah pulau;
 - 2) mewujudkan dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, melalui perlindungan dan pengamanan kawasan-kawasan di darat, laut dan udara;
 - 3) mengembalikan fungsi kawasan lindung yang terlanjur dikembangkan dan terganggu fungsinya supaya tetap terpelihara keseimbangan alam dan

- keanekaragaman hayati.
- 4) Kawasan lindung di daratan dan di wilayah pesisir dan laut meliputi kawasan lindung yang memenuhi minimal salah satu kriteria berikut:
 - a) memiliki keanekaragaman biota dan ekosistem yang khas;
 - b) memiliki gejala dan keunikan/kelangkaan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan/ budaya dan pembangunan;
 - c) mencakup wilayah lintas kabupaten;
 - d) menjadi perhatian nasional maupun internasional.
 - Pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan.
 - Strategi pengembangan dan pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan dengan :
 - 1) menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungannya;
 - 2) menetapkan kegiatan-kegiatan budidaya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - 3) mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian pangan dan hortikultura;
 - 4) mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya peternakan;
 - 5) mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya perkebunan;
 - 6) mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertambangan, energi dan perindustrian;
 - 7) mengembangkan dan mempertahankan kawasan pariwisata;
 - 8) mengembangkan kegiatan untuk ketahanan budidaya pengelolaan sumber daya alam laut yang bernilai ekonomi di 9 Satuan Kawasan Pesisir Laut Terpadu;
 - 9) mengendalikan pengembangan masalah perkotaan besar dan menengah;
 - 10) mengembangkan kota-kota dan perdesaan dalam kesatuan sistem kota-kota dan agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan.
 - Penjabaran pengembangan dan pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Detail
 - Pengembangan kawasan tertentu diselenggarakan untuk meningkatkan penanganan yang diutamakan dalam pembangunan daerah, regional dan nasional.
 - Pengembangan kawasan strategis daerah diselenggarakan dengan:
 - menetapkan kawasan- kawasan strategis daerah;
 - mengembangkan kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup daerah yang dapat mendukung dalam pembangunan melalui upaya-upaya konservasi/perlindungan dan pengembangan potensi ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya serta masyarakat dalam memperkuat keanekaragaman jatidiri bangsa;
 - mengembangkan kawasan strategis daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan atau peningkatan manfaat ruang di wilayah Provinsi sekaligus mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dan sangat tertinggal yang meliputi upaya-upaya :
 - 1) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan sektor/komoditas unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - 2) penyediaan insentif dan penyederhanaan prosedur perizinan investasi;
 - 3) pengelolaan dan promosi peluang investasi kawasan;
 - 4) penyediaan dukungan infrastruktur;
 - mengembangkan kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
 - mengembangkan kawasan strategis daerah untuk melestarikan fungsi dan meningkatkan daya dukung lingkungan melalui upaya-upaya konservasi/ perlindungan dan peningkatan fungsi dan peranannya;
 - mengembangkan kawasan strategis daerah untuk menunjang kepentingan pembangunan daerah dan mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- o Strategi pengembangan kawasan perbatasan Negara melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - 1) mendorong pengembangan kawasan perbatasan Republik Indonesia, Timor Leste dan Australia sebagai beranda depan Negara Indonesia di Daerah;
 - 2) percepatan pembangunan kawasan perbatasan Negara yang berlandaskan pada pola kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan.

Wilayah Pengembangan Kepulauan

- a. Wilayah Pengembangan I meliputi Timor Barat, Rote dan Alor, dengan pengembangan utama lahan kering, hortikultura, peternakan dan kelautan serta pengembangan penunjang lahan basah, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
- b. Wilayah Pengembangan II meliputi Flores dan Lembata, dengan pengembangan utama lahan basah, hortikultura, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pengembangan penunjang lahan kering, peternakan dan pertambangan;
- c. Wilayah Pengembangan III meliputi Sumba, dengan pengembangan utama lahan basah, lahan kering, hortikultura, peternakan, kelautan, dan pariwisata serta pengembangan penunjang perkebunan dan pertambangan;

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu pada rencana tata ruang dengan pengendalian pemanfaatan secara berjenjang yang didukung partisipasi masyarakat.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban.
- c. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang ditetapkan oleh Gubernur.

Rencana Struktur Tata Ruang

Struktur Tata Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman;
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi;
- c. pengembangan sumber dan jaringan distribusi tenaga listrik;
- d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. pengembangan sistem prasarana sumber daya air;
- f. pengembangan kawasan prioritas

Rencana Pengembangan Sistem Kota-Kota dan Pusat Permukiman

- a. Untuk mewujudkan struktur tata ruang wilayah kebijakan pengembangan sistem kotakota adalah mengembangkan sistem kota-kota yang memiliki keterkaitan secara fungsional.
- b. Untuk mengembangkan kota-kota dan perdesaan dalam kesatuan hirarki kota dan agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan kota - kota adalah sebagai berikut:
 - memantapkan peranan kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan pusat pengembangan wilayah bagi Daerah;
 - lebih meningkatkan, mengembangkan dan memantapkan peran kota-kota utama agar mengurangi kesenjangan perkembangan antar kota ;
 - mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional melalui peningkatan peran dan fungsi;
 - mengembangkan desa-desa melalui penetapan desa pusat pertumbuhan sebagai pusat lokasi distribusi bagi kegiatan ekonomi.
- c. Sistem pengembangan Kota-kota sesuai fungsi dan konsep pengembangan wilayah adalah :
 - Hirarki I: Kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuan Bajo dan Maumere;
 - Hirarki II: Baa, Oelmasi, SoE, Kefamenanu, Naikliu, Wini, Kolbano, Maritaing, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Ende, Bajawa, Ruteng, Waikabubak, Betun, Weitabula, Mbay/Aesesa, Seba
 - Hirarki III: ibukota Kecamatan lainnya
 - Hirarki IV: desa-desa pusat pertumbuhan.

Rencana Struktur Jaringan Transportasi

Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah mencakup sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.

- a. Jaringan transportasi jalan dikembangkan untuk mengakomodir keseluruhan jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang yang terletak pada sistem jaringan jalan yang berperan sebagai akses intra moda dengan sistem jaringan transportasi penyeberangan, serta akses antar moda dengan sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara;
- b. Simpul jaringan transportasi jalan terdiri dari :
 - Terminal Penumpang Type A: Motaain, Lasiana, Labuan Bajo, Waikelo, Maumere dan Waingapu.
 - Terminal Penumpang Type B: di setiap Kota dan Ibukota Kabupaten;
 - Terminal Penumpang Type C: di setiap Kecamatan yang tersebar di Kabupaten/Kota;
 - Timbangan Jembatan: Nggorang, Watu Alo, Oesapa, Nunbaun Sabu, Motaain dan Waikelo
 - Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan;
 - Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan;
 - Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;
 - Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
 - Jaringan Trayek Angkutan Antar Lintas Batas Negara;
 - Jaringan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 - Jaringan Lintas Angkutan Barang;
- c. Jaringan lintas penyeberangan dikembangkan untuk menghubungkan jaringan jalan yang terpisah oleh laut dan Tatanan Kepelabuhan Nasional.
- d. Tatanan Kepelabuhan Nasional, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur meliputi:
 - Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi dan antar negara: Labuan Bajo, Teluk Gurita, Waikelo, Marapokot;
 - Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota: Bolok, Waingapu, Aimere, Ende, Larantuka, Kalabahi, Seba dan Pantai Baru;
 - Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota;
- e. Sistem jaringan transportasi laut berupa tatanan kepelabuhanan nasional dan jaringan pelayanan angkutan laut.
- f. Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hirarki, peran dan fungsi pelabuhan laut yang meliputi pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal.
- g. Tatanan kepelabuhanan nasional yaitu:
 - Pelabuhan Laut Internasional: Tenau.
 - Pelabuhan Laut Nasional: Ende, Kalabahi, Larantuka, Labuan Bajo, Reo, Ba'a, Maritaing, Maumere, Waingapu, Atapupu, Waiwadan, Ippi, Seba, Naikliu dan Wini;
 - Pelabuhan Laut Regional: Baranusa, Komodo, Wuring, Papela Lewoleba, Waiwerang, Marapokot, Aimere, Waikelo dan Paitoko;
 - Pelabuhan Laut Lokal: Biu, Batutua, Ndao, Kabir, Kolana, Balauring, Nangalili, Robek, Maurole, Rua, Baing, Boking, Pulau Ende, Pulau Palue, Namosain, Naikliu, Hansisi, Maumbawa, Mborong, Oelaba, Pulau Salura, Bina Tuka, Waiwole, Bari, Tanariughu, Bakalang, Sulamu, Pulau Sukun, Pulau Pemana, Paga, Raijua, Rindi, Mananga, Tabilota, Bitan, Bina Natun, Benda dan Nule;
- h. Sistem jaringan transportasi udara meliputi Tatanan Bandar Udara dan Ruang Lalu Lintas Udara.
- i. Tatanan bandar udara terdiri dari bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udara pusat penyebaran skala sekunder, bandar udara pusat penyebaran skala tersier, dan bandar udara bukan pusat penyebaran.
- j. Bandar udara pusat penyebaran skala primer diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional dan berfungsi sebagai pintu utama untuk ke luar negeri;
- k. Bandar udara dimaksud yang potensial sebagai pintu utama menuju wilayah Australia dan Negara Pasifik yaitu Bandara El-Tari, Kota Kupang.
- l. Bandar udara pusat penyebaran skala sekunder diarahkan untuk melayani penumpang

- dalam jumlah cukup besar dengan lingkup pelayanan nasional dan beberapa Provinsi dan terhubungkan dengan fungsi pusat penyebaran skala primer untuk pelayanan internasional.
- m. Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang potensial sebagai pintu menuju Provinsi lain secara langsung yaitu:
- Bandara Waioti–Maumere, Kabupaten Sikka;
 - Bandara Komodo–Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bandara Mauhau–Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bandara H. Aroeboesman , Kabupaten Ende.
- n. Bandar udara pusat penyebaran skala tersier diarahkan untuk melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan pada satu Provinsi atau beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan fungsi pusat penyebaran skala sekunder dan pusat penyebaran skala primer untuk pelayanan internasional;
- Bandar udara pusat penyebaran skala tersier sebagai jembatan udara dalam wilayah :
- Bandara Lekunik–Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bandara Terdamu–Pulau Sabu, Kabupaten Kupang;
 - Bandara Satartacik–Ruteng, sebagai bandar udara domestik lokal;
 - Bandara Tambolaka–Waikabubak, sebagai bandar udara domestik regional;
 - Bandara Haliwen–Belu, sebagai bandar udara domestik lokal;
 - Bandara Mali–Alor, sebagai bandar udara domestik lokal;
 - Bandara Gewayantana–Larantuka, sebagai bandar udara domestik lokal;
 - Bandara Wunopito–Lewoleba, Kabupaten Lembata;
 - Bandara Soa–Bajawa, Kabupaten Ngada.

Rencana Pengembangan Tenaga Listrik

Pengembangan penyediaan tenaga listrik berupa penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi listrik yang ada dan energi alternatif, pusat pembangkit listrik, sistem jaringan transmisi dan distribusi, jaringan terinterkoneksi dan jaringan terisolasi inter dan antar wilayah Provinsi dan atau kabupaten.

- a. Pola pengelolaan sistem pengembangan penyediaan tenaga listrik bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan secara sinergis dalam mendukung pengembangan wilayah yang dirinci ke dalam peranan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. Sasaran pengelolaan sistem jaringan transmisi tenaga listrik diselenggarakan untuk:
- meningkatkan pelayanan pengembangan penyediaan tenaga listrik Nasional dalam pengembangan wilayah Provinsi;
 - meningkatkan pelayanan jaringan terinterkoneksi kelistrikan dalam pengembangan wilayah Provinsi;
 - meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik dalam wilayah terisolasi dalam pengembangan wilayah Provinsi.
- c. Pola pengelolaan penyediaan tenaga listrik wilayah Provinsi meliputi pola pengelolaan pembangkitan transmisi dan pola pengelolaan jaringan dalam wilayah Provinsi.
- d. Pola pengelolaan penyediaan tenaga listrik wilayah Provinsi meliputi:
- menetapkan pembangkit tenaga listrik wilayah Provinsi untuk mewujudkan struktur ruang wilayah Provinsi dan meratakan distribusi energi secara nasional di wilayah Provinsi;
 - mempertimbangkan kendala fisik dan pengaturan penggunaan lahan di sekitar pembangkitan;
 - melakukan studi kelayakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL) beserta prasyarat yang ditetapkan.
- e. Pola pengelolaan jaringan transmisi meliputi:
- menetapkan dan mengembangkan jaringan transmisi dalam mendukung perwujudan struktur ruang wilayah Provinsi untuk menyediakan tenaga listrik mendukung pengembangan kawasan andalan/tertentu dan sistem kota-kota serta meratakan distribusi supply-demand energi secara nasional di wilayah Provinsi;
 - melakukan studi kelayakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL,UPL) beserta prasyarat yang ditetapkan;

- mengatur jaringan transmisi bertegangan tinggi agar tidak berbahaya bagi penduduk dan aset berharga lainnya dengan menerapkan kaidah teknologi yang sesuai;
 - pengembangan jaringan transmisi dapat dilakukan pemerintah Provinsi melalui kerjasama pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan Listrik Negara/Swasta.
- f. Pola pengelolaan jaringan dalam wilayah Provinsi meliputi :
- mengembangkan jaringan terisolasi untuk mendorong kegiatan produktif sosial ekonomi di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
 - mendorong pemerataan pembangunan;
 - melayani kebutuhan masyarakat;
 - membuka isolasi wilayah pedalaman dan terpencil baik informasi maupun akses;
 - mengembangkan subsidi pengusahaan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi yang tersedia.
- g. Mengatur jaringan transmisi bertegangan tinggi agar tidak berbahaya bagi penduduk dan aset berharga lainnya dengan menerapkan kaidah teknologi yang sesuai.

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi.

- a. Pengembangan stasiun bumi dilaksanakan untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi dan nasional.
- b. Pengembangan jaringan transmisi dilaksanakan untuk melayani jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi yang mengakses ke wilayah nasional.
- c. Kriteria dan prioritas pengembangan jaringan telekomunikasi di Wilayah Provinsi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pola pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk penyediaan informasi yang handal dan cepat di seluruh wilayah Provinsi dalam perwujudan struktur ruang wilayah Provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Sasaran pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi diselenggarakan untuk :
 - meningkatkan penyediaan dan akses informasi dari dan ke seluruh pelosok wilayah dan akses ke wilayah nasional;
 - meningkatkan penyediaan dan akses informasi dari dan ke luar negeri.
- f. Pola pengelolaan sistem jaringan telekomunikasi meliputi pola pengelolaan stasiun bumi dan pola pengelolaan jaringan transmisi telekomunikasi.
- g. Pola pengelolaan stasiun bumi meliputi:
 - menetapkan lokasi dan mengembangkan peran stasiun bumi sesuai tujuan untuk pemerataan pelayanan informasi;
 - mengendalikan kendala fisik dan penggunaan lahan di sekitar stasiun bumi sehingga fungsi penyediaan informasi dapat berkesinambungan;
 - melakukan studi lingkungan dan melakukan persyaratan yang diharuskan;
- h. Pola pengelolaan jaringan transmisi telekomunikasi meliputi :
 - mengembangkan jaringan transmisi telekomunikasi untuk mendukung perkembangan kegiatan sosial ekonomi melalui pengembangan kota-kota dan kawasan budidaya serta kawasan strategis;
 - mengintegrasikan sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem transportasi dalam perwujudan kerangka struktur ruang wilayah Provinsi dan kerangka akses nasional yang merata dan utuh;
 - mengembangkan transmisi telekomunikasi di daerah dilakukan dalam koordinasi Pemerintah melalui Gubernur;
 - menggalang partisipasi swasta dan masyarakat dalam investasi dan operasi termasuk membuka kesempatan usaha bagi pengembangan usaha menengah dan koperasi.

Rencana Pengembangan Sistem Sumber daya Air

Pengembangan sistem prasarana sumber daya air wilayah Provinsi meliputi penetapan wilayah sungai yang berperan mendukung pengembangan kawasan budidaya dan sistem pusat permukiman, dan perlindungan di kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai kritis.

- a. Penetapan daerah aliran sungai kritis dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- b. Penetapan wilayah sungai yang berperan mendukung pengembangan dan perlindungan kawasan pelayanannya dan penetapan daerah aliran sungai kritis disampaikan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- c. Perlindungan air tanah (air tanah dangkal, air tanah dalam, air tanah sangat dalam) untuk memenuhi kebutuhan domestik, irigasi dan industri.
- d. Pola pengelolaan sistem prasarana sumber daya air bertujuan untuk penyediaan air baku yang berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi untuk mendukung pengembangan wilayah dan kota dalam kerangka perwujudan struktur ruang wilayah Provinsi.
- e. Sasaran pengelolaan sistem prasarana sumber daya air diselenggarakan untuk :
 - meningkatkan kualitas wilayah sungai bagi penyediaan air baku bagi kawasan pengembangan;
 - meningkatkan kualitas sistem prasarana sumber daya air;
- f. Pola pengelolaan prasarana sumber daya air meliputi pola pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten/kota, pola pengelolaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, serta pola pengelolaan sistem jaringan prasarana sumber daya air.
- g. Pola pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota meliputi ;
 - menetapkan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota oleh Gubernur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menetapkan rencana induk pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi dan disepakati Bupati/Walikota bersangkutan;
 - menetapkan dan mengelola kawasan lindung untuk melestarikan daerah tangkapan air oleh Pemerintah Provinsi;
 - menetapkan sempadan sungai dan pemanfaatan ruang disisi kiri-kanan sungai;
 - melakukan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;
 - melakukan kerjasama pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan ditetapkan bersama oleh Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - pemantauan dan evaluasi pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air secara bersama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- h. Pola pengelolaan wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional, meliputi:
 - menetapkan wilayah sungai lintas negara terutama untuk mendukung pengembangan kegiatan di kawasan tertentu dan kota pusat kegiatan nasional;
 - menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan di bawah koordinasi Menteri;
- i. Pola pengelolaan sistem jaringan sumber daya air meliputi kegiatan :
 - pengembangan jaringan sumber daya air disertai dengan pengembangan jaringan drainase yang menjadi satu kesatuan;
 - pengembangan jaringan sumber daya air untuk mendukung pengembangan kawasan andalan/tertentu dan pusat-pusat permukiman dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air ;
 - pengembangan sistem jaringan sumber daya air dengan pola satu sistem jaringan sumber daya air, satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan penggunaan di hulu, tengah dan hilir dalam sistem wilayah sungai secara seimbang;
 - pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dalam rangka koordinasi pengelolaan sumber daya air lintas wilayah kabupaten/kota;
 - penyediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi;
- j. Dalam rangka pengembangan kawasan irigasi, maka arahan pengembangan wilayah adalah pada kawasan lahan basah setiap satuan wilayah sungai.

Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah maka perlu menetapkan kawasan prioritas.

- a. Kawasan Prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah :
 - Kawasan andalan yang memiliki keunggulan spesifik di wilayah darat meliputi : Kawasan Industri Bolok dengan Sub Kawasan Bolok-Tenau; Kawasan Noelmina dengan Sub

Kawasan: Oesao–Amarasi–Bena–Baus; Kawasan Benanain dengan Sub Kawasan: Besikama–Aeroki; Kawasan Noelbesi dengan Sub Kawasan: Kapan–Eban–Amfoang; Kawasan Alor Selatan dengan Sub Kawasan: Alor Selatan–Lantoka; Kawasan Tanjungbunga–Magepanda dengan Sub Kawasan Tanjungbunga–Konga–Magepanda; Kawasan Mbay–Mautenda dengan Sub Kawasan: Mbay–Riung–Mautenda–Maurole; Kawasan Lembor dengan Sub Kawasan: Lembor–Nggorang; Kawasan Komodo; Kawasan Iteng dengan Sub Kawasan: Iteng–Buntal; Kawasan Mangili dengan Sub Kawasan: Mangili–Kambaniru–Melolo; Kawasan Wanokaka–Anakalang dengan Sub Kawasan: Kawasan Wanokaka–Anakalang; Kawasan Kodi–Laratama dengan Sub Kawasan: Kodi–Laratama;

- Kawasan Pesisir dan Laut meliputi 9 Satuan Kawasan Pengembangan Pesisir Laut Terpadu (SKPLT) : SKPLT–Selat Ombai–Laut Banda, SKPLT–Laut Sawu I, SKPLT–Laut Sawu II, SKPLT–Laut Sawu III, SKPLT–Laut Flores, SKPLT–Selat Sumba, SKPLT–Laut Timor, SKPLT–Laut Hindia, SKPLT–Selat Sape;
- b. Kawasan prioritas untuk keseimbangan pengembangan wilayah meliputi : Kawasan daerah terbelakang : Sub Kawasan Pesisir : Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan; Sub Kawasan Pedalaman: Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota; Sub. Kawasan pulau-pulau kecil: Sabu, Raijua, Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat;
- c. Kawasan prioritas untuk keseimbangan ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung di kawasan perbatasan negara, perbatasan Provinsi dan lintas kabupaten, kawasan kritis dan kawasan rawan bencana lintas kabupaten.
- d. Kawasan prioritas untuk keamanan wilayah meliputi kawasan pulau-pulau terluar seperti pulau Batek, Ndana, Salura, Mengkudu dan Kotak

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Lindung

- a. Kawasan lindung meliputi :
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - kawasan perlindungan setempat;
 - kawasan suaka alam;
 - kawasan pelestarian alam;
 - kawasan cagar budaya;
 - kawasan rawan bencana;
 - kawasan cagar alam geologi;
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
 - kawasan lindung lainnya.
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi :
 - kawasan hutan lindung;
 - kawasan bergambut;
 - kawasan resapan air.
- c. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - sempadan mata air
 - sempadan pantai;
 - sempadan sungai;
 - kawasan sekitar danau/waduk, embung dan bendung
 - kawasan terbuka hijau kota, termasuk hutan kota.
- d. Kawasan suaka alam meliputi;
 - cagar alam;
 - suaka margasatwa.
- e. Kawasan pelestarian alam meliputi:
 - Taman Nasional;
 - Taman hutan raya;
 - Taman wisata alam.
- f. Kawasan cagar budaya tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil.
- g. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud meliputi :
 - rawan bencana alam banjir: tidak terbagi lagi dalam kawasan yang lebih kecil;

- rawan bencana geologi mencakup kawasan rawan gerakan tanah; bencana gunung api; gempa bumi; patahan; tsunami; abrasi; lahar dan bahaya gas beracun.
- h. Kawasan cagar alam geologi mencakup:
 - kawasan keunikan batuan dan fosil;
 - kawasan keunikan bentang alam;
 - kawasan keunikan proses geologi.
- i. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah mencakup :
 - kawasan resapan (imbuhan) air tanah dan mata air;
 - sempadan mata air.
- j. Kawasan lindung lainnya meliputi:
 - Taman buru;
 - Cagar biosfir;
 - Kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - Kawasan pengungsian satwa;
 - Kawasan pantai berhutan bakau;
 - Kawasan perlintasan bagi jenis biota laut yang dilindungi;
- k. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup:
 - Kawasan hutan yang berfungsi lindung :
 - Kawasan lindung yang telah ditetapkan yang sebagian besar terdapat di Pulau Flores dengan beberapa pulau di sekitarnya, seperti Pulau Alor, Lembata dan Pulau Adonara;
 - Kawasan Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna serta aneka satwa;
 - Wilayah-wilayah karena kebutuhan posisi geografisnya yang berpotensi sebagai kawasan lindung.
 - Kawasan resapan air tersebar di kabupaten/kota.
- l. Kawasan perlindungan setempat meliputi :
 - kawasan sempadan pantai yang meliputi daerah surut terendah dan pasang tertinggi sampai daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 m di kiri/kanan sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman dan untuk sungai di kawasan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 sampai 15 meter.
 - Kawasan sekitar danau/waduk dan embung-embung/cekdam yang meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk, embung-embung/cekdam yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, embung-embung/cekdam antara 50 s/d 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
 - Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan Jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
- m. Kawasan suaka alam dan cagar budaya mencakup :
 - Kawasan Suaka Alam yang meliputi :
 - Cagar Alam yaitu Maubesi, Wai Wuul, Watu Ata, Kimang Boleng dan Wolo Tado
 - Suaka Marga Satwa yaitu Pulau Menipo, Kateri, Danau Tuadale, Harlu, Perhatu dan Ale Aesio;
 - Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya :
 - Taman Wisata Alam Laut dan Taman Laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Kupang di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dan Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;
 - Cagar alam Laut yaitu Cagar alam Laut 17 Pulau Riung di Kabupaten Ngada. Kawasan suaka alam laut di Alor Solor
 - Cagar Budaya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
- n. Kawasan Pelestarian Alam mencakup :
 - Taman Wisata Alam yaitu Camplong, Baumata, Tuti Adagae, Tanjung Watu Manuk, Pulau Besar, Pulau Rusa Pulau Lapang, Pulau Batang, Pulau Pantar dan Ruteng;
 - Taman Nasional yaitu Komodo, Kelimutu, Laiwanggi, Wanggameti, Mutis Timau, Manupeu dan Tanadaru;
 - Taman Hutan Rakyat Profesor Dr. Herman Yohanes.

- o. Kawasan rawan bencana terdiri dari :
- kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata;
 - kawasan rawan bencana gempa bumi terletak di seluruh Kabupaten/Kota terutama wilayah Pulau Flores, Alor dan sekitarnya;
 - kawasan rawan tsunami meliputi hampir seluruh daerah pesisir terutama daerah pesisir dengan laut terbuka di Pesisir Flores bagian Utara, Pesisir Sumba bagian Selatan, Pesisir Timor bagian selatan dan Pulau-pulau yang berhadapan dengan laut terbuka;
 - kawasan rawan bencana banjir mencakup hampir seluruh daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar di setiap Kabupaten/Kota;
 - kawasan rawan bencana longsor relatif merata di kabupaten-kabupaten pulau Flores, Pulau Timor dan Pulau Alor terutama pada daerah dengan topografi berbukit dan kritis akibat usaha bertani yang kurang terkontrol dan penggundulan hutan.
- p. Kawasan lindung lainnya mencakup :
- Taman Buru di Kabupaten Alor, Ende, Kupang, Manggarai, TTS, Rote Ndao dan Lembata;
 - kawasan pantai berhutan bakau yang mencakup dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat. Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan yang tersebar di wilayah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan permukiman transmigrasi dan atau permukiman baru.

- a. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi berbagai hasil hutan;
- b. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan rakyat tidak terbagi lagi menjadi kawasan yang lebih kecil;
- c. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan kawasan budidaya peternakan;
- d. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan perikanan meliputi wilayah pesisir dan laut yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perikanan.
- e. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan meliputi kawasan wilayah pertambangan dan kawasan wilayah pertambangan rakyat dengan potensi pengembangan bahan-bahan galian yang dibagi atas tiga golongan, yaitu golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital dan golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam kedua golongan diatas.
- f. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan industri merupakan kawasan yang dikembangkan bagi kegiatan berbagai industri.
- g. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- h. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal.
- i. Kawasan budidaya yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman transmigrasi dan atau permukiman baru merupakan kawasan yang diarahkan pada kawasan marginal untuk hunian transmigran atau pemukim baru, memiliki luas tertentu dan lahan usaha yang bersifat terpusat.

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Tertentu

Kawasan tertentu meliputi kawasan tertentu dari sudut kepentingan;

- a. Sosial budaya bangsa;
- b. Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
- c. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi strategis;
- d. Politik dan pertahanan negara serta integritas nasional;

e. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Rencana pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

a. Sasaran pengelolaan kawasan lindung diselenggarakan untuk :

- Peningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

b. Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa :

- Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan selalu dapat terjamin;
- Mengendalikan hidrologi wilayah, berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir serta untuk melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut;
- Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

c. Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat adalah :

- Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
- Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
- Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk;
- Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
- Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara, dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta untuk mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota;

d. Rencana pengelolaan kawasan suaka alam berupa perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

e. Rencana pengelolaan bagi kawasan pelestarian alam berupa pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

f. Rencana pengelolaan bagi kawasan cagar budaya dilakukan melalui upaya perlindungan terhadap kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi di kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

g. Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

h. Rencana pengelolaan kawasan lindung lainnya adalah :

- Melindungi kawasan taman buru dan ekosistemnya untuk kelangsungan perburuan

satwa;

- Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;
- Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan faunanya;
- Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- Melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan kawasan pantai berhutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau, tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, dan pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Rencana pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyasrakan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- a. Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdaya guna untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keruangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan untuk :
 - terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - terhindarnya konflik pemanfaatan sumber daya dengan pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat;
 - memelihara kawasan budidaya untuk keadilan dalam masyarakat dengan memperhatikan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P3T).
- c. Rencana pengelolaan kawasan budidaya dilaksanakan sesuai dengan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Peran Pemerintah dalam pengelolaan kawasan budidaya yang mencakup:
 - penetapan kriteria, norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) pengelolaan kawasan budidaya;
 - bimbingan/pembinaan teknis pengembangan kawasan budidaya kepada Pemerintah Daerah;
 - fasilitasi promosi pengembangan investasi kawasan dan fasilitasi pengembangan kerjasama dengan dunia usaha (dengan kemudahan pemberian insentif);
 - penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan budidaya lintas Provinsi dan kawasan budidaya strategis nasional, seperti pertambangan migas, radio aktif, logam mulia.
- e. Peran Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kawasan budidaya mencakup :
 - memberikan pedoman penyelenggaraan pengelolaan kawasan budidaya;
 - menyelenggarakan izin usaha pemanfaatan kawasan budidaya lintas kabupaten/kota;
 - memfasilitasi kerjasama pengelolaan kawasan budidaya antar kabupaten/kota.
- f. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan budidaya mencakup :
 - menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya;
 - melaksanakan pengendalian pengembangan sejak dini melalui mekanisme perizinan
 - berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pembina teknis atau Pemerintah Provinsi dalam kapasitas fungsi dekonsentrasi;
 - mengupayakan kerjasama dan koordinasi antar daerah otonom dalam pengelolaan kawasan budidaya.
- g. Rencana pengelolaan kawasan yang diperuntukkan sebagai hutan produksi adalah :
 - menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil

- hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan pangan jangka panjang;
- menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan hutan produksi tetap, untuk memperoleh hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, transmigrasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri dan lain-lain, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- h. Rencana pengelolaan kawasan yang diperuntukkan sebagai hutan rakyat adalah menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam memanfaatkan ruang, beserta sumber daya alam di tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya untuk meningkatkan penyediaan kayu bagi kepentingan rakyat dan bahan baku industri pengelolaan kayu, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- i. Rencana pengelolaan kawasan yang diperuntukkan sebagai pertanian berupa :
- Memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan lahan basah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi pangan lahan kering di kawasan pertanian lahan kering, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi perkebunan di kawasan perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan peternakan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Memanfaatkan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- j. Langkah pengelolaan kawasan perikanan adalah berupa memanfaatkan potensi perikanan di wilayah pesisir hingga Zona Ekonomi Eksklusif dan meningkatkan nilai tambah perikanan melalui industri pengelolaan hasil-hasil perikanan dan kelautan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- k. Pengelolaan kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan adalah memanfaatkan sumber mineral, energi dan bahan galian lainnya di kawasan pertambangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber mineral tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- l. Pengelolaan kawasan yang diperlukan sebagai industri adalah memanfaatkan potensi kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- m. Pola pengelolaan kawasan pariwisata adalah memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat-istiadat, mutu dan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- n. Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman adalah memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai dengan pengembangan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana Pengelolaan Kawasan Tertentu

- a. Rencana pengelolaan kawasan tertentu bertujuan untuk :
- Terselenggaranya penataan ruang nasional dan ruang wilayah Provinsi atau ruang

- wilayah Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yang berada dalam kawasan tertentu;
- Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertahanan keamanan negara;
- Menciptakan kawasan strategis , baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah.
- b. Pengelolaan kawasan tertentu dilakukan dalam rangka :
 - Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensi melalui arah pola investasi baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat;
 - Meningkatkan pembangunan kawasan dan peningkatan upaya sinergi pembangunan antara kabupaten/kota, Provinsi, maupun nasional;
 - Memacu perkembangan kawasan/daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam dengan penggunaan IPTEK yang tepat guna dan memberikan daya saing nasional;
 - Mempertahankan fungsi lingkungan hidup kawasan dengan pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
- c. Pengelolaan kawasan tertentu dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- d. Peran Pemerintah dalam pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan dengan:
 - Menyediakan dan menerapkan kriteria, norma, standar, prosedur, dan manual pengelolaan kawasan tertentu;
 - Melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk pemberian insentif dan disinsentif, kompensasi, serta fasilitasi promosi;
 - Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tertentu termasuk pengawasan dan penertiban terhadap penyimpangan penyelenggaraan tertentu berdasarkan kewenangannya.
- e. Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan dengan :
 - Memadukan rencana tata ruang kawasan tertentu, termasuk dalam perencanaan tata ruang wilayah masing-masing;
 - Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan tertentu termasuk pengawasan dan penertiban terhadap penyimpangan penyelenggaraan kawasan tertentu berdasarkan kewenangannya;
 - Memberikan penghargaan kepada pelaku pembangunan yang berperan dalam menjaga pelestarian dan pengembangan kawasan tertentu

5.2.9. Telaah Terhadap RTRW Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kebijakan Rencana Tata Ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pengembangan Pelabuhan

- Pelabuhan Internasional
 - Tenau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/1)
- Pelabuhan Nasional
 - Maumere (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)
 - Waingapu (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/3)

b. Rencana Pengembangan Pelabuhan Udara

- Pusat Penyebaran Tertier
 - Waioti (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)
 - Hasan Aroeboesman (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
 - Mau Hau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/5)
 - Haliwen (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (IV/5)

c. Rencana Pengembangan Wilayah Sungai

- Aesesa (I-IV/A/1) Nusa Tenggara Timur–Strategis Nasional

- Benanain (I-IV/A/1) Nusa Tenggara Timur–Timor Leste (Lintas Negara)
- Noel–Mina (I-IV/A/1) Nusa Tenggara Timur–Timor Leste (Lintas Negara)

d. Rencana Kawasan Lindung Nasional

- Suaka Alam Laut Sawu (I/B/1) Nusa Tenggara Timur
- Taman Wisata Alam Kemang Beleng (II/B/6) Nusa Tenggara Timur
- Taman Wisata Alam Pulau Besar (II/B/6) Nusa Tenggara Timur
- Taman Wisata Alam Egon Illimedo (II/B/6) Nusa Tenggara Timur
- Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere (I/A/6) Nusa Tenggara Timur

e. Rencana Kawasan Andalan

- Kawasan Kupang dan sekitarnya
 - (IV/A/2) - pertanian
 - (II/D/2) - industri
 - (I/E/2) - pariwisata
 - (I/G/2) - perikanan laut
 - (III/C/2) – pertambangan
- Kawasan Maumere-Ende
 - (III/H/2) - kehutanan
 - (II/E/2) - pariwisata
 - (III/D/2) - industri
 - (I/F/2) - perikanan
 - (IV/A/2) - pertanian
 - (III/B/2) – perkebunan
- Kawasan Komodo dan sekitarnya
 - (I/E/2) - pariwisata
 - (IV/A/2) - pertanian
 - (IV/B/2) - perkebunan
 - (IV/D/2) - industri
 - (III /F/2) - perikanan
- Kawasan Ruteng – Bajawa
 - (IV/B/2) - perkebunan
 - (II/F/2) - perikanan
 - (III/C/2) - pertambangan
 - (II/E/2) - pariwisata
 - (IV/A/2) - pertanian
- Kawasan Sumba
 - (IV/A/2) - pertanian
 - (II/E/2) - pariwisata
 - (III/B/2) - perkebunan
- Kawasan Andalan Laut Flores
 - (III/F/2) - perikanan
 - (II/E/2) - pariwisata
- Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya
 - (III/F/2) - perikanan
 - (IV/C/2) - pertambangan
 - (II/E/2) – pariwisata
- Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya
 - (II/F/2) - perikanan
 - (IV/E/2) – pariwisata



f. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/A/2)
- Kawasan Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/E/2)

- Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/Australia (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I/E/2)

5.2.10. Telaah Terhadap KLHS

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan Pasal 15 ayat (1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Permendagri tersebut menyebutkan bahwa “KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD”. KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD. Permendagri ini bertujuan untuk merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Isu pembangunan berkelanjutan diperoleh melalui hasil perhitungan GAP (selisih) antara target RPJMN dengan capaian RPJMD Kabupaten Sikka terhadap setiap indikator yang bersangkutan. Tidak semua indikator yang dihitung termasuk dalam isu pembangunan berkelanjutan. Isu pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan isu pembangunan berkelanjutan yang dibagi dalam empat pilar yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.

1.1.1.1. Pilar Sosial

Pilar Sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. **Tujuan:** Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* mengakhiri segala bentuk kemiskinan;

2. **Tujuan:** Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. **Tujuan:** Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. **Tujuan:** Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan
5. **Tujuan:** Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

1.1.1.2. Pilar Lingkungan

Pilar Lingkungan, mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu

1. **Tujuan :** Air Bersih dan Layak Sanitasi, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
2. **Tujuan :** Kota dan Permukiman Berkelanjutan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan;
3. **Tujuan :** Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
4. **Tujuan :** Penanganan Perubahan Iklim, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
5. **Tujuan :** Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan; dan
6. **Tujuan :** Pelestarian dan pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.

1.1.1.3. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. **Tujuan :** Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
2. **Tujuan :** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
3. **Tujuan :** Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
4. **Tujuan :** Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara, *dengan isu pembangunan berkelanjutan:* mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan
5. **Tujuan :** Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan :* memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

1.1.1.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola, dengan **Tujuan** : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, *dengan isu pembangunan berkelanjutan* : perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Selanjutnya adalah dengan menilai isu tersebut terhadap 7 aspek penilaian sesuai dengan muatan pasal 9 ayat (1) PP 46 2016, yaitu:

- a) karakteristik wilayah
- b) tingkat pentingnya potensi dampak
- c) keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
- d) keterkaitan dengan materi muatan KRP
- e) muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f) hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya

Tahap berikutnya adalah dengan penilaian isu untuk memperoleh isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas. Adapun penilaian tersebut melalui pembobotan masing-masing isu terhadap variabel yang terdapat pada PP 46 2016 pasal 9, sebagai berikut:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b) perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup
- c) kinerja layanan atau jasa ekosistem
- d) intensitas dan cakupan wilayah bencana alam
- e) status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
- f) ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- g) kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- h) tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
- i) resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
- j) ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu

Setelah melaksanakan penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis keterkaitan isu strategis prioritas terhadap aspek /muatan kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan
3. Kinerja Pelayanan/ Jasa Ekosistem
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam
5. Tingkat keentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan isu tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dirumuskan skenario yang merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual (BAU)* terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja Kabupaten Sikka yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Sikka. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perpres No. 59 tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan 2023. Ada 4 skenario yaitu :

1. Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

Berdasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi air, pangan, lindung dan lahan terbangun maka dapat dibandingkan perubahan pada pada masing-masing daya dukung lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 5

Skenario Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka

| No | Daya Dukung LH | BAU | | Kebutuhan | Keterangan |
|----|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---|
| | | 2017 | 2023 | | |
| 1 | Daya Dukung Air | - | 3,26 | (+) | Daya dukung memenuhi karena ketersediaan air hingga tahun 2023 sebesar 313.839.253 m3 sementara kebutuhan air 96.188.925,3 |
| 2 | Daya Dukung Pangan | CCR 0,13 (cukup) 7.817 | CCR 0,13 (cukup) - | CCR baik Surplus | Perlu penetapan LP2B dan pembangunan jaringan irigasi Situasi pangan masih surplus namun terdapat 8 kecamatan yang mengalami kekurangan pangan (defisit) sehingga harus diperhatikan ketahanan pangannya |
| 3 | Daya Tampung Penduduk | - | 2,418,964 | 328,495 | Daya tampung demografi memenuhi |
| 4 | Daya dukung lahan pertanian | 29,79 | 28,43 | >1 (swasembada) | Daya dukung lahan pertanian cukup baik namun setiap tahun mengalami penurunan, sehingga perlu perencanaan pertanian |
| 5 | Daya dukung fungsi lindung | 0,61 (baik) | | | Daya dukung fungsi lindung termasuk dalam kondisi baik |

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Sikka, 2018

2. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing pilar yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang belum ada dalam target RPJMD tetapi relevan di Kabupaten Sikka yang diusulkan untuk dapat dimasukkan. Proyeksi dilakukan dengan membandingkan rate tahunan secara *Bussiness As Usual* (BAU) dan rate tahunan terhadap gap target nasional. Proyeksi BAU dilakukan dengan melihat tren perkembangan dari baseline dalam RPJMD pada tahun 2015 terhadap capaian sampai dengan 2017. Sedangkan rate tahunan terhadap gap target nasional dalam TPB membandingkan gap antara capaian 2017 dengan target nasional sampai dengan 2030. Berikut tabel proyeksi dan rekomendasi target untuk dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka sampai tahun 2023.

3. Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario tanpa upaya tambahan adalah bentuk-bentuk skenario pilihan yang dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Sikka untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator yang telah mencapai target nasional. Dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka , 30 diantaranya telah mencapai target nasional. Beikut adalah beberapa alternaif skenario Kabupaten Sikka tanpa upaya tambahan :

- a. Mempertahankan program dan kegiatan untuk pelaksanaan seluruh TPB yang sudah mencapai target nasional (Business as Usual)
- b. Mempertahankan program dan kegiatan untuk indikator TPB yang sudah mencapai target nasional, berdasarkan skala prioritas

Skenario pertama untuk TPB yang telah mencapai target nasional adalah dengan mempertahankan alokasi APBD untuk pelaksnaan TPB. Asumsi yang digunakan untuk skenario ini adalah tersedianya anggaran yang cukup bagi Kabupaten Sikka untuk melaksanakan

seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator TPB, termasuk indikator - indikator yang telah mencapai target nasional. Pertimbangan penerapan skenario ini adalah, belum semua indikator yang telah mencapai target nasional di Kabupaten Sikka cukup kuat untuk dibiarkan tanpa intervensi lanjutan. Sehingga masih dibutuhkan penganggaran lanjutan. Dikhawatirkan apabila tidak dianggarkan pada APBD capaian yang selisihnya masih cukup kecil tersebut dengan target masih akan mengalami penurunan pencapaian.

Skenario kedua untuk TPB yang sudah mencapai target nasional adalah dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan yang sudah mencapai target nasional. Kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan indikator yang telah mencapai target nasional akan tetap dialokasikan, namun tidak secara keseluruhan. Namun demikian, tidak seluruh indikator yang telah mencapai target nasional akan dialokasikan. Harus ditentukan skala prioritas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Asumsi ini dipilih dengan catatan karena adanya keterbatasan anggaran oleh Kabupaten Sikka untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan TPB yang sudah mencapai target nasional. Sehingga hanya beberapa kegiatan yang dianggap prioritas yang masih harus dialokasikan ke dalam program dan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka.

4. **Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Upaya Tambahan**

Alternatif skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif skenario yang diperlukan bagi indikator-indikator TPB yang belum mencapai target RPJMN 2019, baik untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan. Dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Sikka, terdapat 190 indikator yang memerlukan upaya tambahan, dengan rincian: 23 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, 28 indikator belum dilaksanakan, dan 139 indikator belum tersedia data.

Penilaian terhadap capaian indikator TPB di Kabupaten Sikka menghasilkan 190 isu strategis yang terdiri dari indikator-indikator yang belum dilaksanakan, belum mencapai target dan data yang tidak tersedia. Isu tersebut merupakan bagian dari target TPB yang akan dicapai pada periode waktu tertentu. Dari total 190 indikator tersebut, 30 diantaranya merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 40 adalah urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar dan 3 lainnya adalah urusan pilihan.

Berdasarkan skenario diatas, ditetapkan alternatif dan rekomendasi dari masing-masing pilar sebagai berikut :

1. **Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Sosial**

Tabel 5. 6

Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Sosial

| No | Indikator | Isu Strategis | Rekomendasi 2023 | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baru 14,72% | Menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 10% | Dinas Sosial |
| 2 | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | tenaga kerja mengikuti peserta program jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan baru 48% | Menaikkan tingkat tenaga kerja mengikuti peserta program jaminan Sosial sebesar 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal | Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial |
| 3 | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | Jangka Pendek : a. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | |

| | | | | |
|----|--|---|---|------------------------------|
| 4 | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan 350.000.000 | <p>b. Penyusunan data base tenaga kerja daerah</p> <p>c. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>a. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</p> <p>b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>Jangka Panjang:</p> <p>a. Meningkatkan akses terhadap jaminan sosial bidang ketenagakerjaan</p> <p>b. Meningkatkan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan untuk seluruh kalangan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan</p> | |
| 5 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. | Prosentase capaian terhadap sumber air minum yang layak baru mencapai 70% | <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat</p> <p>b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin</p> <p>c. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan</p> <p>d. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>e. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>a. Perencanaan pengembangan kota</p> <p>b. Penataan administrasi kependudukan</p> <p>c. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</p> <p>d. Pemberdayaan komunitas perumahan e. Lingkungan sehat perumahan</p> <p>Jangka Panjang:</p> <p>a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar untuk seluruh kalangan, khususnya masyarakat miskin dan rentan</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan dasar berbasis masyarakat</p> | PUPR Dinas Pendidikan |
| 6 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. | Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%. | | |
| 7 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. | Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. menjadi 94,78% | | |
| 8 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat menjadi 82,2% | | |
| 9 | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Belum ada capaian dan belum ada data dan tidak ada dalam target Nasional | <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana</p> <p>b. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center penanganan masalah-</p> | BPBD |
| 10 | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah). | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 11 | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). | masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | |
| 12 | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu). | c. Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana d. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana | |
| 13 | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) | Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100). | d. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam e. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | |
| 14 | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Jumlah kerugian ekonomi akibat bencana terdapat pada dokumen RBI | Jangka Menengah: | |
| 15 | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Belum adanya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) diKabupaten Sikka | a. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam c. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Jangka Panjang: a. Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang b. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam | |
| 17 | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Prosentase capaian terakhir sebesar 15% | Jangka Pendek: a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Jangka Menengah: a. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah b. Program perencanaan pengembangan kota Jangka Panjang: a. Mendorong alokasi sumberdaya dalam rangka pemberantasan kemiskinan b. Mendorong priritas program pemerinatah untuk layanan pokok pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Masih adanya Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). | Jangka Pendek: a. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | Dinas Pertanian |
| 19 | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %). | b. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 20 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | | c. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat d. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan | |
| 21 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%). | Jangka Menengah: a. Perencanaan Pembangunan Ekonomi b. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya Jangka Panjang: a. Menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pangan b. Memantau daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok | |

2. Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Lingkungan

Tabel 5. 7

Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Lingkungan

| No. | Indikator | Isu Strategis | Rekomendasi 2023 | Instansi |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Jangka Panjang: a. Meningkatkan akses merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Telah memenuhi target RPJMN | Jangka Menengah: a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan pengairan b. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum | |
| 3 | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Jangka Pendek: a. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum b. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah c. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah d. Pengembangan distribusi air minum | |
| 4 | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan | Jangka Panjang: a. Meningkatkan layanan terhadap | DLH, PUPR |

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------|
| | air. | dengan sabun dan air. | sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua | |
| 5 | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Jangka Menengah: a. Upaya kesehatan masyarakat | |
| 6 | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | b. Program lingkungan sehat c. Pemberdayaan komunitas perumahan | |
| 7 | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Jangka Pendek: a. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan | |
| 8 | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | b. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan c. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | |
| 9 | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan e. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat | |
| 10 | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Jangka Panjang: a. Mengurangi polusi air untuk meningkatkan kualitas air | DLH, PUPR |
| 11 | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Jangka Menengah: a. Peningkatan pengendalian polusi b. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | |
| 12 | Kualitas air danau. | Kualitas air danau. | Jangka Pendek: | |
| 13 | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | a. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran c. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah d. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi e. Pemerataan infrastruktur rumah tangga dengan sistem pengelolaan lumpur tinja. | |
| 14 | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | Jangka Panjang: a. Optimalisasi penggunaan air permukaan dalam rangka mengurangi kelangkaan air b. Pengembangan teknologi pengolahan air permukaan | PUPR |

| | | | | |
|----|---|---|--|-----------------------|
| | | | <p>Jangka Menengah:</p> <p>a. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.</p> <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air</p> <p>b. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan</p> <p>c. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air</p> <p>d. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA</p> <p>e. Penyediaan program untuk penghematan atau optimalisasi pemakaian air pertanian/ perkebunan dan industri</p> | |
| 15 | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | <p>Jangka Panjang:</p> <p>1. Kerjasama perlindungan dan konservasi sumber air antar wilayah</p> <p>Jangka Menengah:</p> | Dinas PUPR BAPPEDA |
| 16 | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | <p>1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> | |
| 17 | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air</p> | |
| 18 | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | <p>b. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA</p> | |
| 19 | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Masih banyak rumah yang belum layak huni atau masih banyak rumah kumuh | <p>Jangka panjang:</p> <p>1. Meningkatkan akses terhadap perumahan</p> | BAPPEDA PUPR |
| 20 | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | <p>Jangka menengah:</p> <p>1. Pengembangan Perumahan</p> <p>2. Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Jangka pendek:</p> <p>a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan</p> <p>b. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha</p> <p>c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu</p> <p>d. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang</p> | |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------------------|
| 21 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Perencanaan dokumen mitigasi bencana serta pengembangan gedung dengan sistem mitigasi | |
| 22 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Perhitungan IRBI | |
| 23 | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Penyediaan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan | |
| 24 | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Perhitungan kerugian ekonomi akibat bencana | |
| 25 | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan target capaian terhadap sampah perkotaan yang tertangani menjadi 80% tahun 2019 dan 100% tahun 2023 • Memperbanyak TPS3R; Program Bank Sampah; • TPS Terpadu Skala Kota; • Pelatihan keterampilan pemanfaatan limbah bekas • Program pembuatan TPS terpadu • Pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah | DLH PUPR |
| 26 | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | penanganan RTH perkotaan Belum tercapainya standar pelayanan minimal RTH daerah perkotaan | Penyediaan ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan privat minimal 10% | DLH PUPR |
| 27 | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Pengelolaan limbah B3 | DLH PUPR |
| 28 | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Pelaksanaan program R3 | DLH PUPR |
| 29 | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 | Pendataan perusahaan terkait SNI ISO 14001. | Dinas Perindustrian |
| 30 | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Pendataan produk ramah lingkungan | DLH PUPR BAPPEDA |
| 31 | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Peningkatan fasilitas publik dengan SPM | DLH PUPR |
| 32 | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | Perencanaan program mitigasi bencana | BPBD BAPPEDA |
| 33 | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengurangi alih fungsi lahan pada daerah resapan air 2. Melakukan rehabilitasi lahan untuk daerah resapan air <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan | DLH BAPPEDA Dinas Kehutanan |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----|
| | | | <p>sumber daya air lainnya</p> <p>2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau</p> <p>b. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air</p> <p>c. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan</p> <p>d. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA</p> <p>e. Pengendalian dampak perubahan iklim</p> | |
| 34 | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati | DLH |

3. Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Ekonomi

Tabel 5. 8

Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Ekonomi

| No | Indikator | Isu Strategis | Rekomendasi 2023 | Instansi Pelaksana |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Bauran energi terbarukan. | Bauran energi terbarukan belum mencapai 10-16% | Perencanaan program pemanfaatan energi terbarukan | ESDM dan PLN |
| 2 | Intensitas energi primer. | Intensitas energi primer tidak mengalami penurunan | Penyediaan progam perencanaan pemanfaatan energi primer | |
| 3 | Laju pertumbuhan PDB per kapita. | Telah memenuhi target RPJMN | <p>Jangka Panjang :</p> <p>1. Meningkatkan kegiatan ekonomi disegala tingkat</p> <p>2. Peningkatan Produk Domestik Bruto</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</p> <p>2. Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah</p> <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah</p> <p>b. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah</p> <p>c. Pendirian unit penanganan pengaduan</p> <p>d. Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional</p> <p>e. Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah</p> <p>f. Pengembangan potensi unggulan daerah</p> <p>g. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT)</p> | Dinas Perdagangan BAPPEDA bag Perekonomian |
| 4 | PDB per kapita. | PDB per kapita. | | |
| 5 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB | <p>Jangka Panjang:</p> <p>a. Meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah secara menyeluruh</p> <p>b. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> | BAPPEDA bag Perekonomian Badan Pendapatan |

| | | | | |
|----|--|--|---|---------------------------------------|
| | riil per orang bekerja per tahun. | riil per orang bekerja per tahun. | <p>c. Melakukan pengembangan inovasi teknologi dalam bidang ekonomi</p> <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan teknologi industri 2. Pelaksanaan kajian pengembangan ekonomi wilayah 3. Meningkatkan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat c. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi d. Pembinaan kemampuan teknologi industri | |
| 6 | Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. | Telah memenuhi target RPJMN | <p>Jangka Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas lptek sistem produksi 3. Menyelenggarakan pembimbingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan teknis | Dinas Ketenagakerjaan BAPPEDA |
| 7 | Persentase tenaga kerja formal. | Persentase tenaga kerja formal belum mencapai 51% | <p>Jangka Menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan ekonomi 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Peningkatan kemampuan teknologi industri | |
| 8 | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. | <p>Jangka Pendek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat c. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi d. Pembinaan kemampuan teknologi industri | |
| 9 | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. | Telah memenuhi target RPJMN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan kesempatan kerja di daerah 2. Peningkatan Kesempatan Kerja | |
| 10 | Upah rata-rata per jam pekerja. | Upah rata-rata per jam pekerja. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja <p>Jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan balai latihan kerja b. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja c. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK d. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja e. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja <p>Jangka panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kesempatan Kerja <p>Jangka menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan pelatihan <p>Jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan balai latihan kerja b. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja c. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK d. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja | Dinas Ketenagakerjaan Dinas Sosial |
| 11 | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur meningkat | | |
| 12 | Tingkat setengah pengangguran. | Tingkat setengah pengangguran. | | |
| 13 | Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | Peningkatan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|--------------------------------|
| | | | e. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja f. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan | |
| 14 | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB belum mencapai 8% (target RPJMN) | Jangka Panjang: 1. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya | DISBUDPAR |
| 15 | Jumlah wisatawan mancanegara. | Jumlah wisatawan mancanegara. | Jangka Menengah: a. Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Pengembangan Kawasan untuk wisata Snocling di teluk Maumere | |
| 16 | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | | |
| 17 | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Jumlah devisa sektor pariwisata. | Jangka pendek: a. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri c. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata | |
| 18 | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. | | |
| 19 | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa | Jangka Panjang : 1. Pemerataan akses masyarakat terhadap seluruh jasa keuangan berbagai hirarki | Badan Pendapatan |
| 20 | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). | Jangka Menengah: 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Pengembangan fasilitas jasa keuangan | |
| 21 | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. | Jangka Pendek: a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi b. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal c. Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal | |
| 22 | Panjang pembangunan jalan tol. | Panjang pembangunan jalan tol. | | |
| 23 | Jumlah dermaga penyeberangan. | Jumlah dermaga penyeberangan. | Jangka Panjang : Peningkatan pelayanan dermaga penyeberangan | DINAS PERHUBUNGAN |
| 24 | Jumlah pelabuhan strategis. | Jumlah pelabuhan strategis. | Jangka Menengah: Pengembangan pelabuhan strategis Jangka Pendek: a. Peningkatan pelayanan pelabuhan b. Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan | |
| 25 | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. | Jangka panjang: Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Dinas Perdagangan dan Industri |
| 26 | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur kurang dari 4,3% (target RPJMN). | Jangka menengah: 1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Peningkatan standarisasi pengelolaan industri | |
| 27 | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. | Telah memenuhi target RPJMN | Jangka pendek: a. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur b. Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur c. Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan | |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 28 | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | Jangka panjang: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jangka menengah: | BAPPEDA Dinas Perdagangan dan Industri |
| 29 | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | 1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jangka pendek: a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah b. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI c. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi d. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan | |
| 30 | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | Jangka panjang: Peningkatan bidang fasilitasi komunikasi dan informasi Jangka menengah: Pemerataan pelayanan bidang komunikasi dan informasi | DINAS INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI |
| 31 | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam | Jangka pendek: a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi | |
| 32 | Proporsi individu yang menggunakan internet | Proporsi individu yang menggunakan internet | b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi c. Pengadaan alat studio dan komunikasi d. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi | |
| 33 | Koefisien Gini. | Koefisien Gini. | Jangka panjang: Peningkatan Kesempatan Kerja Jangka menengah: 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin Jangka pendek: | Dinas Sosial |
| 34 | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur belum mencapai 7-8%. | a. Kerjasama pendidikan dan pelatihan b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihankewirausahaan c. Pengadaan alat studio dan komunikasi d. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi e. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin f. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin | |
| 35 | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | | |
| 36 | Jumlah desa tertinggal. | Jumlah desa tertinggal. | | |
| 37 | Jumlah Desa Mandiri. | Jumlah Desa Mandiri. | | |
| 38 | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | | |
| 39 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | | |
| 40 | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Jangka panjang: Peningkatan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin Jangka menengah: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinas Sosial |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------|
| | | | <p>Jangka pendek:</p> <p>Pelayanan kesehatan secara gratis bagi penduduk miskin</p> | |
| 41 | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | <p>Jangka panjang:</p> <p>1. Perencanaan pembangunan ekonomi</p> <p>2. Perencanaan sosial budaya</p> <p>Jangka menengah:</p> <p>Penyusunan kebijakan berkaitan dengan pembangunan ekonomi</p> <p>Jangka pendek:</p> <p>a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah</p> <p>b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat</p> | Dinas Ketenagakerjaan |
| 42 | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Telah memenuhi target RPJMN | <p>Jangka panjang:</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan dalam bidang pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya</p> | Dinas Pendapatan |
| 43 | Rasio penerimaan pajakterhadap PDB. | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | <p>4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk dapat memperkuat mobiltas sumber daya domestik</p> | |
| 44 | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | <p>Jangka menengah:</p> <p>Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>Jangka pendek:</p> <p>h. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p> <p>i. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi</p> <p>j. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah</p> | |
| 45 | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | <p>Jangka panjang:</p> <p>Peningkatan Kerjasama Pembangunan</p> <p>Jangka menengah</p> | BAPPEDA |
| 46 | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | <p>5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>6. Peningkatan tingkat koordinasi pembangunan antar wilayah</p> <p>Jangka pendek:</p> <p>k. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah</p> <p>l. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga</p> <p>m. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah</p> | |

| | | | | |
|----|--|--|--|----------------------------------|
| 47 | Proporsi individu yang menggunakan internet. | Proporsi individu yang menggunakan internet. | <p>Jangka panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan teknologi dan sains 2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna di seluruh bidang <p>Jangka menengah:</p> <p>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>Jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP b. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi e. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi f. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 48 | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | | |
| 49 | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | <p>Jangka panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efisiensi pelayanan investasi 2. Mengakomodir peran swasta dalam partisipasi pembangunan <p>Jangka menengah:</p> <p>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>Jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha c. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah d. Pengembangan potensi unggulan daerah e. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) | |
| 50 | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | |
| 51 | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | <p>Jangka panjang:</p> <p>Pengembangan data/informasi statistik</p> <p>Jangka menengah:</p> <p>Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>Jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi b. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan c. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat d. Pengembangan data base kependudukan | BPS Dinas Kependudukan |
| 52 | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | | |
| 53 | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | | |
| 54 | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--------------------|
| 55 | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Jangka panjang: Mengakomodir seluruh aspek pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan strategis | Dinas Kependudukan |
| 56 | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Jangka menengah: Penataan Administrasi Kependudukan | |
| 57 | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Jangka pendek: a. Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi b. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan c. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat d. Pengembangan data base kependudukan | |

4. Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Hukum dan Tata Kelola

Tabel 5. 9

Rekomendasi KLHS RPJMD Pilar Hukum dan Tata Kelola

| No | Indikator | Isu Strategis | Rekomendasi 2023 | Instansi Pelaksana |
|----|--|--|---|-----------------------|
| 1 | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | Jangka Panjang: Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Jangka Menengah: i. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ii. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Jangka Pendek: a. Kegiatan pengurangan permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. Kegiatan pengurangan perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. Kegiatan pengurangan sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. Kegiatan pengurangan sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e. Kegiatan pengurangan distribusi | Dinas Sosial |
| 2 | Kematian disebabkan konflik per 100.000 | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | | |
| 3 | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | | |
| 4 | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | | |
| 4 | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun | Jangka Panjang: Melakukan intervensi penguatan keterampilan pengasuhan (parenting) dan mengurangi tindakan pecehan kepada anak baik secara emosional maupun secara fisik Jangka Menengah: c. Program intervensi penguatan | Dinas Penanaman Modal |
| 5 | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | | |

| | | | | |
|----|---|--|---|--------------|
| 6 | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | <p>keterampilan mengenai pengasuhan (parenting) yang menjadi salah satu strategi di dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020</p> <p>d. Pengurangan tindakan pecehan kepada anak baik secara emosional maupun secara fisik</p> <p>Jangka Pendek:</p> <p>a. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</p> <p>b. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</p> <p>c. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di</p> | |
| 7 | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | <p>Jangka Panjang:</p> <p>1. Meningkatkan kesadaran dan budaya zero tolerance</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan budaya zero tolerance terhadap dalam bentuk pendidikan dan budaya anti korupsi sebagai</p> | Dinas Sosial |
| | | | <p>Jangka Pendek:</p> <p>Penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang budaya anti korupsi sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi di masyarakat.</p> | |
| 8 | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Jangka Panjang: | BAPPEDA |
| 9 | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | Telah memenuhi target RPJMN | <p>1. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta mengembangkan sistem pengawasan yang efektif</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan</p> <p>4. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>5. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Jangka Pendek:</p> <p>e. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan</p> <p>f. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja</p> <p>g. Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p> <p>h. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</p> | |
| 10 | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | |
| 11 | Persentase penggunaan E-procurement terhadap | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja | | |
| 12 | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | |
| 13 | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------------|
| 14 | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan dan menguatkan kelembagaan pengarusutamaan terkait gender dan anak 2. Melayani pengaduan masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 5. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB |
| 15 | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | | |
| 16 | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, | Telah memenuhi target RPJMN | <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola sistem administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 17 | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% | <p>Jangka Menengah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan administrasi kependudukan secara terpadu dan profesional 2. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 3. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | |
| 18 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Telah memenuhi target RPJMN | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembentukan dan penataan sistem koneksi administrasi kependudukan b. Updating sistem administrasi kependudukan c. Pemeliharaan sistem administrasi kependudukan d. Kegiatan penyusunan laporan informasi | |

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan RPJMD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan.

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas
Tujuan terwujudnya kualitas hidup masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan (IK)

Untuk mencapai tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

- a. Meningkatnya pendidikan masyarakat.
Sasaran meningkatnya pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup.
- c. Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil.
Sasaran terbangunnya perekonomian yang kokoh, maju dan adil dengan indikator PDRB Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Indeks Williamson, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Rasa Aman dan Nyaman.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Tujuan terwujudnya reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Untuk mencapai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

- a. Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN
Sasaran Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator Opini BPK dan jumlah temuan pemeriksaan BPK dan APIP.
- b. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik
Sasaran meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Publik.
- c. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan indikator Nilai SAKIP.

Tabel 5.10.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Manengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023.

| NO | MISI | TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2017) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|--|--|---|------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas | <i>Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas</i> | | | | | | | | | |
| | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | 63,80 | 67,40 | 68,60 | 69,80 | 72,00 | 73,20 | 73,20 |
| | | Indeks Kebahagiaan (IK) | | | < 68,52 | 68,52 | 69,02 | 69,52 | 70,02 | 70,52 | 70,52 |
| | | | Meningkatnya pendidikan masyarakat | Indeks Pendidikan | 9,45 | 10,58 | 11,00 | 11,20 | 11,80 | 12,00 | 12,00 |
| | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 66,3 | 66,69 | 66,86 | 67,04 | 67,21 | 67,38 | 67,38 |
| | | | Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil | PDRB per Kapita | 13.610.000 | 14.555.096 | 15.545.144 | 16.535.192 | 17.525.280 | 18.515.288 | 18.515.288 |
| | | | | Pengeluaran per Kapita | 7.855.000 | | | | | | |
| | | | | Pertumbuhan Ekonomi | 5,22 | 5,3 | 5,6 | 5,86 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
| | | | | Inflasi | 1,7 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,64 |
| | | | | Indeks Gini | 0,274 | 0,269 | 0,256 | 0,242 | 0,229 | 0,215 | 0,215 |
| | | | | Indeks Williamson | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,43 |
| | | | | Angka Kemiskinan | 14,2 | 13,45 | 12,2 | 11,57 | 10,64 | 9,9 | 9,9 |
| | | | | Tingkat Pengangguran | 2,50 | 2,21 | 1,84 | 1,47 | 1,19 | 1,02 | 1,02 |

| NO | MISI | TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL (2017) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
|----|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | Indeks Rasa Aman dan Nyaman | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,82 |
| 2 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi | <i>Terwujudnya reformasi birokrasi</i> | | | | | | | | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | C | C | CC | CC | B | B | B |
| | | | Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | | Jumlah Temuan BPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Jumlah Temuan APIP | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik | 1,85 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3 |
| | | | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Nilai SAKIP | CC | CC | B | B | B | B | B |

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pada bab ini menguraikan mengenai Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

6.1. Strategi

Strategi yang baik dikembangkan dengan prinsip-prinsip menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan serta pemangku kepentingan, terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita/skenario dan layanan yang bernilai tambah secara berkelanjutan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kesakitan
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
4. Peningkatan rasa aman dan nyaman
5. Peningkatan Kinerja Sistim Pengendalian Internal Pemerintah
6. Peningkatan profesionalitas ASN
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan publik
8. Peningkatan sistim informasi pelayanan publik
9. Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah fokus dari strategi sehingga arah kebijakan harus mencakup kelompok sasaran (*target group*), tempat (*locus*) dan dimensi. Arah kebijakan membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional atau realistis, memperjelas strategi sehingga menjadi spesifik/fokus, konkrit dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar memenuhi kriteria, urgensi, serius dan pertumbuhan yang tinggi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. *Pemantapan penerapan SPM pendidikan.*
Pemantapan penerapan SPM pendidikan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, melalui :
 - a. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
 - b. Peningkatan minat baca masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kepemudaan dan olahraga
2. *Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka.*
Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, melalui :
 - a. Pemberian beasiswa prestasi bagi siswa dan mahasiswa
 - b. Pemberian beasiswa miskin bagi mahasiswa
 - c. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa kedokteran dan calon dokter ahli

3. *Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal.*
Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal, melalui :
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
 - b. Keluarga Berencana
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat
 - d. Penguatan puskesmas dan jaringannya
 - e. Pembentukan brigade sehat reaksi cepat
4. *Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita*
Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita, melalui :
 - a. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
 - b. Stimulasi dan deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak
 - c. Imunisasi dan ASI eksklusif
5. *Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan*
Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan, melalui :
 - a. Peningkatan layanan kesehatan guna pengurangan angka kesakitan
 - b. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
 - c. Penanganan kawasan kumuh
6. *Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu*
Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, melalui Pemberian KIS atau Kartu Sikka Sehat. Kartu Sikka Sehat dengan jangka waktu terbatas bagi yang belum memperolehnya.
7. *Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui :
 - a. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - b. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - c. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
8. *Pengembangan investasi swasta*
Pengembangan investasi swasta, melalui Peningkatan kualitas layanan perijinan dan Fasilitasi percepatan investasi swasta dalam pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata
9. *Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat*
Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat, melalui :
 - a. Pembangunan Balai Latihan Kerja
 - b. Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi
10. *Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar*
Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar, melalui :
 - a. Penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka
 - b. Penataan pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan perbatasan
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
 - d. Pembangunan prasarana dan jaringan air bersih
 - e. Perluasan jaringan listrik dan sambungan rumah
 - f. Pembangunan rumah layak huni
 - g. Pembangunan prasarana dan penataan transportasi
 - h. Pengembangan transmigrasi lokal
11. *Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif*
Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, melalui :
 - a. Pengembangan kerajinan tangan, Kuliner dan Fashion
 - b. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM

12. *Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata*
Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata melalui :
 - a. Pengembangan agro industri berbasis kakao;
 - b. Pengembangan agro industri berbasis kelapa;
 - c. Pengembangan industri pengolahan ikan, pengalengan ikan dan rumput laut;
 - d. Pengembangan pemasaran, destinasi, inვენstasi pariwisata alam, religi, dan budaya.
13. *Pengendalian laju inflasi*
Pengendalian laju inflasi, melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa
14. *Penegakan ketertiban umum*
Penegakan ketertiban umum, melalui :
 - a. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - b. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - c. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - e. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - f. Peningkatan kesadaran politik masyarakat
15. *Pengurangan Resiko Bencana*
Pengurangan Resiko Bencana, melalui Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
16. *Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur*
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan struktural dan formal
 - b. Penataan pemangku jabatan fungsional tertentu
17. *Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja*
Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, melalui Pengembangan sistim informasi Pemerintah Daerah
18. *Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah*
Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah, melalui :
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
 - b. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Tertulis
 - c. Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur
 - d. Implementasi kebijakan dan prosedur
 - e. Evaluasi formal, berkala dan Pemantauan/pengembangan berkelanjutan
19. *Peningkatan kapasitas pendanaan*
Peningkatan kapasitas pendanaan melalui pinjaman daerah

6.3. Program Pembangunan

Sumber perumusan program berdasarkan mandat nasional dan internasional yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta tuntutan pembangunan daerah yaitu program prioritas kepala daerah, strategi dalam *cascading* perencanaan pembangunan dan dalam rangka menjawab persoalan pembangunan daerah. Alat ukur keberhasilan program adalah indikator program yang berada pada level outcome.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan secara strategis maka Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
4. Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Secara operasional pelaksanaan program pembangunan dijabarkan Program Prioritas Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- 1 Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3 Pendidikan Non Formal
- 4 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- 7 Peningkatan peran serta kepemudaan
- 8 Upaya Kesehatan Masyarakat
- 9 Perbaikan Gizi Masyarakat
- 10 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 11 Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 12 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya
- 13 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- 14 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 15 Perlindungan anak dan KB
- 16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 18 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 19 Pengembangan Lingkungan Sehat
- 20 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 21 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 22 Pengelolaan Areal Pemakaman
- 23 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- 24 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 25 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 26 Pembinaan anak terlantar
- 27 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 28 Pembinaan panti asuhan/panti jompo
- 29 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 30 Peningkatan Kesempatan Kerja
- 31 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 32 Pembangunan jalan dan jembatan
- 33 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 34 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 35 Pembangunan turap/talud/bronjong
- 36 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 37 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 38 Lingkungan Sehat Perumahan
- 39 Pengembangan Perumahan
- 40 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 41 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 42 Peningkatan pelayanan angkutan

- 43 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- 44 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- 45 Pengembangan wilayah transmigrasi
- 46 Transmigrasi lokal
- 47 Pengembangan pemasaran pariwisata
- 48 Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- 49 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 50 Pengembangan destinasi pariwisata
- 51 Pengembangan industri kecil dan menengah
- 52 Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 53 Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- 54 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- 55 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- 56 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 57 Peningkatan produksi hasil peternakan
- 58 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- 59 Pengembangan budidaya perikanan
- 60 Pengembangan perikanan tangkap
- 61 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 62 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan
- 63 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah
- 64 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 65 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 66 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 67 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- 68 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- 69 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 70 Pendidikan Kedinasan
- 71 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 72 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 73 Pengembangan data/informasi
- 74 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 75 Perencanaan Pembangunan Daerah
- 76 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Untuk menerangkan kausalitas antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1.

Visi, Misi, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

VISI : "TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM PEMBANGUNAN |
|--|---|---|--|---|
| Misi I : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas | | | | |
| Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas | 1 Meningkatkan pendidikan masyarakat | Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan | 1 Pemantapan penerapan SPM pendidikan | 1 Peningkatan Kualitas Pendidikan |
| | | | 2 Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka | |
| | 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kesakitan | 3 Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal | 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kesehatan Lingkungan |
| | | | 4 Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita | |
| | | | 5 Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan | |
| | 3 Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil | 1 Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan | 6 Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata | 3 Peningkatan Daya saing produk Unggulan Daerah |
| | | | 7 Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif | |
| | | | 8 Pengendalian laju inflasi | |
| | | | 9 Pengembangan investasi swasta | |
| | | | 10 Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar | |
| | | | 11 Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat | |
| | | | 12 Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 4 Penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | Arah Kebijakan | Program Pembangunan |
|--|---|--|---|--|
| | | | 13 Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu | 5 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan |
| | | 2 Peningkatan rasa aman dan nyaman | 14 Penegakan ketertiban umum | |
| | | | 15 Pengurangan Resiko Bencana | |
| Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi | | | | |
| Terwujudnya reformasi birokrasi | 1. Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN | Peningkatan Kinerja Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | 16 Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | 6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintahan |
| | 2. Meningkatnya kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik | Peningkatan profesionalitas ASN | 17 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | |
| | | Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pelayanan publik | | |
| | | Peningkatan sistim informasi pelayanan publik | | |
| | 3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kinerja instansi pemerintah | 18 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | |

Gambar 6.1. Tema Pembangunan RPJMD 2018-2023



Untuk menerangkan distribusi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2019–2023 sebagai fokus intervensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.2.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 – 2023

| TEMA PEMBANGUNAN | | | | |
|---|--|---|--|---|
| TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
| Peletakan Dasar SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Infrastruktur Dasar | Pembangunan dan Pemantapan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata | Pendayagunaan dan Penguatan SDM yang Unggul, Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata | Pendayagunaan dan Pemantapan SDM yang Unggul, Kesehatan terjamin, Kemiskinan dan Pengangguran turun, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata | Pendayagunaan dan Pengoptimalan SDM yang Unggul, Kesehatan terjamin, Kemiskinan dan Pengangguran turun, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan Infrastruktur yang Merata |
| ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | | | | |
| 1. Pemantapan penerapan SPM pendidikan | Pemantapan penerapan SPM pendidikan | Pemantapan penerapan SPM pendidikan | Pemantapan penerapan SPM pendidikan | Pemantapan penerapan SPM pendidikan |
| 2. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka | Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka | Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka | Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka | Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka |
| 3. Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal |
| 4. Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita | Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita |
| 5. Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan | Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan | Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan | Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan | Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan |
| 6. Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu | Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu | Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu | Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu | Percepatan Pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu |
| 7. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) |
| 8. Pengembangan investasi swasta | Pengembangan investasi swasta | Pengembangan investasi swasta | Pengembangan investasi swasta | Pengembangan investasi swasta |

| ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | | | | |
|--|--|--|--|--|
| TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
| 9. Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat | Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat | Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat | Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat | Peningkatan kesempatan kerja dan lapangan usaha berbasis ekonomi rakyat |
| 10. Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar | Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar | Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar | Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar | Pengembangan dan penataan kawasan pertumbuhan baru, Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar |
| 11. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif | Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif | Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif | Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif | Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif |
| 12. Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata | Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata | Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata | Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata | Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata |
| 13. Pengendalian laju inflasi | Pengendalian laju inflasi | Pengendalian laju inflasi | Pengendalian laju inflasi | Pengendalian laju inflasi |
| 14. Penegakan ketertiban umum | Penegakan ketertiban umum | Penegakan ketertiban umum | Penegakan ketertiban umum | Penegakan ketertiban umum |
| 15. Pengurangan Resiko Bencana | Pengurangan Resiko Bencana | Pengurangan Resiko Bencana | Pengurangan Resiko Bencana | Pengurangan Resiko Bencana |
| 16. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |
| 17. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja | Peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja |
| 18. Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah | Peningkatan maturitas Sistim Pengendalian Internal Pemerintah |
| 19. Peningkatan kapasitas pendanaan | | | | |

TABEL 6.3.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

| KODE | | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | Rp |
| | | Misi I : Peningkatan kualitas hidup masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 63.80 | 67.40 | | 68.60 | | 69.80 | | 72.00 | | 73.20 | | 73.20 | | |
| | | | Indeks Kebahagiaan (IK) | < 68,52 | 68.52 | | 69.02 | | 69.52 | | 70.02 | | 70.52 | | 70.52 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sasaran I : Meningkatnya pendidikan masyarakat | Indeks Pendidikan | 9.45 | 10.58 | | 11.00 | | 11.20 | | 11.80 | | 12.00 | | 12.00 | | |
| | | Program : Peningkatan Kualitas Pendidikan | | | | 99,893,404,430 | | 106,885,942,740 | | 116,505,677,587 | | 125,826,131,794 | | 135,892,222,337 | 0 | 585,003,378,888 | |
| | | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 6.56 | 6.74 | | 6.91 | | 7.08 | | 7.25 | | 7.42 | | 7.42 | | |
| | | | Angka Harapan Sekolah | 12.34 | 13.92 | | 15.07 | | 16.22 | | 17.37 | | 18.51 | | 18.51 | | |
| | | | APK PAUD | 55.483 | 57.53 | | 59.58 | | 61.64 | | 63.69 | | 65.74 | | 65.74 | | |
| | | | APM SD/MI | 97.70 | 98.10 | | 98.30 | | 98.50 | | 98.70 | | 98.90 | | 98.90 | | |
| | | | APK SD/MI | 107.77 | 108.53 | | 109.29 | | 110.05 | | 110.81 | | 111.57 | | 111.57 | | |
| | | | APM SMP/MTs | 78.75 | 80.52 | | 81.11 | | 81.70 | | 82.29 | | 82.88 | | 82.88 | | |
| | | | APK SMP/MTs | 96.22 | 96.31 | | 96.56 | | 97.81 | | 98.06 | | 98.31 | | 98.31 | | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0.65 | 0.60 | | 0.55 | | 0.50 | | 0.45 | | 0.40 | | 0.40 | | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0.27 | 0.23 | | 0.19 | | 0.15 | | 0.11 | | 0.07 | | 0.07 | | |
| | | | Angka kelayakan mengajar guru | 78.70 | 80.50 | | 82.30 | | 84.10 | | 86.90 | | 88.70 | | 88.70 | | |
| | | | Angka kelayakan mengajar SMP/MTs | 85.846 | 87.66 | | 89.47 | | 91.28 | | 93.09 | | 94.90 | | 94.90 | | |
| | | | Jumlah guru yang memiliki sertifikat | 1.242 | 1.342 | | 1.442 | | 1.542 | | 1.642 | | 1.742 | | 1.742 | | |
| | | | Rasio guru siswa SD/MI | 1:25 | 1:20 | | 1:20 | | 1:20 | | 1:20 | | 1:20 | | 1:20 | | |
| | | | Rasio guru Siswa SMP/MTs | 1:28 | 1:28 | | 1:28 | | 1:28 | | 1:28 | | 1:28 | | 1:28 | | |
| | | | Indeks Literasi Membaca | 7.78 | 8.04 | | 8.51 | | 9.14 | | 9.77 | | 10.40 | | 10.40 | | |
| | | | Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan | 58.19 | 59.65 | | 62.57 | | 65.50 | | 68.42 | | 71.35 | | 71.35 | | |
| | | | Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan | 51.72 | 56.32 | | 62.07 | | 67.82 | | 73.56 | | 78.16 | | 78.16 | | |
| | | | Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan baik | 77.89 | 81.41 | | 84.92 | | 88.44 | | 91.96 | | 95.48 | | 95.48 | | |
| | | | Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan baik | 66.67 | 80 | | 93.33 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium | 70.11 | 79.31 | | 83.91 | | 88.51 | | 93.10 | | 98.85 | | 98.85 | | |
| | | | Persentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium yang baik | 81.52 | 83.12 | | 88.31 | | 93.51 | | 98.70 | | 100 | | 100 | | |
| | | | Persentase Kelulusan SD/MI | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | Persentase Kelulusan SMP/MTs | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | Angka Kelulusan SD/MI | 98.24 | 98.49 | | 98.74 | | 98.99 | | 99.24 | | 99.49 | | 100 | | |
| | | | Angka Kelulusan SMP/MTs | 99.09 | 99.19 | | 99.29 | | 99.39 | | 99.49 | | 99.59 | | 100 | | |
| | | | Jumlah siswa berprestasi di bidang sains tingkat Regional dan Nasional | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sasaran II : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 66.3 | 66.69 | | 66.86 | | 67.04 | | 67.21 | | 67.38 | | 67.38 | | |
| | | Program : Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan | | | | 121,169,213,138 | | 129,611,376,786 | | 141,217,650,370 | | 152,464,107,790 | | 164,609,007,937 | | 709,071,356,022 | |
| | | | Jumlah Kematian Ibu | 10 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| KODE | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|---------------------|----|---------------------|
| | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Cakupan Ibu hamil resti yang ditangani | 38.12 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Ibu Hami K1 | 71.63 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Ibu Hami K4 | 51.54 | 70 | | 73 | | 76 | | 79 | | 85 | | 85 | | |
| | | Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes memadai | 67.98 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Kunjungan Nifas Lengkap (K3) | 67.68 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana dan Prasarana standar PONED | 13 | 17 | | 20 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang memiliki Tim PONED | 2 | 11 | | 20 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| | | Angka Kematian Bayi | 15 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Angka Kematian Neonatal | 10.2 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Cakupan Bayi dengan resiko tinggi yang ditangani | 31.71 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan kunjungan noenatal lengkap (KN3) | 69.41 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi standar | 67.7 | 70 | | 73 | | 76 | | 79 | | 85 | | 85 | | |
| | | Rata-rata Kepuasan Pelanggan | 80% | 81% | | 83% | | 85% | | 87% | | 90% | | 90% | | |
| | | Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih penanganan bayi sesuai standar | 2 | 11 | | 20 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana dan Prasarana penangnan bayi standar | 13 | 17 | | 20 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | |
| | | Prevelensi Stanting | 30.4 | 29 | | 28 | | 27 | | 26 | | 25 | | 25 | | |
| | | Prevelensi Wasting | 0.7 | 0.6 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.3 | | 0.2 | | 0.2 | | |
| | | Prevelensi Underwasting | 7.3 | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | |
| | | Cakupan Pemberian vitamin A | 91.5 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Pemberian ASI Eksklusif | 84.7 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan PMTA pada Balita | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan balita sakit yang MTBS/MTBM | 3.8 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan Kunjungan Rawat Jalan | 33 | 32 | | 31 | | 30 | | 29 | | 28 | | 28 | | |
| | | Cakupan Kunjungan Rawat Nginap | 2.0 | 1.50 | | 1.45 | | 1.40 | | 1.35 | | 1.30 | | 1.30 | | |
| | | Cakupan kunjungan rawat jalan penderita menular | 33 | 32 | | 31 | | 30 | | 29 | | 28 | | 28 | | |
| | | Cakupan kunjungan rawat jalan penderita tidak menular | 33 | 32 | | 31 | | 30 | | 29 | | 28 | | 28 | | |

| KODE | | | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|--|---|--------------------|--|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | 2.72 | 2.62 | | 2.56 | | 2.50 | | 2.45 | | 2.41 | | 2.41 | | |
| | | | | Angka Kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | 45.70 | 43.10 | | 40.50 | | 37.90 | | 35.30 | | 32.70 | | 32.70 | | |
| | | | | Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | 37.77 | 44.92 | | 47.14 | | 48.95 | | 50.43 | | 51.47 | | 51.47 | | |
| | | | | Presentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | 18.52 | 44.44 | | 47.54 | | 50.64 | | 53.74 | | 56.84 | | 60.02 | | |
| | | | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 89.52 | 89.79 | | 90.01 | | 90.32 | | 90.59 | | 90.87 | | 90.87 | | |
| | | | | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 57.69 | 57.98 | | 58.27 | | 58.56 | | 58.85 | | 59.15 | | 59.15 | | |
| | | | | Kabupaten Layak Anak (KLA) | Pratama | Pratama | | Pratama | | Pratama | | Pratama | | Pratama | | Pratama | | |
| | | | | Skor PPH Ketersediaan | 76.7 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Indeks Akses Pangan | 0.36 | 0.27 | | 0.27 | | 0.25 | | 0.24 | | 0.23 | | 0.23 | | |
| | | | | Skor PPH Konsumsi | 74 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 60.29 | 60.67 | | 61.07 | | 61.47 | | 61.87 | | 62.93 | | 62.93 | | |
| | | | | Indeks kualitas air | 41.48% | 42.00 | | 42.50 | | 43.00 | | 43.50 | | 46.00 | | 46.00 | | |
| | | | | Indeks kualitas udara | 82.70 | 83.00 | | 83.50 | | 84.00 | | 84.50 | | 85.00 | | 85.00 | | |
| | | | | Indeks kualitas tutupan lahan | 56.70 | 57.00 | | 57.20 | | 57.40 | | 57.60 | | 57.80 | | 57.80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sasaran III : Terbangunnya perekonomian yang kokoh, maju | Kontribusi sektor pertanian dan PDRB | 35.36 | 35.36 | | 37.36 | | 39.36 | | 41.36 | | 43.36 | | 43.36 | | |
| | | | Program : Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah | | | 105,924,185,331 | | 113,277,318,212 | | 123,381,133,716 | | 133,172,575,270 | | 143,745,355,920 | | 619,500,568,449 | | |
| | | | | Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB | 5.07 | 6.00 | | 7.00 | | 9.00 | | 11.00 | | 13.00 | | 13.00 | | |
| | | | | Nilai Tukar Petani | 107.02 | 108.52 | | 110.02 | | 111.52 | | 113.02 | | 114.52 | | 114.52 | | |
| | | | | Nilai Tukar Peternak | 108.36 | 109.26 | | 110.16 | | 111.06 | | 111.96 | | 112.86 | | 112.86 | | |
| | | | | Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) | 10.57 | 10.65 | | 10.85 | | 11.25 | | 11.5 | | 12.00 | | 12.00 | | |
| | | | | Pertumbuhan Sektor perikanan dalam PDRB | 0.76 | 0.76 | | 1.88 | | 2.22 | | 3.69 | | 4.35 | | 4.35 | | |
| | | | | Data Produksi Perikanan (ton/tahun) | 18,212.44 | 19,123.56 | | 20,079.22 | | 21,083.18 | | 22,137.33 | | 23,244.20 | | 23,244.20 | | |
| | | | | Data nilai produksi perikanan (Rp) | 318,235,680 | 334,147,464 | | 350,854,837 | | 368,975,790 | | 386,817,458 | | 406,158,330 | | 406,158,330 | | |
| | | | | Nilai tukar nelayan | 12,517,000 | 12,850,000 | | 13,450,000 | | 14,750,000 | | 15,500,000 | | 16,250,000 | | | | |
| | | | | Tingkat konsumsi ikan perkapita | 51.27 | 52.50 | | 53.45 | | 54.75 | | 55.25 | | 56.25 | | | | |
| | | | | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 10.24 | 10.97 | | 13.78 | | 16.59 | | 19.40 | | 22.21 | | 22.21 | | |
| | | | | Jumlah barang masuk | 196,041 ton | 199,961 ton | | 201,801 ton | | 203,641 ton | | 205,192 ton | | 207,202 ton | | 207,202 ton | | |
| | | | | Jumlah barang keluar | 86,193 ton | 87,721 ton | | 88,614 ton | | 89,721 ton | | 92,812 ton | | 94,632 ton | | 94,632 ton | | |
| | | | | Jumlah pasar tradisional/rakyat | 39 unit | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 10 unit | | |
| | | | | Jumlah pasar modern | 20 unit | 0 | | 1 unit | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | |

| KODE | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | 1.71% | 1.72% | | 1.73% | | 1.74% | | 1.75% | | 1.76% | | 1.76% | | |
| | | Persentase pertumbuhan industri | 5.81% | 7.81% | | 9.81% | | 11.81% | | 13.81% | | 15.81% | | 15.81% | | |
| | | Persentase produktifias sektor industri | 2.41% | 2.66% | | 2.91% | | 3.16% | | 3.41% | | 3.66% | | 3.66% | | |
| | | Persentase jumlah UKM aktif | 3.68% | 3.72% | | 3.76% | | 3.81% | | 3.85% | | 3.91% | | 3.91% | | |
| | | Persentase Wirausaha terlatih | 7.69% | 15.38% | | 16.92% | | 18.46% | | 20.00% | | 21.54% | | 21.54% | | |
| | | Jumlah Pelaku Usaha | 5,049 | 5,099 | | 5,154 | | 5,214 | | 5,279 | | 5,349 | | 5,349 | | |
| | | Persentase koperasi sehat | 9.09% | 12.10% | | 15.50% | | 18.10% | | 21.20% | | 24.20% | | 24.20% | | |
| | | Jumlah koperasi aktif | 122 | 130 | | 138 | | 146 | | 154 | | 162 | | 162 | | |
| | | Rata-rata Indeks Desa Membangun | 0.549 | 0.579 | | 0.609 | | 0.639 | | 0.669 | | 0.699 | | 0.699 | | |
| | | Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 0.72 | 0.73 | | 0.75 | | 0.76 | | 0.77 | | 0.79 | | 0.79 | | |
| | | Jumlah kunjungan wisatawan | 50,212 | 51,718 | | 56,180 | | 61,076 | | 66,449 | | 72,349 | | 72,349 | | |
| | | Rata-rata lama tinggal wisatawan | 2,21 hari | 2,21 hari | | 2,27 hari | | 2,33 hari | | 2,38 hari | | 2,51 hari | | 2,51 hari | | |
| | | Nilai Realisasi Invenstasi PMA (USA) | 13,121,879 | 13,384,317 | | 13,652,003 | | 13,925,043 | | 14,203,544 | | 14,487,615 | | 14,487,615 | | DPMPTSP |
| | | Nilai Realisasi Invenstasi PMDN | 829,399,041,425 | 870,868,993,496 | | 914,412,443,171 | | 960,133,065,330 | | 1,008,139,718,596 | | 1,058,546,704,526 | | 1,058,546,704,526 | | DPMPTSP |
| | | Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten | 1 kali | 1 kali | | 2 kali | | 3 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 14 kali | | DPMPTSP |
| | | Jumlah Investor berskala Nasional (PMA) | 14 invenstor | 15 invenstor | | 16 invenstor | | 17 invenstor | | 18 invenstor | | 19 invenstor | | 19 invenstor | | DPMPTSP |
| | | Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN) | 37 invenstor | 39 invenstor | | 41 invenstor | | 43 invenstor | | 45 invenstor | | 47 invenstor | | 47 invenstor | | DPMPTSP |
| | | Indeks Kualitas layanan insfratraktur pekerjaan umum | 0 | 1,25 | | 1,50 | | 1,75 | | 2,25 | | 3,0 | | 3,0 | | |
| | | Indeks konektivitas jalan | 6.19 | 6.25 | | 6.33 | | 6.39 | | 6.45 | | 6.52 | | 6.52 | | |
| | | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota | 72.00% | 73.00% | | 75.00% | | 78.00% | | 79.00% | | 80.00% | | 80.00% | | |
| | | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 46.88% | 46.69% | | 46.54% | | 46.39% | | 46.23% | | 46.09% | | 46.09% | | |
| | | Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 6.93% | 9.24% | | 10.39% | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Irigasi dalam kondisi baik | 45.86% | 48.02% | | 50.72% | | 52.33% | | 54.49% | | 56.64% | | 56.64% | | |
| | | Rasio jaringan irigasi | 27.56% | 27.94% | | 28.33% | | 28.71% | | 29.09% | | 29.48% | | 29.48% | | |
| | | Persentase penduduk berakses air minum | 36.36% | 37.43% | | 42.13% | | 46.79% | | 51.40% | | 55.96% | | 55.96% | | |
| | | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU | 62.00% | 65.00% | | 68.00% | | 71.00% | | 74.00% | | 77.00% | | 77.00% | | Dinas Perumahan |
| | | Persentase pemukiman yang tertata | 62.00% | 65.00% | | 68.00% | | 71.00% | | 74.00% | | 77.00% | | 77.00% | | Dinas Perumahan |
| | | Data kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB (%) | 6.53% | 6.83% | | 7.13% | | 7.42% | | 7.73% | | 8.03% | | 8.03% | | Dinas Perhubungan |
| | | Indeks kualitas layanan transportasi | 46 | 48 | | 54 | | 69 | | 73 | | 76 | | 76 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program : Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran dan Pemberdayaan Masvarakat | | | 7,337,433,850 | | 7,831,413,970 | | 7,831,413,970 | | 9,177,805,560 | | 9,893,159,650 | | 42,071,226,999 | |
| | | Rasio PMKS per Jumlah Penduduk | 48.19 | 47.38 | | 47.13 | | 46.88 | | 46.63 | | 46.38 | | 46.38 | | |

| KODE | | | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|---|--|----------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | | | Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 22.00 | 23.00 | | 23.50 | | 24.00 | | 24.50 | | 25.00 | | 25.00 | | |
| | | | | Rata-rata Indeks ketahanan sosial | 0.604 | 0.634 | | 0.664 | | 0.694 | | 0.724 | | 0.754 | | 0.754 | | |
| | | | | Rata-rata Indeks ketahanan ekonomi (IKE) | 0.427 | 0.467 | | 0.507 | | 0.547 | | 0.587 | | 0.627 | | 0.627 | | |
| | | | | Rata-rata Indeks ketahanan lingkungan (IKL) | 0.606 | 0.629 | | 0.649 | | 0.669 | | 0.689 | | 0.709 | | 0.709 | | |
| | | | | Indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) | 54.10 | 55.00 | | 57.00 | | 61.00 | | 64.00 | | 68.00 | | 68.00 | | |
| | | | | Kesempatan kerja | 450 | 500 | | 550 | | 600 | | 650 | | 700 | | 3,000 | | |
| | | | | Hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja | 30 | 30 | | 32 | | 34 | | 36 | | 38 | | 170 | | |
| | | | | Jaminan sosial tenaga kerja dan kesesuaian upah kerja | 400 | 400 | | 450 | | 500 | | 550 | | 600 | | 2,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | 3,999,887,540 | | 4,279,879,668 | | 4,665,068,838 | | 4,665,068,838 | | 5,441,336,293 | | 23,051,241,176 | |
| | | | | Angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum | 89 kasus | 80 kasus | | 65 kasus | | 45 kasus | | 35 kasus | | 20 kasus | | 20 kasus | | |
| | | | | Angka kepatuhan terhadap produk hukum daerah | 83% | 85% | | 87% | | 89% | | 91% | | 93% | | 93% | | |
| | | | | Indeks Resiko Kebakaran | 7 | 7 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3.50 | | 3.50 | | |
| | | | | Indeks Risiko Bencana | 201 | 180.9 | | 160.8 | | 140.7 | | 120.6 | | 100.5 | | 100.5 | | |
| | | | | Persentase peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana (Indeks Kapasitas Daerah) | 0.52 | 0.55 | | 0.58 | | 0.6 | | 0.63 | | 0.65 | | 0.65 | | |
| | | | | Jumlah Desa/Kelurahan tangguh terbentuk | 4 | 19 | | 34 | | 15 | | 15 | | 15 | | 98 | | |
| | | | | Persentase pemulihan dampak bencana | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bencana | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Misi II : Mewujudkan Reformasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | C | C | | CC | | CC | | B | | B | | B | |
| | | | | Sasaran I : Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN | Opini BPK | WTP | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | | WTP | |
| | | | | Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan | | | 45,410,993,917 | | 48,266,801,157 | | 51,604,992,361 | | 54,941,307,790 | | 58,504,924,256 | | 258,729,019,480 | |
| | | | | Jumlah Temuan BPK dan APIP | 9,6miliard | 9miliard | | 8miliard | | 7miliard | | 6miliard | | 5miliard | | 5miliard | | |
| | | | | Tingkat Maturitas SPIP | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | | | | Persentase Tindak lanjut temuan | 17% | 50% | | 55% | | 60% | | 65% | | 70% | | 70% | | |

| KODE | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran II : Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik | Indeks Kualitas pelayanan publik | 1.39 | 2.89 | | 3.07 | | 3.20 | | 3.33 | | 3.65 | | 3.65 | | |
| | Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan | | | | 45,410,993,917 | | 48,266,801,157 | | 51,604,992,361 | | 54,941,307,790 | | 58,504,924,256 | | 258,729,019,480 | |
| | | Indeks profesionalitas ASN | 58.65 | 61.34 | | 63.26 | | 64.95 | | 66.42 | | 67.85 | | 67.85 | | |
| | | Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan | 0.33 | 0.47 | | 0.64 | | 0.78 | | 0.94 | | 1.08 | | 1.08 | | |
| | | Persentase kebijakan yang telah ditetapkan | 85.92% | 90.20% | | 94.20% | | 97.20% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sekretariat Daerah |
| | | Persentase kebijakan yang telah dilaksanakan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Sekretariat Daerah |
| | | Cakupan Layanan Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik dan Pemutakhiran Data | 97.94% | 98.44% | | 99.04% | | 99.34% | | 99.84% | | 100% | | 100% | | Sekretariat Daerah |
| | | Jumlah Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan | - | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | Sekretariat Daerah |
| | Sasaran III : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas | SAKIP | CC | B | | BB | | BB | | A | | A | | A | | |
| | Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan | | | | 45,410,993,917 | | 48,266,801,157 | | 51,604,992,361 | | 54,941,307,790 | | 58,504,924,256 | | 258,729,019,480 | |
| | | Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 95.30 | 97.30 | | 98.80 | | 99.80 | | 99.85 | | 100 | | 100 | | Bapelitbang |
| | | Prosentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 91.68 | 93.18 | | 95.18 | | 97.68 | | 99.68 | | 100 | | 100 | | |
| | | Prosentase hasil kelitbangan sebagai masukan penyusunan kebijakan | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Nilai Perencanaan Kinerja | 18.95 | 20 | | 22.8 | | 23.68 | | 26.5 | | 28 | | 28 | | |
| | | Nilai Pengukuran Kinerja | 12.81 | 12.81 | | 16.75 | | 16.8 | | 17.38 | | 24 | | 24 | | |
| | | Nilai Evaluasi Kinerja | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 10 | | |
| | | Nilai Pelaporan Kinerja | 9.47 | 9.96 | | 10.51 | | 12.46 | | 13 | | 15 | | 15 | | |
| | | Jumlah temuan Kerugian PD atas Pemeriksaan BPK | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Jumlah temuan Kerugian PD atas Pemeriksaan APIP | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Nilai komposit kecukupan pengungkapan laporan keuangan | 360 | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | |
| | | Persentase Jumlah temuan yang belum diungkap per jumlah obyek | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | Rasio Kemandirian keuangan daerah | 1.52% | 1.13% | | 1.13% | | 1.13% | | 1.13% | | 1.13% | | 1.13% | | |
| | | Derajat kemandirian keuangan daerah. | 7.71 | 9.57 | | 9.71 | | 9.72 | | 9.76 | | 9.83 | | 9.83 | | |
| | | Efektivitas PAD | 89.10 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Indeks e-government (SPBE) | 0.97 | 0.97 | | 1.3 | | 1.6 | | 1.8 | | 2 | | 2 | | |
| | | Persentase cakupan sistem data yang terintegrasi | 0 | 0 | | 25 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan aplikasi | 9.50 | 19.8 | | 38.1 | | 59.5 | | 85.7 | | 100 | | 100 | | |
| | | Kepemilikan KTP -el | | 75 | | 75 | | 80 | | 80 | | 95 | | 95 | | |

| KODE | Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan | Indikator Kinerja (Tujuan/Impac/Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--|--|
| | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | | Kepemilikan Akta-akta | | 75 | | 75 | | 80 | | 80 | | 95 | | 95 | | |
| | | | 75 | Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi | 75.50 | | 76.00 | | 76.50 | | 77.00 | | 78.00 | | 78.00 | | | |
| | | | 39% | Persentase jumlah pegawai yang dikenakan sanksi | 20% | | 10% | | 8% | | 7% | | 6% | | 5% | | | |
| | | | 100 | Rata-rata pengeluaran ASN | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | 47.00% | Indeks Pemahaman terhadap 4 Konsensus Bangsa | 50.00% | | 53.00% | | 57.00% | | 59.00% | | 62.00% | | 62.00% | | | |
| | | | 47.00% | Pemahaman terhadap 6 dimensi Wawasan Kebangsaan | 50.00% | | 53.00% | | 57.00% | | 59.00% | | 62.00% | | 62.00% | | | |
| | | | 82.00% | Persentase partisipasi politik masyarakat | 82.00% | | - | | - | | - | | 86.00% | | 86.00% | | | |
| | | | 4.00 | Indeks kinerja DPRD | 4.00 | | 4.20 | | 4.40 | | 4.60 | | 4.80 | | 4.80 | | | |
| | | | 4.00 | Presentase capaian Propemperda | 4.00 | | 4.20 | | 4.40 | | 4.60 | | 4.80 | | 4.80 | | | |
| | | | 4.00 | Presentase jumlah hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti | 4.00 | | 4.20 | | 4.40 | | 4.60 | | 4.80 | | 4.80 | | | |
| | | | 4.00 | Evektifitas dalam pembahasan dan penetapan Anggaran | 4.00 | | 4.20 | | 4.40 | | 4.60 | | 4.80 | | 4.80 | | | |

[illegible]





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Redacted]

[Redacted]



BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan kerangka pendanaan, program prioritas dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja program, target kinerja, pagu indikatif dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

| Uraian | Prediksi Kerangka Pendanaan | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pendapatan | 1,253,921,393,101 | 1,327,331,849,967 | 1,422,187,249,899 | 1,517,768,205,256 | 1,614,100,315,565 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - | - |
| SiLPA | 8,612,957,241 | 7,612,957,241 | 6,312,957,241 | 5,212,957,241 | 3,212,957,241 |
| | | | | | |
| Total Penerimaan | 1,262,534,350,342 | 1,334,944,807,208 | 1,428,500,207,140 | 1,522,981,162,497 | 1,617,313,272,806 |
| Dikurangi | | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| | | | | | |
| Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat | 500,000,000,000 | 512,500,000,000 | 525,312,500,000 | 538,445,312,500 | 551,906,445,313 |
| Total Pengeluaran | 520,000,000,000 | 532,500,000,000 | 545,312,500,000 | 558,445,312,500 | 571,906,445,313 |
| | | | | | |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | 742,534,350,342 | 802,444,807,208 | 883,187,707,140 | 964,535,849,997 | 1,045,406,827,493 |

TABEL 7.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|--|--|--------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| | | | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | DPKO | | |
| 01 | 01 | 15 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki PAUD | 93% | 95% | 6,625,308,200 | 100% | 6,790,940,905 | 100% | 6,960,714,428 | 100% | 7,134,732,288 | 100% | 7,313,100,596 | 100% | 34,824,796,416 | |
| 01 | 01 | 16 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase standart kompetensi kelulusan siswa pada jenjang SD/MI | 26 | 5 | 69,167,297,250 | 6 | 70,896,479,681 | 7 | 72,668,891,673 | 8 | 74,485,613,965 | 9 | 76,347,754,314 | 35 | 363,566,036,884 | |
| 01 | 01 | 18 | Program Pendidikan Non Formal | Angka Putus Sekolah SD/MI | 258 | 225 | 1,055,500,000 | 180 | 1,081,887,500 | 125 | 1,108,934,688 | 75 | 1,136,658,055 | 0 | 1,165,074,506 | 0 | 5,548,054,748 | |
| 01 | 01 | 22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase pelaksanaan rekomendasi pembangunan pendidikan | 0 | 100 | - | 100 | 250,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 150,000,000 | 100 | 700,000,000 | |
| 01 | 01 | 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Angka Kelayakan Mengajar Guru SD/MI | 834 | 100 | 1,456,553,520 | 100 | 1,492,967,358 | 100 | 1,530,291,542 | 100 | 1,568,548,830 | 100 | 1,607,762,551 | 100 | 7,656,123,802 | |
| 01 | 18 | 15 | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Persentase Pelayanan Pengembangan Keserasian Pemuda | - | 100 | - | 100 | 35,000,000 | 100 | 35,875,000 | 100 | 36,771,875 | 100 | 37,691,172 | 100 | 145,338,047 | |
| 01 | 18 | 16 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Persentase pelayanan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | - | 100 | 438,999,000 | 100 | 449,973,975 | 100 | 461,223,324 | 100 | 472,753,907 | 100 | 484,572,755 | 100 | 2,307,522,962 | |
| 01 | 18 | 17 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Persentase pelayanan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | - | 100 | - | 100 | 70,000,000 | 100 | 71,750,000 | 100 | 73,543,750 | 100 | 75,382,344 | 100 | 290,676,094 | |
| 01 | 18 | 19 | Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga | Persentase pelayanan pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga | - | - | - | 28.57 | 25,000,000 | 57.14 | 30,000,000 | 85.71 | 30,750,000 | 100 | 31,518,750 | 100 | 117,268,750 | |
| 01 | 18 | 20 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Persentase pelayanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | - | 100 | 652,075,500 | 100 | 668,377,388 | 100 | 685,086,822 | 100 | 702,213,993 | 100 | 719,769,343 | 100 | 3,427,523,045 | |
| 01 | 18 | 21 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Persentase Layanan sarana dan prasarana olahraga | - | - | - | - | - | 100 | 45,000,000,000 | - | - | - | - | - | 45,000,000,000 | |
| 01 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas PKO | 100% | | 667,763,120 | | 684,457,198 | | 701,568,628 | | 719,107,844 | | 737,085,540 | | 3,509,982,329 | |
| 01 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | 100 | 152,800,000 | 100 | 1,219,300,000 | 100 | 258,300,000 | 100 | 3,144,800,000 | 100 | 151,300,000 | 100 | 4,926,500,000 | |
| 01 | 01 | 03 | Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | - | - | 15,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000,000 | |
| 01 | 01 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 100 | 701,000,000 | 100 | 718,525,000 | 100 | 736,488,125 | 100 | 754,900,328 | 100 | 773,772,836 | 100 | 3,684,686,289 | |
| 01 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun | 8 Dokumen | 100 | 20,000,000 | 8 Dokumen | 20,500,000 | 8 Dokumen | 21,012,500 | 8 Dokumen | 21,537,813 | 8 Dokumen | 22,076,258 | 8 Dokumen | 105,126,570 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | Dinkes | |
| 01 | 02 | 15 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase sekolah tidak ditemukan jajanan mengandung bahan berbahaya | | | 4,525,000,000 | | 4,195,580,000 | | 3,798,258,574 | | 4,525,000,000 | | 4,525,000,000 | | 21,568,838,574 | |
| 01 | 02 | 16 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas | NA | | 27,729,043,000 | | 28,422,269,075 | | 29,132,825,802 | | 29,861,146,447 | | 30,607,675,108 | | 145,752,959,432 | |
| 01 | 02 | 17 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Cakupan ketersediaan obat sesuai kebutuhan, baik obat esensial maupun obat generik | % | | 100,000,000 | | 102,500,000 | | 105,062,500 | | 107,689,063 | | 110,381,289 | | 525,632,852 | |
| 01 | 02 | 19 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Cakupan Promosi Kesehatan melalui Posyandu aktif | 0.63% | 0 | 348,100,000 | 0 | 356,802,500 | 0 | 365,722,563 | 0 | 374,865,627 | 0 | 384,237,267 | 0 | 1,829,727,956 | |
| 01 | 02 | 20 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Prevelensi balita gizi buruk | | | 182,625,000 | 0 | 187,190,625 | 0 | 191,870,391 | 0 | 191,825,000 | 0 | 196,620,625 | 0 | 950,131,641 | |
| 01 | 02 | 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase desa yang belum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 43.54% | 0 | 97,420,000 | 0 | 90,327,824 | 0 | 81,773,779 | 0 | 169,210,000 | 0 | 137,210,000 | 0 | 575,941,603 | |
| 01 | 02 | 22 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Angka kejadian kasus penyakit menular (angka kesakitan per 1.000 penduduk) | per 1.000 penduduk | | 852,112,000 | | 790,078,246 | | 715,257,836 | | 1,582,056,000 | | 1,479,093,500 | 0 | 5,418,597,583 | |
| 01 | 02 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Kesehatan yang sesuai standar | % | | 2,788,830,000 | | 2,585,803,176 | | 2,340,927,615 | | 3,147,247,107 | | 2,750,901,825 | 0 | 13,613,709,723 | |
| 01 | 02 | 25 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | Persentase bangunan Puskesmas sesuai standar | % | | 24,992,000,000 | | 23,172,582,400 | | 20,978,138,847 | | 19,236,953,322 | | 29,644,000,000 | | 118,023,674,569 | |
| 01 | 02 | 26 | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Persentase bangunan Rumah Sakit yang memenuhi standar | % | | | 1 unit | | | | | | | | | - | |
| 01 | 02 | 28 | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan | | | 28,566,146,349 | | 26,486,530,895 | | 23,978,256,419 | | 21,988,061,136 | | 37,222,146,349 | 0 | 138,241,141,148 | |
| 01 | 02 | 29 | Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita | Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | | | 480,000,000 | | 445,056,000 | | 402,909,197 | | 375,000,000 | | 375,000,000 | 0 | 2,077,965,197 | |
| 01 | 02 | 30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan | | | 20,850,000 | | 19,332,120 | | 17,501,368 | | 20,850,000 | | 45,850,000 | 0 | 124,383,488 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|----|----|--|--|--------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 01 | 02 | 32 | Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan K4) | % | | 3,421,350,000 | | 3,172,275,720 | | 2,871,861,209 | | 2,633,496,729 | | 3,638,550,000 | 0 | 15,737,533,658 |
| 01 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan | % | | 1,140,040,000 | | 1,057,045,088 | | 1,230,040,000 | | 1,240,040,000 | | 1,260,040,000 | | 5,927,205,088 |
| 01 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 362,500,000 | | 336,110,000 | | 304,280,383 | | 963,500,000 | | 446,500,000 | | 2,412,890,383 |
| 01 | 02 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 1,503,750,000 | | 1,394,277,000 | | 1,262,238,968 | | 1,436,694,400 | | 1,455,694,400 | | 7,052,654,768 |
| 01 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 16,787,883 | 5 Dok | 17,207,580 | 5 Dok | 17,637,770 | 5 Dok | 90,177,233 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 01 | 02 | 26 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit | Persentase sarana dan prasarana rumah sakit | | 100% | 50,966,917,000 | 100% | 69,634,885,932 | 100% | 72,527,401,068 | 100% | 16,988,143,895 | 100% | 47,611,588,813 | 100% | 257,728,936,708 |
| 01 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 75% | 100% | 1,136,000,000 | 100% | 1,476,800,000 | 100% | 1,868,720,000 | 100% | 2,319,428,000 | 100% | 2,837,742,200 | 100% | 9,638,690,200 |
| 01 | 02 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | 100% | 500,000,000 | | | | | 100% | 750,000,000 | 100% | 1,250,000,000 |
| 01 | 02 | 33 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rumah Sakit | Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis rumah sakit | 100% | 100% | 5,130,040,320 | 100% | 5,643,044,352 | 100% | 6,207,348,787 | 100% | 6,828,083,666 | 100% | 7,510,892,033 | 100% | 31,319,409,158 |
| 01 | 02 | 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Cakupan pengembangan lingkungan sehat | | - | - | 100% | 2,000,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100% | 2,000,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | - PUTR |
| 03 | 01 | 15 | Program Pembangunan jalan dan jembatan | Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik | 0.62 | 0.65 | 47,977,656,900 | 0.68 | 71,586,585,050 | 0.71 | 83,770,154,525 | 0.74 | 91,298,417,531 | 0.77 | 77,729,123,309 | 0.77 | 372,361,937,315 |
| 03 | 01 | 16 | Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Persentase drainase dalam kondisi baik | 23.52% | 28.64% | 2,889,580,450 | 28.82% | 15,545,000,000 | 27.14% | 16,312,250,000 | 24.98% | 17,117,862,500 | 22.83% | 13,924,970,780 | 22.83% | 65,789,663,730 |
| 03 | 01 | 17 | Program pembangunan turap/talud/bronjong | Persentase turap/talud/bronjong yang dibangun dalam kondisi baik | 34.33% | 27.96% | 4,702,928,100 | 23.40% | 1,184,000,000 | 20.38% | 1,184,000,000 | 18.11% | 1,243,200,000 | 16.35% | 1,305,360,000 | 16.35% | 9,619,488,100 |
| 03 | 01 | 18 | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Persentase jalan yang direhabilitasi | 16.06% | 1.18% | 6,275,781,000 | 1.18% | 16,770,399,700 | 1.18% | 32,137,526,762 | 1.18% | 34,036,220,257 | 1.18% | 17,774,223,980 | 21.96% | 106,994,151,699 |
| 03 | 01 | 22 | Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan | Persentase database jalan dan jembatan | 0.00% | 100.00% | 223,075,000 | | | | | | | | | 100.00% | 223,075,000 |
| 03 | 01 | 24 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Persentase tersedianya Air Irigasi untuk pertanian | 46% | 58% | 4,380,478,550 | 60% | 14,470,806,330 | 63% | 15,178,000,000 | 65% | 15,936,900,000 | 68% | 16,733,745,000 | 68% | 66,699,929,880 |
| 03 | 01 | 25 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Persentase Air Baku yang tersedia dan dikelola untuk kebutuhan pokok | 42.96% | 49.87% | 3,270,738,500 | 56.71% | 6,650,000,000 | 63.48% | 6,732,500,000 | 70.18% | 6,819,125,000 | 76.82% | 6,910,081,250 | 76.82% | 30,382,444,750 |
| 03 | 01 | 27 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | - | - | 3,446,289,900 | - | 2,500,000,000 | - | 2,537,500,000 | - | 3,465,000,000 | - | 1,504,912,500 | - | 13,453,702,400 |
| 03 | 01 | 31 | Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase ketersediaan dokumen kebijakan tata ruang | - | 100% | 64,181,000 | 100% | 1,550,000,000 | 100% | 550,000,000 | 100% | 1,275,000,000 | 100% | 160,000,000 | 100% | 3,599,181,000 |
| 03 | 01 | 32 | Program Pemanfaatan Ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | - | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 300,000,000 | 100% | - | 100% | - | 100% | 300,000,000 |
| 03 | 01 | 33 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan | 3.36 | 3.95% | 716,853,300 | 4.09 | 425,994,465 | 4.22 | 455,678,392 | 4.32 | 488,372,607 | 4.40 | 524,517,769 | 4.40 | 2,611,416,533 |
| 03 | 01 | 34 | Program Manajemen dan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum | Persentase ketersediaan penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat | | 70.00% | 150,000,000 | 72% | 350,000,000 | 75% | 367,500,000 | 77% | 385,875,000 | 80.00% | 405,168,750 | 80.00% | 1,658,543,750 |
| 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas PUPR | 100% | 100% | 67,100,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 105,000,000 | 100% | 110,250,000 | 100% | 115,762,500 | 100% | 498,112,500 |
| 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 5,819,353,500 | 100% | 2,448,000,000 | 100% | 1,968,997,175 | 100% | 1,570,947,034 | 100% | 1,618,341,885 | 100% | 13,425,639,594 |
| 03 | 01 | 23 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan | - | 100% | 1,550,256,940 | 100% | 3,900,000,000 | 100% | 1,910,000,000 | 100% | 1,995,500,000 | 100% | 2,085,275,000 | 100% | 11,441,031,940 |
| 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | - | - | 0 | 10 Dok | 150,000,000 | 10 Dok | 157,500,000 | 10 Dok | 165,375,000 | 10 Dok | 173,643,750 | 40 Dok | 646,518,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | - DINAS PKPP |
| 01 | 04 | 15 | Program Pengembangan Perumahan | Rasio Rumah Layak Huni | 30.70 | 0.34 | 12,660,000,000 | 0.54 | 30,908,000,000 | 0.60 | 36,324,000,000 | 0.63 | 41,606,000,000 | 0.67 | 40,473,000,000 | 0.67 | 161,971,000,000 |
| 01 | 04 | 16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rasio Pemukiman Layak Huni | 25.15 | 0.50 | 716,000,000 | 13.23 | 23,975,000,000 | 13.23 | 26,372,000,000 | 13.23 | 29,009,000,000 | 10.21 | 25,620,000,000 | 50.40 | 105,692,000,000 |
| 01 | 04 | 17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di kawasan perkotaan | 0.18% | 0.14% | 137,000,000 | 0.11% | 131,000,000 | 0.09 | 127,000,000 | 0.07 | 123,000,000 | 0.05 | 118,000,000 | 0.05 | 636,000,000 |
| 01 | 04 | 18 | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Ratio jumlah rumah yang direhab akibat bencana alam/sosial | | | | 90 rumah | 1,850,000,000 | 90 rumah | 1,850,000,000 | 90 rumah | 1,850,000,000 | 90 rumah | 1,850,000,000 | 360 rumah | 7,400,000,000 |
| 01 | 04 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas PPKP | 100% | 100% | 283,000,000 | 100% | 325,000,000 | 100% | 343,000,000 | 100% | 382,000,000 | 100% | 425,000,000 | 100% | 1,758,000,000 |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|----|----|--|---|--------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | Rp |
| 01 | 04 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 132,000,000 | 100% | 1,701,000,000 | 100% | 20,106,000,000 | 100% | 81,000,000 | 100% | 476,000,000 | 100% | 22,496,000,000 | |
| 01 | 04 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | - | - | - | 100% | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100% | 10,000,000 | |
| 01 | 04 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 100% | 100% | 10,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 30,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 10,000,000 | 100% | 80,000,000 | |
| 01 | 04 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | - | - | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 20,000,000 | 100% | 80,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | SAT. POL PP |
| 01 | 05 | 15 | Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Rasio Polisi PP per 10.000 penduduk | 3:10.000 | | 2,215,596,000 | | 2,054,300,611 | | 2,305,106,078 | | 2,351,208,200 | | 2,398,232,364 | 0 | 11,324,443,253 | |
| 01 | 05 | 16 | Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Angka kepatuhan terhadap produk hukum | % | 100% | 287,575,000 | 100% | 307,575,000 | 100% | 377,575,000 | 100% | 407,575,000 | 100% | 550,000,000 | 100% | 1,930,300,000 | |
| 01 | 05 | 26 | Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Indeks resiko kebakaran | | 100% | 189,424,000 | 100% | 389,424,000 | 100% | 589,424,000 | 100% | 789,424,000 | 100% | 889,424,000 | 100% | 1,083,424,000 | |
| 01 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan administrasi perkantoran | % | 100% | 298,490,000 | 100% | 398,490,000 | 100% | 598,490,000 | 100% | 798,490,000 | 100% | 998,490,000 | 100% | 1,298,490,000 | |
| 01 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks sarana dan prasarana pelayanan Aparatur | | 100 | 2,032,696,000 | 100 | 2,232,696,000 | 100 | 2,432,696,000 | 100 | 2,632,696,000 | 100 | 2,732,696,000 | 100 | 2,932,696,000 | |
| 01 | 05 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Meningkatkan profesionalitas ASN | | 100 | 90,600,000 | 100 | 190,600,000 | 100 | 290,600,000 | 100 | 390,600,000 | 100 | 490,600,000 | 100 | 590,600,000 | |
| 01 | 05 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 16 | Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Rasio penurunan gangguan kantrantibmas dan tindak kriminal | 31% | 31% | 88,000,000 | 32.24% | 175,000,000 | 45% | 175,000,000 | 47% | 150,000,000 | 50% | 150,000,000 | 50% | 738,000,000 | KESBANGPOL |
| 01 | 05 | 17 | Program Pengembangan wawasan kebangsaan | Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan | 32% | 35% | 141,222,300 | 62% | 332,450,000 | 64% | 580,400,000 | 76% | 587,170,000 | 90% | 773,500,000 | 90% | 2,414,742,300 | |
| 01 | 05 | 18 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Rasio peningkatan frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan | 86% | 88% | 95,296,000 | 90% | 350,000,000 | 92% | 400,000,000 | 94% | 410,000,000 | 100% | 420,000,000 | 100% | 1,675,296,000 | |
| 01 | 05 | 21 | Program Pendidikan politik masyarakat | Persentase peran serta masyarakat yang ikut dalam Pemilu | 82% | 82% | 122,100,000 | 83.23% | 206,000,000 | 84.23% | 176,000,000 | 85.23% | 186,000,000 | 86% | 196,000,000 | 86% | 886,100,000 | |
| 01 | 05 | 23 | Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi | Persentase peningkatan koordinasi dalam mengatasi permasalahan ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | 100% | 100% | 32,648,000 | 100% | 155,000,000 | 100% | 175,000,000 | 100% | 175,000,000 | 100% | 175,000,000 | 100% | 712,648,000 | |
| 01 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kesbangpol | % | | 233,590,800 | | 216,585,390 | | 243,027,868 | | 247,888,426 | | 252,846,194 | | 1,193,938,678 | |
| 01 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 58,441,000 | | 54,186,495 | | 60,802,016 | | 62,018,057 | | 63,258,418 | | 298,705,986 | |
| 01 | 05 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 56,890,000 | | 52,748,408 | | 59,188,356 | | 60,372,123 | | 61,579,566 | | 290,778,453 | |
| 01 | 05 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 22 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Indeks Risiko bencana | 126.1 | | 191,613,000 | | 201,193,650 | | 172,128,718 | | 175,571,292 | | 179,082,718 | 0 | 919,589,378 | BPBD |
| 01 | 05 | 24 | Program Rehabilitasi Pasca Bencana | Persentase pemulihan dampak bencana | % | | 85,000,000 | | 78,812,000 | | 88,434,000 | | 90,202,680 | | 92,006,734 | 0 | 434,455,414 | |
| 01 | 05 | 25 | Program Penanggulangan Darurat Bencana | Persentase penanganan darurat bencana | 100% | 100% | 136,178,240 | 100% | 126,264,464 | 100 | 141,679,841 | 100 | 144,513,438 | 100 | 147,403,706 | 100 | 696,039,689 | |
| 01 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD | % | | 511,256,485 | | 474,037,013 | | 531,911,247 | | 542,549,472 | | 553,400,461 | | 2,613,154,678 | |
| 01 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 134,000,000 | | 124,244,800 | | 139,413,600 | | 142,201,872 | | 145,045,909 | | 684,906,181 | |
| 01 | 05 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | 100% | | - | 100% | 15,000,000 | | | | | | | 100% | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | DINSOS |
| 01 | 06 | 15 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Fakir miskin yang diberdayakan | 54.89% | | 686,547,146 | | 636,566,514 | | 714,283,651 | | 728,569,324 | | 743,140,710 | 0 | 3,509,107,345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 16 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%) | 0 | 0 | 919,118,054 | - | 5,157,508,957 | - | 5,036,194,405 | - | 4,283,304,125 | - | 4,121,656,831 | - | 19,517,782,372 | |
| 01 | 06 | 18 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) | Persentase anak cacat dan trauma yang dibina | 18.41% | 100 | 283,800,000 | 100 | 263,139,360 | 100 | 295,265,520 | 100 | 301,170,830 | 100 | 307,194,247 | 100 | 1,450,569,957 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|--|---|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 01 | 06 | 19 | Program pembinaan panti asuhan /panti jompo | Presentase pembinaan panti asuhan/ panti jompo (%) | | | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 5 | 200,000,000 | | |
| 01 | 06 | 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah lembaga kesejahteraan yang diberdayakan | lembaga | | 237,734,500 | 220,427,428 | | 247,338,974 | | 252,285,753 | | 257,331,468 | 0 | 1,215,118,123 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 06 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial | | | 382,150,500 | 354,329,944 | | 397,589,380 | | 405,541,168 | | 413,651,991 | | 1,953,262,983 | | |
| 01 | 06 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | | 218,957,000 | 203,016,930 | | 227,802,863 | | 232,358,920 | | 237,006,098 | | 1,119,141,811 | | |
| 01 | 06 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | 56,890,000 | 52,748,408 | | 59,188,356 | | 60,372,123 | | 61,579,566 | | 290,778,453 | | |
| 01 | 06 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 15 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja | 100% | 100% | 779,650,000 | 722,891,480 | 100% | 4,850,000,000 | 100% | 850,000,000 | 100% | 850,000,000 | 100% | 8,052,541,480 | NAKERTRANS | |
| 02 | 01 | 16 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja | 62.47% | 100% | 1,825,075,000 | 1,692,209,540 | 100% | 1,194,000,000 | 100% | 1,256,000,000 | 100% | 1,318,000,000 | 100% | 7,285,284,540 | | |
| 02 | 01 | 17 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 100% | 100% | 137,500,000 | 127,490,000 | 100% | 210,000,000 | 100% | 215,000,000 | 100% | 220,000,000 | 100% | 909,990,000 | | |
| 02 | 01 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | | | | 10,000,000 | | | | | | | 100% | 10,000,000 | | |
| 02 | 01 | 05 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | | | | 75,000,000 | | 77,250,000 | | 79,567,500 | | 81,954,525 | | 313,772,025 | | |
| 02 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | | 173,000,000 | 160,405,600 | | 173,500,000 | | 1,786,500,000 | | 246,000,000 | | 2,539,405,600 | | |
| 02 | 01 | 01 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | 540,290,000 | 500,956,888 | | 921,180,000 | | 1,016,680,000 | | 1,080,180,000 | | 4,059,286,888 | | |
| 02 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | | | 12 Dok | 200,000,000 | 12 Dok | 200,000,000 | 12 Dok | 210,000,000 | 12 Dok | 210,000,000 | 12 Dok | 820,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | - DINAS PP & KB, PP & PA | |
| 02 | 02 | 15 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Pengetahuan tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - | - | - | 3.13% | 60,000,000 | 6.25% | 66,000,000 | 9.37% | 72,000,000 | 13.13% | 78,000,000 | 13.13% | 276,000,000 | |
| 02 | 02 | 16 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Persentase OPD yang Melaksanakan Perencanaan dan Penanganan Responsif Gender | 12.50% | 33.33% | 145,338,500 | 134,757,857 | 85.42% | 103,914,500 | 100% | 95,014,500 | 100% | 57,114,500 | 100% | 536,139,857 | | |
| 02 | 02 | 17 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapat Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak | 45 | 47.5 | 178,000,000 | 165,041,600 | 52.5 | 410,125,000 | 55 | 449,587,500 | 57.5 | 492,996,250 | 60 | 1,695,750,350 | | |
| 02 | 02 | 18 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif | 8.57% | 10% | 115,675,000 | 107,253,860 | 10% | 257,075,000 | 10% | 250,475,000 | 11% | 271,075,000 | 11% | 1,001,553,860 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pangan | | | | | | | | | | | | | | - DINAS KET.PANGAN | |
| 02 | 03 | 15 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan | Persentase ketersediaan pangan rumah tangga | 76.70% | 100% | 442,204,000 | 914,025,000 | 100% | 959,726,000 | 100% | 1,007,713,000 | 100% | 1,058,098,000 | 100% | 4,381,766,000 | | |
| 02 | 03 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan | 85% | 88% | 242,173,000 | 308,090,000 | 94% | 310,590,000 | 100% | 348,090,000 | 100% | 375,590,000 | 100% | 1,584,533,000 | | |
| 02 | 03 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 66% | 72.80% | 75,115,000 | 803,500,000 | 86.40% | 805,000,000 | 93.20% | 788,000,000 | 100.00% | 789,000,000 | 100% | 3,260,615,000 | | |
| 02 | 03 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | - | - | - | 10,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 10,000,000 | |
| 02 | 03 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | - | - | - | 15.40% | 50,000,000 | 30.77% | 52,500,000 | 46.16% | 55,126,000 | 61.54% | 57,882,000 | 61.54% | 215,508,000 | |
| 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | - | - | - | 100% | 215,000,000 | 100% | 215,500,000 | 100% | 266,000,000 | 100% | 318,500,000 | 100% | 1,015,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 16 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan | Ratio tenaga penyuluh terhadap desa/kel. | ... : ... | | 1,913,717,400 | 1,774,398,773 | | 1,991,031,583 | | 2,030,853,215 | | 2,071,469,259 | | 9,781,470,230 | DISTAN | |
| 02 | 01 | 19 | Program Pemberdayaan kelembagaan Petani dan Usaha Tani | Cakupan bina kelompok tani | 63.62% | 100 | 104,278,850 | 96,687,350 | 100 | 108,491,715 | 100 | 110,661,550 | 100 | 112,874,781 | 100 | 532,994,246 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | - DINAS PKPP | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|--|--|--------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 02 | 04 | 16 | Program penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Persentase tanah pemerintah yang tersertifikat | 100% | 100% | 282,000,000 | 100% | 311,000,000 | 100% | 342,000,000 | 100% | 376,000,000 | 100% | 413,000,000 | 100% | 1,724,000,000 | |
| 02 | 04 | 17 | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Persentase penyelesaian konflik tanah pemerintah | 100% | 100% | 37,000,000 | 100% | 40,000,000 | 100% | 44,000,000 | 100% | 49,000,000 | 100% | 54,000,000 | 100% | 224,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | - DLH | |
| 02 | 05 | 15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase Volume Sampah yang tertangani | 73.60% | 74.82% | 2,710,682,540 | 74.82% | 1,924,063,460 | 74.82% | 1,992,024,033 | 74.82% | 2,062,535,356 | 74.82% | 2,135,699,550 | 74.82% | 10,825,004,939 | |
| 02 | 05 | 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase Usaha yang memiliki dokumen | 75% | 80% | 149,861,340 | 85% | 205,528,908 | 90% | 142,305,354 | 95% | 149,420,620 | 100% | 156,991,651 | 100% | 804,107,873 | |
| 02 | 05 | 17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase daerah mata air yang dikonservasi | 0.00% | 1.42% | 510,448,500 | 1.44% | 232,290,975 | 1.46% | 243,905,524 | 1.48% | 256,100,800 | 1.50% | 268,905,840 | 1.50% | 1,511,651,639 | |
| 02 | 05 | 24 | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 2.00% | 2.03% | 396,637,830 | 2.05% | 3,414,000,000 | 2.07% | 435,000,000 | 2.08% | 437,000,000 | 2.10% | 439,000,000 | 2.10% | 5,121,637,830 | |
| 02 | 05 | 25 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Ratio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | 0.00004 | 0.00006 | 416,747,000 | 0.00009 | 1,582,515,563 | 0.00012 | 637,891,341 | 0.00015 | 669,785,908 | 0.00018 | 703,275,203 | 0.00018 | 4,010,215,015 | |
| 02 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi | 97% | 95% | 288,854,904 | 96% | 297,520,551 | 97% | 306,446,167 | 98% | 315,639,552 | 99% | 325,108,739 | 99% | 1,533,569,913 | |
| 02 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 95.00% | 95.00% | 54,968,000 | 96.00% | 56,617,000 | 97.00% | 58,315,510 | 98.00% | 60,064,975 | 99.00% | 61,866,900 | 99.00% | 291,832,385 | |
| 02 | 05 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | | | - | 100.00% | 7,500,000 | | - | | - | | - | 100.00% | 7,500,000 | |
| 02 | 05 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 5.00% | 17.50% | 76,850,000 | 27.50% | 50,000,000 | 37.50% | 52,500,000 | 47.50% | 52,625,000 | 57.50% | 52,631,250 | 57.50% | 284,606,250 | |
| 02 | 05 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan kinerja dan keuangan | | | | 100.00% | 15,000,000 | 100.00% | 15,450,000 | 100.00% | 15,913,500 | 100.00% | 16,390,905 | 100.00% | 62,754,405 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | | | | | | | | | | | DISPENDUK |
| 02 | 06 | 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan | 38.10% | 50.00% | 2,368,292,400 | 63.00% | 1,518,000,100 | 75.00% | 1,507,500,100 | 88.00% | 1,553,050,100 | 100.00% | 1,533,015,000 | 100.00% | 8,479,857,700 | |
| 02 | 06 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 99.63% | 99.63% | 959,242,600 | 100% | 1,774,215,250 | 100% | 2,212,251,400 | 100% | 1,959,206,250 | 100% | 2,053,195,500 | 100% | 8,958,111,000 | |
| 02 | 06 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peralatann dan perlengkapan gedung kantor | 100% | 100% | 156,965,000 | 100% | 4,663,422,000 | 100% | 530,000,000 | 100% | 367,816,870 | 100% | 403,611,182 | 100% | 6,121,815,052 | |
| 02 | 06 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | 95% | - | - | 100% | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100% | 5,000,000 | |
| 02 | 06 | 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase Penataan Administrasi Kependudukan | 100% | 100% | 616,613,500 | | 587,980,000 | | 610,339,500 | | 690,640,450 | | 782,961,500 | | 3,288,534,950 | |
| 02 | 06 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | - | - | 100% | 50,000,000 | 100% | 66,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 78,000,000 | 100% | 269,000,000 | |
| 02 | 06 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 45,000,000 | 100% | 180,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | | | | | - DPMD |
| 02 | 07 | 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Nilai survey kepuasan masyarakat | NA | | 106,504,400 | | 98,750,880 | | 110,808,218 | | 113,024,382 | | 115,284,870 | | 544,372,750 | |
| 02 | 07 | 17 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Jumlah BUMDES yang dibina | BUMDES | | 2,358,088,250 | | 2,186,419,425 | | 2,453,355,015 | | 2,502,422,116 | | 2,294,721,080 | | 11,795,005,887 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 02 | 07 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | % | | 458,620,860 | | 425,233,261 | | 477,149,143 | | 486,692,126 | | 496,425,968 | | 2,344,121,358 | |
| 02 | 07 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 66,153,000 | | 61,337,062 | | 68,825,581 | | 70,202,093 | | 71,606,135 | | 338,123,871 | |
| 02 | 07 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 39,700,000 | | 36,809,840 | | 41,303,880 | | 42,129,958 | | 42,972,557 | | 202,916,235 | |
| 02 | 07 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | - DINAS PP & KB, PP & PA |
| 02 | 08 | 15 | Program Keluarga Berencana | Persentase peserta KB aktif | 65.43% | 65.50% | 349,866,800 | 65.60% | 324,396,497 | 65.70% | 485,200,000 | 65.80% | 531,325,000 | 65.90% | 578,200,000 | 65.90% | 2,268,988,297 | |
| 02 | 08 | 16 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Persentase remaja tingkat SMA/SMK/MA yang mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi | - | 100% | 49,700,000 | 100% | 46,081,840 | 100% | 65,137,000 | 100% | 71,150,000 | 100% | 77,765,000 | 100% | 309,833,840 | |
| 02 | 08 | 17 | Program pelayanan kontrasepsi | Persentase PUS yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi | 20.87% | 20.37% | 155,554,000 | 19.87% | 144,229,669 | 19.57% | 188,221,000 | 18.87% | 207,037,000 | 18.37% | 227,741,000 | 18.37% | 922,782,669 | |
| 02 | 08 | 18 | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Persentase Desa / kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung KB | 17.50% | 17.50% | 1,987,699,900 | 19.38% | 1,842,995,347 | 21.25% | 2,092,285,000 | 23.13% | 2,093,785,000 | 25.00% | 1,920,000,845 | 25.00% | 9,936,766,092 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|---|---|--------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 02 | 08 | 19 | Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Poktan di Masyarakat | Persentase Poktan BKB yang Mendapatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak | - | 14.88% | 57,300,000 | 17.36% | 53,128,560 | 19.83% | 69,300,000 | 23.14% | 76,230,000 | 24.79% | 83,850,000 | 24.79% | 339,808,560 | |
| 02 | 08 | 22 | Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Persentase Tersedianya Bahan Informal | 100% | 100% | 9,750,000 | 100% | 9,040,200 | 100% | 17,750,000 | 100% | 19,250,000 | 100% | 20,750,000 | 100% | 76,540,200 | |
| 02 | 08 | 23 | Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga | Persentase Tenaga Pendamping Poktan yang Terlatih | 1.74% | 1.74% | 516,750,000 | 2.09% | 279,600,000 | 2.44% | 311,460,000 | 2.79% | 345,406,000 | 3.13% | 381,646,600 | 3.13% | 1,834,862,600 | |
| 02 | 08 | 25 | Program Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Persentase Kelompok yang Mendapat Pendampingan dan Pembinaan | - | 4.98% | 52,600,000 | 6.22% | 48,770,720 | 7.47% | 78,900,000 | 8.71% | 92,050,000 | 9.96% | 105,200,000 | 9.96% | 377,520,720 | |
| 02 | 08 | 05 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | % | | 38,374,600 | | 35,580,929 | | 48,000,000 | | 52,000,000 | | 56,000,000 | | 229,955,529 | |
| 02 | 08 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 1,906,281,600 | | 1,767,504,300 | | 2,802,251,600 | | 3,164,411,600 | | 2,901,765,437 | | 12,542,214,537 | |
| 02 | 08 | 01 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 601,240,712 | | 557,470,388 | | 721,608,712 | | 781,392,712 | | 781,392,712 | | 3,443,105,236 | |
| 02 | 08 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 4 Dok | 4 Dok | 20,000,000 | 4 Dok | 18,544,000 | 4 Dok | 21,000,000 | 4 Dok | 21,500,000 | 4 Dok | 22,000,000 | 4 Dok | 103,044,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | DISHUB |
| 02 | 09 | 15 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Jumlah Prasarana Perhubungan yang dibangun | | | | 4 | 650,000,000 | 4 | 650,000,000 | | | | | | 1,300,000,000 | |
| 02 | 09 | 16 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi dalam kondisi baik | Unit | | 526,031,000 | | 487,735,943 | | 547,282,652 | | 558,228,305 | | 569,392,872 | | 2,688,670,772 | |
| 02 | 09 | 17 | Pogram peningkatan pelayanan angkutan | Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum dibidang tranportasi darat | % | | 709,032,160 | | 657,414,619 | | 737,677,059 | | 752,430,600 | | 767,479,212 | | 3,624,033,650 | |
| 02 | 09 | 18 | Pogram Pembangunan sarana dan sarana perhubungan | Jumlah sarana Perhubungan yang dibangun | % | | | 1 | 8,000,000,000 | | | | 8,000,000,000 | | | | 16,000,000,000 | |
| 02 | 09 | 19 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas dan angkutan | % | | 1,224,972,000 | | 1,135,794,038 | | 1,274,460,869 | | 1,299,950,086 | | 1,325,949,088 | | 6,261,126,081 | |
| 02 | 09 | 20 | Program peningkatan kelayaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan yang layak jalan / operasi | % | | 500,000,000 | | | | 500,000,000 | | | | | | 1,000,000,000 | |
| 02 | 09 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan | % | | 704,530,390 | | 653,240,578 | | 732,993,418 | | 747,653,286 | | 762,606,352 | | 3,601,024,024 | |
| 02 | 09 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 255,159,450 | | 236,583,842 | | 265,467,892 | | 270,777,250 | | 276,192,795 | | 1,304,181,229 | |
| 02 | 09 | 03 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 63,750,000 | | 59,109,000 | | 66,325,500 | | 67,652,010 | | 69,005,050 | | 325,841,560 | |
| 02 | 09 | 05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | % | | 46,000,000 | | 42,651,200 | | 47,858,400 | | 48,815,568 | | 49,791,879 | | 235,117,047 | |
| 02 | 09 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | | DIKOMINFO |
| 02 | 10 | 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan | 0% | 80.95% | 481,319,100 | 100% | 4,201,000,000 | 100% | 4,558,000,000 | 100% | 3,333,000,000 | 100% | 1,373,000,000 | 100% | 13,946,319,100 | |
| 02 | 10 | 18 | Program kerjasama informasi dengan mas media | Cakupan penyebaran informasi daerah melalui media massa | 13.00% | 13.00% | 274,519,310 | 33.00% | 550,000,000 | 67.00% | 435,000,000 | 80.00% | 435,000,000 | 100% | 420,000,000 | 100% | 2,114,519,310 | |
| 02 | 10 | 19 | Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah | Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral | 90% | 95% | 172,504,650 | 100% | 1,437,575,000 | 100% | 1,287,575,000 | 100% | 1,287,575,000 | 100% | 1,287,575,000 | 100% | 5,472,804,650 | |
| 02 | 10 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | 100% | | | 100% | 15,000,000 | | | | | | | 100% | 15,000,000 | |
| 02 | 10 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 92,846,250 | 100% | 530,000,000 | 100% | 565,000,000 | 100% | 485,000,000 | 100% | 487,500,000 | 100% | 2,160,346,250 | |
| 02 | 10 | 17 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Cakupan SDM yang memiliki keahlian/profesional dalam pengendalian TIK di perangkat daerah | - | 61.04% | 200,000,000 | 64.94% | 225,000,000 | 71.43% | 225,000,000 | 84.42% | 225,000,000 | 100% | 75,000,000 | 100% | 950,000,000 | |
| 02 | 10 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika | 100% | 100% | 464,026,830 | 100% | 666,500,000 | 100% | 765,000,000 | 100% | 853,500,000 | 100% | 941,500,000 | 100% | 3,690,526,830 | |
| 02 | 10 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 50% | 65% | 63,900,000 | 80% | 1,698,500,000 | 95% | 235,500,000 | 100% | 285,500,000 | 100% | 325,500,000 | 100% | 2,608,900,000 | |
| 02 | 10 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 464,026,830 | 100% | 430,245,677 | 100% | 764,680,000 | 100% | 853,180,000 | 100% | 941,180,000 | 100% | 3,453,312,507 | |
| 02 | 10 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan | - | - | - | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 60,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|--|----|--|---|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 03 | 06 | 20 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM | Persentase wirausaha yang berdaya saing | 1.98% | - | - | 4.06% | 75,000,000 | 5.24% | 85,000,000 | 6.53% | 95,000,000 | 7.92% | 105,000,000 | 7.92% | 360,000,000 | DINAS PKUKM |
| 03 | 06 | 21 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM | Persentase koperasi/UKM yang mendapat dukungan pengembangan usaha | 2.91% | - | - | 3.41% | 152,000,000 | 4.49% | 215,000,000 | 6.17% | 285,000,000 | 8.45% | 325,000,000 | 8.45% | 977,000,000 | |
| 03 | 06 | 22 | Program Penciptaan iklim UKM yang kondusif | Persentase UKM/LKM aktif | 3.68% | 3.72% | 163,429,440 | 3.76% | 428,000,000 | 3.81% | 518,500,000 | 3.85% | 307,500,000 | 3.91% | 332,500,000 | 3.91% | 1,749,929,440 | |
| 03 | 06 | 20 | Program Pengembangan Kewirausahaan/Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UKM | Persentase wirausaha/koperasi yang berdaya saing | 7.69% | 15.38% | - | 16.92% | 50,000,000 | 18.46% | 85,000,000 | 20.00% | 100,000,000 | 21.54% | 110,000,000 | 21.54% | 345,000,000 | |
| 03 | 06 | 23 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase koperasi aktif | 16% | 17% | 100,000,000 | 18% | 118,215,563 | 19% | 245,000,000 | 20% | 280,000,000 | 21% | 320,000,000 | 21% | 1,063,215,563 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | PM PTSP |
| 02 | 12 | 15 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Invenstor berskala Nasional (PMA/PMDN) yang berinvestasi baru, perluasan dan atau pengembangan | 51 invenstor | 54 invenstor | 189,259,367 | 57 invenstor | 198,722,335 | 60 invenstor | 208,658,452 | 62 invenstor | 219,091,375 | 65 invenstor | 230,045,944 | 65 invenstor | 1,045,777,473 | |
| 02 | 12 | 16 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Penerbitan Ijin yang sesuai standar | 95% | 100% | 56,050,000 | 100% | 78,000,000 | 100% | 81,900,000 | 100% | 85,995,000 | 100% | 90,294,750 | 100% | 392,239,750 | |
| 02 | 12 | 30 | Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah | Jumlah Jenis Ijin yang Dikeluarkan | 28 jenis | 28 jenis | 315,685,000 | 28 jenis | 331,469,250 | 28 jenis | 348,042,713 | 28 jenis | 365,444,849 | 28 jenis | 383,717,091 | 28 jenis | 1,744,358,903 | |
| 02 | 12 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | - | - | - | 100% | 7,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,500,000 | |
| 02 | 12 | 05 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 95% | 100% | 315,980,240 | 100% | 331,780,000 | 100% | 348,340,000 | 100% | 365,740,000 | 100% | 384,015,000 | 100% | 1,745,855,240 | |
| 02 | 12 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 98% | 100% | 88,100,000 | 100% | 92,500,000 | 100% | 327,800,000 | 100% | 97,000,000 | 100% | 101,850,000 | 100% | 707,250,000 | |
| 02 | 12 | 01 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 25.93% | | | 40.74% | 50,000,000 | 55.56% | 52,500,000 | 70.37% | 55,125,000 | 85.19% | 57,881,000 | 85.19% | 215,506,000 | |
| 02 | 12 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuanan | | | - | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,750,000 | 100% | 16,537,500 | 100% | 17,364,000 | 5 Dok | 64,651,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | PKO |
| 02 | 13 | 15 | Program Pengembangan dan Kesorasian Kebijakan Pemuda | Cakupan kebijakan pengembangan pemuda | | 60 | | 60 | 60,000,000 | 60 | 60,000,000 | 60 | 60,000,000 | 60 | 60,000,000 | 60 | 240,000,000 | KEC. |
| 02 | 13 | 16 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Jumlah lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif | 60 organisasi | 60 | 423,999,000 | 60 | 393,131,873 | 60 | 441,128,560 | 60 | 449,951,131 | 60 | 458,950,153 | 60 | 2,167,160,717 | KEC. |
| 02 | 13 | 17 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Cakupan usaha kepemudaan yang dikembangkan | | 60 | | 60 | 70,000,000 | 60 | 70,000,000 | 60 | 70,000,000 | 60 | 70,000,000 | 60 | 280,000,000 | KEC. |
| 02 | 13 | 20 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | Jumlah klub olahraga yang aktif | 53 klub | 53 | 802,735,500 | 53 | 744,296,356 | 53 | 835,166,014 | 53 | 851,869,334 | 53 | 868,906,721 | 53 | 4,102,973,925 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | DISPARBUD |
| 02 | 16 | 16 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/direkomendasikan | % | | 287,965,000 | | 267,001,148 | | 299,598,786 | | 305,590,762 | | 311,702,577 | | 1,471,858,273 | |
| 02 | 16 | 17 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan | dokumen | | 381,620,000 | | 353,838,064 | | 397,037,448 | | 404,978,197 | | 413,007,761 | | 1,950,481,470 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | KEARSIPPUST |
| 02 | 17 | 15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah perpustakaan yang dibina | 518 unit | 518 | 494,699,440 | 518 | 458,685,321 | 518 | 514,685,297 | 518 | 524,979,003 | 518 | 535,478,583 | 518 | 2,528,527,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | KEARSIPPUST |
| 02 | 18 | 15 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Terwujudnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan | 100% | 100% | 494,699,440 | 100% | 1,620,000,000 | 100% | 1,810,000,000 | 100% | 1,520,000,000 | 100% | 1,530,000,000 | 100% | 6,974,699,440 | |
| 02 | 18 | 16 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | Terwujudnya perbaikan sistem administrasi kearsipan | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 810,000,000 | 100% | 303,000,000 | 100% | 317,000,000 | 100% | 325,000,000 | 100% | 1,805,000,000 | |
| | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah | 100% | 100% | - | 100% | 135,000,000 | 100% | 135,000,000 | 100% | 135,000,000 | 100% | 135,000,000 | 100% | 540,000,000 | |
| 02 | 18 | 16 | Program Pemeliharaan/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang dipelihara | 100% | 100% | 3,900,000 | 100% | 240,000,000 | 100% | 117,500,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | 122,500,000 | 100% | 603,900,000 | |
| 02 | 18 | 18 | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan informasi | 100% | 100% | 55,000,000 | 100% | 335,000,000 | 100% | 337,500,000 | 100% | 340,000,000 | 100% | 342,500,000 | 100% | 1,410,000,000 | |
| 02 | 18 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah | % | 100% | 353,346,710 | 100% | 507,562,500 | 100% | 548,375,000 | 100% | 560,425,000 | 100% | 583,100,000 | 100% | 2,552,809,210 | |
| 02 | 18 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 100% | 51,000,000 | 100% | 1,799,000,000 | 100% | 761,000,000 | 100% | 301,500,000 | 100% | 238,050,000 | 100% | 3,150,550,000 | |
| 02 | 18 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | | | | 100% | 15,000,000 | | | | | | | 100% | 15,000,000 | |

| KODE | | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|---|--|-------------------------------------|--------------------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 02 | 18 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Presentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 100% | 100% | 160,703,850 | 100% | 711,950,000 | 100% | 711,950,000 | 100% | 586,950,000 | 100% | 586,950,000 | 100% | 2,758,503,850 | | |
| 02 | 18 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Dokumen pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan | | | | 100% | 40,000,000 | 100% | 41,200,000 | 100% | 42,400,000 | 100% | 43,200,000 | 40 Dok | 166,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | | - DKP | |
| | | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 15 | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | Jumlah wirausaha baru yang bergerak disektor perikanan | 675 kelompok | | 134,901,500 | | 125,080,671 | | 140,351,521 | | 143,158,551 | | 146,021,722 | | 689,513,965 | | |
| 03 | 01 | 17 | Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut | Jumlah pelanggaran laut | kasus | | 264,239,500 | | 245,002,864 | | 274,914,776 | | 280,413,071 | | 286,021,333 | | 1,350,591,544 | | |
| 03 | 01 | 18 | Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut | Persentase kawasan laut yang di konservasi | % | | 39,863,500 | | 36,961,437 | | 41,473,985 | | 42,303,465 | | 43,149,534 | | 203,751,921 | | |
| 03 | 01 | 20 | Program pengembangan budidaya perikanan | Volume produksi perikanan budidaya | kg | | 104,193,620 | | 96,608,324 | | 108,403,042 | | 110,571,103 | | 112,782,525 | 0 | 532,558,614 | | |
| 03 | 01 | 21 | Program pengembangan perikanan tangkap | Volume produksi perikanan tangkap | 16.972 ton | | 6,062,146,000 | | 5,620,821,771 | | 6,307,056,698 | | 6,433,197,832 | | 5,899,242,412 | 0 | 30,322,464,713 | | |
| 03 | 01 | 23 | Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Jumlah pemasaran produksi antar pulau | 1.438,61 ton | | 2,601,491,280 | | 2,412,102,715 | | 2,706,591,528 | | 2,760,723,358 | | 2,531,583,319 | 0 | 13,012,492,200 | | |
| 03 | 01 | 24 | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Luas kawasan budidaya yang dikembangkan | 600 ha | | 167,179,640 | | 155,008,962 | | 173,933,697 | | 177,412,371 | | 180,960,619 | | 854,495,289 | | |
| 03 | 01 | 24 | Program peningkatan konservasi, rehabilitasi sumber daya alam perikanan | Luas kawasan konservasi yang dikembangkan | | | 125,000,000 | | 115,900,000 | | 125,000,000 | | 125,000,000 | | 125,000,000 | | 615,900,000 | | |
| 03 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan | % | | 718,073,460 | | 665,797,712 | | 747,083,628 | | 762,025,300 | | 777,265,806 | | 3,670,245,906 | | |
| 03 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 66,009,000 | | 61,203,545 | | 68,675,764 | | 70,049,279 | | 71,450,264 | | 337,387,852 | | |
| 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 56,890,000 | | 52,748,408 | | 59,188,356 | | 60,372,123 | | 61,579,566 | | 290,778,453 | | |
| 03 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | - DISPARBUD | |
| 03 | 02 | 15 | Program pengembangan pemasaran pariwisata | Jumlah kunjungan wisatawan | 47.228 orang | | 862,455,280 | | 799,668,536 | | 897,298,473 | | 915,244,443 | | 933,549,332 | 0 | 4,408,216,064 | | |
| 03 | 02 | 16 | Program pengembangan destinasi pariwisata | Persentase destinasi wisata yang dikembangkan | % | | 3,027,607,000 | | 2,807,197,210 | | 3,149,360,507 | | 3,212,347,717 | | 2,945,722,856 | | 15,142,235,291 | | |
| 03 | 02 | 17 | Program pengembangan Kemitraan | Jumlah usaha pariwisata yang dibentuk | 21 Usaha | | 709,048,500 | | 657,429,769 | | 737,694,059 | | 752,447,940 | | 767,496,899 | | 3,624,117,167 | | |
| 03 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | % | | 479,048,900 | | 444,174,140 | | 498,402,475 | | 508,370,525 | | 518,537,935 | | 2,448,533,975 | | |
| 03 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 125,973,320 | | 116,802,462 | | 131,062,642 | | 133,683,895 | | 136,357,573 | | 643,879,892 | | |
| 03 | 02 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 59,750,000 | | 55,400,200 | | 92,163,900 | | 63,407,178 | | 64,675,321 | | 335,396,599 | | |
| 03 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | - DISTAN | |
| 03 | 03 | 15 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Persentase peningkatan kesejahteraan petani | 100% | 100% | 585,072,600 | 100% | 370,000,000 | 100% | 370,000,000 | 100% | 370,000,000 | 100% | 370,000,000 | | 2,065,072,600 | | |
| 03 | 03 | 18 | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Jumlah penerapan teknologi pertanian/perkebunan | | | 217,575,000 | | 1,524,000,000 | | 1,602,000,000 | | 1,735,000,000 | | 1,590,000,000 | 0 | 6,668,575,000 | | |
| 03 | 03 | 19 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Jumlah produksi pertanian/perkebunan | 10.3837,25 ton | | 5,280,379,000 | | 5,552,500,000 | | 6,039,825,000 | | 6,837,500,000 | | 7,520,000,000 | 0 | 31,230,204,000 | | |
| 03 | 03 | 21 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | Persentase penemuan dan penanganan penyakit ternak | 100% | 100% | 1,697,823,980 | 100% | 1,782,715,179 | 100% | 1,871,850,938 | 100% | 1,965,443,485 | 100% | 2,063,715,659 | 100% | 9,381,549,241 | | |
| 03 | 03 | 22 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Populasi ternak besar | 19,677 | 19873 | 2,003,979,661 | 20071 | 1,874,000,000 | 20271 | 2,174,000,000 | 20473 | 2,115,000,000 | 20677 | 2,280,000,000 | 20677 | 10,446,979,661 | | |
| 03 | 03 | 23 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Jumlah pemasaran hasil produksi peternakan | 100% | 100% | 94,970,000 | | | | | | | | 0 | | 94,970,000 | | |
| 03 | 03 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian | 100% | 100% | 915,194,080 | 100% | 936,375,080 | 100% | 986,814,080 | 100% | 981,811,080 | 100% | 1,017,714,080 | 100% | 4,837,908,400 | | |
| 03 | 03 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 2,182,967,250 | | 2,024,047,234 | | 2,155,000,000 | | 1,977,500,000 | | 1,230,000,000 | | 9,569,514,484 | | |
| 03 | 03 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 30,000,000 | | 27,816,000 | | 36,000,000 | | 39,000,000 | | 43,000,000 | | 175,816,000 | | |
| 03 | 03 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | % | | | 235,000,000 | | 235,000,000 | | 235,000,000 | | 235,000,000 | | 235,000,000 | 940,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|----|----|---|---|--------------------|--|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | DIPERINDAGKO P | | |
| 03 | 06 | 15 | Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen | 100% | - | - | 100% | 392,552,594 | 100% | 380,680,224 | 100% | 399,714,235 | 1 | 389,699,947 | 100% | 1,562,647,000 | | |
| 03 | 06 | 18 | Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | - Persentase pengembangan pasar daerah | 3.39% | 6.78% | 8.47% | 2,050,000,000 | 10.17% | 2,215,000,000 | 11.86% | 2,358,500,000 | 13.56% | 2,460,675,000 | 13.56% | 12,131,088,000 | | | |
| | | | | - Persentase usaha yang memiliki ijin | 75.52% | 79.17% | 84.38% | | 89.58% | | 94.79% | | 100.00% | | 100.00% | | - | | |
| 03 | 06 | 19 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Cakupan bina kelompok pedagang kaki lima dan asongan | 45.38 | - | 73.08 | 15,750,000 | - | - | - | - | 100 | 16,537,500 | 100 | 32,287,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 06 | 01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | 100% | - | - | - | 100% | 7,500,000 | - | - | - | - | 100% | 7,500,000 | | | |
| 03 | 06 | 02 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas PKUJKM | 100% | 100% | 100% | 2,023,220,000 | 100% | 1,880,450,000 | 100% | 1,968,950,000 | 100% | 2,053,950,000 | 100% | 9,686,405,500 | | | |
| 03 | 06 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 70% | 75% | 80% | 50,980,000 | 85% | 185,000,000 | 90% | 530,500,000 | 100% | 222,000,000 | 100% | 1,587,480,000 | | | |
| 03 | 06 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 0.37 | - | 0.46 | 50,000,000 | 0.54 | 52,500,000 | 0.63 | 55,125,000 | 0.72 | 57,881,250 | 0.72 | 215,506,250 | | | |
| 03 | 06 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | - | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,750,000 | 100% | 16,537,500 | 100% | 17,364,375 | 100% | 64,651,875 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | DIPERINDAGKO P | | |
| 03 | 07 | 16 | Program pengembangan industri kecil dan menengah | Persentase peningkatan nilai penjualan (omzet) IKM | 27% | 25% | 25% | 1,660,000,000 | 25% | 300,431,668 | 25% | 311,953,252 | 25% | 319,300,915 | 25% | 2,881,382,663 | | | |
| 03 | 07 | 17 | Program peningkatan kemampuan teknologi industri | Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna | 4.60% | - | 8.60% | 190,259,375 | 15.80% | 225,259,375 | 23.20% | 225,000,000 | 30.50% | 250,000,000 | 30.50% | 890,518,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | DISNAKERTRAN | | |
| 02 | 08 | 15 | Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 99.04% | | 99.70% | 132,794,466 | 99.90% | 139,434,189 | 100% | 146,405,899 | 100% | 153,726,194 | 100% | 572,360,748 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 04 | 01 | 26 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Pesentase peraturan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan | % | | | 150,000,000 | | 139,080,000 | | 156,060,000 | | 159,181,200 | | 162,364,824 | 766,686,024 | DPMD | |
| 04 | 01 | 27 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Persentase desa yang dimekarkan | | | | 488,650,000 | | 453,076,280 | | 508,391,460 | | 518,559,289 | | 528,930,475 | 0 | 2,497,607,504 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 30 | Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah | Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief | % | | | 247,604,760 | | 229,579,133 | | 257,607,992 | | 262,760,152 | | 268,015,355 | | 1,265,567,392 | PMPTSP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah | % | | | 4,591,418,860 | | 4,257,163,567 | | 7,898,112,182 | | 8,056,074,425 | | 7,387,420,248 | | 32,190,189,282 | Setda, SetKORPRI, Kecamatan |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | | 3,774,485,260 | | 3,499,702,733 | | 4,967,374,464 | | 5,066,721,954 | | 4,646,184,032 | | 21,954,468,443 | |
| 04 | 01 | 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | 84,000,000 | | 77,884,800 | | 87,393,600 | | 89,141,472 | | 90,924,301 | | 429,344,173 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | % | | | 165,300,000 | | 153,266,160 | | 171,978,120 | | 175,417,682 | | 178,926,036 | | 844,887,998 | |
| 04 | 01 | 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Nilai Hasil evaluasi SAKIP | CC | CC | CC+ | 400,964,900 | B | 417,163,882 | BB | 425,507,161 | BB | 434,017,303 | BB | 434,017,303 | BB | 2,049,427,901 | |
| 04 | 01 | 16 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana dengan baik | 100% | 100 | 100 | 677,057,050 | 100 | 627,767,297 | 100 | 704,410,155 | 100 | 718,498,358 | 100 | 732,868,325 | 100 | 3,460,601,185 | |
| 04 | 01 | 25 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Persentase kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik | 100% | 100 | 100 | 138,539,680 | 100 | 128,453,991 | 100 | 144,136,683 | 100 | 147,019,417 | 100 | 149,959,805 | 100 | 708,109,576 | |
| 04 | 01 | 26 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Pesentase peraturan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan | % | | | 676,499,550 | | 627,250,383 | | 703,830,132 | | 717,906,734 | | 732,264,869 | | 3,457,751,668 | |
| 04 | 01 | 27 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Persentase Kecamatan yang dimekarkan | 0% | | | 127,492,900 | | 118,211,417 | | 132,643,613 | | 135,296,485 | | 138,002,415 | | 651,646,830 | |
| 04 | 01 | 29 | Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program/Kegiatan Pembangunan | Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang dimanfaatkan | % | | | 767,174,600 | | 711,324,289 | | 798,168,454 | | 814,131,823 | | 830,414,459 | 0 | 3,921,213,625 | |
| 04 | 01 | 30 | Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Perekonomian Daerah | Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan oleh policy brief | % | | | 238,241,000 | | 220,897,055 | | 247,865,936 | | 252,823,255 | | 257,879,720 | 0 | 1,217,706,966 | |
| 04 | 01 | 35 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam | | | | | 120,000,000 | | 111,264,000 | | 124,848,000 | | 127,344,960 | | 129,891,859 | | 613,348,819 | |
| 04 | 01 | 36 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | | | | | 37,783,400 | | 35,032,768 | | 39,309,849 | | 40,096,046 | | 40,897,967 | | 193,120,030 | |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|----|--|---|--|--|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 04 | 01 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 37,783,400 | | 35,032,768 | | 39,309,849 | | 40,096,046 | | 40,897,967 | | 193,120,030 | | |
| 04 | 01 | Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik | | | 37,783,400 | | 35,032,768 | | 39,309,849 | | 40,096,046 | | 40,897,967 | | 193,120,030 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 04 | 01 | 15 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Perda yang terlaksana | 100% | 9,180,665,000 | 100% | 9,373,131,000 | 100% | 10,135,950,000 | 100% | 9,967,450,000 | 100% | 10,367,450,000 | 100% | 49,024,646,000 | SEKWAN |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD | % | 4,722,616,560 | | 4,378,810,074 | | 4,913,410,269 | | 5,011,678,474 | | 4,595,709,161 | | 23,622,224,538 | |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 644,150,000 | | 597,255,880 | | 670,173,660 | | 683,577,133 | | 697,248,676 | | 3,292,405,349 | |
| 04 | 01 | 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 280,000,000 | | 259,616,000 | | 291,312,000 | | 297,138,240 | | 303,081,004 | | 1,431,147,244 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 20,500,000 | 5 Dok | 21,012,500 | 5 Dok | 21,537,813 | 5 Dok | 22,076,258 | 5 Dok | 105,126,570 | |
| 1 | | Alok | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 164,840,000 | | 152,839,648 | | 171,499,536 | | 174,929,527 | | 178,428,117 | | 842,536,828 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 3,220,000 | | 2,985,584 | | 3,350,088 | | 3,417,090 | | 3,485,432 | | 16,458,194 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Alok | % | 128,600,000 | | 119,237,920 | | 133,795,440 | | 136,471,349 | | 139,200,776 | | 657,305,485 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 69,590,000 | | 64,523,848 | | 72,401,436 | | 73,849,465 | | 75,326,454 | | 355,691,203 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 15,950,000 | | 14,788,840 | | 16,594,380 | | 16,926,268 | | 17,264,793 | | 81,524,281 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | Kabor | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 131,975,000 | | 122,367,220 | | 137,306,790 | | 140,052,926 | | 142,853,984 | | 674,555,920 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kabor | % | 158,565,300 | | 147,021,746 | | 164,971,338 | | 168,270,765 | | 171,636,180 | | 810,465,329 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 38,609,700 | | 35,798,914 | | 40,169,532 | | 40,972,922 | | 41,792,381 | | 197,343,449 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 16,850,000 | | 15,623,320 | | 17,530,740 | | 17,881,355 | | 18,238,982 | | 86,124,397 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Madawat | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 130,500,000 | | 120,999,600 | | 135,772,200 | | 138,487,644 | | 141,257,397 | | 667,016,841 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Madawat | % | 159,492,000 | | 147,880,982 | | 165,935,477 | | 169,254,186 | | 172,639,270 | | 815,201,915 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 44,558,000 | | 41,314,178 | | 46,358,143 | | 47,285,306 | | 48,231,012 | | 227,746,639 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 18,550,000 | | 17,199,560 | | 19,299,420 | | 19,685,408 | | 20,079,116 | | 94,813,504 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Nangalimang | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 131,200,000 | | 121,648,640 | | 136,500,480 | | 139,230,490 | | 142,015,099 | | 670,594,709 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Nangalimang | % | 120,783,180 | | 111,990,164 | | 125,662,820 | | 128,176,077 | | 130,739,598 | | 617,351,839 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 42,416,820 | | 39,328,876 | | 44,130,459 | | 45,013,069 | | 45,913,330 | | 216,802,554 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 17,600,000 | | 16,318,720 | | 18,311,040 | | 18,677,261 | | 19,050,806 | | 89,957,827 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Kota Uneng | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 123,705,000 | | 114,699,276 | | 128,702,682 | | 131,236,736 | | 133,902,270 | | 632,245,964 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|---|---|--------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kotaunung | % | | 137,751,310 | | 127,723,015 | | 143,316,463 | | 146,182,792 | | 149,106,448 | | 704,080,028 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 63,146,500 | | 58,549,435 | | 65,697,619 | | 67,011,571 | | 68,351,802 | | 322,756,927 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,100,000 | | 15,855,120 | | 17,790,840 | | 18,146,657 | | 18,509,590 | | 87,402,207 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| 2 | | | Alok Barat | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 125,575,000 | | 116,433,140 | | 130,648,230 | | 133,261,195 | | 135,926,418 | | 641,843,983 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 3,220,000 | | 2,985,584 | | 3,350,088 | | 3,417,090 | | 3,485,432 | | 16,458,194 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Alok Barat | % | | 140,534,000 | | 130,303,125 | | 146,211,574 | | 149,135,805 | | 152,118,521 | | 718,303,025 | Alok Barat |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 52,285,000 | | 48,478,652 | | 54,397,314 | | 55,485,260 | | 56,594,965 | | 267,241,191 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 36,702,000 | | 34,030,094 | | 38,184,761 | | 38,948,456 | | 39,727,425 | | 187,592,736 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| | | | Wolomarang | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 80,500,000 | | 74,639,600 | | 83,752,200 | | 85,427,244 | | 87,135,789 | | 411,454,833 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Wolomarang | % | | 134,164,520 | | 124,397,343 | | 139,584,767 | | 142,376,462 | | 145,223,991 | | 685,747,083 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 98,985,480 | | 91,779,337 | | 102,984,493 | | 105,044,183 | | 107,145,067 | | 505,938,560 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 18,350,000 | | 17,014,120 | | 19,091,340 | | 19,473,167 | | 19,862,630 | | 93,791,257 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Wailiti | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 112,850,000 | | 104,634,520 | | 117,409,140 | | 119,757,323 | | 122,152,469 | | 576,803,452 | |
| | | | | Indeks Pelayanan pemerintahan | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Wailiti | % | | 131,050,000 | | 121,509,560 | | 136,344,420 | | 139,071,308 | | 141,852,734 | | 669,828,022 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 48,500,000 | | 44,969,200 | | 50,459,400 | | 51,468,588 | | 52,497,960 | | 247,895,148 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,600,000 | | 16,318,720 | | 18,311,040 | | 18,677,261 | | 19,050,806 | | 89,957,827 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Hewuli | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 149,883,200 | | 138,971,703 | | 155,938,481 | | 159,057,251 | | 162,238,396 | | 766,089,031 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Hewuli | % | | 102,429,200 | | 94,972,354 | | 106,567,340 | | 108,698,686 | | 110,872,660 | | 523,540,240 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 19,687,600 | | 18,254,343 | | 20,482,979 | | 20,892,639 | | 21,310,491 | | 100,628,052 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,250,000 | | 15,994,200 | | 17,946,900 | | 18,305,838 | | 18,671,955 | | 88,168,893 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| | | | Wuring | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 97,925,000 | | 90,796,060 | | 101,881,170 | | 103,918,793 | | 105,997,169 | | 500,518,192 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Wuring | % | | 125,975,000 | | 116,804,020 | | 131,064,390 | | 133,685,677 | | 136,359,391 | | 643,888,478 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 83,750,000 | | 77,653,000 | | 87,133,500 | | 88,876,170 | | 90,653,693 | | 428,066,363 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,350,000 | | 16,086,920 | | 18,050,940 | | 18,411,958 | | 18,780,197 | | 88,680,015 | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|--|----|---|--|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 |
| 3 | | | Alok Timur | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 158,050,000 | | 146,543,960 | | 164,435,220 | | 167,723,924 | | 171,078,042 | | 807,831,146 |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 3,220,000 | | 2,985,584 | | 3,350,088 | | 3,417,090 | | 3,485,432 | | 16,458,194 |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Alok Timur | % | 126,475,820 | | 117,268,380 | | 131,585,443 | | 134,217,152 | | 136,901,495 | | 646,448,290 |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 60,544,800 | | 56,137,139 | | 62,990,809 | | 64,250,626 | | 65,535,639 | | 309,459,013 |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 18,650,000 | | 17,292,280 | | 19,403,460 | | 19,791,529 | | 20,187,360 | | 95,324,629 |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 |
| | | | Waioti | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 87,450,000 | | 81,083,640 | | 90,982,980 | | 92,082,639 | | 94,658,692 | | 446,257,951 |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Waioti | % | 134,874,740 | | 125,055,859 | | 140,323,679 | | 143,130,153 | | 145,992,756 | | 689,377,187 |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 108,875,260 | | 100,949,141 | | 113,273,820 | | 115,539,296 | | 117,850,082 | | 556,487,599 |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 17,300,000 | | 16,040,560 | | 17,998,920 | | 18,358,898 | | 18,726,076 | | 88,424,454 |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 |
| | | | Nangameting | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 103,672,000 | | 96,124,678 | | 98,527,795 | | 100,990,990 | | 103,515,765 | | 502,831,229 |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Nangameting | % | 168,288,000 | | 156,036,634 | | 175,086,835 | | 178,588,571 | | 182,162,343 | | 860,162,383 |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 57,040,000 | | 52,887,488 | | 59,344,416 | | 60,531,304 | | 61,741,930 | | 291,545,138 |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 19,000,000 | | 17,616,800 | | 19,767,600 | | 20,162,952 | | 20,566,211 | | 97,113,563 |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 |
| | | | Wairotang | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 145,000,000 | | 134,444,000 | | 150,858,000 | | 153,875,160 | | 156,925,663 | | 741,102,823 |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Wairotang | % | 106,700,000 | | 98,932,240 | | 111,010,680 | | 113,230,893 | | 115,495,511 | | 545,369,324 |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 52,700,000 | | 48,863,440 | | 54,829,080 | | 55,925,661 | | 57,044,174 | | 269,362,355 |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 17,600,000 | | 16,318,720 | | 18,311,040 | | 18,677,260 | | 19,050,806 | | 89,957,826 |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | % | 30,000,000 | | 27,816,000 | | 36,000,000 | | 39,000,000 | | 43,000,000 | | 175,816,000 |
| | | | Beru | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 125,631,000 | | 116,485,063 | | 130,706,492 | | 133,320,622 | | 135,987,034 | | 642,130,211 |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Beru | % | 139,509,000 | | 129,352,745 | | 145,145,163 | | 148,048,066 | | 151,009,028 | | 713,064,002 |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 53,860,000 | | 49,938,992 | | 56,035,944 | | 57,156,662 | | 58,299,796 | | 275,291,394 |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 18,000,000 | | 16,689,600 | | 18,727,200 | | 19,101,744 | | 19,483,778 | | 92,002,322 |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 |
| | | | Kota Baru | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 139,240,000 | | 129,103,328 | | 144,865,296 | | 147,762,601 | | 150,717,853 | | 711,689,078 |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|---|---|--------------------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kelurahan Kota Baru | % | | 139,466,500 | | 129,313,339 | | 145,100,946 | | 148,002,965 | | 150,963,024 | | 712,846,774 | Alok |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 88,693,500 | | 82,236,613 | | 50,660,717 | | 51,673,931 | | 52,707,410 | | 325,972,171 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,600,000 | | 16,318,720 | | 18,311,404 | | 18,677,260 | | 19,050,806 | | 89,958,190 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 10,000,000 | 5 Dok | 9,272,000 | 5 Dok | 9,503,800 | 5 Dok | 9,741,395 | 5 Dok | 9,984,930 | 5 Dok | 48,502,125 | |
| 4 | | | Bola | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 149,800,000 | | 138,894,560 | | 155,851,920 | | 158,968,958 | | 162,148,338 | | 765,663,776 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 6,400,000 | | 5,934,080 | | 6,658,560 | | 6,791,731 | | 6,927,566 | | 32,711,937 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Bola | % | | 129,220,000 | | 119,812,784 | | 134,440,488 | | 137,129,298 | | 139,871,884 | | 660,474,454 | Bola |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 36,670,000 | | 34,000,424 | | 38,151,468 | | 38,914,497 | | 39,692,787 | | 187,429,176 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 24,300,000 | | 22,530,960 | | 25,281,720 | | 25,787,354 | | 26,303,101 | | 124,203,135 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 5 | | | Doreng | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 146,550,000 | | 135,881,160 | | 152,470,620 | | 155,520,032 | | 158,630,433 | | 749,052,245 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 8,044,000 | | 7,458,397 | | 8,327,362 | | 8,493,909 | | 8,663,787 | | 40,987,455 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Doreng | % | | 117,366,000 | | 108,821,755 | | 122,107,586 | | 124,549,738 | | 127,040,733 | | 599,885,812 | Doreng |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 83,580,000 | | 77,495,376 | | 86,956,632 | | 88,695,765 | | 90,469,680 | | 427,197,453 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 19,000,000 | | 17,616,800 | | 19,767,600 | | 20,162,952 | | 20,566,211 | | 97,113,563 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 6 | | | Hewokloang | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 135,000,000 | | 125,172,000 | | 140,454,000 | | 143,263,080 | | 146,128,342 | | 690,017,422 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 25,000,000 | | 23,180,000 | | 26,010,000 | | 26,530,200 | | 27,060,804 | | 122,781,004 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Hewokloang | % | | 120,300,000 | | 111,542,160 | | 125,160,120 | | 127,663,322 | | 130,216,589 | | 614,882,191 | Hewokloang |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 91,200,000 | | 84,560,640 | | 94,864,440 | | 96,782,170 | | 98,717,813 | | 466,125,063 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 22,200,000 | | 20,583,840 | | 23,096,880 | | 23,558,818 | | 24,029,994 | | 113,469,532 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 7 | | | Kangae | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 147,468,400 | | 136,732,700 | | 153,824,283 | | 156,919,129 | | 160,057,512 | | 755,002,024 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 9,000,000 | | 8,344,800 | | 9,363,600 | | 9,550,872 | | 9,741,889 | | 46,001,161 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Kangae | % | | 164,981,600 | | 152,970,940 | | 171,646,857 | | 175,079,794 | | 178,581,390 | | 843,260,581 | Kangae |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 46,050,000 | | 42,697,560 | | 4,791,042 | | 48,868,628 | | 4,986,000 | | 147,393,230 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 19,250,000 | | 17,848,600 | | 20,027,700 | | 20,428,254 | | 20,836,819 | | 98,391,373 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 8 | | | Kewapante | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 120,600,000 | | 111,820,320 | | 125,472,240 | | 127,981,685 | | 130,541,318 | | 616,415,563 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 12,675,000 | | 11,752,260 | | 13,187,070 | | 13,450,811 | | 13,719,828 | | 64,784,969 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Kewapante | % | | 130,915,000 | | 121,384,388 | | 136,203,966 | | 138,928,045 | | 141,706,606 | | 669,138,005 | Kewapante |

| KODE | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|--|---|--|--|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | | Rp | |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 61,010,000 | | 56,568,472 | | 63,474,804 | | 64,744,300 | | 66,039,186 | | 311,836,762 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 17,800,000 | | 16,504,160 | | 18,519,120 | | 18,889,502 | | 19,267,292 | | 90,980,074 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 9 | | | Koting | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 120,430,500 | | 111,663,160 | | 125,295,892 | | 127,801,810 | | 130,357,846 | | 615,549,208 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 14,679,800 | | 13,611,111 | | 15,272,864 | | 15,578,321 | | 15,889,888 | | 75,031,984 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Koting | % | | 130,389,700 | | 120,897,330 | | 135,657,444 | | 138,370,593 | | 141,138,005 | | 666,453,072 | Koting |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 85,500,000 | | 79,275,600 | | 88,954,200 | | 90,733,284 | | 92,547,950 | | 437,011,034 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 19,000,000 | | 17,616,800 | | 19,767,600 | | 20,162,952 | | 20,566,211 | | 97,113,563 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 10 | | | Lela | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 174,550,000 | | 161,842,760 | | 181,601,820 | | 185,233,856 | | 188,938,533 | | 892,166,969 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 14,679,800 | | 13,611,111 | | 15,272,864 | | 15,578,321 | | 15,889,888 | | 75,031,984 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Lela | % | | 153,962,620 | | 142,754,141 | | 160,182,710 | | 163,386,364 | | 166,654,091 | | 786,939,926 | Lela |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 71,324,880 | | 66,132,429 | | 74,206,405 | | 75,690,533 | | 77,204,344 | | 364,558,591 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 18,550,000 | | 17,199,560 | | 19,299,420 | | 19,685,408 | | 20,079,116 | | 94,813,504 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 11 | | | Magepanda | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 103,400,000 | | 95,872,480 | | 107,577,360 | | 109,728,907 | | 111,923,485 | | 528,502,232 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 56,811,000 | | 52,675,159 | | 59,106,164 | | 60,288,288 | | 61,494,053 | | 290,374,664 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Magepanda | % | | 133,714,603 | | 123,980,180 | | 139,116,673 | | 141,899,006 | | 144,736,986 | | 683,447,448 | Magepanda |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 82,174,397 | | 76,192,101 | | 85,494,243 | | 87,204,127 | | 88,948,210 | | 420,013,078 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 13,900,000 | | 12,888,080 | | 14,461,560 | | 14,750,791 | | 15,045,807 | | 71,046,238 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 12 | | | Mapitara | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 135,137,700 | | 125,299,675 | | 143,263,080 | | 146,128,342 | | 135,000,000 | | 684,828,797 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 7,500,200 | | 6,954,185 | | 7,803,208 | | 7,959,272 | | 8,118,458 | | 38,335,323 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Mapitara | % | | 128,456,000 | | 119,104,403 | | 133,645,622 | | 136,318,535 | | 139,044,905 | | 656,569,465 | Mapitara |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 70,843,800 | | 65,686,371 | | 73,705,889 | | 75,180,007 | | 76,683,607 | | 362,099,674 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 18,200,000 | | 16,875,040 | | 18,935,280 | | 19,313,986 | | 19,700,265 | | 93,024,571 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 20,500,000 | 5 Dok | 21,012,500 | 5 Dok | 21,537,813 | 5 Dok | 22,076,258 | 5 Dok | 105,126,570 | |
| 13 | | | Mego | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 143,700,000 | | 133,238,640 | | 149,505,480 | | 152,495,590 | | 155,545,501 | | 734,485,211 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 4,750,000 | | 4,404,200 | | 4,941,900 | | 5,040,738 | | 5,141,553 | | 24,278,391 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Mego | % | | 141,254,400 | | 130,971,080 | | 146,961,078 | | 149,900,299 | | 152,898,305 | | 721,985,162 | Mego |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 99,608,100 | | 92,356,630 | | 103,632,267 | | 105,704,912 | | 107,819,011 | | 509,120,920 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 15,350,000 | | 14,232,520 | | 15,970,140 | | 16,289,543 | | 16,615,334 | | 78,457,537 | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|--|----|---|---|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 14 | | | Nelle | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 124,000,000 | | 114,972,800 | | 129,009,600 | | 131,589,792 | | 134,221,588 | | 633,793,780 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 15,000,000 | | 13,908,000 | | 15,606,000 | | 15,918,120 | | 16,236,482 | | 76,668,602 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Nelle | % | 134,400,480 | | 124,616,125 | | 139,414,099 | | 142,202,381 | | 145,046,429 | | 685,679,514 | Nelle |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 51,500,000 | | 47,750,800 | | 53,580,600 | | 54,652,212 | | 55,745,256 | | 263,228,868 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 29,500,000 | | 27,352,400 | | 30,691,800 | | 31,305,636 | | 31,931,749 | | 150,781,585 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 15 | | | Nita | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 169,400,000 | | 157,067,680 | | 176,243,760 | | 179,768,635 | | 183,364,008 | | 865,844,083 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 10,000,000 | | 9,272,000 | | 10,404,000 | | 10,612,080 | | 10,824,322 | | 51,112,402 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Nita | % | 140,799,450 | | 130,549,250 | | 146,466,940 | | 149,396,278 | | 152,384,204 | | 719,596,122 | Nita |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 70,837,900 | | 65,680,901 | | 73,699,751 | | 75,173,746 | | 76,677,221 | | 362,069,519 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 20,000,000 | | 18,544,000 | | 28,808,000 | | 21,224,160 | | 21,648,643 | | 110,224,803 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 16 | | | Paga | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 157,800,000 | | 146,312,160 | | 164,175,120 | | 167,458,622 | | 170,807,795 | | 806,553,697 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 6,650,000 | | 6,165,880 | | 6,918,660 | | 7,057,033 | | 7,198,174 | | 33,989,747 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Paga | % | 162,890,000 | | 151,031,608 | | 169,470,756 | | 172,860,171 | | 176,317,374 | | 832,569,909 | Paga |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 130,710,000 | | 121,194,312 | | 135,950,684 | | 138,710,498 | | 141,484,708 | | 668,050,202 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 20,150,000 | | 18,683,080 | | 20,964,060 | | 21,383,341 | | 21,811,008 | | 102,991,489 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 17 | | | Palue | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 198,500,000 | | 184,049,200 | | 206,519,400 | | 210,649,788 | | 214,462,784 | | 1,014,181,172 | |
| | | | Indeks Pelayanan pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | 12,750,000 | | 11,821,800 | | 13,265,100 | | 15,530,402 | | 13,801,010 | | 67,168,312 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Palue | % | 301,574,000 | | 279,619,413 | | 313,757,590 | | 320,032,741 | | 32,643,396 | | 1,247,627,140 | Palue |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 45,126,000 | | 41,840,827 | | 46,949,090 | | 47,888,072 | | 48,845,834 | | 230,649,823 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 19,050,000 | | 17,663,160 | | 19,819,620 | | 20,216,012 | | 20,620,333 | | 97,369,125 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 18 | | | Talibura | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | 162,600,000 | | 150,762,720 | | 169,169,020 | | 172,552,421 | | 176,003,469 | | 831,087,630 | |
| | | | Indeks Pelayanan pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | - |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keuangan desa | | | 19,450,000 | | 18,034,040 | | 20,235,780 | | 20,640,496 | | 21,053,305 | | 99,413,621 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Talibura | % | 138,462,200 | | 128,382,152 | | 144,056,073 | | 146,937,194 | | 149,875,938 | | 707,713,557 | Talibura |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | 91,367,500 | | 84,715,946 | | 95,058,747 | | 96,959,922 | | 9,889,120 | | 377,991,235 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | 21,150,000 | | 19,610,280 | | 22,004,460 | | 22,444,549 | | 22,893,440 | | 108,102,729 | |

| KODE | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | |
|------|--|----|---|---|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | |
| 19 | | | Tanawawo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 138,600,000 | | 128,509,920 | | 144,199,440 | | 147,083,429 | | 150,025,097 | | 708,417,886 | |
| | | | | Indeks Pelayanan pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 5,625,000 | | 5,215,500 | | 5,852,250 | | 5,969,295 | | 6,088,681 | | 28,750,726 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Tanawawo | % | | 133,172,060 | | 123,477,134 | | 138,552,211 | | 141,323,255 | | 144,149,720 | | 680,674,380 | Tanawawo |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 63,927,800 | | 59,273,856 | | 66,510,483 | | 67,840,693 | | 69,167,507 | | 326,720,339 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 14,200,000 | | 13,166,240 | | 14,773,680 | | 15,069,154 | | 15,370,537 | | 72,579,611 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| 20 | | | Waiblama | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 132,600,000 | | 122,946,720 | | 137,957,040 | | 140,716,181 | | 143,530,504 | | 677,750,445 | |
| | | | | Indeks Pelayanan pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 8,500,000 | | 7,881,200 | | 8,843,400 | | 9,020,268 | | 9,200,670 | | 43,445,538 | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Waiblama | % | | 118,784,720 | | 110,137,192 | | 123,583,623 | | 126,055,295 | | 128,576,401 | | 607,137,231 | Waiblama |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 80,665,280 | | 74,792,848 | | 83,924,157 | | 85,606,640 | | 87,314,693 | | 412,303,618 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 19,450,000 | | 18,034,040 | | 20,235,780 | | 20,640,496 | | 21,053,305 | | 99,413,621 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| 21 | | | Waigete | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 28 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan | Persentase aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan yang melayani secara optimal | | | 136,850,000 | | 126,887,320 | | 142,378,740 | | 145,226,315 | | 148,130,841 | | 699,473,216 | |
| 04 | 01 | 19 | Pogram pembinaan dan fasilitasi keungan desa | | | | 10,000,000 | | 9,272,000 | | 10,404,000 | | 10,612,080 | | 10824322 | | 51,112,402 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Waigete | % | | 126,869,000 | | 117,632,937 | | 131,994,508 | | 134,634,398 | | 137,327,086 | | 648,457,929 | Waigete |
| 04 | 01 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | % | | 133,581,000 | | 123,856,303 | | 138,977,672 | | 141,757,226 | | 144,592,370 | | 682,764,571 | |
| 04 | 01 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 19,700,000 | | 18,265,840 | | 20,495,880 | | 20,905,798 | | 21,323,915 | | 100,691,433 | |
| 04 | 01 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 Dok | 20,000,000 | 5 Dok | 18,544,000 | 5 Dok | 19,007,600 | 5 Dok | 19,482,790 | 5 Dok | 19,969,860 | 5 Dok | 97,004,250 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | INSPEKTORAT |
| 04 | 02 | 20 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Cakupan pelayanan pengawasan dan pengendalian | 19.52 | 45.16 | 1,035,000,000 | 45.16 | 1,138,500,000 | 45.16 | 1,252,350,000 | 45.16 | 1,377,585,000 | 45.16 | 1,676,474,600 | 45.16 | 6,479,909,600 | |
| 04 | 02 | 22 | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan dan sistem dan prosedur kebijakan pengawasan | Persentase implementasi kebijakan dan prosedur | 100% | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 15,000,000 | 100% | 75,000,000 | |
| 04 | 02 | 21 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas | Persentase kapasitas Sumber Daya Aparatur | 13.80% | 13.80% | 179,800,000 | 45.83% | 179,800,000 | 54.17% | 197,780,000 | 63.00% | 217,558,000 | 71.00% | 224,084,740 | 71.00% | 999,022,740 | |
| 04 | 02 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 10,000,000 | 100% | - | 100% | - | 100% | 10,000,000 | |
| 04 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inpektorat | 100% | 100% | 174,420,000 | 100% | 180,607,600 | 100% | 196,025,828 | 100% | 191,606,603 | 100% | 197,354,801 | 100% | 940,014,832 | |
| 04 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 64.41% | 64.41% | 349,500,000 | 69.49% | 1,997,585,000 | 76.27% | 842,667,550 | 88.14% | 551,857,577 | 100% | 775,318,234 | 100% | 4,516,928,361 | |
| 04 | 02 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | 100% | 100% | 55,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 73,500,000 | 100% | 77,175,000 | 100% | 81,033,750 | 100% | 356,708,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | BAPELITBANG |
| 04 | 02 | 15 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Perda | ada | ada | 2,197,556,000 | ada | 2,149,933,800 | ada | 2,257,430,490 | ada | 2,370,302,015 | ada | 3,938,817,115 | ada | 12,914,039,420 | |
| 04 | 02 | 16 | Program Kerjasama Pembangunan | Persentase kerjasama pembagunan | 100% | 100% | 362,750,000 | 100% | 380,887,500 | 100% | 399,931,875 | 100% | 419,928,469 | 100% | 440,924,892 | 100% | 2,004,422,736 | |
| 04 | 02 | 18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Persentase perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 100% | 100% | 50,000,000 | 100% | 52,500,000 | 100% | 55,125,000 | 100% | 57,881,250 | 100% | 60,775,313 | 100% | 276,281,563 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab |
|------|----|----|--|--|--------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Kondisi Akhir RPJMD | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 04 | 02 | 19 | Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar | Persentase perencanaan pembangunan kota yang dihasilkan | 100% | 100% | 269,467,500 | 100% | 332,940,875 | 100% | 349,587,919 | 100% | 367,067,315 | 100% | 385,420,680 | 100% | 1,704,484,289 | |
| 04 | 02 | 22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase perencanaan ekonomi yang dihasilkan | 100% | 100% | 395,000,000 | 100% | 914,750,000 | 100% | 435,487,500 | 100% | 457,261,875 | 100% | 480,124,969 | 100% | 2,682,624,344 | |
| 04 | 02 | 23 | Program Perencanaan Sosial Budaya | Persentase Perencanaan Sosial dan Budaya yang dihasilkan | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 78,750,000 | 100% | 432,687,500 | 100% | 86,821,875 | 100% | 91,162,969 | 100% | 764,422,344 | |
| 04 | 02 | 24 | Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Persentase perancanaan prasarana yang dihasilkan | 100% | 100% | 75,000,000 | 100% | 78,750,000 | 100% | 429,567,500 | 100% | 81,954,525 | 100% | 84,413,161 | 100% | 749,685,186 | |
| 04 | 02 | 25 | Program Perencanaan Tata Ruang | Tersedianya dokumen RT RW yang telah ditetapkan dengan Perda | ada | ada | 350,000,000 | | - | | - | | - | | - | ada | 350,000,000 | |
| 04 | 02 | 26 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 100% | 100% | 92,000,000 | 100% | 96,600,000 | 100% | 101,430,000 | 100% | 106,501,500 | 100% | 111,826,575 | 100% | 508,358,075 | |
| 04 | 02 | 27 | Program Pemanfaatan Ruang | Persentase hasil pemanfaatan ruang | - | - | - | 100% | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | 100% | 350,000,000 | |
| 04 | 02 | 15 | Program pengembangan data/informasi | Persentase pengembangan data/informasi | 100% | 100% | 3,100,516,050 | 100% | 3,755,541,853 | 100% | 3,943,318,945 | 100% | 4,140,484,892 | 100% | 4,347,509,137 | 100% | 19,287,370,877 | |
| 04 | 02 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapelitbang | 100% | 100% | 918,327,660 | 100% | 963,544,043 | 100% | 1,011,000,245 | 100% | 1,060,807,627 | 100% | 1,113,083,100 | 100% | 5,066,762,675 | |
| 04 | 02 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 293,250,000 | 100% | 447,720,500 | 100% | 495,106,525 | 100% | 490,921,226 | 100% | 517,904,788 | 100% | 2,244,903,039 | |
| 04 | 02 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase disiplin aparatur | 100% | - | - | - | - | 100% | 15,000,000 | - | - | - | - | 100% | 15,000,000 | |
| 03 | 01 | 05 | Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi | 16.66% | - | - | 33.33% | 90,000,000 | 50.00% | 94,500,000 | 66.66% | 99,225,000 | 83.33% | 104,186,250 | 83.33% | 387,911,250 | |
| 03 | 03 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik | 100% | - | - | 100% | 200,000,000 | 100% | 210,000,000 | 100% | 220,500,000 | 100% | 231,525,000 | 100% | 862,025,000 | |
| 03 | 03 | 20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Perencanaan Pembangunan Daerah | 19.44% | 36.11% | 90,000,000 | 52.77% | 184,500,000 | 69.44% | 193,725,000 | 86.11% | 203,411,250 | 100% | 213,581,813 | 100% | 885,218,063 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | - | BPKAD |
| 04 | 04 | 06 | Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | Persentase Penyediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 80,741,000 | 100% | 84,778,000 | 100% | 89,016,000 | 100% | 93,467,000 | 100% | 98,141,000 | 100% | 446,143,000 | |
| 04 | 04 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi | 100% | 100% | 694,985,000 | 100% | 729,734,000 | 100% | 766,220,000 | 100% | 804,532,000 | 100% | 844,758,000 | 100% | 3,840,229,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 04 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | 100% | 100% | - | 100% | - | 100% | 17,500,000 | 100% | - | 100% | - | 100% | 17,500,000 | |
| 04 | 04 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan terintegrasi | 100% | 100% | 2,813,325,685 | 100% | 2,926,948,114 | 100% | 2,915,736,569 | 100% | 3,116,696,273 | 100% | 3,384,756,355 | 100% | 15,157,462,996 | |
| 04 | 04 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPKAD | 100% | 100% | 1,506,487,000 | 100% | 1,581,811,000 | 100% | 1,660,901,000 | 100% | 1,743,947,000 | 100% | 1,831,144,000 | 100% | 8,324,290,000 | |
| 04 | 04 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 100% | 301,200,000 | 100% | 946,510,000 | 100% | 289,695,000 | 100% | 308,702,000 | 100% | 457,689,000 | 100% | 2,303,796,000 | |
| 04 | 04 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 456,609,000 | 100% | 396,350,000 | 100% | 306,167,000 | 100% | 266,475,000 | 100% | 285,180,000 | 100% | 1,710,781,000 | |
| 03 | 03 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 80,741,000 | 100% | 99,778,000 | 100% | 104,766,000 | 100% | 110,005,000 | 100% | 115,505,000 | 100% | 510,795,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 04 | 04 | 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Presentase pendapatan daerah yang akuntabel dan mandiri | 89.20% | 100% | 999,083,890 | 100% | 1,026,912,303 | 100% | 1,074,508,118 | 100% | 1,124,483,324 | 100% | 1,173,259,640 | 100% | 5,398,247,275 | BAPENDA |
| 04 | 04 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapenda | 92.06% | 96.00% | 530,429,625 | 97.00% | 556,951,106 | 98.00% | 584,798,662 | 99.00% | 614,038,595 | 100% | 644,740,524 | 100% | 2,930,958,512 | |
| 04 | 04 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 50% | 60% | 91,841,840 | 70% | 622,735,803 | 80% | 4,231,828,317 | 90% | 126,795,377 | 100% | 199,168,768 | 100% | 5,272,370,105 | |
| 04 | 04 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | % | | 267,750,000 | | 248,257,800 | | 278,567,100 | | 284,138,442 | | 289,821,210 | | 1,368,534,552 | |
| 03 | 03 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keungan | | - | - | 7 Dok | 15,000,000 | 7 Dok | 15,450,000 | 7 Dok | 15,913,500 | 7 Dok | 15,390,900 | 7 Dok | 61,754,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | - | BKD |
| 04 | 05 | 33 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Cakupan penyusunan rencana pembinaan karir ASN dan sistem informasi | 97% | 75% | 2,032,890,699 | 75.60% | 1,989,035,234 | 76.00% | 2,090,236,996 | 77.00% | 2,166,748,846 | 78.00% | 2,268,836,288 | 100% | 10,547,748,063 | |
| 04 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKD & PSDM | 97% | 20% | 294,956,200 | 20% | 309,704,010 | 20% | 325,189,211 | 20% | 341,948,672 | 100% | 358,521,106 | 100% | 1,630,319,199 | |
| 04 | 05 | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 60% | 60% | 71,715,000 | 65% | 43,800,750 | 70% | 45,990,788 | 75% | 48,290,788 | 100% | 50,704,843 | 100% | 260,502,169 | |
| 04 | 05 | 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Disiplin Aparatur | | 70% | - | 1% | | 76% | 15,000,000 | 77% | | 78% | | 100% | 15,000,000 | |
| 04 | 05 | 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 75% | 70% | 225,000,000 | 73% | 225,000,000 | 75% | 225,000,000 | 76% | 225,000,000 | 77% | 225,000,000 | 100% | 1,125,000,000 | |

| KODE | | | BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Awal RPJMD | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | PD Penanggung Jawab | | |
|------|----|----|--|---|--------------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | | Kondisi Akhir RPJMD | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | Target | Rp |
| 04 | 05 | 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | | 75% | 25,000,000 | 75% | 26,000,000 | 75% | 27,562,000 | 100% | 28,940,625 | 100% | 107,502,625 | - BKD | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 05 | 32 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur | Persentasi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 60 | 40 | 1,023,478,932 | 37 | 1,041,895,932 | 22 | 1,093,990,729 | 18 | 1,148,690,162 | 16 | 1,206,124,778 | 100 | | 5,514,180,533 |
| | | | | | | | 473,717,305,159 | | 633,083,816,191 | | 733,533,940,855 | | 640,983,198,094 | | 651,356,064,946 | | 3,119,123,485,245 | |

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1. berikut:

TABEL 8.1.

PENETAPAN INDIKATOR UTAMA KABUPATEN SIKKA 2018-2023

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Kondisi Awal RPJMD | TARGET TAHUN | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 63,80 | 67,40 | 68,60 | 69,80 | 72,00 | 73,20 |
| 2 | Indeks Kebahagiaan | < 68,52 | 68,52 | 69,02 | 69,52 | 70,02 | 70,52 |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | C | C | CC | CC | B | B |
| 4 | Indeks Pendidikan | 9,45 | 10,58 | 11,00 | 11,20 | 11,80 | 12,00 |
| 5 | Angka Harapan Hidup | 66,3 | 66,69 | 66,86 | 67,04 | 67,21 | 67,38 |
| 6 | PDRB Per Kapita | Rp13.610.000 | Rp14.555.096 | Rp15.545.144 | Rp16.535.192 | Rp17.525.280 | Rp18.515.288 |
| 7 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,22 | 5,3 | 5,6 | 5,86 | 6,1 | 6,3 |
| 8 | Inflasi | 1,7 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 |
| 9 | Indeks Gini | 0,274 | 0,269 | 0,256 | 0,242 | 0,229 | 0,215 |
| 10 | Indeks Wiliamson | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,43 |
| 11 | Angka Kemiskinan | 14,2% | 13,45% | 12,2% | 11,57% | 10,64% | 9,9% |
| 12 | Tingkat Pengangguran | 2,50 | 2,21 | 1,84 | 1,47 | 1,19 | 1,02 |
| 13 | Indeks Rasa Aman dan Nyaman | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 |
| 14 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 15 | Jumlah Temuan BPK dan APIP | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Indeks Kualitas Pelayanan Publik | 1,85 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3 |
| 17 | Nilai SAKIP | CC | CC | B | B | B | A |

TABEL 8.2.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1.1.1 | <i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i> | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Pertumbuhan PDRB | 13,610,000 | 14,555,096 | 15,545,144 | 16,535,192 | 17,525,280 | 18,515,288 | 18,515,288 |
| 1.1.1.2 | Laju Inflasi | 5.22 | 5.3 | 5.6 | 5.86 | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| 1.1.1.3 | PDRB per kapita | 1.7 | 1.59 | 1.59 | 1.51 | 1.51 | 1.35 | 1.35 |
| 1.1.1.4 | Indeks Gini | 0.274 | 0.269 | 0.256 | 0.242 | 0.229 | 0.215 | 0.215 |
| 1.1.1.5 | Indeks Ketimpangan Williamson | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| 1.1.1.6 | Persentase Penduduk Miskin | 14.2 | 13.45 | 12.2 | 11.57 | 10.64 | 9.9 | 9.9 |
| 1.1.1.7 | Indeks Pembangunan Manusia | 63.80 | 67.40 | 68.60 | 69.80 | 72.00 | 73.20 | 73.20 |
| 1.1.1.8 | Indeks Kebahagiaan | <68,52 | 68.52 | 69.00 | 69.52 | 70.02 | 70.52 | 70.52 |
| 1.2 | Fokus Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1.2.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Indeks Pendidikan | 9.45 | 10.58 | 11.00 | 11.20 | 11.80 | 12.00 | 12.00 |
| 1.2.1.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 6.56 | 6.74 | 6.91 | 7.08 | 7.25 | 7.42 | 4.42 |
| 1.2.1.3 | Angka Harapan Sekolah | 12.34 | 13.92 | 15.07 | 16.22 | 17.37 | 18.51 | 18.51 |
| 1.2.1.4 | APK PAUD | 55.483 | 57.53 | 59.58 | 61.64 | 63.69 | 65.74 | 65.74 |
| 1.2.1.5 | APK SD/MI | 107.77 | 108.53 | 109.29 | 110.05 | 110.81 | 111.57 | 111.57 |
| 1.2.1.5 | APK SMP/MTs | 96.22 | 96.31 | 96.56 | 97.81 | 98.06 | 98.31 | 98.31 |
| 1.2.1.6 | APM SD/MI | 97.70 | 98.10 | 98.30 | 98.50 | 98.70 | 98.90 | 98.90 |
| 1.2.1.7 | APM SMP/MTs | 78.75 | 80.52 | 81.11 | 81.70 | 82.29 | 82.88 | 82.88 |
| 1.2.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Jumlah Kematian Ibu | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | Angka Kematian Bayi | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3 | Angka Kematian Neonatal | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 | Angka Harapan Hidup | 66.3 | 66.69 | 66.86 | 67.04 | 67.21 | 67.38 | 67.38 |
| 1.2.3 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) | 54.10 | 55.00 | 57.00 | 61.00 | 64.00 | 68.00 | 68.00 |
| 1.2.3.2 | Kesempatan kerja | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 3,000 |
| 1.2.3.3 | Hubungan industrial dan kondisi lingkungan kerja | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 170 |
| 1.2.3.4 | Jaminan sosial tenaga kerja dan kesesuaian upah kerja | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 2,500 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|------------|---|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.3 | Fokus Seni Budaya dan Olahraga | | | | | | | |
| 1.3.1 | Kebudayaan | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Jumlah Grup Kesenian | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 1.3.1.2 | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3.2 | Pemuda dan Olahraga | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Jumlah Klub Olahraga | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 1.3.2.2 | Jumlah Gedung Olahraga | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | |
| 2. | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 2.1 | <i>Fokus Pelayanan Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</i> | | | | | | | |
| 2.1.1 | Pendidikan | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Rasio Guru-Siswa SD/MI | 1:25 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| 2.1.1.2 | Rasio Guru-Siswa SMP/MTs | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 | 1:28 |
| 2.1.1.3 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.40 |
| 2.1.1.4 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 2.1.1.5 | Persentase Kelulusan SD/MI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.1.6 | Persentase Kelulusan SMP/MTs | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.1.7 | Angka Kelulusan SD/MI | 98.24% | 98.49% | 98.74% | 98.99% | 99.24% | 99.49% | 100% |
| 2.1.1.8 | Angka Kelulusan SMP/MTs | 99.09% | 99.19% | 99.29% | 99.39% | 99.49% | 99.59% | 100% |
| 2.1.1.9 | Jumlah siswa berprestasi di bidang sains tingkat Regional dan Nasional | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Cakupan ibu hamil resti yang ditangani | 38.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.2 | Cakupan ibu hamil K1 | 71.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.3 | Cakupan ibu hamil K4 | 51.54 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 | 85 |
| 2.1.2.4 | Cakupan pertolongan persalinan di faskes memadai | 67.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.5 | Cakupan kunjungan nifas lengkap (K3) | 67.68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.6 | Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana PONE | 13 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.2.7 | Jumlah Puskesmas yang memiliki Tim PONE | 2 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.2.8 | Angka Kematian Bayi | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.9 | Angka Kematian Neonatal | 10.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10 | Cakupan Bayi dengan resiko tinggi yang ditangani | 31.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.11 | Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN3) | 69.41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan bayi standar | 67.7 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 | 85 |
| 2.1.2.13 | Rata-rata Kepuasan Pelanggan | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.9 | 0.9 |
| 2.1.2.14 | Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan terlatih penanganan bayi sesuai standar | 2 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|----------|---|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.1.2.15 | Jumlah Puskesmas yang memiliki Sarana dan Prasarana penangan bayi standar | 13 | 17 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.2.16 | Prevelensi Stunting | 30.4 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| 2.1.2.17 | Prevelensi Wasting | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2.1.2.18 | Prevelensi Underwasting | 7.3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2.1.2.19 | Cakupan Pemberian vitamin A | 91.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.20 | Cakupan Pemberian ASI Eksklusif | 84.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.21 | Cakupan PMTA pada Balita | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.22 | Cakupan balita sakit yang MTBS/MTBM | 3.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2.23 | Cakupan Kunjungan Rawat Jalan | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 2.1.2.24 | Cakupan Kunjungan Rawat Nginap | 2 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | 1.3 |
| 2.1.2.25 | Cakupan kunjungan rawat jalan penderita menular | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 2.1.2.26 | Cakupan kunjungan rawat jalan penderita tidak menular | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 2.1.2.27 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | 2.72 | 2.62 | 2.56 | 2.5 | 2.45 | 2.41 | 2.41 |
| 2.1.2.28 | Angka Kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19) | 45.7 | 43.1 | 40.5 | 37.9 | 35.3 | 32.7 | 32.7 |
| 2.1.2.29 | Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | 37.77 | 44.92 | 47.14 | 48.95 | 50.43 | 51.47 | 51.47 |
| 2.1.2.30 | Presentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB | 18.52 | 44.44 | 47.54 | 50.64 | 53.74 | 56.84 | 60.02 |
| 2.1.3 | Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Indeks Kualitas layanan insfratraktur pekerjaan umum | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | Indeks konektivitas jalan | 6.19 | 6.25 | 6.33 | 6.39 | 6.45 | 6.52 | 6.52 |
| 2.1.3.3 | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota | 72.00% | 73.00% | 75.00% | 78.00% | 79.00% | 80.00% | 80.00% |
| 2.1.3.4 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 46.88% | 46.69% | 46.54% | 46.39% | 46.23% | 46.09% | 46.09% |
| 2.1.3.5 | Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 6.93% | 9.24% | 10.39% | | | | |
| 2.1.3.6 | Persentase Irigasi dalam kondisi baik | 45.86% | 48.02% | 50.72% | 52.33% | 54.49% | 56.64% | 56.64% |
| 2.1.3.7 | Rasio jaringan irigasi | 27.56% | 27.94% | 28.33% | 28.71% | 29.09% | 29.48% | 29.48% |
| 2.1.3.8 | Persentase penduduk berakses air minum | 36.36% | 37.43% | 42.13% | 46.79% | 51.40% | 55.96% | 55.96% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.2.1.8 | Angka Kelayakan Mengajar Guru SD/MI | 78.70 | 80.50 | 82.30 | 84.10 | 86.90 | 88.70 | 88.70 |
| 1.2.1.9 | Angka Kelayakan Mengajar Guru SMP/MTs | 85.846 | 87.66 | 89.47 | 91.28 | 93.09 | 94.90 | 94.90 |
| 1.2.1.10 | Jumlah Guru yang memiliki Sertifikat | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 17.42 |
| 1.2.1.11 | Indeks Literasi Membaca | 7.78 | 8.04 | 8.51 | 9.14 | 9.77 | 10.40 | 10.40 |
| 1.2.1.12 | Persentase SD/MI yang memiliki Perpustakaan | 58.19% | 59.65% | 62.57% | 65.50% | 68.42% | 71.35% | 71.35% |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|--------------|---|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1.2.1.13 | Persentase SMP/MTs yang memiliki Perpustakaan | 51.72% | 56.32% | 62.07% | 67.82% | 73.86% | 78.16% | 78.16% |
| 1.2.1.14 | Persentase SD/MI yang memiliki Perpustakaan yang baik | 77.89% | 81.41% | 84.92% | 88.44% | 91.96% | 95.48% | 95.48% |
| 1.2.1.15 | Persentase SMP/MTs yang memiliki Perpustakaan yang baik | 66.67% | 80.00% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2.1.16 | Persentase SMP/MTs yang memiliki Labortarium | 70.11% | 79.31% | 83.91% | 89% | 93.10% | 98.85% | 98.85% |
| 1.2.1.17 | Persentase SMP/MTs yang memiliki Labortarium yang baik | 81.52% | 83.12% | 88.31% | 94% | 98.70% | 100% | 100% |
| 1.2.1.18 | Jumlah Siswa berprestasi di bidang sains tingkat regional dan nasional | - | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% |
| 2.1.2.2 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 0.28% |
| 2.1.2.3 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% | 0.009% |
| 2.1.2.4 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.21% |
| 2.1.2.5 | Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% | 2.65% |
| 2.1.2.6 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani | 23.30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.7 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan | 69.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.8 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 87.50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.9 | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.10 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA | 43.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.11 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | 13.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.13 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin | 2.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.14 | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 31.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.2.15 | Cakupan Puskesmas | 119% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.3 | Pekerjaan Umum | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.1.3.1 | Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | 54.77% | | | | | | |
| 2.1.3.2 | Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk | 0.00266 | | | | | | |
| 2.1.3.3 | Panjang Pembangunan Turap | 7,60 Km | | | | | | |
| 2.1.4 | Perumahan | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | 79.342 jiwa | | | | | | |
| 2.1.4.2 | Rumah Tangga Pengguna Listrik | 46.439 SR | | | | | | |
| 2.1.4.3 | Persentase Cakupan Sistem Limbah Setempat yang Memadai | 23.47% | | | | | | |
| 2.1.4.4 | Persentase Cakupan Sistem Limbah Skala Komunitas/Kawasan | | | | | | | |
| 2.1.4.5 | Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan | 1.01% | | | | | | |
| 2.1.4.6 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | 30.70% | | | | | | |
| 2.1.5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk | 3:10.000 | | | | | | |
| 2.1.5.2 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk | 82:10.000 | | | | | | |
| 2.1.5.3 | Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan/Desa | 3:01 | | | | | | |
| 2.1.5.4 | Persentase Penegakan Peraturan Daerah | 100% | | | | | | |
| 2.1.5.5 | Cakupan Patroli Petugas Satpol PP | 732 | | | | | | |
| 2.1.5.6 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kota | 100% | | | | | | |
| 2.1.5.7 | Petugas Linmas di Kota | 315 | | | | | | |
| 2.1.5.8 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran | 5% | | | | | | |
| 2.1.5.9 | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran | 18 menit | | | | | | |
| 2.1.6 | Sosial | | | | | | | |
| 2.1.6.1 | Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Rehabilitasi | | | | | | | |
| | Panti Asuhan | 9 lembaga | | | | | | |
| | Panti Sosial Remaja | 5 lembaga | | | | | | |
| | Panti Anak Cacat | 4 lembaga | | | | | | |
| | Panti Jompo | 1 lembaga | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.1.6.2 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial | 53.85% | | | | | | |
| 2.1.6.3 | Jumlah Penanganan PMKS | 6.367 kasus | | | | | | |
| 2.1.6.4 | Cakupan Anak Terlantar yang terbina | 194 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.2 | Fokus Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.2.1 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja | 0.70% | | | | | | |
| 2.2.1.2 | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan | 59.16% | | | | | | |
| 2.2.1.3 | Pencari Kerja Yang ditempatkan | 18 | | | | | | |
| 2.2.1.4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2.50% | | | | | | |
| 2.2.1.5 | Keselamatan dan Perlindungan Kerja | 20.499 orang | | | | | | |
| 2.2.1.6 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | 100% | | | | | | |
| 2.2.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | | | | | | | |
| | Rasio KDRT terhadap anak dan perempuan | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% |
| | Rasio perempuan korban kekerasan | 38.99% | 38.99% | 38.99% | 38.99% | 38.99% | 38.99% | 38.99% |
| 2.2.2.2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 89.38% | 89.38% |
| 2.2.2.3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 57.55% | 57.55% | 57.55% | 57.55% | 57.55% | 57.55% | 57.55% |
| 2.2.3 | Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Skor PPH Ketersediaan | 76.70% | 76.70% | 76.70% | 76.70% | 76.70% | 76.70% | 76.70% |
| 2.2.3.2 | Skor PPH Konsumsi | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| 2.2.4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Volume Sampah yang Terangkut ke TPA | 46.080 M3 | 46.080 M3 | 46.080 M3 | 46.080 M3 | 46.080 M3 | 46.080 M3 | 46.080 M3 |
| 2.2.4.2 | Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% |
| 2.2.4.3 | Persentase volume sampah yang dikelola secara 3R | 34.56% | 34.56% | 34.56% | 34.56% | 34.56% | 34.56% | 34.56% |
| 2.2.5 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk | 71.08% | 71.08% | 71.08% | 71.08% | 71.08% | 71.08% | 71.08% |
| 2.2.5.2 | Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk | 77.07% | 77.07% | 77.07% | 77.07% | 77.07% | 77.07% | 77.07% |
| 2.2.5.3 | Rasio Pasangan Berakta Nikah | 34.74% | 34.74% | 34.74% | 34.74% | 34.74% | 34.74% | 34.74% |
| 2.2.5.4 | Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kota | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2.2.6 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | | | | | | | |
| | LPMK | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | BPD | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 2.2.6.2 | Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2.2.6.3 | Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|----------|---|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.2.7 | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
| 2.2.7.2 | Cakupan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% |
| 2.2.7.3 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% |
| 2.2.8 | Perhubungan | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Jumlah Angkutan Umum yang melayani Wilayah yang telah tersedia Jaringan Jalan | | | | | | | |
| | Jumlah Angkutan Umum perkotaan | 112 unit | 112 unit | 112 unit | 112 unit | 112 unit | 112 unit | 112 unit |
| | Jumlah Trayek / Lin perkotaan | 6 trayek | 6 trayek | 6 trayek | 6 trayek | 6 trayek | 6 trayek | 6 trayek |
| | Jumlah Angkutan Umum Perdesaan | 156 unit | 156 unit | 156 unit | 156 unit | 156 unit | 156 unit | 156 unit |
| | Jumlah Trayek / Lin Perdesaan | 25 Trayek | 25 Trayek | 25 Trayek | 25 Trayek | 25 Trayek | 25 Trayek | 25 Trayek |
| 2.2.8.2 | Rasio Ijin Trayek | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
| 2.2.8.3 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 1457 unit | 1457 unit | 1457 unit | 1457 unit | 1457 unit | 1457 unit | 1457 unit |
| 2.2.8.4 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit | 26 menit |
| 2.2.8.5 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus | | | | | | | |
| | Pelabuhan Laut | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Pelabuhan Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Tamabatan Perahu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Terminal Bus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2.9 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 2.2.9.1 | Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2.9.2 | Jumlah Penyiaran Radio Lokal | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun | 6 Stasiun |
| 2.2.9.3 | Website Milik Pemerintah Daerah | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2.2.9 | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| | Koperasi Simpan Pinjam (KSP) | 91 unit | 91 unit | 91 unit | 91 unit | 91 unit | 91 unit | 91 unit |
| | Koperasi Serba Usaha (KSU) | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit | 80 unit |
| 2.2.9.1 | Jumlah Koperasi Aktif | | | | | | | |
| 2.2.9.2 | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 324 unit | 324 unit | 324 unit | 324 unit | 324 unit | 324 unit | 324 unit |
| 2.2.10 | Penanaman Modal | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) | Rp 218,585,816,710 | | | | | | |
| 2.2.10.2 | Daya Serap Tenaga Kerja | 1.498 orang | | | | | | |
| 2.2.10.3 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN | Rp 370,030,343,614 | | | | | | |
| 2.2.10 | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Jumlah Organisasi Pemuda | 60 organisasi | 60 organisasi | 60 organisasi | 60 organisasi | 60 organisasi | 60 organisasi | 60 organisasi |
| 2.2.10.2 | Jumlah Klub Olahraga | 53 klub | 53 klub | 53 klub | 53 klub | 53 klub | 53 klub | 53 klub |
| 2.2.10.3 | Jumlah Kegiatan Olahraga | 32 kegiatan | 32 kegiatan | 32 kegiatan | 32 kegiatan | 32 kegiatan | 32 kegiatan | 32 kegiatan |
| 2.2.10.4 | Jumlah Lapangan/Sarana Olahraga | 32 unit | 32 unit | 32 unit | 32 unit | 32 unit | 32 unit | 32 unit |
| 2.2.11 | Kebudayaan | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|----------|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.2.11.1 | Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11.2 | Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.11.3 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2.12 | Perpustakaan | | | | | | | |
| 2.2.11.1 | Jumlah Perpustakaan | 518 unit | 518 unit | 518 unit | 518 unit | 518 unit | 518 unit | 518 unit |
| 2.2.11.2 | Rasio Jumlah Perpustakaan Per 10.000 Penduduk | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
| 2.2.11.3 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | 764 org | 764 org | 764 org | 764 org | 764 org | 764 org | 764 org |
| 2.2.11.4 | Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | 5391 judul buku | 5391 judul buku | 5391 judul buku | 5391 judul buku | 5391 judul buku | 5391 judul buku | 5391 judul buku |
| 2.2.12 | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | | |
| 2.2.12.1 | Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2.2.12.2 | Kegiatan Pembinaan Terhadap OKP | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.2.12.3 | Kegiatan Pembinaan Terhadap Karang Taruna | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.2.12.2 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.13 | Statistik | 0 | | | | | | |
| 2.2.14 | Kearsipan | 60% | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.3 | Fokus Pelayanan Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 2.3.1 | Pertanian | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi/Palawija | 175,24 ton | | | | | | |
| 2.3.1.2 | Peningkatan Produktivitas Pertanian Hortikultura | 73.803,76 ton | | | | | | |
| 2.3.1.3 | Peningkatan Produktivitas Perkebunan | 29.858,25 ton | | | | | | |
| 2.3.1.4 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB | 35.36% | | | | | | |
| 2.3.1.5 | Cakupan Bina Kelompok Petani | 63.62% | | | | | | |
| 2.3.2 | Pariwisata | | | | | | | |
| 2.3.2.1 | Kunjungan Wisata | 47.228 org | | | | | | |
| 2.3.2.2 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 2.3.3 | Perdagangan | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 10.48% | 10.48% |
| 2.3.4 | Perindustrian | | | | | | | |
| 2.3.4.1 | Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
| 2.3.5 | Perikanan | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|----------|---|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2.3.5.1 | Produksi Perikanan | 16.972 ton | 16.972 ton | 16.972 ton | 16.972 ton | 16.972 ton | 16.972 ton | 16.972 ton |
| 2.3.5.2 | Konsumsi Ikan | 49,17 kg | 49,17 kg | 49,17 kg | 49,17 kg | 49,17 kg | 49,17 kg | 49,17 kg |
| 2.3.5.3 | Cakupan Bina Kelompok Perikanan | 34.37% | 34.37% | 34.37% | 34.37% | 34.37% | 34.37% | 34.37% |
| 2.3.6 | Ketransmigrasian | | | | | | | |
| 2.3.6.1 | Jumlah Transmigran Swakarsa | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 3.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 3.1.1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Pengeluaran Per Kapita | 7,855,000 | 7,855,000 | 7,855,000 | 7,855,000 | 7,855,000 | 7,855,000 | 7,855,000 |
| | | | | | | | | |
| 3.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 3.2.1 | Perhubungan | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% |
| 3.2.1.2 | Rasio Angkutan Umum yang Melewati Kota Maumere Per 1000 Penduduk | 0.02157% | 0.02157% | 0.02157% | 0.02157% | 0.02157% | 0.02157% | 0.02157% |
| 3.2.1.3 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Terminal Darat | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org |
| 3.2.1.4 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Terminal Darat | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton |
| 3.2.1.5 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Terminal Darat | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org | 1.269.936 org |
| 3.2.1.6 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Terminal Darat | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton | 5.901 ton |
| 3.2.1.7 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Bandar Udara | 97.534 org | 97.534 org | 97.534 org | 97.534 org | 97.534 org | 97.534 org | 97.534 org |
| 3.2.1.8 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Bandar Udara | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton | 1.078.511 ton |
| 3.2.1.9 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Bandar Udara | 96.480 org | 96.480 org | 96.480 org | 96.480 org | 96.480 org | 96.480 org | 96.480 org |
| 3.2.1.10 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Bandar Udara | 952.940 ton | 952.940 ton | 952.940 ton | 952.940 ton | 952.940 ton | 952.940 ton | 952.940 ton |
| 3.2.1.11 | Jumlah Orang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut | 59.925 org | 59.925 org | 59.925 org | 59.925 org | 59.925 org | 59.925 org | 59.925 org |
| 3.2.1.12 | Jumlah Barang Yang Masuk Melalui Pelabuhan Laut | 53.132 ton | 53.132 ton | 53.132 ton | 53.132 ton | 53.132 ton | 53.132 ton | 53.132 ton |
| 3.2.1.13 | Jumlah Orang Yang Keluar Melalui Pelabuhan Laut | 56.201 org | 56.201 org | 56.201 org | 56.201 org | 56.201 org | 56.201 org | 56.201 org |
| 3.2.1.14 | Jumlah Barang Yang Keluar Melalui Pelabuhan Laut | 803 ton | 1105 ton | 1235 ton | 1352 ton | 1527 ton | 1714 ton | 1714 ton |
| 3.2.2 | Ketaatan Terhadap RTRW | | | | | | | |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3.2.2.1 | Perubahan Terhadap Pelaksanaan Struktur Ruang | 74.19% | 74.19% | 74.19% | 74.19% | 74.19% | 74.19% | 74.19% |
| 3.2.2.2 | Perubahan Terhadap Pelaksanaan Pola Ruang | 86.88% | 86.88% | 86.88% | 86.88% | 86.88% | 86.88% | 86.88% |
| 3.2.3 | Wilayah Perkotaan | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Luas Kawasan Perkotaan Maumere | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha | 6181,83 Ha |
| 3.2.4 | Luas Wilayah Produktif | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | Persentase Luas Wilayah Produktif | 44.73% | 48.82% | 55.12% | 60.73% | 62.14% | 70.15% | 70.15% |
| 3.2.5 | Luas Wilayah Kebanjiran | | | | | | | |
| 3.2.5.1 | Persentase Luas Wilayah Kebanjiran | 21.99% | 19.99% | 17.19% | 15.29% | 13.35% | 10.36% | 10.36% |
| 3.2.6 | Fasilitas Ekonomi | | | | | | | |
| 3.2.6.1 | Jenis dan Jumlah Lembaga Keuangan Bank | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2.6.2 | Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| 3.2.6.3 | Jenis dan Jumlah Restoran | 2/114 | 2/120 | 2/125 | 2/130 | 2/135 | 2/135 | 2/135 |
| 3.2.6.4 | Jumlah Penginapan/Hotel | 36 penginapan/hotel | 37 penginapan/hotel | 38 penginapan/hotel | 42 penginapan/hotel | 44 penginapan/hotel | 46 penginapan/hotel | 46 penginapan/hotel |
| 3.2.7 | Infrastruktur Listrik | | | | | | | |
| 3.2.7.1 | Jumlah Sambungan Rumah Tangga Pengguna Listrik | 46.439 sambungan | 49.439 sambungan | 55.439 sambungan | 65.439 sambungan | 70.439 sambungan | 75.059 sambungan | 75.059 sambungan |
| 3.2.8 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 3.2.8.1 | Jumlah Pelanggan Telepon Rumah | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan | 2.777 pelanggan |
| 3.2.8.2 | Jumlah Pelanggan Sambungan Layanan Internet Rumah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.3 | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | |
| 3.3.1 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Angka Kriminalitas Yang Tertangani | 157 kasus | 157 kasus | 157 kasus | 157 kasus | 157 kasus | 157 kasus | 157 kasus |
| 3.3.1.2 | Lama Proses Perijinan | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari | 6 hari |
| 3.3.1.3 | Jenis dan Jumlah Objek Pajak Daerah | 9/142.765 | 9/142.765 | 9/142.765 | 9/142.765 | 9/142.765 | 9/142.765 | 9/142.765 |
| 3.3.1.4 | Jenis dan Jumlah Obyek Retribusi Daerah | | | | | | | |
| 3.3.1.5 | Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha | 3 PERDA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.4 | Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| 3.4.1 | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | Persentase Penduduk Yang Tidak Punya Ijazah | 45.03% | 45.03% | 45.03% | 45.03% | 45.03% | 45.03% | 45.03% |
| 3.4.1.2 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SD | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |
| 3.4.1.3 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMP | 11.87% | 11.87% | 11.87% | 11.87% | 11.87% | 11.87% | 11.87% |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Kondisi Awal RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|---------|---|--------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3.4.1.4 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMA | 10.99% | 10.99% | 10.99% | 10.99% | 10.99% | 10.99% | 10.99% |
| 3.4.1.5 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat SMK | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% |
| 3.4.1.6 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-I dan D-II | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 3.4.1.7 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-III | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% | 1.32% |
| 3.4.1.8 | Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas Yang Tamat D-IV, S-1, S-2, S-3 | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
| 3.4.1.9 | Rasio Ketergantungan | 62.47% | 62.47% | 62.47% | 62.47% | 62.47% | 62.47% | 62.47% |
| | | | | | | | | |

BAB IX

PENUTUP

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 dengan mengarahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Kabupaten Sikka berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sikka 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Kabupaten Sikka.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sikka Tahun 2019 sampai dengan 2023.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sikka. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sikka 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sikka Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sikka akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan

berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan , dan lain-lain.

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.